



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO

BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen kami untuk mewujudkan
masyarakat yang berakhlak mulia

**#bangga
melayani
bangsa**



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KABUPATEN TEBO

TAHUN

2026



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR..... TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen perencanaan pembangunan dimaksud yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan RKPD.

Dalam proses penyusunannya, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
2. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);



3. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
4. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resource availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*).

Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun kedua periode RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dimana berisikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan upaya kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 juga memuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan representasi dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program dan kegiatan sesuai



dengan prioritas pembangunan tahun 2026, hasil penelaahan hasil reses DPRD, hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 mempedomani Rancangan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026. Penjabaran RKPD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2026



Penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan secara khusus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam



Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal-hal sebagai berikut:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pada rancangan awal penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilakukan apabila telah masuk ke Bappeda dan Litbang dan untuk penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP, program strategis nasional dan rancangan awal RKPD Provinsi baru sebatas tema dan prioritas, hal tersebut disebabkan karena materinya yang ada baru sebatas tema dan prioritas.

Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Penutup

Terhadap Rancangan awal dilakukan konsultasi publik untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal



RKPD, yang mana Rancangan Awal yang disempurnakan tersebut menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD.

Tahap berikutnya adalah penyusunan rancangan RKPD, yang pada dasarnya adalah penyempurnaan dari dokumen rancangan awal RKPD berdasarkan saran dan masukan para stakeholder pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik, serta berdasarkan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang secara simultan juga disempurnakan sejalan dengan proses penyusunan rancangan RKPD berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis Nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja PD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten dan penyelarasan dengan Tema Pembangunan, prioritas dan arah kebijakan Pemerintah maupun Provinsi.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Rancangan RKPD ini selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RKPD untuk disempurnakan menjadi rancangan akhir RKPD. Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rancangan RKPD. Pelaksanaan Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan



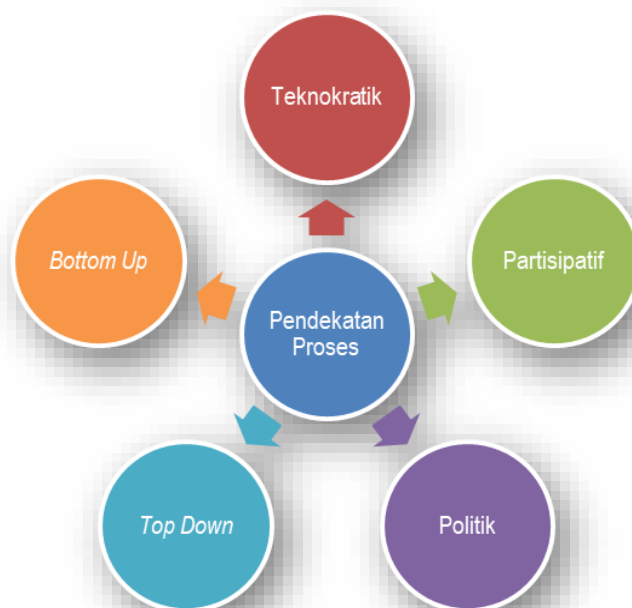
RKPD Provinsi ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam rancangan RPJMD 2025-2029, mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada Tahun 2025, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada Tahun 2026. Perpaduan berbagai faktor ini selanjutnya dituangkan menjadi Tema Pembangunan Tahun 2026 yang mewarnai rencana aksi RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026.

Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD menggunakan pendekatan proses yaitu **teknokratik, partisipatif, politis, top down dan bottom up** sedangkan untuk pendekatan substansi menggunakan pendekatan **tematik, holistik, integratif dan spasial** sebagaimana digunakan dalam penyusunan RKP tahun 2026.

A. Pendekatan Proses

Gambar 1.3
Pendekatan Proses penyusunan RKPD Tahun 2026





Pendekatan **teknokratik** dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pendekatan **partisipatif** dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026.

Pendekatan **politik** dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

Pendekatan **top down** dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, rancangan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan rancangan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029.

Pendekatan **bottom up** dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa/kelurahan dan kecamatan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Desa/kelurahan dan Kecamatan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

KRITERIA		PARAMETER
DARI BAWAH (<i>BOTTOM-UP</i>)	1.	Usulan dari Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kota.
	2.	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
DARI ATAS (<i>TOP-DOWN</i>)	3.	Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026, Prioritas Provinsi



KRITERIA	PARAMETER	
TEKNOKRATIK		Jambi dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2026.
	4.	Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026, RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026.
	5.	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
	6.	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026.
PARTISIPATIF	7.	Kapasitas Perencanaan Daerah dalam Penyiapan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026.
	8.	Mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024.
POLITIK	9.	Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui forum-forum yang diselenggarakan seperti Musrenbang dan Konsultasi Publik.
	10.	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tebo yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
	11.	Melakukan telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tebo hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan saat reses pada Tahun 2025.

B. Pendekatan Substansi

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 juga menggunakan pendekatan substansi **Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial**, sebagaimana yang digunakan dalam penyusunan RKP 2026.

Gambar 1.6
Pendekatan Substansi Penyusunan RKPD Tahun 2026





Pendekatan **tematik** adalah tema – tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pendekatan **holistik** penjabaran tematik dari tema pembangunan kedalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan, pendekatan **integratif** adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pemerintah daerah dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan dan pendekatan **spasial** adalah kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu sama lain antara wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

PENDEKATAN	PARAMETER
HOLISTIK- TEMATIK	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
INTEGRATIF	Menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
SPASIAL	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses Perencanaan Pembangunan Daerah dan memperkuat pendekatan Perencanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tebo menerapkan Sistem Informasi dalam *e-planning* dan *e-budgeting* menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Kemendagri. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah. Disamping itu, penerapan sistem *e-planning* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan



yang transparan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten serta melalui penjangkaran aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan kegiatan reses di Desa/Kelurahan dan kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tebo 2025-2029 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 adalah pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, serta menjadi bahan dalam proses penyusunan APBD yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu :

- a. Secara Substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Secara Normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Secara Operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat



- serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Secara Faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tebo adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tersusunnya RKPD Kabupaten Tebo ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan konsisten untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Tebo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 845);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 20. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu (*e-planning dan e-budgeting*) sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD Tahun 2026 terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya yang meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra Perangkat Daerah dan (4) Renja Perangkat Daerah. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, dimana dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2026 juga memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043.

RKPD Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun 2026.

Selain itu, mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD 2026 juga merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RJMPD Kabupaten Tebo, RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 juga mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

1.3.1 Hubungan RKPD Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026.

Dokumen RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 secara substansi mengacu pada prioritas RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Tema **RKP 2026** yaitu **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai



swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran *ethanol*, *biodiesel*, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi *biofuel*, pemanfaatan *biodiesel* pada sektor transportasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih.

Sedangkan Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

Keterkaitan RKPD Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tebo dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda Pembangunan Nasional. Selain mengacu pada RKP Tahun 2026, penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan kementerian/lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2025-2029. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2025 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.

1.3.2 Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Jambi

Wilayah Kabupaten Tebo yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Jambi, sangat perlu untuk memperhatikan



arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tebo dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi.

Keterkaitan RKPD Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam prioritas pembangunan Tahun 2026 yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua RPJMD 2025-2029.

Visi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 yaitu **Mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT**". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien**, dengan sasaran melalui peningkatan tata kelola pemerintah yang berintegritas dan berbasis digital serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. **Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, melalui peningkatan kualitas infrastruktur daerah, peningkatan stabilitas ekonomi makro, skala ekonomi masyarakat sehingga mampu tumbuh bersama usaha sedang dan besar, peningkatan dinamisme bisnis dan peningkatan kapabilitas inovasi.
3. **Memantapkan Keberlanjutan pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, melalui Peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan tenaga kerja terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender.

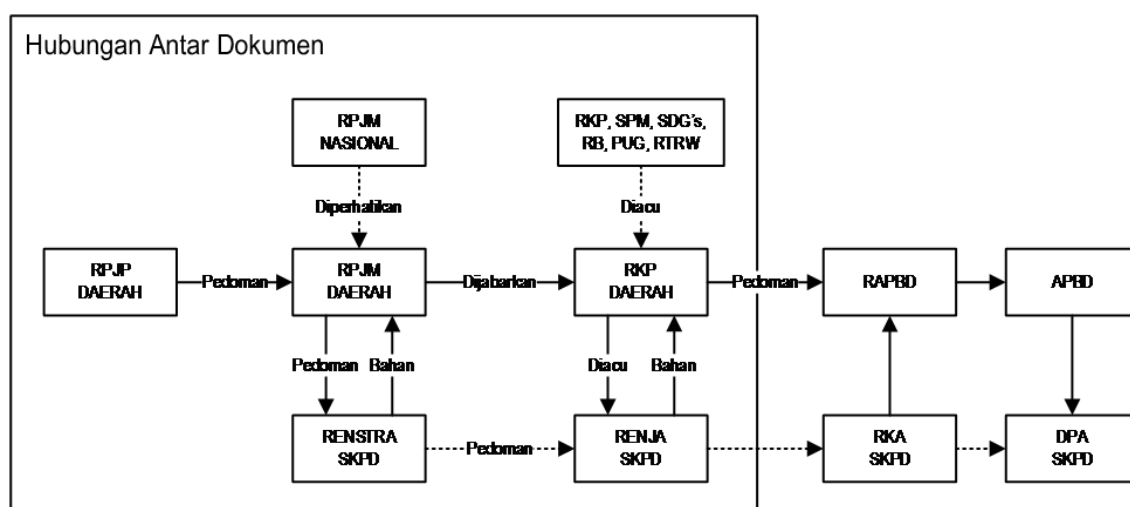
Dengan adanya keterkaitan antara kebijakan pembangunan Kabupaten Tebo dengan Provinsi Jambi maka dokumen RKPD Kabupaten



Tebo tahun 2026 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jambi dengan mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026.

Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar 1.8 :

Gambar 1.8
Hubungan antar dokumen terhadap RKPD Tahun 2026



Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (3) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), (4) Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja-PD).

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026, dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor, serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga



dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.

2. Menjadi pedoman dalam Penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun 2026;
4. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 ini, diantaranya:

1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2026, disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



1.1. Latar Belakang

1.2. Mengemukakan Pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang: 1). Gambaran umum daerah yang meliputi; aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, 2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD; dan 3). Permasalahan Pembangunan Daerah. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang



meliputi: kondisi daerah tahun lalu (2024) dan perkiraan tahun berjalan (2025), Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2026, dan Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah. Bab ini juga memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah. Baik Arah kebijakan Ekonomi Nasional, Kebijakan Perekonomian Provinsi Jambi, Kondisi Perekonomian Kabupaten Tebo dan Arah kebijakan Ekonomi Daerah, yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaannya. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan Pembangunan meliputi Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas Pembangunan Tahun 2026, Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta Inovasi Program Pembangunan Tahun 2026.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD Tahun 2026 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan tentang



matrik Renja dari program dan kegiatan PD tahun 2026, yang bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026 sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Mengemukakan RKPD tentang penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh, dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPD serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun yang direncanakan.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi berkaitan erat. Geografi mempelajari ruang dan interaksi manusia di dalamnya, termasuk aspek demografi yang membahas jumlah, komposisi, dan dinamika penduduk. Demografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Geografi dan demografi saling terkait. Geografi membantu kita memahami bagaimana penduduk tersebar di ruang, sedangkan demografi membantu kita memahami karakteristik penduduk dan perubahan populasi.

2.1.1.1 Aspek Geografi

a. Letak Wilayah dan Luas Wilayah

Secara astronomis Kabupaten Tebo terletak antara $0^{\circ} 52' 32''$ - $01^{\circ} 54' 50''$ LS dan $101^{\circ} 48' 57''$ - $102^{\circ} 49' 17''$ BT. Daerah ini beriklim tropis, dimana 84,96% daerahnya berada pada ketinggian <99 m dari permukaan laut. Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Tebo memiliki batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin; sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Bungo; dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tebo merupakan satu di antara kabupaten di dalam wilayah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara administratif, Kabupaten Tebo terdiri dari 12 Kecamatan, 122 Desa dan 7 Kelurahan, untuk lebih jelas rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :



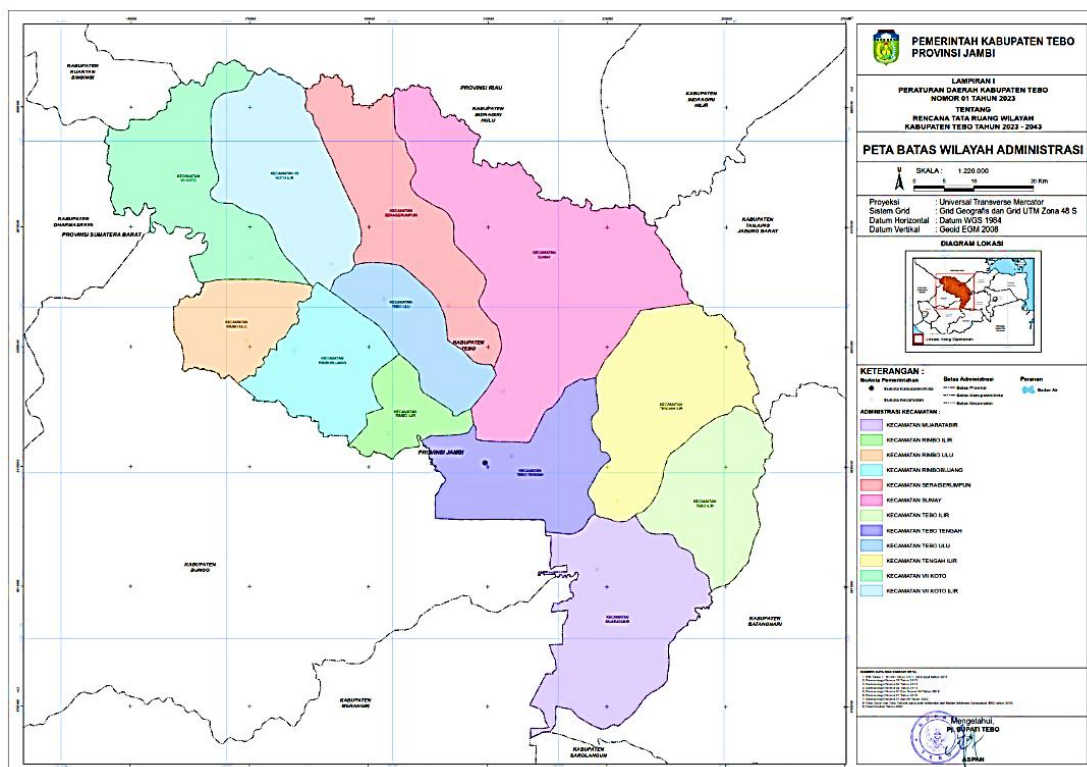
Tabel. 2. 1
Desa dan Kelurahan Perkecamatan
dalam Kabupaten Tebo Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Tebo Ilir	11	1
2.	Muara Tabir	8	-
3.	Tebo Tengah	10	2
4.	Sumay	12	-
5.	Tengah Ilir	6	-
6.	Rimbo Bujang	13	3
7.	Rimbo Ulu	12	-
8.	Rimbo Ilir	10	-
9.	Tebo Ulu	16	1
10.	VII Koto	10	-
11.	Serai Serumpun	8	-
12.	VII Koto Ilir	6	-
Jumlah		122	7

Sumber :BPS Kabupaten Tebo, 2024

Kabupaten Tebo memiliki luas wilayah 610.373, 69 Ha (6.103,74 km²) atau 12,88 % dari luas Provinsi Jambi. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Sumay yakni 1.215,06 Km2 atau 19,91% dari luas Kabupaten Tebo dan yang wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Rimbo Ilir dengan luas 172.22 Km2 atau 2,82% dari luas Kabupaten Tebo seperti terlihat pada gambar dan tabel di bawah ini:

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tebo





Tabel. 2. 2
Luas Wilayah Kabupaten Tebo
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Ha)	km2	%
1	Tebo Ilir	Sungai Bengkal	39,875.1	398.75	6.53
2	Muara Tabir	Pintas Tuo	68,018.3	680.18	11.14
3	Tebo Tengah	Muara Tebo	45,934.5	459.35	7.53
4	Sumay	Teluk Singkawang	121,506.0	1,215.06	19.91
5	Tengah Ilir	Mangupeh	61,120.1	611.20	10.01
6	Rimbo Bujang	Wirotho Agung	37,069.8	370.70	6.07
7	Rimbo Ulu	Suka Damai	27,483.7	274.84	4.50
8	Rimbo Ilir	Karang Dadi	17,222.3	172.22	2.82
9	Tebo Ulu	Pulau Temiang	28,870.4	288.70	4.73
10	VII Koto	Sungai Abang	52,981.2	529.81	8.68
11	Serai Serumpun	Sekutur Jaya	55,242.8	552.43	9.05
12	VII Koto Ilir	Balai Rajo	55,049.4	550.49	9.02
Kabupaten Tebo		Muara Tebo	610,373.69	6,103.74	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2025

a. Topografi

Kabupaten Tebo merupakan dataran rendah, sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Daerah rawa terdapat di sepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tabir dan Batang Sumay. Panjang sungai yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam Kabupaten Tebo adalah Sungai Batanghari 300 Km, Sungai Batang Tebo 29 Km, Sungai Batang Tabir 52 Km, Sungai Batang Sumay 70 Km, Sungai Batang Langsisip 23 Km dan Sungai Batang Jujuhan 7 Km.

Berdasarkan ketinggian Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu daerah dataran rendah dengan ketinggian <50 M di Kecamatan Tebo Ilir, dataran rendah dengan ketinggian 50–100 meter di Kecamatan Tebo Tengah dan Rimbo Bujang. Daerah dataran tinggi dengan ketinggian sedang diantara 100–1000 meter di Kecamatan Sumay.

b. Geologi, Jenis Tanah, Hidrologi dan Klimatologi

Struktur geologi wilayah Kabupaten Tebo relatif kompleks, meliputi peristiwa tektonik dari karbon dan resen. Unsur struktur utama batuan adalah lipatan termasuk belahan dan sesar. Batuan Pra Tersier memperlihatkan pelipatan dan belahan berulang-ulang. Penempatan belahan dalam batuan Pra Tersier menunjukkan pola kompleks dimana



corak umum sejarah tektonik Kabupaten Tebo yaitu belahan utama mempunyai arah Timur-Barat dengan kemiringan ke Utara dan Selatan menunjukkan belahan tersebut telah berlipat sekitar lipatan tegak yang berarah Timur-Barat. Formasi batuan di Kabupaten Tebo secara stratigrafi dari berumur tua ke muda adalah Granit, Formasi Gangsal, Formasi Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Gumai, Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim, Formasi Kasai, Undak Sungai dan Alluvial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2. 3
Kondisi Geologi Kabupaten Tebo

Formasi Geologi	Luas (Ha)	Formasi Geologi	Luas (Ha)
Alluvium	78.346,26	Formasi Lakat	2.382,40
Anggota Atas	66.909,64	Formasi Muara Enim	110.001,02
Anggota Batu Gamping	11.963,27	Formasi Pengabuhan	2.602,46
Anggota Bawah	5.612,40	Formasi Talangakar	12.073,50
Anggota Bawah Formasi Telisa	5.319,00	Formasi Tualang	378,00
Diorit	212,68	Granit	7.266,55
Formasi Air Benakat	44.513,44	Granodiorit	12,46
Formasi Gangsal	27.097,72	Kipas Aluvium	90,23
Formasi Gumai	16.904,76	Lava	1,56
Formasi Kasai	162.909,28	<i>Oligo-Miocene Volcanic Rock</i>	228,75
Formasi Kelesa	150,12	Sedimen Jura	87,49
Formasi Lahat	7.888,65	<i>Undifferentiated Volcanic Breccia</i>	25.286,32

Sumber : Profil Pembangunan Kabupaten Tebo, 2025

Wilayah Kabupaten Tebo mempunyai tanah yang berkualitas cukup baik dalam jenis dan penyebarannya sehingga memungkinkan untuk pengembangan usaha pertanian. Di daerah ini terdapat empat jenis tanah, yakni jenis Tanah Podzolik merupakan yang terbesar yaitu 438.000 Ha (67,79%), selanjutnya adalah Latosol 204.600 Ha (31,67%), Aluvial 2.200 Ha (0,34%) dan Organosol 1.300 Ha (0,20%). Dilihat dari jenis tanah Kabupaten Tebo memiliki jenis tanah yang tidak terlalu bervariasi. Jenis tanah ini juga tidak sama di setiap kecamatan, yang memiliki tiga jenis tanah hanya Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Tebo Ulu, selebihnya memiliki paling banyak dua jenis tanah. Kondisi demikian mempermudah perencanaan pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan jenis tanahnya seperti kawasan perkebunan dan kawasan tanaman pangan.



Jenis tanah latosol terdapat hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Muara Tabir. Sedangkan jenis tanah Organosol tidak terdapat di kecamatan Tengah Ilir, VII Koto Ilir, Serai Serumpun dan Muara Tabir. Jenis tanah Alluvial terdapat di kecamatan Tebo Tengah, Sumay, Tebo Ulu, VII Koto, Rimbo Bujang dan Rimbo Ilir dan VII Koto Ilir. Untuk penyebaran jenis tanah di Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2. 4
Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tebo

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		PMK	Latosol	Alluvial	Organosol	
1	Tebo Tengah	80.789	3.537	13.747	283	98.356
2	Tebo Ilir	32.246	24.096	-	14.528	70.870
3	Sumay	56.566	49.991	6.722	13.521	126.800
4	Tebo Ulu	34.920	819	2.035	3.256	41.030
5	VII Koto	44.301	18.828	2.350	400	65.879
6	Rimbo Bujang	32.563	2.641	3.252	2.236	40.692
7	Rimbo Ilir	20.944	220	152	118	21.434
8	Rimbo Ulu	26.900	650	-	2.024	29.574
9	Tengah Ilir	12.456	9.688	-	-	22.144
10	VII Koto Ilir	26.358	18.114	2.349	-	46.821
11	Serai Serumpun	18.981	12.589	-	-	31.570
12	Muara Tabir	50.930	-	-	-	50.930
Jumlah		437.954	141.173	30.607	36.366	646.100
% Kabupaten		67,78	21,85	4,74	5,63	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo, 2025

Iklim Kabupaten Tebo secara umum iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim yaitu musim penghujan yang berkisar antara bulan September sampai bulan Mei dan musim kemarau antara bulan Juni sampai Agustus, sedangkan rata-rata curah hujan tahunan adalah 2.634 mm per tahun dengan rata-rata hari hujan 12,5 hari/tahun. Perbedaan temperatur antara daerah terendah dan tertinggi berkisar antara 0°C-0,5°C dengan temperatur rata-rata 27°C-28,5°C. Kelembaban udara di Kabupaten Tebo rata-rata tahunan berkisar antara 85,2%-96,1% dengan kelembaban rata-rata 87,92%. Adapun lamanya penyinaran matahari, umumnya dapat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, relief daerah dan waktu penyinaran serta pengaruh tumbuh-tumbuhan pada suatu daerah. Sedangkan rata-rata penyinaran



matahari tiap hari di Kabupaten Tebo selama 9 tahun bervariasi antara 4,20 jam sampai dengan 6,56 jam.

c. Penggunaan Lahan

Kabupaten Tebo memiliki kawasan hutan lindung (Hutan Lindung Bukit Limau) dengan luas 8.320,48 (delapan ribu tiga ratus dua puluh koma empat delapan) hektar, kawasan suaka alam seluas 1.173,04 (seribu seratus tujuh puluh tiga koma nol empat) hektar yang terdiri dari Cagar Alam Bulu Hitam yang terdapat di Kecamatan VII Koto Ilir seluas 455,87 (empat ratus lima puluh lima koma delapan tujuh) hektar; dan Cagar Alam Cempaka/Sungai Bengkal/Tabir Kejasung yang terdapat di Kecamatan Muara Tabir dan Tengah Ilir seluas 717,17 (tujuh ratus tujuh belas koma satu tujuh) hektar sedangkan untuk kawasan pelestarian alam yang terdiri dari kawasan taman nasional dan taman hutan raya, kawasan taman nasional seluas 37.153,24 (tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga koma dua empat) hektar meliputi Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang terdapat di Kecamatan Sumay dan Tengah Ilir seluas 25.720,52 (dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua) hektar; dan Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang terdapat di Kecamatan Muara Tabir seluas 11.454,50 (sebelas ribu empat ratus lima puluh empat koma lima dua) hektar dan untuk taman hutan raya yakni taman raya bukit sari yang terdapat di Kecamatan Tebo Ilir seluas 128,71 (seratus dua puluh delapan koma tujuh satu) hektar.

Untuk kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Tebo dapat di bagi menurut penggunaan dominan meliputi kawasan hutan produksi; kawasan pertanian; kawasan pariwisata; dan kawasan permukiman. Kawasan hutan produksi yang terdiri dari Kawasan hutan produksi terbatas seluas 20.052,99 (dua puluh ribu lima puluh dua koma sembilan sembilan) hektar, yang tersebar di Kecamatan Serai Serumpun; Kecamatan Sumay; dan Kecamatan Tengah Ilir, dan Kawasan hutan produksi tetap seluas 222.549,09 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan koma nol Sembilan) hektar



dengan sebaran pada 8 Kecamatan meliputi Kecamatan VII Koto; Kecamatan VII Koto Ilir; Kecamatan Serai Serumpun; Kecamatan Sumay; Kecamatan Tengah Ilir; Kecamatan Tebo Ilir; Kecamatan Muara Tabir; dan Kecamatan Tebo Tengah.

Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Tebo terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 6.456 (enam ribu empat ratus lima puluh enam) hektar dan untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan di dalam kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 6.213 (enam ribu dua ratus tiga belas) hektar. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 290.567 (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh) hektar dengan komoditas unggulan merupakan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet.

Kawasan permukiman yang terdiri dari Kawasan permukiman perkotaan dengan luasan kurang lebih 7.694 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) hektar yang tersebar pada seluruh kecamatan di dalam Kabupaten Tebo dan untuk kawasan pariwisata berupa sebaran-sebaran objek wisata di dalam Kabupaten Tebo.

d. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi alam Kabupaten Tebo yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari sungai-sungai besar dan sebagian lainnya berupa hutan dan perkebunan menyebabkan Kabupaten Tebo termasuk dalam daerah rawan bencana terutama bencana banjir dan kebakaran hutan atau lahan. Beberapa lokasi rawan bencana di Kabupaten Tebo seperti dibawah ini:

1. Bencana banjir saat musim penghujan terjadi hampir di setiap tahun pada kecamatan yang dilewati Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Kecamatan VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Sumay, Tebo Tengah, Tengah Ilir, Tebo Ilir dan Kecamatan Muara Tabir.



2. Hampir semua kecamatan diwilayah Kabupaten Tebo berpotensi terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan untuk Perkebunan.
3. Kawasan rawan bencana tanah longsor berpotensi di Kecamatan VII Koto, VII Koto Ilir, Sumay, Tebo Tengah, Serai Serumpun dan Tengah Ilir.

2.1.1.2 Aspek Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebanyak 355.262 jiwa, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Rimbo Bujang dan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Serai Serumpun. Dilihat dari jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki sebanyak 182,040 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 173,222 Jiwa dengan rasio jenis kelamin 105,09 yang berarti pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 105 jiwa penduduk laki-laki. Berikut ini jumlah penduduk dan rasio jumlah penduduk disetiap kecamatan dalam Kabupaten Tebo tahun 2024.

Tabel. 2. 5
Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan		
Tebo Ilir	15,209	14,508	104.83	29,717
Muara Tabir	9,214	8,554	107.72	17,768
Tebo Tengah	21,961	20,721	105.98	42,682
Sumay	12,081	11,014	109.69	23,095
Tengah Ilir	15,299	13,887	110.17	29,186
Rimbo Bujang	33,403	31,347	106.56	64,750
Rimbo Ulu	19,953	18,792	106.18	38,745
Rimbo Ilir	12,407	11,831	104.87	24,238
Tebo Ulu	17,091	16,604	102.93	33,695
VII Koto	10,761	10,082	106.73	20,843
Serai Serumpun	5,416	5,033	107.61	10,449
VII Koto Ilir	9,245	10,849	85.22	20,094
Total	182,040	173,222	105.09	355,262

Sumber : Tebo Dalam Angka, BPS Tahun 2025



b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah penduduk Kabupaten Tebo pada Tahun 2024 berdasarkan kelompok umur di dominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun, yang pada tahun 2023 sebesar 238.990 jiwa naik menjadi 241.643 jiwa di Tahun 2024 atau meningkat sebesar 1.11 persen, sedangkan kelompok penduduk usia 0-14 tahun dari 94.355 jiwa pada Tahun 2023 naik menjadi 94.944 jiwa pada Tahun 2024 atau meningkat sebesar 0,65 persen, dan kelompok usia diatas 65 tahun keatas dari sebelumnya 17.436 jiwa pada tahun 2023 naik menjadi 18.675 jiwa pada Tahun 2024 atau meningkat sebesar 7,11 persen. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2. 6

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Tebo Tahun 2024**

Kelompok Umur	Tahun 2023	Tahun 2024	Persentase Pertumbuhan
0-14 Tahun	94,335	94,944	0.65
15-19 Tahun	238,990	241,643	1.11
65 Tahun ke atas	17,436	18,675	7.11
Jumlah	350,761	355,262	1.28

Sumber : BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka 2024 dan 2025

c. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu, Berdasarkan data BPS, Laju Pertumbuhan Penduduk di Tahun 2023 sebesar 1.33 % dan pada Tahun 2024 sebesar 1,28 % dengan rata-rata pertumbuhan dalam dua tahun terakhir sebesar 1,31%. Berikut Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo dua tahun terakhir

Tabel. 2. 7

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2023-2024

TAHUN	PENDUDUK	PERTUMBUHAN
2023	350. 761	1, 33
2024	355. 262	1, 28
RATA-RATA		1, 31

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Tebo 2025



d. Kepadatan Penduduk

Tingkat Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (population density) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu, Satuan tingkat kepadatan penduduk adalah orang per kilometer persegi (orang/km²) atau orang per hektar (orang/ha). Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk dalam suatu wilayah atau negara. Kepadatan penduduk dapat dihitung menggunakan rumus $KP = P/L$, di mana: KP adalah kepadatan penduduk, P adalah jumlah penduduk, L adalah luas lahan.

Tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah tidak merata karena ada lahan atau wilayah yang kurang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, daerah yang memiliki akses mudah ke pusat industri dan memiliki tanah yang subur cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Berdasarkan data BPS Kepadatan Penduduk Kabupaten Tebo pada Tahun 2024 sebesar 58,2 orang/km² yang berarti pada setiap km² di huni oleh sebanyak 58 orang.

Tabel. 2. 8

Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS (KM2)	KEPADATAN (JIWA/KM2)
1	2	3	4	5
1	Tebo Ilir	29,717	708.7	41.93
2	Muara Tabir	17,768	509.93	34.84
3	Tebo Tengah	42,682	983.56	43.4
4	Sumay	23,095	1,268.00	18.21
5	Tengah Ilir	29,186	221.44	131.8
6	Rimbo Bujang	64,750	406.92	159.12
7	Rimbo Ulu	38,745	295.74	131.01
8	Rimbo Ilir	24,238	214.34	113.08
9	Tebo Ulu	33,695	410.3	82.12
10	VII Koto	20,843	658.79	31.64
11	Serai Serumpun	10,449	315.7	33.1
12	VII Koto Ilir	20,094	468.21	42.92
Jumlah		355,262	610,374	58.2

Sumber : BPS Kab. Tebo 2025, Perda No 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tebo 2023-2043



2.1.2 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi difokuskan pada analisis terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat inflasi dan indikator-indikator kemiskinan.

2.1.2.1 Struktur Perekonomian Daerah.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Perhitungan nilai PDRB ADHB disebut dengan nilai PDRB nominal, sedangkan perhitungan PDRB ADHK disebut dengan nilai PDRB Riil. Pada Tahun 2024, PDRB Kabupaten Tebo ADHB sebesar Rp23.908.920,00 juta sedangkan PDRB ADHK 2024 adalah sebesar Rp12.234.470,00 juta.

Tabel. 2. 9

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,680.30	9,114.00	10,131.40	11,167.00	13,563.00
B	Pertambangan dan Penggalian	578.9	858.2	2,070.50	1,749.70	1,184.60
C	Industri Pengolahan	916.1	1,018.60	1,126.00	1,238.60	1,461.60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.3	14	15.9	18.4	20.9
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	6.4	7	7.5	8.6	10.1
F	Konstruksi	1,048.40	1,130.40	1,158.10	1,258.10	1,337.60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,565.90	1,749.00	1,948.20	2,264.10	2,584.70
H	Transportasi dan Pergudangan	192	212.7	244	285.7	314.3



Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
1		2	3	4	5	6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55.2	55.2	60.1	65.8	70.3
J	Informasi dan Komunikasi	637.7	665.1	716.9	766.6	807.3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	207.3	226.3	243.2	251.1	260.8
L	Real Estat	306.4	317.8	351.6	368	381.3
M, N	Jasa Perusahaan	8.9	9.4	11	13.2	15.9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	741.5	751.9	758	787.7	876.9
P	Jasa Pendidikan	377.5	392.4	406	429.7	477.3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	165.4	185.6	187.3	202.4	221
R, S, T, U	Jasa Lainnya	239.8	241.8	263.4	290.4	321.1
Produk Domestik Regional Bruto		14,738.00	16,949.30	19,699.00	21,165.30	23,908.90

Sumber : Kabupaten Tebo Dalam Angka Tahun 2025

Tabel. 2. 10

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), Kab. Tebo Tahun 2020-2024**

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,315.20	5,505.20	5,646.90	5,901.50	6,296.70
B	Pertambangan dan Penggalan	861.3	936.3	1,325.30	1,324.40	1,063.00
C	Industri Pengolahan	638.1	662.1	675.7	715.4	777.4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.6	7	7.6	8.5	9.4
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.4	4.8	4.8	5.1	5.6
F	Konstruksi	709.6	746.9	747	785.3	832.1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	833.6	881.9	928.4	1,014.50	1,111.80
H	Transportasi dan Pergudangan	145.8	157.6	171	183.5	199.9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37.4	39.4	42.4	46	49.1
J	Informasi dan Komunikasi	426.4	443.9	478.2	513.8	538.1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	132.5	137.5	138	138.8	141.6
L	Real Estat	191.8	193.9	204	210.3	214.4
M, N	Jasa Perusahaan	5.5	5.7	6.2	7.1	7.8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	320.9	325.4	327.3	335.6	361.4



Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
1		2	3	4	5	6
P	Jasa Pendidikan	236.7	242.8	245.7	254.2	279.4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105.3	115.1	114.5	119.9	128.6
R, S, T, U	Jasa Lainnya	187.2	188.5	197.7	202.8	218.1
	PDRB	10,158.20	10,594.00	11,260.50	11,766.80	12,234.50

Sumber : Kabupaten Tebo Dalam Angka tahun 2025

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kab. Tebo, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo pada Tahun 2024 mencapai 3,97%. Pertumbuhan tersebut melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,50% atau melambat sebesar 0,53%. Pada Tahun 2024, sektor dengan pertumbuhan tertinggi yaitu di sektor Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 10,44%. Faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo antara lain akibat melemahnya daya beli masyarakat hingga sektor manufaktur yang mengalami kontraksi. Faktor lainnya yaitu meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tebo yang mengalami kenaikan drastis pada Tahun 2024. Data terbaru mencatat angka pengangguran mencapai 1,93%, meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1,71%. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan beberapa perusahaan yang merumahkan karyawan yang disebabkan karena perusahaan tidak beroperasi lagi dan habisnya masa kontrak karyawan di perusahaan. Kebijakan tersebut berpotensi menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Tebo.

Tabel. 2. 11

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,41	3,57	2,57	4,51	6,70
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,53	8,71	41,55	-0,06	-19,74
C	Industri Pengolahan	-0,72	3,76	2,05	5,88	8,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,59	5,62	7,27	12,62	10,29
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,09	7,52	1,58	5,63	9,53
F	Konstruksi	-7,70	5,26	0,01	5,12	5,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,60	5,79	5,28	9,28	9,59
H	Transportasi dan Pergudangan	-5,39	8,10	8,52	7,33	8,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,48	5,42	7,50	8,60	6,68
J	Informasi dan Komunikasi	8,78	4,10	7,74	7,44	4,73



Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
1		2	3	4	5	6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,23	3,80	0,45	0,94	2,02
L	Real Estat	0,65	1,12	5,22	3,07	1,96
M,N	Jasa Perusahaan	-4,76	3,56	8,41	14,21	10,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,65	1,39	0,58	2,53	7,70
P	Jasa Pendidikan	3,78	2,60	1,17	3,46	9,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,21	9,28	-0,53	4,77	7,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-3,32	0,73	4,84	2,61	7,55
Produk Domestik Regional Bruto		-0,03	4,29	6,29	4,50	3,97

Sumber : Kabupaten Tebo Dalam Angka Tahun 2025

c. Inflasi Kabupaten Tebo

Inflasi menurut Bank Indonesia adalah meningkatnya harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Dampak dari inflasi ini salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena berkurangnya kemampuan untuk mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu :

1. Kenaikan Harga.

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya.

2. Bersifat Umum.

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik.

3. Berlangsung Terus Menerus.

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

Dari konsep diatas perkembangan dan prospek inflasi Kabupaten Tebo diambil dari pengukuran inflasi di Kota Muara Bungo, karena



pengukuran inflasi oleh BPS hanya dilakukan di tiga tempat yaitu Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci.

1. Pada Oktober 2024 Kota Muara Bungo mengalami inflasi sebesar 0,04 persen (mtm). Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 105,75. Laju inflasi tahun kalender (*year to date*) sebesar 1,36, sedangkan laju inflasi tahun ke tahun (*year on year*) sebesar 2,51 persen.
2. Pada November 2024 Kota Muara Bungo mengalami inflasi sebesar 0,37 persen (mtm). Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 106,14. Laju inflasi tahun kalender (*year to date*) sebesar 2,25, sedangkan laju inflasi tahun ke tahun (*year on year*) sebesar 2,525 persen.
3. Pada Desember 2024 Kota Muara Bungo mengalami inflasi sebesar -0,30 persen (mtm). Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 106,46. Laju inflasi tahun kalender (*year to date*) sebesar 2,04, sedangkan laju inflasi tahun ke tahun (*year on year*) sebesar 2,04 persen.

a. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI

1. Masih banyaknya bahan pokok yang didatangkan dari luar daerah seperti cabe, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, dan lain-lainnya.
2. Masih terdapat lahan kosong pada pekarangan rumah tangga yang tidak dimanfaatkan.
3. Masih banyak terdapat lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk lahan pangan.
4. Kesulitan petani dalam memperoleh bibit/benih unggul dan pupuk subsidi.
5. Kebijakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

b. PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tebo untuk penanggulangan inflasi yang dituangkan dalam APBD telah dijalankan oleh perangkat daerah terkait. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh



Pemerintah Kabupaten Tebo guna menstabilkan harga adalah dengan meningkatkan produksi pangan khususnya cabe dan beras yang menjadi salah satu penyumbang inflasi, serta alokasi Dana Desa untuk kegiatan ketahanan pangan.

Dari 10 (sepuluh) langkah pengendalian inflasi, 9 (sembilan) langkah telah dilaksanakan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tebo telah melaksanakan langkah lainnya yaitu:

1. Melaksanakan Rakor inflasi secara periodik,
2. Melaksanakan pemantauan harga setiap hari di Kecamatan,
3. Penyaluran beras CBP pada triwulan III,
4. Penyaluran bantuan benih dan pakan ikan,
5. Menyusun neraca pangan,
6. Penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan,
7. Panen raya cabe 10 Hektar,
8. Panen raya bawang merah 5 Hektar, dan
9. Pengusulan lahan abadi hortikultura seluas 10 Ha.

Hasil dari kebijakan diatas dapat terlihat dari laporan harga yang diupdate oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tebo pada aplikasi SP2KP setiap hari. Dari laporan monitoring tersebut dapat dilihat kestabilan harga dan ketersediaan stok sembako yang cukup serta angka inflasi/IPH yang stabil.

c. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tebo dalam melakukan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal. Deteksi awal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan laporan pelaksanaan perkembangan kegiatan yang harus disampaikan ke Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tebo. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk melihat kendala sekaligus mencari solusi terhadap kendala tersebut. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan tugas tersebut disatukan dalam wadah koordinasi dalam menjaga stabilitas harga



barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga inflasi dapat terkendali. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk melihat kendala sekaligus mencari solusi terhadap kendala tersebut. Koordinasi yang dilaksanakan dibedakan dalam:

a. Rapat koordinasi periodik.

Rapat Koordinasi periodik telah dilaksanakan setiap hari senin setiap minggunya.

b. Rapat koordinasi tematik

Rapat koordinasi tematik dilakukan apabila terdapat permasalahan mendesak atau ada kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang harus di tindak lanjuti. Untuk Triwulan IV tahun 2024, Tim TPID Kabupaten Tebo telah melaksanakan rapat koordinasi periodik maupun tematik.

d. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Rekomendasi kebijakan inflasi di Daerah berdasarkan laporan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi, khususnya penambahan areal/sentra pangan di Kabupaten Tebo melalui dana APBN.
2. Perlu dibentuk BUMD Pangan yang mampu menampung hasil-hasil pertanian dari masyarakat dengan harga yang sesuai.
3. Memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD),
4. Penambahan kuota bahan pangan yang sifatnya Impor seperti bawang putih,
5. Bantuan bibit dan alat pertanian lainnya,
6. Bantuan pupuk kepada petani tepat sasaran,
7. Diharapkan Bulog dapat menjadi *buffer stock* untuk semua bahan pangan termasuk cabe,



Agar pemerintah mengurangi impor bahan pangan sehingga harga dipetani tidak anjlok seperti saat ini, dan sulitnya mendapat bibit berkualitas dan pupuk.

e. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Tebo tersaji pada Tabel di bawah ini:

Tabel. 2. 12
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tebo Tahun 2018-2024

No.	Uraian	TAHUN								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	6.87	6.79	6.58	6.47	6.26	6.68	6.34	6.46	6.12
2	Jumlah Penduduk Miskin	23,040	23,180	22,856	22,830	22,470	23,770	22,810	23,470	22,480
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	338,160	363,698	379,390	404,473	453,523	448,481	485,883	528,310	590,573

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo cenderung menurun. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang merupakan dampak dari kontraksi ekonomi selama pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tebo menurun sebanyak 960 jiwa. Kemudian naik kembali sebanyak 660 jiwa, menjadi 23.470 jiwa pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tebo menurun kembali sebanyak 960 jiwa menjadi 22.480 jiwa. Terjadi kenaikan nilai garis kemiskinan pada tahun 2024, Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan harga komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Pada tahun 2024 Garis kemiskinan



meningkat senilai 62.263 Rupiah perkapita perbulan dari sebesar Rp.528.310,00 perkapita perbulan pada tahun 2023 menjadi Rp.590.573,00 perkapita perbulan pada tahun 2024.

f. Ketimpangan dan Indeks Gini Rasio

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Indeks Gini Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebesar 0,257 atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 yang berada di angka 0,24 atau meningkat sebesar 0,017 poin. Dengan angka tersebut, Kabupaten Tebo menjadi kabupaten dengan angka indeks gini terendah kedua setelah Merangin bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Jambi. Dari target yang ditetapkan Tahun 2024, di angka 0,280, target tersebut tercapai dengan persentase capaian sebesar 108,95 Persen. Angka indeks gini Kabupaten/Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2. 13
Indeks Gini Kabupaten/Kota dalam
Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	2024
1	Kerinci	0.293
2	Merangin	0.241
3	Sarolangun	0.286
4	Batang Hari	0.312
5	Muaro Jambi	0.295
6	Tanjab Timur	0.305
7	Tanjab Barat	0.292
8	Tebo	0.257
9	Bungo	0.266
10	Kota Jambi	0.395
11	Sungai Penuh	0.305

Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2025

Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, maka Pemerintah Kabupaten Tebo meningkatkan kualitas infrastruktur dasar secara



menyeluruh, yang diharapkan pembangunan merata tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah yang masih terpencil.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat dalam membangun suatu kehidupan yang layak. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, pemerintah harus meningkatkan pelayanan dasar terutama sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ketenagakerjaan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK Kabupaten Tebo Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2. 14

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tebo Tahun 2019–2024

JENJANG PENDIDIKAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/SDLB	109,26	107,74	107,74	108,30	107,28	105,83
SLTP/MTS	91,40	90,59	90,56	87,39	94,29	88,45
SLTA/MA	67,59	70,04	*	68,60	72,84	77,34

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tebo tahun 2024 pada jenjang pendidikan sekolah dasar mencapai 105,83% dimana terjadi penurunan APK SD dari tahun 2023 yang mencapai 107,28. APK sebesar 105,83% tersebut menunjukkan bahwa terdapat 105 orang penduduk yang sedang mengikuti pendidikan dasar dari 100 penduduk kelompok umur jenjang pendidikan dasar yaitu 7-12 tahun, hal ini karena terdapat penduduk yang berumur melebihi atau kurang dari umur jenjang pendidikan dasar yang masih bersekolah atau telah bersekolah. Pada jenjang pendidikan SLTP, tahun 2024 APK mencapai 88,45%, jumlah ini menurun 5,84% dibandingkan tahun 2023 mencapai 94,29%.



b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM mengukur partisipasi penduduk yang bersekolah tepat waktu. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tebo Tahun 2019–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2. 15
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Tebo Tahun 2018-2023

JENJANG PENDIDIKAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/SDLB	99,6	99,59	99,57	99,91	98,94	98,47
SLTP/MTS	76,29	77,45	78,66	78,51	82,23	80,82
SLTA/MA	52,43	52,59	-	52,65	59,14	56,30

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

APM jenjang pendidikan SD pada tahun 2024 mencapai 98,47%, menurun sebesar 0.47% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 98,94%. Hal ini terbilang normal disaat APM berada disekitar angka maksimal 100%. Pada jenjang pendidikan SLTP mengalami kenaikan menjadi 80,82% dari 82,23% di tahun 2023 angka ini masih menjadi angka tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir dimana Kabupaten Tebo secara simultan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang SLTP.

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. RLS Kabupaten Tebo 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 2. 16

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tebo Tahun 2018-2024

Rata-rata Lama Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tebo	7,57	7,58	7,59	7,70	7,94	8,04

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Capaian RLS penduduk di Kabupaten Tebo menunjukkan kecenderungan meningkat secara simultan dari periode 2019-2024. Pada tahun 2023 RLS penduduk di Kabupaten Tebo adalah 7,94 tahun dan meningkat menjadi 8,04 tahun pada tahun 2024. Peningkatan RLS masih harus terus dilakukan dikarenakan selama periode ini angka RLS Kabupaten Tebo selalu berada dibawah angka RLS Provinsi Jambi.

d. Harapan Lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam. HLS Kabupaten Tebo 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2. 17

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tebo Tahun 2019–2024

Harapan Lama Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tebo	12,39	12,60	12,64	12,65	12,92	12,93

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Capaian HLS penduduk di Kabupaten Tebo menunjukkan kecenderungan meningkat secara simultan dari periode 2019-2024. Pada tahun 2023 HLS penduduk di Kabupaten Tebo adalah 12,92 tahun dan meningkat menjadi 12,93 tahun pada tahun 2024. Harapan Lama Sekolah 12,93 tahun Ini berarti anak-anak Kabupaten Tebo yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I.



e. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator paling utama yang mencerminkan permasalahan kesehatan yang sangat krusial. Angka kematian bayi mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakatnya. Angka ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi program serta kebijakan kependudukan dan kesehatan. Program kesehatan Indonesia telah difokuskan untuk menurunkan tingkat kematian bayi yang cukup tinggi. Penurunan kematian bayi dan ibu telah menjadi tujuan utama pada tujuan 4 dan 5 dari Millennium Development Goals (MDGs). Demikian pula pada tujuan Sustainable Development Goals (SDG's). Berikut ditampilkan Angka Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Tebo selama tahun 2019 hingga 2024:

Tabel. 2. 18
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Tebo Tahun 2019–2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	AKB (Angka Kematian Bayi) /1.000KH	5,2	4,8	4,3	4,1	8,8	11,36

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tebo Tahun 2025

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup).

Angka Kematian Bayi dapat memberikan gambaran status kelangsungan hidup di suatu wilayah karena dipengaruhi oleh status kesehatan anak dan didukung oleh adanya status pelayanan kesehatan anak yang optimal. Berdasarkan batasan capaian indikator Milleneum Development Goals (MDG's), Angka Kematian Bayi diharapkan berada dibawah 35 per 1.000 kelahiran hidup.

Cakupan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 di Kabupaten Tebo belum bisa menggunakan AKB dikarenakan jumlah kelahiran di Kabupaten Tebo sendiri belum mencapai angka 1.000 kelahiran hidup



sehingga data yang digunakan adalah jumlah absolut dari kasus kematian Bayi.

Pada tabel diatas terlihat bahwa AKB Kabupaten Tebo cenderung menurun dari tahun 2019 hingga 2022, Kabupaten Tebo sudah jauh lebih rendah dari angka batasan MDG's 2015 serta jauh lebih rendah dari angka Nasional. Namun AKB Kabupaten Tebo naik kembali pada tahun 2023 sebesar 8,8 dan 11,36 pada tahun 2024.

Penyebab langsung kematian bayi dan balita sebenarnya relatif dapat ditangani. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup.

f. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) *atau Maternal Mortality Rate (IMR)* adalah banyaknya ibu hamil/ibu bersalin yang meninggal pada setiap 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama pada ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel. 2. 19

Angka Kematian Ibu Kabupaten Tebo Tahun 2018–2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tebo	10	13	8	8	5	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Target MDG's 2015 AKI adalah sebesar 102/100.00 kelahiran hidup.



AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas.

Cakupan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tebo belum bisa menggunakan AKI dikarenakan jumlah kelahiran di Kabupaten Tebo sendiri belum mencapai angka 100.000 kelahiran hidup sehingga data yang digunakan adalah jumlah absolut dari kasus kematian ibu. Untuk jumlah kematian ibu di Kabupaten Tebo dari tahun 2019-2024 cenderung fluktuatif namun menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2019 kasus kematian ibu menjadi 10 kasus kematian ibu, pada tahun 2023 menjadi 5 kasus kematian ibu dan pada tahun 2024 naik kembali menjadi 7 kasus kematian ibu.

Peningkatan kasus kematian ibu pada tahun 2024 disebabkan adanya sistem pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan bayi yang berbasis aplikasi yang disebut dengan MPDN (*maternal Perinatal Death Notification*) yang memungkinkan semua kematian ibu dan bayi dilaporkan berdasarkan NIK ibu atau bayi walaupun ibu meninggal di tempat lain atau diluar Kabupaten Tebo.

g. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Kabupaten Tebo terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2024, pada tahun 2022 sebesar 70,26 sedangkan tahun 2023 terus meningkat mencapai 70,49 dan tahun 2024 menjadi sebesar 70,69. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup dipengaruhi juga oleh penurunan angka kematian bayi. Tabel berikut ini memberikan gambaran kondisi angka harapan hidup di Kabupaten Tebo.

Tabel. 2. 20

Angka Harapan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024



AHH	69,91	69,99	70,02	70,26	70,49	70,69

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

h. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Metode perhitungan IPM diadaptasi dari metode perhitungan Human Development Indeks (HDI) oleh United Nation Development Program (UNDP). Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo disertai dengan komponen pembentuknya.

Tabel. 2. 21

Komponen Pembentuk

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	69,91	69,99	70,02	70,26	70,49	70,69
Rata-rata Lama Sekolah	7,57	7,58	7,59	7,7	7,94	8,04
Harapan Lama Sekolah	12,39	12,6	12,64	12,65	12,92	12,93
Pengeluaran per kapita	10.555	10.389	10.546	10.725	10.894	11,415
Indeks Pembangunan Manusia	69,02	69,14	69,35	69,78	70,63	71,32

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,32. IPM Kabupaten Tebo untuk pertama kalinya berstatus TINGGI. Meningkatnya IPM 2024 disebabkan oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH) dan pengetahuan (HLS dan RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan) pada Tahun 2024 masih mengacu pada data pengeluaran tahun 2022 dan 2023 meningkat Rp. 169.000,- (1,01 persen) dari Rp.10.725.00 pada tahun 2022 menjadi Rp.10.894.000 pada tahun 2023.

2.3 Aspek Pelayanan Umum



2.3.1 Fokus Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

a) Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid yang ada di Kabupaten Tebo, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Tebo dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2. 22

Rasio Murid dan Guru Kabupaten Tebo Tahun 2018-2024

Jenjang pendidikan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah murid							
SD/MI/SDLB	41.825	37,512	37,880	37,588	37.659	37,722	37,438
SLTP/MTS	1.733	11,348	11,290	11,185	11.211	11,529	11,722
SLTA/MA	13.017	6,239	6,504	6,439	6.628	6,760	7,100
Jumlah Guru							
SD/MI/SDLB	3,053	2,220	2,205	2,285	2,294	2,341	2,330
SLTP/MTS	1,941	832	858	884	888	908	1.158
SLTA/MA	1,304	490	504	525	514	515	677
Rasio Murid: Guru							
SD/MI/SDLB	1:14	1:17	1:17	1:16	1:16	1:16	1:16
SLTP/MTS	1:09	1:17	1:13	1:13	1:13	1:13	1:10
SLTA/MA	1:10	1:13	1:13	1:12	1:13	1:13	1 :10

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, 2025

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 1 : 16 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 16 orang anak sedangkan rasio guru/murid jenjang SLTP/MTs adalah sebesar 1 : 10 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 10 orang anak.

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maksimal 1 (satu) orang guru SD/MI



mengajar 28 murid, 1 (satu) orang guru SLTP/MTS mengajar 32 pelajar dan 1 (satu) orang guru SLTA/SMK mengajar 32 siswa.

Apabila dilihat dari rasio guru dan murid yang ada dibandingkan dengan Standar Nasional Pendidikan terlihat bahwa ketersediaan guru pada setiap jenis pendidikan terpenuhi, namun karena penghitungan rasio tersebut termasuk guru non PNS/GTT sehingga apabila dihitung dengan tidak memasukkan guru Non PNS/GTT maka rasio guru dan murid untuk jenjang SD/MI mengalami kekurangan.

b). Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan gedung sekolah adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk dalam memperoleh pelayanan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2. 23
Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah Kabupaten Tebo
Tahun 2018-2024

Jenjang Pendidikan	TAHUN						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah murid							
SD/MI/SDLB	54.450	37.512	37.880	37.588	37.659	37.722	37.438
SLTP/MTS	13.13	11.348	11.290	11.185	11.211	11.529	11.722
Jumlah Sekolah (Unit)							
SD/MI/SDLB	297	291	291	291	292	292	253
SLTP/MTS	111	116	117	119	121	124	74
Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah : murid							
SD/MI/SDLB	71,01	68,01	62,58	77,42	67,86	63,12	67,31
SLTP/MTS	64,05	60,93	68,41	106,39	61,04	67,62	63,13

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, 2025

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2024 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI mencapai 67,31 dan cenderung meningkat meskipun sempat menurun di tahun 2023. Namun rasio ketersediaan gedung sekolah tertinggi dalam periode 7 tahun terakhir terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 77,42. Fluktuasi rasio ini terjadi karena adanya perubahan jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dengan rata-rata pertumbuhan -2,54% sedangkan jumlah



gedung sekolah berfluktuasi dengan rata-rata 0,51 %. Angka rasio ketersediaan Gedung sekolah ini Kembali menurun pada tahun 2024.

Rasio ketersediaan gedung sekolah SMP/MTs juga cenderung meningkat. Pada tahun 2018 sebesar 71.01 dan mencapai puncak pada tahun 2021 sebesar 77.42. Hal ini terjadi karena jumlah usia sekolah SMP/MTs cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata mencapai - 7,54 % sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan 3,15 %.

2.3.1.2 Kesehatan

a) Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan utama adalah rumah sakit, dimana hingga saat ini terdapat 2 unit rumah sakit yang ada di Kabupaten Tebo yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berada di Kecamatan Tebo Tengah dan Rumah Sakit Umum Setia Budi yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang Fasilitas kesehatan lain selain rumah sakit, kondisi hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2. 24
Gambaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2024

No	Fasillitas dan Tenaga Medis Tenaga Kesehatan	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit	1	2	2	2	2	2	2	2
2	Data Fasilitas Kesehatan (Unit)								
	a. Puskesmas Rawat Inap	11	13	13	13	11	11	11	11
	b. Puskesmas Non Perawatan	8	7	7	7	9	9	9	9
	c. Puskesmas Pembantu	40	37	37	37	41	41	41	36
	d. Klinik	-	-	-	-	12	11	11	10
	e. Rumah Bersalin	8	8	8	8	8	-	-	-
	f. Poskesdes	116	116	116	113	107	109	109	93
	g. Poskestren	31	30			40	40	40	40*
	h. Desa Siaga	112	112	112	112	60	60	60	60*
	i. Posyandu	309	310	310	319	321	321	321	321*

Sumber: Dinkes Kabupaten Tebo, 2025 (*) data sementara)

b) SDM Kesehatan



Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kualitas. Dari data ketenagaan sumber daya kesehatan Kabupaten Tebo tahun 2024 diperoleh data Tenaga Medis yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan spesialis serta pendidikan lainnya meliputi tenaga perawat, perawat gigi, bidan, tenaga farmasi, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisisionis, tenaga analisis kesehatan serta penunjang administrasi yang tersebar di seluruh puskesmas yang ada dan juga termasuk yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.

Tabel. 2. 25
Jumlah dan Sebaran Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tebo,
Tahun 2018–2024

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	DOKTER SPESIALIS	13	13	13	13	13	15	19
2	DOKTER UMUM	39	58	58	42	40	59	59
3	DOKTER GIGI	14	19	19	19	18	19	19
4	BIDAN	237	500	500	534	630	632	632
5	PERAWAT	174	261	261	341	469	514	514
6	FARMASI	36	31	31	43	82	82	82
7	GIZI	15	18	18	33	38	40	40
8	SANITASI	17	20	20	23	23	23	23
9	KESEHATAN MASYARAKAT	24	38	42	44	61	72	72
10	TENAGA KESEHATAN LAIN	56	53	52	56	56	81	81

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 jumlah tenaga medis secara keseluruhan cenderung tetap kecuali dokter spesialis dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya dokter spesialis yang sebelumnya dikirim untuk Pendidikan dokter spesialis sudah kembali dan adanya dokter residen hasil kerjasama dengan Universitas Andalas Padang.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan yang tinggi dijadikan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara ekonomis dan sosial. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk



meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Capaian pembangunan kesehatan dari 2018-2024 dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini:

Tabel. 2. 26
Indikator Capaian Pembangunan Kesehatan
Kabupaten Tebo Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi
1	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	%	100	100
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,07*	73,45*
3	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 KH	100	128,27
4	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 KH	2,50	11,75
5	Persentase tenaga Kesehatan yang bersertifikasi	%	100	100
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,6*	1,78*

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, 2024 (* data tahun 2023)

Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Capaian Daerah 2024
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Ratio TT:1000 penduduk	0,49
Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100
Presentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	100
Presentase rumah sakit yang terakreditasi	%	100
Pelayanan Kesehatan Balita	%	79,13
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	84,30
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	99,66
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	92,59
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	74,41
Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	%	75,57
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	57,84
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	80,33
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	%	84,30
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	79,66



Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Capaian Daerah 2024
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	%	0,43
Jumlah Penurunan Kematian Ibu	Kematian Ibu	7
Persentase FKTP terakreditasi	%	100
Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	57,84
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	79,70
Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	85,70
Persentase posyandu aktif	%	89,16
Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	%	1,30
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	89,97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, 2025

Sementara Pencapaian kinerja pelayanan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2. 27

Indikator Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	
1	Kunjungan Rawat Jalan (Kunjungan)	27.180	22.304	18.546	20.848	27.802	34,806
2	Rawat Inap (Orang)	7.174	5.510	4.398	5.767	7.254	8,122
3	B.O.R (%)	60,54	41,02	31,83	40,11	52,40	56.86
4	B.T.O (kali)	59,78	41,12	29,92	40,90	54,95	60.61
5	L.O.S (hari)	2,71	2,70	2,93	2,62	2,51	2.61
6	T.O.I (hari)	2,41	5,24	8,34	5,34	3,16	2.61
7	G.D.R (%)	35	52	0,06	0,05	0,044	0.037
8	N.D.R (%)	14	18	0,02	0,02	0,019	0.015
9	Kunjungan IGD (Kunjungan)	7.072	5.507	4.632	6.419	8.521	9.599

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin, 2025

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Tebo dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tebo yang berubah pada tiap tahunnya



sesuai dengan keadaan di lapangan. Capaian kinerja sampai tahun 2019 terdiri dari Panjang Jalan kabupaten yang telah di SK kan dari tahun 2015 hingga tahun 2021 adalah sepanjang 1,443.33 Km. Pada Tahun 2022 panjang jalan Kabupaten mencapai 1,443.33 km . Sedangkan untuk jembatan hingga tahun 2022 sebanyak 48 unit dengan panjang 1.391,00 m.

Secara umum, kondisi jalan di Kabupaten Tebo masih jauh dari harapan dimana kondisi jalan baik masih belum cukup signifikan dibandingkan total panjang jalan. Selain itu, masih cukup banyak panjang jalan dengan jenis kerikil dan tanah. Belum optimalnya penganggaran sekaligus luasnya wilayah Tebo menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan. Hal inilah yang harus menjadi salah satu concern pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan masyarakat secara lebih baik sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

Tabel. 2. 28

**Panjang Jalan, Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Tebo
Tahun 2019-2024**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Nasional	87.00	112.00	112.00	122.00	112.00	112.00
2	Panjang Jalan Provinsi	162.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
3	Panjang Jalan Kabupaten	1,443.33	1,443.33	1,443.33	1,443.33	1,443.33	1,443.33
4	Jumlah Jembatan	45	45	46	48	48	48
5	Panjang Jembatan (Meter)	1,341.60	1,333	1,351	1,391	1,391	1,391

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tebo, 2025

Kondisi jalan kabupaten sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2. 29

Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Tebo Tahun 2018-2024

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Nasional di Kabupaten Tebo (Km)							
	- Kondisi Baik	82	84	98,1	98,1	103,10	103,10	103.10



NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Rusak Ringan	5	3	13,9	13,9	8,90	8,90	8.90
2	Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten Tebo (Km)							
	- Kondisi Baik	150	153	134,8	134,8	132,80	132,80	132.80
	- Rusak Ringan	12	9	3,2	3,2	5,20	5,20	5.20
3	Panjang Jalan Kabupaten (Km)							
	- Kondisi Baik	707,52	722,42	717,92	711,42	759,29	332,00	340.02
	- Rusak Sedang	440,63	474,49	473,99	469,99	422,12	373,73	372.23
	- Rusak Ringan	155,19	144,77	149,77	146,27	136,27	109,67	109.671
	- Rusak Berat	74,4	101,65	101,65	115,65	125,65	627,93	621.412
4	Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan permukaan (Km)							
	- Permukaan Aspal	780,09	868,95	689,45	869,95	904,07	904,07	910.59
	- Permukaan Kerikil	397,94	373,39	372,89	370,39	322,32	322,32	314.30
	- Permukaan Tanah	188,11	185,8	185,8	188	188,00	188,00	188
	- Permukaan Beton	11,6	15,19	15,19	15,19	28,94	28,94	30.44
5	Jumlah Jembatan di Kabupaten Tebo (Unit)	41	45	45	46	48	48	48
6	Panjang Jembatan di Kabupaten Tebo (meter)	1.255,4	1.341,6	1.333	1.351	1.391	1.391	1,391

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tebo, 2025

Capaian kinerja di bidang pengairan sampai tahun 2024 dapat dibangun dam sebanyak 1 unit, rehabilitasi dam sebanyak 3 unit, Operasi dan pemeliharaan dam sebanyak 3 unit, selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel. 2. 30

**Perkembangan Kegiatan di Bidang Pengairan Pekerjaan Umum
Kabupaten Tebo, 2018-2024**

NO	KEGIATAN	Perkembangan Kegiatan Pengairan						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembangunan dam	0	0	0	1	1	4	1
2	Rehabilitasi dam	6	6	7	7	14	14	3
3	Peningkatan dam	1	0	0	0	0	0	0



NO	KEGIATAN	Perkembangan Kegiatan Pengairan						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Operasi dan pemeliharaan dam	5	5	5	3	6	5	3
5	Pengerukan saluran dam	-	1	1	2	3	5	3
6	Pembangunan turap das Batanghari	-	-	-	1	3	-	-
7	Rehab turap das batanghari	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tebo, 2025

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk lingkungan permukiman dianggap sebagai kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Tebo. Berdasarkan Perda RTRW Kab. Tebo Nomor 1 Tahun 2023 Persentase Luas kawasan permukiman di Kabupaten Tebo adalah sebesar 2,26%, didapat dari perhitungan luas kawasan permukiman seluas 13.814 ha dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tebo sebesar 610.373 ha.

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan rumah layak huni 93,76%. Indikator-indikator selain rumah layak huni diukur berdasarkan jumlah pengguna.
2. Indikator rumah tangga pengguna air bersih yang layak di Kabupaten Tebo pada tahun 2024 mencapai 69,33%.
3. Indikator rumah tangga bersanitasi layak pada tahun 2024 angka yang tercatat sebesar 88,26%.

Tabel. 2. 31

Perkembangan Kegiatan Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018-2024

N o	Kegiatan	Perkembangan Kegiatan Perumahan dan Pemukiman						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Lingkungan (Meter)	6,635.00	1,225.00	5,658.95	6,557.00	11,833.00	6.302,95	13,503
2	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong (Meter)	3.63	1,635.00	1,618.00	1,101.99	1,102.9	7.367	4,194.98
3	Persentase Saluran Drainase Gorong-gorong	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100



No	Kegiatan	Perkembangan Kegiatan Perumahan dan Pemukiman						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	dalam kondisi baik (%)							
4	LPJU (Titik)	692.00	168.00	349.00	686.00	477	993	1,086

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Tebo 2025

2.3.1.4 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi politik dan pertikaian antar kelompok masyarakat dapat mengganggu pembangunan dan stabilitas keamanan. Menyikapi dari permasalahan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan yang harus diselesaikan. Iklim daerah yang aman dan kondusif perlu diciptakan, salah satunya melalui pembinaan politik daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kelompok Kepemudaan (OKP).

Masalah keamanan merupakan salah satu indikator yang berpengaruh dalam iklim berinvestasi, keamanan suatu daerah dapat dilihat dari resiko penduduk terkena kejahatan atau Angka Kejahatan (*Crime Rate*) per 100.000 penduduk yang terjadi setiap tahun. *Crime Rate* dihitung dengan rumus jumlah tindak pidana kejahatan dibagi jumlah penduduk dan dikalikan 100.000 (Statistik Kriminalitas Badan Pusat Statistik, 2018).

Angka *Crime Rate* Kabupaten Tebo pada Tahun 2024 adalah sebesar 75,44 yang berarti bahwa jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan pada setiap 100.000 penduduk adalah 75 orang. Pada tahun 2023 angka *crime rate* adalah sebesar 108,62.

Tabel. 2. 32

Jumlah Kejahatan berdasarkan Jenis Kejahatan dan *Crime Rate* Kabupaten Tebo Tahun 2021-2024

No	Jenis Kejahatan	2021		2022		2023		2024	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Pencurian dengan Pemberatan	68	44	48	42	34	29	49	35
2	Pencurian dengan Kekerasan	4	5	10	-	-	2	5	2
3	Pencurian Kendaraan Bermotor	24	15	11	9	8	9	11	4
4	Penganiayaan Berat	17	15	15	14	21	15	26	22
5	Pembunuhan	3	2	1	1	2	1	2	1
6	Aniaya Ringan	9	5	7	8	13	6	3	11
7	Pengeroyokan	12	15	18	18	17	11	12	11



No	Jenis Kejahatan	2021		2022		2023		2024	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
8	Pemerasan	1	1	-	-	1	-	-	-
9	Penculikan	0	0	-	-	-	-	-	-
10	Perkosaan	1	2	2	1	1	3	1	1
11	Perzinahan	1	0	1	-	1	2	1	1
12	Perbuatan Cabul	12	9	17	13	14	11	19	10
13	KDRT	10	9	3	2	8	7	7	9
14	Perlindungan Wanita dan Anak	3	1	6	1	4	4	5	3
15	Pengrusakan	0	3	3	1	2	2	5	1
16	Pembakaran	0	0	-	-	2	2	1	-
17	Permainan Judi	2	3	-	3	-	-	4	2
18	Penggelapan	22	8	16	11	16	12	23	27
19	Penipuan	10	1	3	2	5	2	11	5
20	Pemalsuan Surat	2	2	1	-	1	1	1	-
21	Serobot Tanah	1	0	1	-	-	1	1	-
22	Penyalahgunaan Senpi/Handak/Sajam	3	3	1	2	2	2	-	-
23	Pencurian Biasa	13	9	15	10	39	31	59	63
24	<i>Trafficking in Person</i>	0	0	-	-	2	2	1	1
25	Penyelundupan Senjata Api	0	0	-	-	-	-	-	-
26	<i>People Smuggling</i>	0	0	-	-	-	-	-	-
27	Kejahatan/Pelanggaran Lainnya	15	21	10	-	12	20	20	18
	Jumlah	233	173	187	158	206	175	268	226
	Jumlah Penduduk	340.868		350.234		350.761		355.262	
	Crime Rate	119,10		98,50		108,62		75,44	

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

JTP : Jumlah Tindak Pidana

PTP : Penyelesaian Tindak Pidana

2.3.1.5 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel berikut ini:

Tabel. 2. 33

Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tebo Tahun 2018-2024

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sarana sosial:							



No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Panti Asuhan	-	-	-	-	-	-	
	- Panti Jompo	-	-	-	-	-	-	
	- Panti Sosial	-	-	-	-	-	-	
	- Rumah Singgah	-	-	-	-	-	-	
	- Panti cacat	-	-	-	-	-	-	
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	-	-	-	151%	94,83%	151%	43.87%
	Keluarga Miskin	21.919	29.950	51.500	55.735	81.824	89.552	114,850
	Bantuan Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	13.110	13.040	14.518	14.518	14.111	13.940	13,332
	LKS/ LKSA	1	1	1	1	2	6	6
	RPSA (Dana Tasa)	-	-	-	-	-	-	-
	Program Keluarga Harapan (PKH)	-	-	-		8.989	7.392	7,594
	PSBRW	-	-	-	-	-	-	-
	Penyandang Disabilitas	50	57	85	44	156	127	655
	Anak Yatim & Tidak Mampu	43	65	50	95	50	80	600
	Jumlah Gangguan Jiwa Tidak Mampu	0	0	0	0	25	30	27
	Lansia Tidak Mampu	150	489	450	420	180	100	209
	Anak Berhadapan dengan Hukum Yang di Dampingi Sakti Peksos	17	17	24	24	30	22	25
	Anak Jalanan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kab.Tebo, 2025

Kebersamaan dari semua pihak dalam rangka mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal.



2.3.2 Fokus Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial, untuk itu indikator ketenagakerjaan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kesejahteraan sosial. Indikator ketenagakerjaan tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPAK mengidentifikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK mencerminkan penyediaan tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja, akan berakibat semakin kecil TPAK.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan angkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Tebo pada tahun 2018–2024, sebagai berikut:

Tabel. 2. 34
TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tebo
Tahun 2018-2024

KETERANGAN		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk		348.760	354.485	337.669	340.868	350.234	350.761	355,262
1	Angkatan Kerja	178.431	181.786	186.005	186.808	185.722	180.288	180,148



KETERANGAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	A	Bekerja	174.740	176.355	180.517	181.524	183.165	177.198	175,644
	B	Pengangguran	3.691	5.431	5.488	5.284	2.557	3.090	4,504
2	Bukan Angkatan Kerja		72.325	75.931	75.479	77.612	83.357	76.783	80,510
	A	Sekolah	15.866	14.713	18.199	17.169	18.190	18.886	*
	B	Mengurus Rumah Tangga	49.281	53.734	48.339	50.968	55.684	51.663	*
	C	Lainnya	8.476	7.484	8.941	9.475	9.483	6.234	*
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			7.079	70,54	71,13	70,65	-	70,13	69,11
Tingkat Pengangguran Terbuka			2,07	2,99	2,95	2,83	-	1,71	2,50

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya kualitas perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender. Perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan harus lebih di optimalkan. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan dapat memperlambat proses pembangunan suatu bangsa.

Laki-laki dan perempuan, serta anak memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, dan perolehan manfaat pembangunan yang setara sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Tabel. 2. 35

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tebo Tahun 2018-2023



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,06	90,22	90,23	90,06	90,40	90,92	91,63
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-				-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Tebo. 2025

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pemerintah Kabupaten Tebo di wakili dengan persentase Aparatur Sipil Negara perempuan yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo. Sementara di bidang politik perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal. Dalam bidang politik melalui UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 Pasal 53 telah mensyaratkan partai politik menominasikan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif terbuka. Pada periode 2020-2024 anggota legislatif perempuan sebanyak 1 orang atau baru 3% dari total anggota DPRD sebanyak 35 orang.

Tabel. 2. 36



Jumlah/Persentase ASN Perempuan dan Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Tebo Tahun 2021-2024

No		2021		2022		2023		2024	
		ASN	DPRD	ASN	DPRD	ASN	DPRD	ASN	DPRD
1	Laki-laki	1.674	34	1.573	34	1.573	34	1,422	32
2	Perempuan	2.065	1	1.965	1	1.965	1	1,835	3
	Persentase	55,23	3	55,53	3	55,53	3	56,34	9

Sumber: BKSDM & Kesbangpol Kabupaten Tebo, 2025

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan beberapa halantara lain faktor ekonomi, psikologis, pendidikan yang rendah, pihak ketiga atau faktor pemicu lainnya.

Rasio KDRT menunjukkan terjadinya kejadian KDRT dalam setiap 10.000. Rasio KDRT di Kabupaten Tebo belum sepenuhnya dapat dipantau karena tidak semua korban KDRT mau melaporkan kasusnya ke pihak berwenang.

Tabel. 2. 37
Data kekerasan terhadap anak yang tercatat
Tahun 2012-2024

Tahun	KDRT	Kekerasan Seksual Anak < 18 Th	Kekerasan Fisik Anak <18 Th	Kekerasan Seksual Perempuan > 18 Th	Jml Kasus
2012	4	3	2	1	10
2013	5	12	1	1	19
2014	3	4	0	9	16
2015	11	18	2	7	31
2016	14	19	4	3	44
2017	11	25	4	3	43
2018	11	20	4	4	39
2019	2	-	12	14	28
2020	7	-	12	11	30
2021	6	24	-	-	30
2022	1	29	-	-	30
2023	3	8	14	-	25
2024	13	11	2	17	43

Sumber: DinsosP3A Kabupaten Tebo, 2025



2.3.2.3 Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat". "Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi". Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan "pengkayaan cakupan" dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan "perorangan" dan "sesuai keyakinan agama" serta "budaya" bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Data ketersediaan dan konsumsi pangan di Kabupaten Tebo tersedia dalam tabel berikut:

Tabel. 2. 38



Data Ketersediaan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2016-2024

Komoditas	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Padi sawah	ton	41.398	32.614	28,496.90	27,545.00	23,424.58	*
Padi ladang	ton	15.709,95	20.471,10	16,296.10	12,592.00	7,970.60	*
Jumlah padi	ton	57.107,95	53.085,10	44,793.00	40,137.00	31,395.18	*
Beras	ton	36.083	33.549,78	34,440.89	25,367.00	19,841.75	*
Jagung	ton	9.838	17.257,50	5,059.20	5,369.00	5,243.58	*
Kedelai	ton	1.796	6.273,80	4,610.00	4,326.00	2,810.06	*
Kacang tanah	ton	93	444,21	68.4	243.00	96.48	*
Ubi kayu	ton	6.498	3.086	5,321.40	4,046.00	4,386.59	*
Ubi jalar	ton	311	220	260	293	713.86	*
Sayur Buah	ton	16.548	11.209	46,870.93	9,467.20	59,785.84	*
Daging sapi + kerbau	ton	882.259	920	719	809,864	824,277	1,173,163
Daging ayam	ton	1.408,22	1.385,13	3,258.00	384,064	3,763,145	416,929
Telur	butir	440,07	588.422	13,099.00	1,461,094	1,626,734	544,562
Susu	ton	0	0	0			*
Ikan	ton	1.151	1.166,50	758.26			

Sumber:DTPHPK Kabupaten Tebo, 2025

Tabel. 2. 39

Data Konsumsi Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023

Nama		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi - Padian*			38,876.050	40,857.200	40,162.011
	1 Beras (ton)	34,893	35,118.82	32,925.65	35,581.1	34,884.4
	2 Jagung (Ton)	110	108.06	201	89.6	106.8
	3 Terigu (Ton)	5,786	5,222.80	5,749.40	5,186.5	5,170.8
2	Umbi - Umbian*			7,926.50	7,773.90	7,655.08
	1 Singkong (Ton)	4,476	4,754.55	4,700.30	4,293.3	4,258.9
	2 Ubi Jalar (Ton)	1,346	1,440.77	1,100.40	1,019.2	1,127.8
	3 Kentang (Ton)	8	0	1,889.50	2,371.5	2,192.9
	4 Sagu (Ton)	2,819	2,989.60	26.7	0	1.2
	5 Umbi Lainnya (Ton)	210	216.12	209.6	89.9	74.2
3	Pangan Hewani*			14,907.00	16,645.90	15,265.10
	1 Daging Ruminansia (Ton)	1,161	1,080.58	817	1,166.4	1,048.9
	2 Daging Unggas (Ton)	3,678	3,421.83	3,088.20	3,750.0	3,741.5
	3 Telur (Ton)	2,683	2,485.33	2,466.20	2,555.9	2,119.7



Nama		2019	2020	2021	2022	2023
4	Susu (Ton)	1,047	972.52	847.1	852.7	856.1
5	Ikan (Ton)	8,512	7,888.23	7,688.50	8,320.9	7,498.9
4	Minyak dan Lemak*			4,334.30	4,591.10	4,658.29
1	Minyak Kelapa (Ton)	303	252.14	56.9	189.1	26.0
2	Minyak Sawit (Ton)	4,781	4,142.22	4,125.40	4,340.3	4,569.0
3	Minyak Lainnya (Ton)	0	0	152	61.7	63.3
5	Buah/Biji Berminyak*			899.20	980.70	767.88
1	Kelapa (Ton)	2,206	1,945.04	834.5	922.3	714.1
2	Kemiri (Ton)	98	72.04	64.7	58.4	53.8
6	Kacang-Kacangan*			2,324.70	2,514.80	1,860.55
1	Kedelai (Ton)	2,119	2,485.33	2,053.30	2,376.9	1,610.4
2	Kacang Tanah (Ton)	33	36.02	88	43.1	54.5
3	Kacang Hijau (Ton)	97	108.06	92.9	55.0	84.0
4	Kacang Lainnya (Ton)	14	0	90.5	39.8	111.7
7	Gula*			3,322.80	3,509.80	3,622.77
1	Gula Pasir (Ton)	4,799	4,286.30	3,254.40	3,452.0	3,502.8
2	Gula Merah (Ton)	65	72.04	68.4	57.8	119.9
8	Sayur dan Buah*			38,960.90	35,408.50	32,915.90
1	Sayur (Ton)	33,552	29,86	23,728	21,674.1	21,816.4
2	Buah (Ton)	14,321	12,750.83	15,232.90	13,734.4	11,099.4
9	Lain - Lain*			8,933.00	6,928.79	6,872.56
1	Minum (Liter)	7,369	12,858.89	7,700.50	5,437.89	5,605.3
2	Bumbu - Bumbuan (Ton)	1,289	2,269.22	1,232.50	1,490.9	1,267.3

Sumber: DTPHKP Kabupaten Tebo, 2025

2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan adanya berbagai pembangunan proyek strategis di Kabupaten Tebo, dimana kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan tiga indikator/parameter



yaitu pencemaran air, pencemaran udara dan luas tutupan hutan dengan kriteria :

Tabel. 2. 40

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

Unggul			X	>	90
Sangat Baik	82		X	≤	90
Baik	74		X	≤	82
Cukup	66	≤	X	≤	74
Kurang	58	≤	X	<	66
Sangat Kurang	50	≤	X	<	58
Waspada			X	<	50

Sumber:Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2. 41

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Tebo Tahun 2019-2024**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	60,00	58,9	67,78	70.00	55.00	65.00
Indeks Kualitas Udara	92,23	91,35	92,03	93.42	92.72	93.76
Indeks Tutupan Hutan/Lahan	62,50	42,17	47,83	47.83	42.86	42.98
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,00	72,36	73,23	74.63	67.62	71.83

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2025

Untuk meminimalisir dampak yang dimungkinkan terjadi dari suatu usaha/kegiatan tersebut maka diperlukan suatu instrumen untuk menilai kelayakan suatu kegiatan. Instrumen tersebut dapat berupa izin lingkungan yang meliputi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan), serta SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk kegiatan usaha skala kecil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan instrumen tersebut diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Kabupaten Tebo tidak lagi memiliki Komisi Penilai Amdal, sehingga apabila ada kegiatan dan atau usaha yang wajib Amdal, kewenangan penilaian pada Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas



kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik.

Tabel. 2. 42

Sarana Pengelolaan Sampah Kabupaten Tebo Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	32 unit	30 unit	22 unit	22 unit	22 unit	18 Unit
Tempat Pembuangan Sampah Sementara 3 R	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	4 unit	4 unit	4 unit	1 unit	1 unit	1 Unit
Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja (IPLT)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan , 2025

Perkembangan kegiatan lingkup Lingkungan Hidup pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2. 43

**Perkembangan Kegiatan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024**

No	Kegiatan	Perkembangan Kegiatan Lingkungan Hidup							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Areal Pemakaman yang dipelihara	4	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah RTH (Unit)	6	0	0	0	15	15	15	15
3	Persentase RTH dalam kondisi baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas lingkungan Hidup, 2025

2.3.2.5 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau obyek saja.



Program pembangunan yang mengarah ke pedesaan perlu ditingkatkan, mengingat pedesaan memiliki nilai-nilai tradisional, sehingga sesuai dengan hakekatnya bahwa pembangunan tersebut bertujuan untuk membimbing nilai-nilai tradisional tersebut kearah yang lebih maju. Mengingat begitu pentingnya pembangunan pedesaan maka untuk tercapainya sasaran tersebut dibentuklah organisasi yang disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat desa, yang memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan melakukan pembangunan desa.

Tabel. 2. 44

Klasifikasi Desa dalam Kabupaten Tebo tahun 2024

No	Kecamatan	Status IDM (Indeks Desa Membangun)					total
		Mandiri (desa)	Maju (desa)	Berkembang (desa)	Tertinggal I (desa)	Sangat Tertinggal I (desa)	
1	Tebo Tengah	0	4	6	0	0	10
2	Tebo Ilir	2	4	5	0	0	11
3	Tebo Ulu	1	5	10	0	0	16
4	Rimbo Bujang	3	8	2	0	0	13
5	Sumay	0	3	9	0	0	12
6	VII Koto	0	10	0	0	0	10
7	Rimbo Ulu	4	4	4	0	0	12
8	Rimbo Ilir	4	5	1	0	0	10
9	Tengah Ilir	1	4	1	0	0	6
10	Serai serumpun	0	1	7	0	0	8
11	VII Koto Ilir	2	3	1	0	0	6
12	Muara Tabir	4	2	2	0	0	8
Tebo		21	53	48	0	0	122

Sumber: Dinas PMD, 2025

Nilai IDM Kabupaten Tebo tahun 2024 sebesar 0,7344 dengan Status MAJU meningkat dibandingkan Tahun 2023 sebesar 0,712 dengan Status MAJU



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tebo yang aktif sampai dengan tahun 2024 sebanyak 122 LPM meningkat dari tahun 2023 sebanyak 109 LPM.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat adalah Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT). Untuk itu peranan RT/RW hendaknya terus didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan. Sampai dengan tahun 2024 jumlah RT sebanyak 2.185 dan RW sebanyak 42 Yang tersebar di 532 dusun.

Selain RT/RW peranan PKK sebagai aktor pembangunan harus mendapat perhatian. Selain itu Posyandu juga merupakan salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang sangat berperan dalam pembangunan khususnya di bidang pelayanan kesehatan Ibu dan Anak. Hingga akhir tahun 2024 jumlah posyandu sebanyak 333 posyandu.

2.3.2.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana. Sebagaimana diketahui bahwa kependudukan merupakan isu sentral dalam pembangunan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, dan berbagai upaya pembangunan tentu saja dilakukan dalam upaya pencapaian kesejahteraan penduduk.

Dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk, maka pemerintah menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB dan Kesehatan Reproduksi saat ini tidak hanya di tujukan untuk penurunan angka kelahiran, namun dikaitkan pula dengan tujuan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi, promosi, pencegahan, dan penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak. Program Kampung KB masih menjadi



lokus pelaksanaan program KKBPK. Sejak digulirkan tahun 2016, hingga akhir tahun 2024, sudah ada 76 Kampung KB di Kabupaten Tebo.

2.3.2.7 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perizinan merupakan instrument konkrit individual yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada orang atau badan hukum untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu. Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo telah mengeluarkan sebanyak 3.368 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di berbagai jenis usaha kecuali klasifikasi usaha besar.

Tabel. 2. 45
Perkembangan Jumlah Surat Izin Usaha (SIUP)
Tahun 2019-2024

NO	JENIS USAHA	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mikro	0	47	14	914	2609	3362
2	Usaha Kecil	124	20	8	900	-	
3	Usaha menengah	16	8	5	200	5	6
4	Usaha besar	4	0	12	3	-	

Sumber: DPMPTSPKUKM Kabupaten Tebo, 2025

Setelah UU Cipta Kerja disahkan sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU. Saat ini pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB. NIB ibaratnya nomor identitas pelaku usaha. nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Pelaku usaha mengurus NIB sesuai bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeaan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor. Selain legalitas, adanya nomor induk tersebut membuat usaha yang dijalankan juga berpeluang semakin berkembang pesat. Dengan mengurus NIB, usaha anda menjadi terjamin legalitasnya. Selain itu, pengurusan NIB juga menambah peluang usaha di



antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Tabel. 2. 46
Perkembangan Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB)
Tahun 2023-2024

NO	JENIS IZIN	TAHUN	
		2023	2024
1	NIB	2.653	5.368

Sumber : DPMPTSPKUKM Kabupaten Tebo, 2025

Kelembagaan ekonomi diperlukan untuk mengoptimalkan aktivitas ekonomi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, salah satu kelembagaan ekonomi yang penting adalah koperasi. Keberadaan koperasi dapat memberi daya dukung dalam permasalahan umum yang dihadapi rakyat dalam memproduksi, khususnya pada sektor pertanian yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Tebo. Koperasi diharapkan dapat mengatasi masalah permodalan, daya tampung produksi dan pemasaran.

Tabel. 2. 47
Perkembangan Jumlah Koperasi Kabupaten Tebo
Tahun 2018-2024

NO	JENIS KOPERASI	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koperasi primer	-	-	-	-	-		
	- Koperasi unit desa	32	32	32	32	32	32	32
	- Primer koperasi polisi	1	1	1	1	1	1	1
	- Koperasi serba usaha	2	2	2	2	2	2	2
	- Koperasi pertanian	42	42	42	42	42	42	42
	- Koperasi perikanan	2	2	2	2	2	2	2
	- Koperasi perkebunan	66	66	66	65	66	66	66
	- KPN/ KPRI	20	20	20	20	19	19	18
	- Koperasi karyawan	9	9	9	10	11	10	10
	- Kopontren	17	17	17	17	17	17	12
	- Koperasi pedagang pasar	4	4	4	4	4	4	4
	- KSP	5	5	5	7	6	6	8
	- Koperasi wanita	15	15	15	15	15	15	13
	- Koperasi angkutan	1	1	1	1	1	1	1



NO	JENIS KOPERASI	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Koperasi lainnya	147	150	183	158	158	164	147
2	Koperasi sekunder	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Koperasi	363	366	369	376	376	381	358

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2025

Perkembangan jumlah koperasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terus mengalami peningkatan meskipun peningkatannya tidak besar. Akan tetapi di tahun 2024 jumlah koperasi yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 381 koperasi pada 2023 dan pada tahun 2024 sebanyak 358 koperasi. Perkembangan jumlah koperasi yang terdaftar saja dirasa tidak cukup untuk menjelaskan keadaan koperasi yang sebenarnya. Pada tabel 2.48 dijelaskan jumlah koperasi aktif dan jumlah anggota koperasi.

Tabel. 2. 48

**Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Anggota Koperasi
Kabupaten Tebo Tahun 2024**

No	Jenis Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Jumlah Anggota
A	Koperasi Primer	-	-	-	-
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	3	29	32	8.971
2	Primkopol	0	1	1	-
3	KSU	0	2	2	-
4	KOPTAN	2	40	42	1.806
5	Kop. Perikanan	0	2	2	-
6	Kop. Perkebunan	22	44	66	9.472
7	KPN/KPRI	4	14	18	1.384
8	Kop. Karyawan	5	5	10	1.338
9	Kop. Pontren	0	12	12	1.819
10	Kop. Pas	1	3	4	245
11	KSP	6	2	8	2.368
12	Kop. Wanita	3	10	13	413
13	Kop. Angkutan	0	1	1	-
14	Kop. Lainnya	14	133	147	6.637
B	Koperasi Sekunder	-	-	-	-
	Jumlah	60	298	358	34.453



Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo, 2025

Jumlah koperasi aktif Kabupaten Tebo pada tahun 2024 berjumlah 60 Koperasi, dengan jumlah anggota sebanyak 34.453 orang.

2.3.2.1 Penanaman Modal

Capaian urusan penanaman modal adalah peningkatan investasi di daerah baik merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Capaian penanaman modal dapat dilihat dari jumlah investor, nilai investasi dan rasio daya serap tenaga kerja.

Tabel. 2. 49
Realisasi Indikator Penanaman Modal
Kabupaten Tebo Tahun 2024

Bidang	Jumlah Investor		Nilai Investasi (Rp. Juta)
	PMDN	PMA	
Tanaman pangan, Perkebunan dan Peternakan	1,196	0	94,761,962,665
Perdagangan dan reparasi	1,550	4	150,680,651,323
transportasi, gudang dan telekomunikasi	55	0	11,574,679,426
Pertambangan	11	0	25,475,000,000
kehutanan	4	2	21,172,000,000
Industri kayu	2	0	1,250,000,000
Industri makanan	23	0	140,000,000
Industri Lainnya	1	0	100,000,000
Jumlah	2,842	6	305,154,293,414

Sumber: DPMPSTSPKUKM Kabupaten Tebo, 2025

Pada tahun 2024, jumlah investor PMDN di Kabupaten Tebo sebanyak investor yang bergerak pada bidang perkebunan, pertanian dan perikanan, dan Bidang Pertambangan. Dari investasi tersebut jumlah nilai investasi total sebesar 305,154 Milyar rupiah.

2.3.2.2 Kepemudaan dan Olahraga

Pada bidang olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, untuk itu pembangunan dalam bidang ini juga penting untuk terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, serta memiliki raga yang sehat. Untuk mencapai pembangunan pada bidang ini maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga. Di bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta data gedung olahraga yang ada di Kabupaten Tebo sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel. 2. 50
Perkembangan Olahraga
Kabupaten Tebo Tahun 2021-2023

No	Capaian Pembangunan	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	16,13	17,34	17,47	17
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,93	0,93	0,93	0,93

Sumber: Disporapar Kabupaten Tebo, 2025

Tabel. 2. 51
Perkembangan Olahraga Kabupaten Tebo
menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Tebo Ilir	65	15
2	Muara Tabir	58	3
3	Tebo Tengah	89	4
4	Sumay	45	13
5	Tengah Ilir	27	3
6	Rimbo Bujang	49	3
7	Rimbo Ulu	76	3
8	Rimbo Ilir	33	11
9	Tebo Ulu	77	4
10	VII Koto	40	1
11	Serai Serumpun	17	1
12	VII Koto Ilir	15	3

Sumber : Dispora Kabupaten Tebo, 2025

2.3.2.3 Budaya

Pada bidang Seni budaya salah satu indikator terpenuhinya penggalan seni budaya adalah tersedianya fasilitas kesenian. Di bawah ini data tentang jumlah gedung kesenian dan grup kesenian yang ada di Kabupaten Tebo tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2. 52
Perkembangan Seni, Budaya Kabupaten Tebo Tahun 2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	4.21	4.21	4.21	4.21	45
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0,36	0,80	0,85	0,87	5

Sumber: Disporapar 2025

Tabel. 2. 53
Perkembangan Seni, Budaya Kabupaten Tebo
menurut Kecamatan Tahun 2024



No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
1	Tebo Ilir	4	0
2	Muara Tabir	2	0
3	Tebo Tengah	8	2
4	Sumay	0	0
5	Tengah Ilir	1	0
6	Rimbo Bujang	9	1
7	Rimbo Ulu	11	1
8	Rimbo Ilir	3	1
9	Tebo Ulu	5	0
10	VII Koto	1	0
11	Serai Serumpun	0	0
12	VII Koto Ilir	1	0

Sumber : Dikbud Kabupaten Tebo, 2025

2.3.2.4 Perpustakaan

Perpustakaan di Kabupaten Tebo terdiri dari satu perpustakaan daerah dan layanan perpustakaan keliling, Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 12 kecamatan dengan 1 armada yang tersedia. Sampai saat ini peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca di perpustakaan. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung perpustakaan. Sementara koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Tebo sampai dengan Tahun 2024 adalah sebanyak 16.748 eksemplar dengan 6.704 judul.

Tabel. 2. 54

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Koleksi Buku perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo periode 2018-2024

No	Pengunjung / Buku	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengunjung Perpustakaan	5.393	5.411	1.871	1.548	1.337	8.983	3,916
2	Jumlah Buku:							
	- Judul	5.227	5.427	5.785	5.785	6.135	6.704	6,704
	- Eksemplar	12.183	13.853	14.674	14.674	15.374	16.748	16,748

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tebo, 2025



2.3.2.5 Kearsipan

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada di dalam pengelolaannya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja kearsipan diantaranya adalah peningkatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah, mengupayakan penambahan personil jabatan fungsional arsiparis dan peningkatan pengelolaan sistem informasi kearsipan statis.

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Jumlah Rumah Tangga Perikanan, jumlah produksi dan nilai produksi ikan di Kabupaten Tebo terlihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2. 55

**Jumlah Rumah Tangga Perikanan, Jumlah Produksi dan Nilai
Produksi Ikan di Kabupaten Tebo periode 2019-2024**

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	RTP budidaya	484	484	359	908	873	1.354
2	RTP Penangkapan	1.083	1.014	1.182	441	375	550
	Jumlah	3.586	1.498	1.541	1.319	1.248	1.354
A	Perahu	370	369	264	295	276	372
B	Motor	30	39	25	42	37	43
	Jumlah	400	408	289	337	313	415
A	Produksi Budidaya (ton)	409,11	768,32	451,15	566,55	565,6	599,42
	Nilai (rp)	17.155.046,00	15.692.408,00	9.951.708,00	15.173.026,00	15.003.302	16.174.024
B	Produksi perairan umum (ton)	282,98	409,11	307,11	425,50	405,08	404,72
	Nilai (rp)	9.975.570,00	17.155.046,00	11.655.022,00	18.404.879,00	17.519.710	19.498.120
C	Produksi Ikan kolam (ton)	828.071,36	727,77	440,57	512,99	515,1	554,71



No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai (rp)	16.165.027,71	14.770.768,00	9.680.556,00	13.622.246,00	13.540.912	14.835.374
D	Keramba (unit)	324	328	129	177	140	158
	Produksi keramba (ton)	40,05	40,55	10,58	53,56	50,5	44,71
	Nilai (rp)	920.486,00	921.640,00	271.152,00	1.550.780	1.462.389	1.338.650

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Dalam satu tahun terakhir, jumlah rumah tangga perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan angka pertumbuhan sebesar 8,5 Persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada umumnya, budidaya ikan dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok. Untuk perikanan budidaya, seiring dengan bertambahnya RTP juga berpengaruh terhadap produksi maupun nilai perikanan. Akan tetapi pada perikanan tangkap, terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya, adapun secara nilai mengalami kenaikan, hal tersebut terjadi karena dengan seiring langkanya jenis ikan, berpengaruh terhadap harga ikan tersebut. Berikut sebaran RTP pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tebo.

Tabel. 2. 56

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PENANGKAPAN	BUDIDAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Tebo Ilir	84	90	174
2	Muara Tabir	25	75	100
3	Tebo Tengah	90	116	206
4	Sumay	35	69	104
5	Tengah Ilir	33	50	83
6	Rimbo Bujang	30	250	280
7	Rimbo Ulu	5	205	210
8	Rimbo Ilir	18	185	203
9	Tebo Ulu	93	74	167
10	VII Koto	68	78	146
11	Serai Serumpun	12	35	47
12	VII Koto Ilir	57	127	184
JUMLAH		550	1.354	1.904

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025



Berdasarkan sebarannya jumlah rumah tangga perikanan penangkapan terbanyak berada di Kecamatan Tebo Ulu sedangkan untuk jumlah Rumah tangga Perikanan Budidaya terbanyak di Kecamatan Rimbo Bujang mencapai 280 RTP.

Tingkat produksi ikan budidaya di Kabupaten Tebo sangat tergantung pada sumber benih ikan. Benih ikan di Kabupaten Tebo di hasilkan dari Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan sebagian lagi masih didatangkan dari luar daerah. Produksi benih ikan terbesar berasal dari Unit perbenihan Rakyat yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang.

Tabel. 2. 57
Jumlah benih Ikan yang Disebarkan Menurut Sumber Benih dan Kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2024

NO	KECAMATAN	SUMBER BENIH			JUMLAH
		BBI	UPR	LUAR DAERAH	
1	2	3	4	5	6
1	Tebo Ilir	25.000	92.550	350.000	467.550
2	Muara Tabir		85.500	50.000	135.500
3	Tebo Tengah	65.000	120.000	25.500	210.500
4	Sumay	10.000	95.000	11.250	116.250
5	Tengah Ilir	10.000	150.000	15.320	175.320
6	Rimbo Bujang	16.700	850.000	130.450.000	997.150
7	Rimbo Ulu	-	735.000	125.000	860.000
8	Rimbo Ilir	20.000	550.000	95.200	665.200
9	Tebo Ulu	82.000	195.000	25000	302.000
10	VII Koto		120.500	23.200	143.700
11	Serai Serumpun		101.250	25.500	126.750
12	VII Koto Ilir		142.000	85.000	227.000
JUMLAH		228.700	3.236.800	961.420	4.426.920

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Pada bidang Perkebunan secara umum, satu tahun terakhir telah terjadi kenaikan luas lahan di hampir semua komoditi perkebunan di Kabupaten Tebo. Jumlah luas dan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Tebo Tahun 2018-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2. 58
Jumlah Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tebo 2019-2024



JENIS TANAMAN PERKEBUNAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas tanam (ha)						
Karet	114.025,00	114.288,00	114.276,00	114.285,00	113.638	113.691
Kelapa sawit	61.002,00	60.980,00	60.901,00	61.130,00	69.208	69.233
Kelapa dalam	1.041,00	1.062,00	1.090,00	1.137,00	1.069	1.059
Kopi	260	268	286	251	274	274
Coklat	333	341	327	340	341	315
Pinang	334	341	362	-	-	-
Produksi (ton)						
Karet	50.327,00	50.328,00	50.334,00	50.485,00	50.099	50.099
Kelapa sawit	129.170,00	119.034,00	119.264,00	118.992,00	119.264	119.264
Kelapa dalam	456	465	447	448	449	415
Kopi	30	41	42	40	47	47
Coklat	50	54	52	65	71	73
Pinang	38	42	40	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2025

Tanaman Perkebunan yang masih banyak diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Tebo adalah karet dan Kelapa Sawit. Dari sisi lahan maupun produksi kedua tanaman perkebunan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Membaihnya harga pasar untuk kedua komoditas ini menyebabkan masyarakat masih antusias untuk menggantungkan sumber pendapatan pada komoditi karet dan kelapa sawit. Beberapa kurun waktu terakhir, harga jual kedua komoditas ini cenderung stabil.

Pada subsektor Peternakan jumlah populasi dan produksi ternak baik ternak besar maupun ternak kecil di Kabupaten Tebo pada tahun 2024 tidak mengalami kenaikan. Jumlah populasi ternak dan produksi daging di Kabupaten Tebo tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2. 59

**Jumlah Populasi Ternak dan Produksi di Kabupaten Tebo
Tahun 2020-2024**

JENIS TERNAK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Populasi (ekor)					
Sapi	20.910	21.445	21.660	21.965	21.965
Kerbau	10.651	10.511	10.851	10.861	10.862
Kambing	57.529	54.080	59.196	48.503	49.503
Domba	16.024	15.377	15.588	12.368	12.368
Produksi (kg)					
Sapi	683.274	494.830	539.074	545.865	545.865
Kerbau	236.283	224.254	270.790	278.412	278.412
Kambing	133.123	106.131	116.093	50.102	50.102



JENIS TERNAK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Domba	36.300	25.823	28.580	24.588	24.588

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, Tebo Dalam Angka 2025

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dalam Kabupaten Tebo Dalam Angka Tahun 2025, populasi dan Produksi ternak unggas memiliki angka yang sama. Pola peternakan ayam potong di Kabupaten tebo diterapkan melalui pola kemitraan antara peternak ayam dengan badan usaha/investor terhadap peternakan ayam potong, dimana petani bertugas dalam penyediaan kandang, lahan dengan tenaga kerja sedangkan pihak investor menyiapkan bibit, pakan, obat-obatan sampai dengan pemasaran. Bentuk kerjasama ini mendorong peningkatan minat masyarakat untuk beternak ayam potong. Hal ini juga berefek positif terhadap pemenuhan daging ayam potong di Kabupaten Tebo, dimana Kabupaten Tebo telah mampu memenuhi kebutuhan daging ayam untuk masyarakat. Jumlah populasi ternak dan produksi tahun 2019-2024 di Kabupaten Tebo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2. 60
Jumlah Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Tebo
Tahun 2019-2024

JENIS	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Populasi ternak itik(ekor)	54.694	74.650	66.008	63.468	65.568	65.568
Daging itik (kg)	13.569	17.771	17.896	15.347	10.357	10.357
Populasi ayam broiler(ekor)	406.681	446.893	2.063.949	2.076.039	2.063.949	2.063.949
Daging broiler (kg)	1.029.038	1.211.130	3.258.801	3.564.308	3.395.649	3.395.649
Populasi ayam buras (ekor)	574.554	667.898	655.292	800.680	982.981	982.981
Daging ayam buras (kg)	379.184	520.394	218.489	319.756	367.496	367.496

Sumber: BPS, Tebo Dalam Angka 2025

2.3.3.2Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tebo belum menunjukkan kontribusi yang berarti, meskipun Kabupaten Tebo juga memiliki objek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan



diantaranya adalah Danau Sigombak, Danau (persawahan) Cermin Alam (Kepungo Lake), Kebun Raya Bukit Sari, Taman Tanggo Rajo, Air Terjun Ketalo, Air Terjun Pemayungan, Air Terjun Bukit Karendo, Air Terjun Bulian Berdarah, Air Terjun Langgas, Air Terjun Gajah Mati, Air Terjun Pademan, Air Panas Sungai Bengkal, Gua Harimau, Situs Candi Gedong, Makam Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo dan Istana Sultan Thaha Desa Tanah Garo.

Sejarah Kota Tua di Muaro Tebo menjadi ikon sejarah peninggalan kolonialisme Belanda yang pernah terjadi di Kabupaten Tebo. Kawasan Kota Tua Muara Tebo memiliki banyak bangunan peninggalan sejarah yang dapat ditemukan di sudut Kota Tua Muara Tebo yaitu sisa-sisa peninggalan kolonial (bangunan militer), benteng, tanggo rajo, gedung pertokoan, makam Belanda, ponton dan tempat **makam Pahlawan Nasional Sultan Thaha Syaifudin**.

Salah satu destinasi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan yaitu destinasi **ekowisata gajah**. Fasilitas yang tersedia berupa PIKG (Pusat Informasi Konservasi Gajah) yang terletak di Desa Muara Sekalo sebagai Pusat Kegiatan. Wisata yang ditawarkan selain ekowisata hidupan liar, juga kearifan lokal **komunitas adat terpencil suku talang mamak**. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung di Kawasan ekowisata diharapkan akan dapat menarik minat wisatawan. Kabupaten Tebo juga memiliki beberapa atraksi alam lainnya yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata.

2.3.3.3 Pertanian

Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan mengenai struktur ekonomi Kabupaten Tebo, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Tebo. Pembangunan terhadap sektor ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan produktifitas dan nilai tambah sehingga dapat lebih berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat.



2.3.3.3.1 Pangan

Pertanian merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa (Kuznet, 1964). Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Penyediaan data produksi tanaman pangan secara berkesinambungan diharapkan mampu menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Data pokok yang dikumpulkan untuk penghitungan produksi tanaman pangan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Terdapat 3 (tiga) komoditas utama tanaman pangan dan palawija yang diusahakan oleh masyarakat petani Kabupaten Tebo yaitu Padi, Kedelai dan Jagung.

Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas padi Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 2.61 berikut:

Tabel. 2. 61

**Luas panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan Ladang
Kabupaten Tebo Tahun 2019-2024**

KETERANGA N	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas panen sawah (ha)	8.776,00	7.107,90	6.237,00	6.097,00	4,872.0	3.442
Luas panen ladang (ha)	4.504,00	5.869,70	4.729,00	3.654,00	2,313	2.016
Total luas panen	13.280,00	13.077,60	10.966,00	9.751,00	7.185	5.458,5
Produksi padi sawah (ton)	41.398,00	33.527,90	28.496,90	27,545.00	23,424.58	15.860,74
Produksi padi ladang (ton)	15.709,95	20.473,50	16.296,10	12.592,00	7,970.60	6.948,86

Sumber: BPS, Tebo dalam Angka 2025

Tanaman padi di Kabupaten Tebo terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Luas panen dan produktivitas tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang di Kabupaten Tebo setiap tahunnya berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, sehingga berpengaruh juga terhadap produksi padi. Penurunan luas panen padi tersebut rata-rata sebesar 1,41%



per tahun, sedangkan untuk produktivitas tanaman padi dalam dua tahun terakhir adalah tetap. Salah satu penyebab terjadinya penurunan produksi padi ini adalah adanya pengaruh dampak iklim, dimana pada Tahun 2024 terjadi badai elnino yang di susul dengan bencana banjir yang cukup parah sehingga menyebabkan fuso.

Dari Produksi padi tahun 2024, kebutuhan masyarakat akan beras yang dihasilkan dari produksi lokal masih diangka -57.05 persen yang berarti bahwa Kabupaten Tebo baru bisa memenuhi kebutuhan beras masyarakat tidak sampai dari separuh kebutuhan beras.

Tabel. 2. 62
Ketersediaan Beras Kabupaten Tebo Tahun 2019-2024

KETERANGAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pddk tebo(pertengahan tahun)	354.485,00	360,193	340,868	340,868	350,760	355.262
Produksi padi (gkg)	57.108,00	53,189.90	44,793	40,137	31,395.18	22,809.6
Produksi beras (ton) 63,20% x kg	36.092,26	33,616.02	28,309.18	25,366.58	19,841.75	14,415.67
Tersedia beras dikonsumsi di rumah tangga (ton) = 98,23% x ton beras	35.453,42	33,021.01	27,808.10	24,917.60	19,490.55	14,160.51
Kebutuhan beras konsumsi (ton) per tahun	34.893,00	35,118.82	33,234.63	33,234.63	34,199.10	32,968.31
Plus/Minus (ton)	560,29	-2,097.80	-5,426.53	-8,317.03	14,708.55	-18,807.8
Persentase kekurangan dari kebutuhan konsumsi (%)	2,00	-5.97	-16.33	-25.03	-43.01	-57.05

Sumber: DTPHKP Kabupaten Tebo 2025, Data diolah

Selain padi, komoditas bahan pangan lain yang di produksi di Kabupaten Tebo adalah jagung, kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah



dan Kacang Hijau. Tabel dibawah akan memperlihatkan perkembangan luas tanam, jumlah produksi dan produktivitas tanaman palawija Kabupaten Tebo kurun waktu (lima) tahun terakhir. Data perkembangan luas tanam, produksi dan produktivitas tanaman palawija Kabupaten Tebo tersedia dalam tabel berikut:

Tabel. 2. 63

Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija Kabupaten Tebo 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LUAS PANEN (HA)						
a. Jagung	1.218,00	2.212,50	744,00	807		270
b. Ubi kayu	189,00	89,90	116,00	118,5	759.50	146
c. Ubi jalar	63,00	22,00	11,00	19	130.00	32.2
d. Kacang tanah	77,00	36,50	39,00	174	26	61
e. Kedelai	1.237,00	4.323,80	2.823,00	2.163	59.30	240
f. Kacang hijau	23,00	11,00	3,00	5	1,714.50	2.5
PRODUKSI (TON)						
a. Jagung	9.838,00	17.874,70	5.059,20	5.367		2,172.69
b. Ubi kayu	6.498,00	3.090,70	5.321,40	4.046	5,243.58	5,058.78
c. Ubi jalar	1.266,00	220,40	260,00	293	4,387	794.76
d. Kacang tanah	93,00	44,40	70,20	243	713.86	85.16
e. Kedelai	1.796,00	6.273,80	4.610,00	4.326	96.48	336
f. Kacang hijau	28,00	13,10	4,00	13	3,146.16	3.04
PRODUKTIVITAS (TON/HA)						
a. Jagung	7,94	8,10	6,80	66,53		8.047
b. Ubi kayu	34,33	34,38	45,87	341,45	69.04	34.649
c. Ubi jalar	20,00	10,20	23,64	153,99	33.74	24.682
d. Kacang tanah	1,22	1,22	1,80	13,99	274.56	1.396
e. Kedelai	1,45	1,45	1,63	20,00	16.27	111.400
f. Kacang hijau	1,19	1,19	1,23	26,33	16.39	1.216

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka, 2025

Pada Tahun 2024, terjadi penurunan luas panen pada beberapa komoditas tanaman pangan, yaitu ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau. Penurunan luas panen berdampak terhadap produksi yang dihasilkan. Untuk komoditas jagung dan kedelai, penurunan luas panen dan produksi kedua komoditas tersebut terjadi karena tidak adanya program bantuan benih jagung dan kedelai dari pemerintah. Oleh karena itu, kedepannya, masyarakat perlu didorong untuk pengelolaan pertanian secara mandiri terutama untuk komoditas kedelai dimana pada tahun sebelumnya Kabupaten Tebo telah dikenal sebagai sentra pembibitan benih kedelai.



2.3.3.4 Perdagangan

Kabupaten Tebo mempunyai potensi daerah yang cukup strategis di sektor perdagangan karena merupakan daerah yang dilalui Jalan Lintas Sumatera. Melalui pengembangan sarana dan prasarana pasar berupa pasar desa (tradisional), pasar kecamatan dan pasar kota Kabupaten, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi angka pengangguran, penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah masyarakat. Jumlah Pasar Umum, Pasar Tradisional dan Kios menurut Kecamatan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2. 64

**Jumlah Pasar Umum, Pasar Tradisional dan Kios
di Kabupaten Tebo Tahun 2024**

No	Uraian	Pasar Umum	Pasar Tradisional	Toko	Kios
1	Kabupaten Tebo	4	64	2315	764
	JUMLAH	4	64	2315	764

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo, 2025

Tabel. 2. 65

**Jumlah Pasar Umum, Pasar Tradisional dan Kios
Per kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2024**

No	Kecamatan	Pasar Umum	Pasar Tradisional	Kios
1	Tebo Tengah	1	1	62
2	Tengah Ilir	-	10	-
3	Tebo Ilir	1	2	65
4	Muara Tabir	-	4	-
5	Sumay	-	6	21
6	Tebo Ulu	1	5	-
7	Serai Serumpun	-	5	-
8	Rimbo Bujang	1	6	616
9	Rimbo Ulu	-	6	-
10	Rimbo Ilir	-	5	-
11	VII Koto	-	5	-
12	VII Koto Ilir	-	5	-



JUMLAH	4	60	764

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo, 2025

Jumlah pasar umum di Kabupaten Tebo yaitu berjumlah 4 pasar dan pasar tradisional berjumlah 60 pasar dan kios berjumlah 764 kios yang tersebar di 12 Kecamatan dalam Kabupaten Tebo.

Sedangkan untuk jumlah pedagang yang ada di Kabupaten Tebo tahun 2024 sebanyak 7.032 orang yang terdiri dari pedagang besar sebanyak 433 orang, pedagang menengah sebanyak 5.410 dan pedagang kecil sebanyak 1189 orang yang tersebar di 12 kecamatan dalam Kabupaten Tebo. Jumlah Pedagang menurut Kecamatan di Kabupaten Tebo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2. 66

Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2024

No	Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Kecil	Pedagang Menengah
1	Tebo Ilir	45	503	117
2	Muara Tabir	23	310	67
3	Tebo Tengah	84	724	205
4	Sumay	12	162	40
5	Tengah Ilir	22	284	65
6	Rimbo Bujang	105	1.312	315
7	Rimbo Ulu	63	591	140
8	Rimbo Ilir	18	400	72
9	Tebo Ulu	15	450	55
10	VII Koto	12	145	35
11	Serai Serumpun	8	127	25
12	VII Koto Ilir	26	402	53
JUMLAH		433	5.410	1.189

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo, 2025

2.3.3.5 Perindustrian

Jumlah industri kecil dan rumah tangga tahun 2024 sebanyak 2.621 unit meningkat sebanyak 281 unit dari tahun 2023 yaitu sebanyak 2.340 unit.



Data perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2. 67

IKM Kabupaten Tebo berdasarkan KBLI Tahun 2024

NO	JENIS INDUSTRI KECIL	TAHUN	
		2023	2024
1	Industri minuman (air isi ulang)	56	103
2	Industri Produksi Sampah Organik	2	2
3	Industri Kerajinan	64	64
4	Industri barang dari logam (pandai besi dan teralis)	137	143
5	Industri makanan ringan dan kue basah	640	850
6	Industri Obat Tradisional (jamu)	27	45
7	Industri batik	10	8
8	Industri bahan galian bukan logam (batu bata dan genteng)	42	46
9	Industri penggilingan padi	66	65
10	Industri tempe, Tahu kedelai	382	398
11	Industri bahan bangunan & perabotan kayu (Meubel, kusen, dan daun pintu)	369	381
12	Industri pakaian Jadi (Konveksi dari Tekstil)	317	402
13	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	36	42
14	Industri Pertenunan (Songket)	3	2
15	Industri lainnya (sablon, percetakan dan reklame)	0	1
16	Industri bahan bangunan dari semen (conblock, gorong-gorong, tiang teras, genteng, semen, dan gips)	40	22
17	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu	0	34
18	Industri minuman lainnya	0	13
JUMLAH		2.340	2.621

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo, 2025

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Guna melihat kemampuan daya saing daerah maka dapat dilihat dari berbagai aspek. Adapun aspek yang dimaksud dapat berkenaan dengan kemampuan ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing infrastruktur dan daya saing investasi. Berikut beberapa informasi yang berkenaan dengan kemampuan daya saing daerah Kabupaten Tebo.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan



beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan Hukum *Engel/Engel Law* bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Pada tahun 2024 rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita sehari Kabupaten Tebo adalah Rp.1.065.590,-

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk kelompok makanan adalah sebesar Rp.696.199,- terbesar adalah pengeluaran untuk jenis makanan dan minuman jadi yaitu mencapai 13,25%. Selanjutnya diikuti pengeluaran untuk rokok yang mencapai 9,47%.

Tabel. 2. 68

**Pengeluaran Per kapita Menurut Kelompok Makanan
di Kabupaten Tebo Tahun 2018-2024**

No	Kelompok Makanan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	77.515,00	67.741,04	75.120,00	68.649,00	78.213	94.864
2	Umbi-umbian	7.010,00	6.891,22	7.930,00	7.965,00	8.175	8.167
3	Ikan	45.649,00	4.818,03	50.873,00	53.299,00	53.106	60.043
4	Daging	22.515,00	22.152,62	25.506,00	29.334,00	26.217	27.746



No	Kelompok Makanan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Telur dan susu	25.691,00	27.750,14	23.812,00	27.980,00	26.970	28.554
6	Sayur-sayuran	53.615,00	62.257,97	66.071,00	63.606,00	67.709	83.993
7	Kacang-kacangan	9.400,00	10.215,88	9.536,00	10.670,00	10.766	10.331
8	Buah-buahan	19.060,00	25.981,06	21.164,00	29.137,00	24.260	47.714
9	Minyak dan lemak	18.416,00	16.831,92	20.119,00	27.000,00	21.409	23.974
10	Bahan minuman	16.653,00	18.291,10	18.508,00	18.921,00	19.998	22.420
11	Bumbu-bumbuan	9.214,00	9.468,50	9.779,00	12.303,00	9.026	10.879
12	Konsumsi Lainnya	9.960,00	11.389,44	11.515,00	11.934,00	10.980	12.660
13	Makanan dan minuman jadi	140.719,00	156.102,52	133.120,00	137.428,00	133.008	154.476
14	Rokok	61.599,00	77.241,56	76.605,00	78.769,00	90.747	110.378
Jumlah		517.014,00	560.732,98	549.658,00	576.994,00	580.584	696,199

Sumber: Tebo Dalam Angka, 2025

Pengeluaran konsumsi non makanan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.469.257 perkapita per bulan dengan pengeluaran terbesar adalah pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 23,69%.

Tabel. 2. 69

Pengeluaran Per kapita Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Tebo Tahun 2019-2024

No	Kelompok Bukan Makanan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perumahan, dan fasilitas rumah tangga	209.634,00	233.240,67	237.186,00	234.266,00	266.939	276.120
2	Aneka Barang dan jasa	79.985,00	93.379,43	90.983,00	86.490,00	88.176	86.819
3	Biaya Pendidikan	-	-	-	-	-	
4	Biaya Kesehatan	-	-	-	-	-	
5	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	31.832,00	33.841,03	33.051,00	33.728,00	32.642	36.724
6	Barang yang tahan lama	34.880,00	48.867,63	61.001,00	92.634,00	27.273	20.740



No	Kelompok Bukan Makanan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Pajak , pungutan dan premi asuransi	22.348,00	26.415,46	29.185,00	30.766,00	33.635	33.707
8	Keperluan pesta dan upacara	11.290,00	14.541,53	10.298,00	10.701,00	18.610	15.148
TOTAL		389.969,00	450.285,75	461.703,00	488.596,00	467.275	469.257

Sumber : Tebo Dalam Angka, 2025

b. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), dimana NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Sejak Januari 2021 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2012 menjadi tahun dasar 2018. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian di pedesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dalam penghitungan NTP, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya. Perkembangan NTP Provinsi Jambi tahun 2018-2024 dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel. 2. 70

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi Tahun 2018-2024

No	Subsektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani		98,58	107,60	98,02	140,63	138,11	156,14
1.	Tanaman pangan	100,12	100,49	100,11	102,96	104,32	104,97
2.	Hortikultura	91,14	109,62	135,26	105,46	112,41	129,98
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	99,05	97,54	100,92	151,31	147,55	169,59
4.	Peternakan	101,24	105,30	112,82	97,68	94,59	93,11
5.	Perikanan	105,80	107,31	107,11	109,62	107,07	101,27
5.1.	Perikanan tangkap	114,72	98,57	99,57	111,18	108,13	101,18



No	Subsektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.2.	Perikanan Budidaya	96,18	107,60	127,51	104,26	103,80	101,60

Sumber: Berita Resmi Statistik Perkembangan Nilai Tukar Petani Prov. Jambi Desember 2025

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tebo berperan penting dalam menentukan daya saing. Pada Tahun 2024 panjang jalan nasional dalam kondisi baik mencapai 103,10 Km (92,05%) dari total 112 km, jalan provinsi dalam kondisi baik mencapai 132,80 Km (96,23%) dari total 138 km, sedangkan jalan Kabupaten pada tahun 2024 dalam kondisi baik mencapai 340,02 km (23,00%) dari total 1.443,33 km. Sedangkan untuk jembatan hingga tahun 2024 telah terbangun sebanyak 48 unit dengan panjang 1.391,00 m.

Listrik sebagai sumber energi, mempunyai peran yang penting dalam pengembangan daerah. Pengguna listrik di Kabupaten Tebo terus meningkat seiring dengan laju pengembangan pembangunan dan makin luasnya daerah yang terjangkau jaringan listrik, sampai tahun 2016 semua desa/kelurahan dalam Kabupaten Tebo telah teraliri listrik dan hanya tinggal beberapa Dusun yang belum teraliri listrik. Pada tahun 2017 pembangunan Gardu induk Kabupaten Tebo dan dilengkapi dengan fasilitas Kantor yang mulai dikerjakan sejak Tahun 2015 telah mulai dioperasikan. Dengan dioperasikannya Gardu Induk berkapasitas 60 Megawatt ini, maka kebutuhan listrik Kabupaten Tebo Surplus sebesar 18 Megawatt.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Guna menarik minat investor untuk berinvestasi diperlukan upaya untuk memperbaiki iklim investasi dimana hal ini merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh pemerintah suatu daerah. Dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif akan memungkinkan suatu daerah untuk memacu pertumbuhan ekonominya.

Untuk menilai daya saing suatu daerah didasarkan pada 5 (lima) faktor utama yaitu faktor kelembagaan, faktor keamanan, politik, sosial dan budaya, faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur fisik.



Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya di Kabupaten Tebo mengindikasikan bahwa Kabupaten Tebo lebih memiliki tingkat kestabilan dalam hal keamanan dan politik, serta kultur sosial budaya yang lebih kondusif terhadap investor, baik yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun dari luar daerah. Heterogenitas masyarakat dapat terlihat pada beragamnya suku bangsa yang didominasi oleh suku Jawa dan suku Melayu Jambi. Besarnya proporsi penduduk migran merupakan indikasi keterbukaan daerah Tebo terhadap semua pendatang yang bermaksud baik.

Faktor ekonomi daerah terdiri dari tiga variabel yaitu daya beli masyarakat, ekonomi daerah dan tingkat investasi. Untuk daya beli masyarakat di Kabupaten Tebo tergolong masih rendah, hal ini disebabkan karena penurunan harga komoditas yang menjadi andalan masyarakat yaitu Karet dan Sawit, sedangkan tingkat investasi di sini cukup baik sejalan dengan posisi Kabupaten Tebo yang strategis. Berdasarkan data dari BPS Kab. Tebo, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo pada tahun 2024 mencapai 3.97%. Pertumbuhan tersebut melambat dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2023 yaitu 4,50% atau (-11.78) %, namun demikian, secara persentase capaian tersebut masih termasuk dalam kategori **Baik**. Sektor dengan sumbangan terbesar atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 56.73% dari total pertumbuhan regional. Faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo antara lain melemahnya daya beli masyarakat sebagai akibat terjadinya inflasi, hingga penurunan laju pertumbuhan sektor pertambangan yang berkontraksi sebesar -19,74%, dan faktor lain yakni meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tebo yang mengalami kenaikan drastis pada tahun 2024.

Data terbaru mencatat angka pengangguran mencapai 2,50 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.71 persen atau meningkat sebesar 1.46 persen. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan beberapa perusahaan yang merumahkan karyawan



yang disebabkan karena perusahaan tidak beroperasi lagi dan habisnya masa kontrak karyawan di perusahaan. Kebijakan tersebut berpotensi menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Tebo.

Faktor Infrastruktur Fisik merupakan faktor yang menjadi pertimbangan yang cukup penting dalam berinvestasi. Dukungan infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga akan semakin besar. Dua variabel utama dalam menunjang infrastruktur fisik adalah variabel ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik. Untuk Kabupaten Tebo, kondisi sarana transportasi di Kabupaten Tebo masih didominasi oleh transportasi darat walaupun Kabupaten Tebo juga mempunyai sungai-sungai yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi.

Faktor Kelembagaan terdiri dari variabel kepastian hukum, kebijakan dan peraturan daerah, aparatur dan pelayanan, serta kepemimpinan lokal. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kegiatan investasi swasta antara lain penegakan supremasi hukum dan penataan peraturan daerah, peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan kepada masyarakat melalui penggabungan instansi/lembaga pemberi izin usaha pelayanan satu pintu, serta adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo dalam memberikan pelayanan kepada investor mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.

Faktor Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor penting dalam penciptaan iklim investasi. Pertambahan penduduk membuat ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Tebo cukup tinggi.

Untuk ketenagakerjaan, pada tahun 2023, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Tebo untuk kelompok umur 15 sampai dengan 55 tahun berjumlah 175.644 orang atau 49,44% dari total penduduk.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Jumlah kelompok penduduk usia kerja (PUK) merupakan tulang punggung perekonomian yang secara produktif melakukan aktivitas



ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Sedang kelompok penduduk di luar usia kerja (PDUK) merupakan penduduk yang tidak produktif untuk melakukan aktivitas ekonomi. Berdasarkan PUK dan PDUK dapat diketahui tingkat beban/tanggungan penduduk (*dependency ratio*). *Dependency ratio* adalah merupakan perbandingan jumlah penduduk di luar usia kerja (PDUK) dengan jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau variabel yang memperlihatkan perbandingan antara banyaknya penduduk tidak produktif dengan penduduk produktif. Gambaran Penduduk usia kerja dan penduduk diluar usia kerja serta *dependency ratio* penduduk Kabupaten Tebo seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 2. 71

**Perkembangan PUK, PDUK dan Rasio Beban Penduduk
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2024**

KELOMPOK USIA	TAHUN							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 14 Tahun	97.3 38	97.5 04	97.5 86	89.2 31	89.0 95	90.2 26	94.3 35	94,9 44
15 – 64 Tahun	231. 724	236. 500	241. 228	234. 202	236. 514	243. 714	238. 990	241, 643
65 + Tahun	13.9 41	14.7 56	15.6 71	14.2 36	15.2 59	16.2 94	17.4 36	18,6 75
Jumlah	343. 003	348. 760	354, 485	337. 669	340. 868	350. 234	350. 761	355, 262
DEPENDENC Y RATIO (RASIO KETERGANT UNGAN)	48,0 2 %	47,4 6 %	47,0 3%	44,1 8%	44,1 2%	43,7 1%	46,7 6 %	47,0 2

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, data diolah, 2025

Angka *dependency ratio* penduduk Kabupaten Tebo terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 48,63 % dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 43,71 %.namun Kembali naik pada tahun 2024 sebesar 47,02 %. Angka *Dependency ratio* sebesar ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban menghidupi 47 orang penduduk usia tidak produktif.

Tingkat kemampuan daya saing daerah Kabupaten Tebo dari aspek sumber daya manusia dapat juga dilihat dari kemampuannya meningkatkan kesempatan kerja atau mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini



dikarenakan, semakin tinggi daya saing suatu daerah maka akan semakin tumbuh berkembang unit ekonomi. Pada akhirnya kondisi ini akan meningkatkan kesempatan kerja atau dalam artian akan mengurangi tingkat pengangguran.

Pengangguran terbuka yang lebih besar merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi daerah. Penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran terbuka adalah salah satu sasaran pembangunan ekonomi dan sekaligus menjadi instrumen utama dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Secara makro ekonomi, perkembangan kesempatan kerja nasional dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional demikian juga untuk skala daerah (*regional*) perkembangan kesempatan kerja di daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah kesempatan kerja yang tersedia dalam kurun waktu tertentu merupakan cerminan dari daya dukung ekonomi dalam penggunaan sumberdaya manusia yang tersedia.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Kinerja RPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2024 meliputi seluruh program dan kegiatan. Evaluasi ini menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2024 terhadap RPD.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2024 ini mencakup realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPD, dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi



untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tebo.

Evaluasi kinerja yang digunakan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan menggunakan Tabel E.1 sebagai berikut:

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KETERANGAN
91% < 100%	Sangat Tinggi (ST)	Pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
76% < 90%	Tinggi (T)	
66% < 75%	Sedang (S)	Pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
51% < 65%	Rendah (R)	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih dibawah persyaratan minima/ pencapaian kinerja yang diharapkan
< 50%	Sangat Rendah (SR)	

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tebo diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024, dibandingkan dengan target tahun 2024. Dengan memperhatikan aspek-aspek yang sudah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2024. Berikut evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 terhadap target RKPD Tahun 2024 berdasarkan Tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026.

Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tebo yang merupakan Indikator Kinerja Utama Makro sebagai bentuk akuntabilitas kinerja terhadap ketercapaian penyelenggaraan fungsi semua urusan. Melalui telaahan terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan hasil pengendalian yang dilakukan secara berkala serta memperhatikan isu-isu nasional dan global maka diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terdiri dari **123 program, 233 kegiatan dan 558 sub kegiatan** yang



dilaksanakan oleh Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2024.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo berdasarkan tingkat capaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tebo.

Secara umum rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian IK} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala ini juga termasuk ke dalam skala pengukuran kualitatif. Ia menggunakan urutan tertentu guna memberi peringkat, dan efektif untuk data yang memerlukan urutan ketika melakukan evaluasi. Skala ordinal mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui, sebagai mana tabel berikut:

Tabel. 2. 72
Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>95-100	Sangat Baik (SB)
2	>80-95	Baik (B)
3	>55-80	Cukup (C)
4	>0-55	Kurang (K)

Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran capaian kinerja tertinggi dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan Target yang tercantum dalam RPD Kabupaten Tebo 2023-2026, pada Tahun 2024



terdapat 6 (enam) IKU Kabupaten yang keberhasilan kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2. 73

**Pengukuran Indikator Kinerja Makro Pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	2023		2024		Perbandingan Capaian 2023-2024	Prediket Capaian 2024
			2023	Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(6-4)}{4 \times 100}$	9=7
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70.63	69.95	72.67	103.89	2.89	Sangat Baik
2	Tingkat Kemiskinan	%	6.46	5.97	6.12	97.55	2.56	Baik
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1.71	2.61	2.50	104.40	-46,20	Sangat Baik
4	Indeks Gini	Poin	0.240	0.280	0.257	108.95	-7,08	Sangat Baik
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4.50	4.71	3.97	84.29	-11,78	Baik
6	PDRB Per Kapita	Juta	60.39	52.75	67.39	127.75	11.59	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Tahun 2024						104,47		Sangat Baik

Sumber : RPD 2023-2026, RKPD 2024 DAN DATA BPS 2025

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat terlihat bahwa secara rata-rata capaian kinerja Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Tebo pada Tahun 2024 terhadap target RPD 2023-2026 termasuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan angka rata-rata capaian sebesar **104,47 persen**. Dari 6 indikator makro, 3 indikator diantaranya capaiannya melebihi target.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selama tiga tahun terakhir angka IPM Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tebo semakin baik. Sesuai berita resmi Statistik BPS Kab. Tebo Desember 2024 pada tahun 2024 IPM Kabupaten Tebo sebesar 72,67, meningkat 0,68 poin (0,94 persen) dibanding tahun 2023, yakni 71,99, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2. 74

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tebo



di Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		2022	2023	2024
1	PROVINSI JAMBI	73,11	73,73	74,36
2	KERINCI	73,24	73,77	74,33
3	MERANGIN	70,98	71,81	72,65
4	SAROLANGUN	72,66	73,05	73,76
5	BATANGHARI	71,99	72,50	73,12
6	MUARO JAMBI	71,41	72,26	73,11
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	68,96	69,85	70,77
8	TANJUNG JABUNG BARAT	70,88	71,44	72,01
9	TEBO	71,14	71,99	72,67
10	BUNGO	73,08	73,57	74,44
11	KOTA JAMBI	80,38	80,93	81,77
12	KOTA SUNGAI PENUH	76,75	77,20	77,93

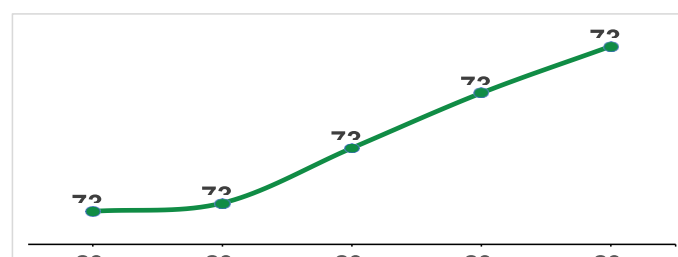
Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Tebo Desember 2024

Peningkatan IPM Kabupaten Tebo tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan pada dimensi standar hidup layak lebih cepat dari dimensi lainnya.

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (UHH)

UHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,60 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,20 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Provinsi Jambi adalah 73,02 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 73,62 Tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,17 tahun (0,23 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,20 persen per tahun).

Gambar 2.2
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Kabupaten Tebo (tahun) 2020–2024





a. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu HLS penduduk usia 7 tahun ke atas dan RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Tebo rata-rata meningkat 0,64 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,46 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun 2023, sedangkan RLS meningkat 0,10 tahun (1,24 persen).

b. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada Tahun 2024, Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan masyarakat Tebo mencapai Rp11,415 juta. Capaian ini meningkat 521 ribu rupiah (4,56 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 1,57 persen per tahun.

Tabel. 2. 75

**Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tebo 2022-2024**

Indikator	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,25	73,45	73,62
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,65	12,92	12.93
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,70	7,94	8.04
Pengeluaran/Kapita/Tahun (ribu rupiah)	10.725	10.894	11,415
IPM	71,14	71,99	72,67

Sumber : BPS Kab. Tebo Tahun 2025

1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Selama periode Tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tebo berkurang sebanyak 990 jiwa, dari 23.470 jiwa pada Tahun



2023 menjadi 22.480 jiwa pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 4,22 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan apabila dilihat dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Tebo, dalam rentang waktu satu tahun terjadi penurunan sebesar 0,34 persen dari 6,46 persen pada tahun 2023 turun menjadi 6,12 persen pada Tahun 2024. Penurunan angka kemiskinan ini dianggap sebagai hasil dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penurunan ini juga harus dilihat dalam konteks peningkatan garis kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut. Garis kemiskinan di Kabupaten Tebo Tahun 2024 naik dari Rp 523.310 per kapita per bulan pada Tahun 2023 menjadi Rp 590.573 per kapita per bulan di Tahun 2024. Peningkatan garis kemiskinan ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga barang pokok di daerah tersebut, yang terutama dipengaruhi oleh inflasi.

Penetapan garis kemiskinan ini berdasarkan harga barang pokok di daerah tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tebo memang mengalami kenaikan harga barang, terutama saat inflasi. Meskipun ada penurunan persentase angka kemiskinan, masyarakat di Kabupaten Tebo tetap harus menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya hidup yang tercermin dari kenaikan garis kemiskinan. Hal ini menuntut pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menstabilkan harga kebutuhan pokok.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten, maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Berikut tabel tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tebo menurut Provinsi Tahun 2024.



Tabel. 2. 76

**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi,
Agustus 2023–Agustus 2024**

Kabupaten/Kota	Agustus 2023	Agustus 2024
	persen	persen
1	2	3
Kerinci	2,48	2,51
Merangin	4,35	4,18
Sarolangun	5,09	5,03
Batanghari	3,85	4,49
Muaro Jambi	5,40	5,27
Tanjung Jabung Timur	1,67	2,06
Tanjung Jabung Barat	2,95	3,20
Tebo	1,71	2,50
Bungo	5,23	4,67
Kota Jambi	8,27	7,38
Kota Sungai Penuh	3,80	4,30
Provinsi Jambi	4,53	4,48

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Tebo Desember 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tebo mengalami kenaikan drastis pada tahun 2024. Data terbaru mencatat angka pengangguran mencapai 1.93 persen, meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya di angka 1.71 persen. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan beberapa perusahaan yang merumahkan karyawan yang disebabkan karena perusahaan tidak beroperasi lagi dan habisnya masa kontrak karyawan di perusahaan. Kebijakan tersebut berpotensi menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Tebo.

3. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks Gini Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebesar 0,257 atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 yang berada di angka 0,24 atau meningkat sebesar 0,017 poin. Dengan angka tersebut, Kabupaten Tebo menjadi kabupaten dengan angka indeks gini terendah kedua setelah Merangin bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Jambi. Dari target yang ditetapkan



Tahun 2024 di angka 0,280 target tersebut tercapai dengan persentase capaian sebesar 108,95 Persen.

Tabel. 2. 77

Indeks Gini Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	2024
1	Kerinci	0.293
2	Merangin	0.241
3	Sarolangun	0.286
4	Batang Hari	0.312
5	Muaro Jambi	0.295
6	Tanjab Timur	0.305
7	Tanjab Barat	0.292
8	Tebo	0.257
9	Bungo	0.266
10	Kota Jambi	0.395
11	Sungai Penuh	0.305

Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2025

Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, maka Pemerintah Kabupaten Tebo meningkatkan kualitas infrastruktur dasar secara menyeluruh, yang diharapkan pembangunan merata tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah yang masih terpencil.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Berdasarkan data dari BPS Kab. Tebo, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo pada tahun 2024 mencapai 3.97%. Pertumbuhan tersebut melambat dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2023 yaitu 4,50% atau (-11.78) %, namun demikian, secara persentase capaian tersebut masih termasuk dalam kategori **Baik**. Sektor dengan sumbangan terbesar atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 56.73% dari total pertumbuhan regional. Faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo antara lain melemahnya daya beli masyarakat sebagai akibat terjadinya inflasi, hingga penurunan laju pertumbuhan sektor pertambangan yang berkontraksi sebesar -19,74%, dan faktor lain yakni meningkatnya tingkat pengangguran



terbuka di Kabupaten Tebo yang mengalami kenaikan drastis pada tahun 2024.

Data terbaru mencatat angka pengangguran mencapai 2,50 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.71 persen atau meningkat sebesar 1.46 persen. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan beberapa perusahaan yang merumahkan karyawan yang disebabkan karena perusahaan tidak beroperasi lagi dan habisnya masa kontrak karyawan di perusahaan. Kebijakan tersebut berpotensi menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Tebo.

Tabel. 2. 78

Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen), 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,41	3,57	2,57	4,51	6,70
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,53	8,71	41,55	-0,06	-19,74
C	Industri Pengolahan	-0,72	3,76	2,05	5,88	8,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,59	5,62	7,27	12,62	10,29
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,09	7,52	1,58	5,63	9,53
F	Konstruksi	-7,70	5,26	0,01	5,12	5,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,60	5,79	5,28	9,28	9,59
H	Transportasi dan Pergudangan	-5,39	8,10	8,52	7,33	8,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,48	5,42	7,50	8,60	6,68
J	Informasi dan Komunikasi	8,78	4,10	7,74	7,44	4,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,23	3,80	0,45	0,94	2,02
L	Real Estat	0,65	1,12	5,22	3,07	1,96
M,N	Jasa Perusahaan	-4,76	3,56	8,41	14,21	10,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,65	1,39	0,58	2,53	7,70
P	Jasa Pendidikan	3,78	2,60	1,17	3,46	9,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/	7,21	9,28	-0,53	4,77	7,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-3,32	0,73	4,84	2,61	7,55
	Produk Domestik Regional Bruto	-0,03	4,29	6,29	4,50	3,97

Sumber : Kabupaten Tebo Dalam Angka tahun 2025

6. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang berperan penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Semakin meningkat PDRB setiap tahunnya, mencerminkan semakin pesat pula arus perekonomian di suatu wilayah tersebut. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada



tahun tersebut atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar yang biasa disebut dengan harga konstan.

Perhitungan nilai PDRB dengan harga berlaku disebut dengan nilai PDRB nominal, sedangkan perhitungan PDRB dengan harga konstan disebut dengan nilai PDRB Riil. PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga berlaku tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 23.908.920,00 juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga konstan 2024 adalah sebesar Rp. 12.234.470,00 juta. Perkembangan PDRB Kabupaten Tebo disampaikan pada tabel berikut:

Tabel. 2. 79

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2020-2024**

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,680.30	9,114.00	10,131.40	11,167.00	13,563.00
B	Pertambangan dan Penggalian	578.9	858.2	2,070.50	1,749.70	1,184.60
C	Industri Pengolahan	916.1	1,018.60	1,126.00	1,238.60	1,461.60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.3	14	15.9	18.4	20.9
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.4	7	7.5	8.6	10.1
F	Konstruksi	1,048.40	1,130.40	1,158.10	1,258.10	1,337.60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,565.90	1,749.00	1,948.20	2,264.10	2,584.70
H	Transportasi dan Pergudangan	192	212.7	244	285.7	314.3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55.2	55.2	60.1	65.8	70.3
J	Informasi dan Komunikasi	637.7	665.1	716.9	766.6	807.3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	207.3	226.3	243.2	251.1	260.8
L	Real Estat	306.4	317.8	351.6	368	381.3
M,N	Jasa Perusahaan	8.9	9.4	11	13.2	15.9



Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
1		2	3	4	5	6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	741.5	751.9	758	787.7	876.9
P	Jasa Pendidikan	377.5	392.4	406	429.7	477.3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	165.4	185.6	187.3	202.4	221
R,S,T,U	Jasa Lainnya	239.8	241.8	263.4	290.4	321.1
	Produk Domestik Regional Bruto	14,738.00	16,949.30	19,699.00	21,165.30	23,908.90

Sumber : Kabupaten Tebo Dalam Angka tahun 2025

Tabel. 2. 80

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024*
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,315.20	5,505.20	5,646.90	5,901.50	6,296.70
B	Pertambangan dan Penggalian	861.3	936.3	1,325.30	1,324.0	1,063.00
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	638.1	662.1	675.7	715.4	777.4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.6	7	7.6	8.5	9.4
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.4	4.8	4.8	5.1	5.6
F	Konstruksi	709.6	746.9	747	785.3	832.1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	833.6	881.9	928.4	1,014.50	1,111.80
H	Transportasi dan Pergudangan	145.8	157.6	171	183.5	199.9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37.4	39.4	42.4	46	49.1
J	Informasi dan Komunikasi	426.4	443.9	478.2	513.8	538.1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	132.5	137.5	138	138.8	141.6
L	Real Estat	191.8	193.9	204	210.3	214.4
M,N	Jasa Perusahaan	5.5	5.7	6.2	7.1	7.8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	320.9	325.4	327.3	335.6	361.4
P	Jasa Pendidikan	236.7	242.8	245.7	254.2	279.4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	105.3	115.1	114.5	119.9	128.6
R,S,T,U	Jasa Lainnya	187.2	188.5	197.7	202.8	218.1
	Produk Domestik Regional Bruto	10,158.20	10,594.00	11,260.50	11,766.80	12,234.50

Sumber : Kabupaten Tebo Dalam Angka tahun 2025

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah



Capaian Kinerja Perangkat Daerah di ukur berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam rencana strategis masing-masing perangkat daerah, dimana indikator sasaran tersebut harus selaras untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Berikut ini Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024.

Tabel. 2. 81

**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024**

N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas SDM yang Sehat, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	1	Indeks Pendidikan		0.608	0.63	103.13
			2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.62	8.04	105.51
			3	Angka Harapan Sekolah	Tahun	12.67	12.93	102.05
			4	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	98.04	98.04	100.00
2	Dinas Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Masyarakat	5	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.07	70.69	100.88
			6	Angka Kematian Bayi		2.50	11.72	268.80
			7	Angka Kematian Ibu Melahirkan		100.00	128.27	71.73
			8	Angka Kesakitan		13.00	12.82	101.38
3	RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat yang Memanfaatkan Rumah Sakit	9	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	60.25	56.86	94.37
			10	Nett Death Rate	%	0.019	0.015	119.65
			11	Indeks Kepuasan Masyarakat		78.65	76.84	97.69



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah	1 2	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	48.43	49.35	101.90
			1 3	Penambahan panjang jalan (Km)	km	3.50	37.70	1077.17
			1 4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan air minum layak	%	67.63	69.33	102.51
			1 5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak	%	88.21	88.26	100.06
			1 6	Jumlah Penambahan Prasarana Layanan Publik	%	5.00	5.00	100.00
			1 7	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	66.58	76.43	114.79
			1 8	Persentase daerah potensi banjir yang ditangani	%	0.50	0.72	144.00
			1 9	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang	%	53.85	33.00	61.28
			2 0	Persentase penambahan tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	50.00	77.00	154.00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Menurunnya Luasan Pemukiman Kumuh	2 1	Luasan kawasan kumuh yang ditangani	Ha	2.00	0.60	30.00
			2 2	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	Unit	50.00	45.00	90.00



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
		Meningkatnya Fasilitas Legalitas Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan atas Tanah	23	Persentase Penambahan Tanah Aset Milik Pemkab yang bersertifikat	%	50.00	-	0.00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Menurunnnya Laju Pertumbuhan Penduduk	24	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.35	1.44	93.33
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Wilayah Tangguh Bencana	25	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	%	1.00	1.00	100.00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan Kebakaran	26	Persentase Bangunan Perkantoran yang memiliki alat proteksi kebakaran	%	65.00	59.54	91.60
			27	Persentase kegiatan sosialisasi/ penyuluhan pencegahan kebakaran	%	100.00	100.00	100.00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	28	Persentase kebakaran yang tertangani memenuhi waktu tanggap (Response Time)	%	90.00	88.89	98.77
			29	Persentase sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai sesuai standar	%	90.00	80.00	88.89
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Menurunnnya Pelanggaran	30	Persentase penegakan Perda	%	98.00	98	100.00



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Daerah						
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	31	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	%	100.00	98	98.00
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Berkualitas dan Derdaya Saing	32	Skor Kabupaten Layak Anak		700.00	657.87	93.98
		Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	33	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		51.76	51.23	98.98
			34	Persentase PPKS yang tertangani	%	46.00	47.83	103.98
			35	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	36.00	25.59	71.08
11	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Unggulan Daerah	36	Produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun (tanaman pangan)	Ton	45,000.00	29,516.61	65.59
			37	Produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun (hortikultura)	Ton	8,472.54	14,150.56	167.02



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
			38	Persentase ketersediaan pangan	%	95.00	95.00	100.00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Unggulan Daerah	39	Persentase ketersediaan pangan	%	95.00	95.00	100.00
			40	Persentase Peningkatan Produktivitas Budidaya Perikanan	%	677.16	677.16	100.00
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	41	Persentase Peningkatan Komoditi unggulan tanaman perkebunan	%	0.25	0.23	92.00
			42	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	1.75	1.6	91.43
			43	Persentase Peningkatan Produktivitas Budidaya Perikanan	%	677.16	677.16	100.00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan serta Pengelolaan Sampah	44	Indeks Kualitas Air	poin	52.90	65.00	122,87
			45	Indeks Kualitas udara	poin	88.92	93.76	105,44
			46	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	49.02	42.98	87.68
			47	Persentase Pengelolaan Sampah	%	7.00	21.93	313,29
		Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan	48	Persentase Layanan Jaringan Distribusi transportasi Darat	%	70.00	87.50	125
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi	49	Persentase Keselamatan dan Keamanan Transportasi	%	85.00	65.77	77.38
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	50	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kependudukan		88.00	85.69	97.38



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
		si Kependudukan dan Pencatatan Sipil		dan pencatatan sipil				
			51	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	81.00	84.58	104.42
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Peran Posyandu Desa	52	Persentase kader posyandu yang aktif	%	75.00	75.00	100.00
		Meningkatkan Kelompok Binaan PKK	53	Persentase PKK yang dibina	%	82.00	85.00	103.66
		Meningkatnya Pemanfaatan TTG	54	Jumlah peralatan TTG yang dihasilkan	Unit	11.00	10.00	90.91
		Meningkatnya Jumlah Bumdes yang Menghasilkan Pades	55	Persentase BUMDES yang menghasilkan PADes.	%	60.00	57.00	95.00
		Meningkatnya Jumlah Pasar Desa yang Berkembang	56	Persentase Pasar desa yang berkembang	%	65.00	65.00	100.00
		Terbentuknya Kawasan Pedesaan	57	Persentase kawasan pedesaan yang terbentuk	%	35.00	35.00	100.00
		Terselenggaranya Sosialisasi Bagi Aparatur Pemerintahan Desa	58	Persentase perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	%	40.00	40.00	100.00
		Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	59	Persentase kepala desa yang terpilih	%	40.00	40.00	100.00
		Terselenggaranya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	60	Persentase perangkat desa yang ikut pelatihan	%	55.00	55.00	100.00



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, Penyebarluasan Informasi dan Keamanan Komunikasi dan Informasi	61 Persentase Layanan Publik Yang di selenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	100.00	100.00	100.00
			62 Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Kominfo	%	100.00	100.00	100.00
			63 Persentase Desiminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat Kabuapten Tebo	%	100.00	68.13	68.13
			64 Persentase Pengamanan Informasi Daerah	%	100.00	35.00	35.00
		Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah	65 Persentase Statistik Sektoral	%	100.00	70.00	70.00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Jumlah Investor yang Berinvestasi	66 Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	5.66	158.29	2,796.64
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	67 Persentase Pengaduan Bidang Perizinan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	100.00
			68 Persentase Izin yang Diterbitkan	%	96.00	99.55	103.70
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	69 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3	96.76	3225.33



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	70 Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	%	2	75	3750.00
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa dan pariwisata	71 Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	2	14.61	730.50
			72 pertumbuhan wira usaha muda	%	3	9.24	308.00
			73 Rata-rata lama kunjungan	Hari	1	1	100.00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	74 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	44.61%	62.97%	141.16
		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baik dan Benar	75 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik dan benar	%	20%	20%	100.00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM	Meningkatnya IKM yang Naik Skala Usaha	76 Persentase IKM yang naik skala usaha	%	2.25	5.39	239.56
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	77 Persentase Barang yang memenuhi standar kesehatan dan halal	%	2.43	2.00	82.30
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	78 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	1.43	1.59	111.19
		Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan	79 Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	52	78	150.00



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
		Hubungan Industrial						
		Meningkat nya Pendapata n Masyaraka t	8 0	Persentase Koperasi yang Aktif yang Melakukan RAT	%	45.00	22.00	48.89
			8 1	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	%	0.19	0.23	121.05
2 2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si	Meningkat nya Produktivit as Tenaga Kerja	8 2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	1.43	1.59	111.19
		Meningkat nya Penyelesai an Perselisiha n Hubungan Industrial	8 3	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	52	78	150.000
2 3	Sekretariat Daerah	Meningkat nya Kinerja Penyeleng garaan Pemerinta han Daerah	8 4	Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	2.00	5.00	250.00
		Meningkat nya Kinerja Penyeleng garaan Pemerinta han Daerah	8 5	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Level	1.70	n/a	
2 4	Sekretariat DPRD	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	8 6	Persentase prolegda yang berhasil	%	0.70	0.70	100.00
2 5	Badan Perencanaa n Pembangu nan Daerah dan Penelitian, Pengemban gan	Meningkat nya Kinerja Perencana an Daerah	8 7	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	%	91.75	117.70	128.29
		Meningkat nya Kinerja Perencana an	8 8	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU)	%	112.85	186.75	165.49



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
26	Badan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah				
			89	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Perangkat Daerah	%	99	99.7	100.71
		Menguatn ya Fungsi Kelitbanga n dalam Mendukun g Perencana an Daerah	90	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	65	100	153.85
			91	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	73	90.77	124.34
		Mewujudk an Kinerja dan Penatausa haan Keuangan Daerah yang Akuntabel	92	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo	(Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu)	Tepat waktu	tepat waktu	100.00
			93	Persentase serapan belanja daerah	%	92.00	92.02	100.02
			94	Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo	(Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu)	Tepat waktu	tepat waktu	100.00
		Mewujudk an Penatausa haan Barang Milik Daerah yang tertib	95	Ketepatan waktu penyusunan laporan Barang Milik Daerah (PMD)	(Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu)	tepat waktu	tepat waktu	100.00
		Meningkat kan Realisasi	96	Persentase capaian pedapatan daerah	%	99	96.43	97.40



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
		Pendapatan Daerah						
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kompetensi ASN	97	Persentase peningkatan kompetensi ASN	%	15.50	27.79	179.29
		Meningkatkan Kinerja ASN	98	Persentase capaian kinerja ASN	%	90.50	76.70	84.75
			99	Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensinya	%	80.00	80.10	100.13
28	Inspektorat	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	100	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3.21	107.03
		Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	101	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3.00	100.00
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo	102	Indeks Manajemen Risiko	angka	3.181	3.18	99.81
			103	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	angka	2.936	2.86	98.50
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penyelesaian Kasus Konflik Bermotif SARA	104	Terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama	%	80%	0	100.00
		Persentase Penurunan Konflik	105	Persentase Konflik yang terjadi dan terselesaikan	%	80%	89%	111.84



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
			1 0 6	Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	%	80%	100%	125.00
			1 0 7	Persentase kepatuhan Ormas	%	80%	84.62%	105.78
		Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih	1 0 8	Tingkat partisipasi politik masyarakat	%	70%	80.61%	100.00
3 0	Kecamatan Tebo Tengah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1 0 9	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		81.00	84.40	104.20
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	1 1 0	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	81%	100.00%	123.46
3 1	Kecamatan Tebo Ilir	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1 1 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		100.00	98.19	98.19
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	1 1 2	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100.00	98.19	98.19
3 2	Kecamatan Tebo Ulu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1 1 3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		81.00	81.00	100.00
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	1 1 4	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	81.00	81.00	100.00
3 3	Kecamatan Sumay	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1 1 5	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		84.00	84.00	100.00



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	116	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	95.00	95.00	100.00
34	Kecamatan Rimbo Bujang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	117	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		83.45	81.45	97.60
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	118	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	82.00	80.00	97.56
35	Kecamatan Rimbo Ilir	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	119	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		84.00	84.00	100.00
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	120	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	0.80	0.81	101.25
36	Kecamatan Rimbo Ulu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	121	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		84.00	84.00	100.00
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	122	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85.00	85.00	100.00
37	Kecamatan Tengah Ilir	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	123	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		84.00	84.00	100.00
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	124	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	95.00	95.00	100.00



N o.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100
38	Kecamatan Serai Serumpun	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	125	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		85	82.09	96.58
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	126	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00
39	Kecamatan VII Koto Ilir	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	127	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		100.00	90.00	90.00
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	128	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100.00	92.00	92.00
40	Kecamatan VII Koto	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	129	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		91.00	91.00	100.00
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	130	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	91.00	91.00	100.00
41	Kecamatan Muara Tabir	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	131	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		84.00	85.00	101.19
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Keluhan Masyarakat	132	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100.00	93.72	93.72
	Jumlah Rata-rata Capaian		132					86.09

Sumber : Data Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo



Tahun 2024 yang terdiri dari 41 Perangkat Daerah memiliki Rata-rata capaian Keseluruhan sebesar **86.09** persen dengan kategori **Baik**

2. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program

Capaian Kinerja Perangkat Daerah di ukur berdasarkan Program yang dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian pelaksanaan Indikator Kinerja yang terealisasi berdasarkan Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan selanjutnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Program dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel. 2. 82
Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program
Tahun Anggaran 2024

N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	BB	BB	100.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2	Persentase lembaga PAUD, SD & SMP yang terakreditasi A	%	10	10	100.00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3	Persentase standar kompetensi yang terpenuhi pada kurikulum muatan lokal	%	100	100	100.00	



No	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN	4 Persentase Izin Pendidikan yang diterbitkan	%	100	100	100.0 0	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5 Persentase pemenuhan guru tersertifikasi di masing- masing sekolah	%	63	63	100.0 0	
		PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN	6 Persentase budaya daerah yang mendapatka n HAKI	%	44	44	100.0 0	
		PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL	7 Persentase pergelaran event Budaya dari kalender event tahunan pariwisata dan budaya	%	35	35	100.0 0	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	8 Persentase pemanfaata n data dan informasi sejarah	%	65	65	100.0 0	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	9 Persentase bangunan dan situs budaya yang mendapatka n sertifikat cagar budaya	%	30	30	100.0 0	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	10 Persentase Koleksi dan SDM Permuseuma n yang dikelola	%			-	
		Jumlah Capaian					90.00	Baik



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
2	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	BB	BB		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12	Persentase Indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai lebih dari 90%	%	100.00	84.45	84.45	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13	Persentase Tenaga Kesehatan Bersertifikat Kompetensi	%	100.00	76.00	76.00	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	14	Persentase pemenuhan obat dan sarana prasarana alat kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15	Persentase penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat	%	100.00	100.00	100.00	
		Jumlah Capaian						92.09	Baik
3	RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	A	A	100.00	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17	Cakupan penduduk yang memanfaatkan RSUD	%	2.65	2.88	108.68	
		Jumlah Capaian						104.34	Sangat Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18	Predikat AKIP Perangkat Daerah					
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	66.58	76.43	114.79	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	67.63	69.33	102.51	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	21	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	88.21	88.26	100.06	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	22	Persentase kawasan/titik terbebas dari genangan	%	100	100	100	
		PROGRAM PENATAAN	23	Persentase fungsi bangunan	%	100.00	100.00	100.00	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		BANGUNAN GEDUNG		yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah					
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	24	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	48.43	49.35	101.90	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	25	Persentase kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai ketentuan	%	50.00	76.71	153.42	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	26	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	%	53.85	33.00	61.28	
		Jumlah Capaian						103.77	Sangat Baik
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27	Predikat AKIP Perangkat Daerah					
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	28	Persentase pembangunan infrastruktur pada permukiman yang tertangani	%	1,341	13,503	1,006.94	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	29	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni	%	50.00	45.00	90.00	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	30 Laporan kondisi rumah tidak layak huni yang ditangani dan Luasan kawasan kumuh yang ditangani	Dokumen	1	1.00	100.00	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	31 Cakupan kawasan yang didukung PSU baik	%	114.00	119.00	104.39	
		PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	32 Persentase tanah pemda yang tersertifikasi	%	50.00	-	-	
		Jumlah Capaian					260.26	Sangat Baik
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	33 persentase capaian Indikator Pengendalian kualitas dan kuantitas Penduduk Tk. Kabupaten Tebo (Total Fertility Rate)	%	2.25	2.34	104.00	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	34 Persentase Kepesertaan ber KB (PPM PA)	%	68.00	68.79	101.16	
			35 Persentase Kepesertaan ber KB (PPM PB)	%	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	36 Penurunan persentase angka	%	8.00	8.65	108.13	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		KELUARGA SEJAHTERA (KS)		keluarga pra sejahtera					
		Jumlah Capaian						103.32	Sangat Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	100.00	95.39	83.33	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	38	Persentase penanganan penanggulangan bencana	%	100.00	96.43	96.43	
		Jumlah Capaian						89.88	Baik
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	70.00	Na	na	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	40	Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	%	90.00	88.89	98.77	
		Jumlah Capaian						100.19	Sangat Baik
9	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	AA	AA		



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	%	100	88.08	88.08
		Jumlah Capaian					94.04	Sanga t Baik
10	Dinas Sosial, Pemberd ayaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	43	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	B	B	100.00
		PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL	44	Persentase Pemberdaya an Sosial di Masyarakat	%	47.00	38.00	80.85
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	45	Persentase Pemenuhan Kebutuhaha n Dasar Penyandang disabilitas, Lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta PMKS lainnya di luar panti	%	52.00	19.00	36.54
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	46	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Anak Terlantar dan Fakir Miskin	%	47.00	38.00	80.85
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	47	Persentase penanganan Bencana	%	42.00	47.00	111.90



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
			Alam Dan Sosial					
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	48	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terkole dengan baik	%	80.00	100.00	125.00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	49	Persentase peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif	%	35.00	8.16	23.31
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	50	Cakupan Keluarga Berkualitas Yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	%	65.00	67.00	103.08
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	51	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	100.00	106.67	106.67
		Jumlah Capaian					85.36	Baik
11	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52	Predikat AKIP Perangkat Daerah		AA	AA	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN	53	Persentase sumber daya ekonomi kemandirian pangan yang terbangun	%	100.00	100.00	100.00



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		KEMANDIRIAN PANGAN							
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	54	Skor PPH Ketersediaan	%	95.00	94.48	99.45	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	55	Peta ketahanan dan kerentanan pangan	Doku men	1	1	100.00	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	56	Total Pangan Segar asal tumbuhan (PSAT) yang bersertifikat prima 3	Komo ditas	2	2	100.00	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	57	Persentase pemanfaatan sarana pertanian	%	82.25	95.83	116.51	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	58	Total Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	48.35	47.03	97.28	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	59	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	100.00	99.73	99.73	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	60	Persentase peningkatan kapasitas SDM	%	100.00	100.00	100.00	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
				pertanian dan kelembagaan petani					
		Jumlah Capaian						101.44	Sangat Baik
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	62	Persentase sumber daya ekonomi kemandirian pangan yang terbangun	%	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	63	Skor PPH Ketersediaan	%	95.00	94.48	99.45	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	64	Peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dokumen	1	1	100.00	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	65	Total Pangan Segar asal tumbuhan (PSAT) yang bersertifikat prima 3	Komoditas	2	2	100.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	66	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	345.80	345.80	100.00	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
13		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	67	Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	677.16	677.16	100.00	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	68	Peningkatan jumlah kelompok yang dibina	%	109	109	100.00	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	69	Total konsumsi ikan perkapita/tahun	Kg/ka-pita per Tahun	33.46	33.46	100.00	
		Jumlah Capaian						99.94	Sangat Baik
	Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70	Predikat AKIP Perangkat Daerah					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	71	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	345.80	345.80	100.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	72	Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	677.16	677.16	100.00	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	73	Peningkatan jumlah kelompok yang dibina	%	109.00	109.00	100.00	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	74	Total konsumsi ikan perkapita/tahun	Kg/ka-pita per Tahun	33.46	33.46	100.00	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	7 5	Peningkatan jumlah ternak yang terinseminasi	Ekor	5,900	5,970	101.1 9
			7 6	Total ketersediaan bibit unggul	Bibit	23,00 0	23,500	102.1 7
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN	7 7	Persentase ketersediaan sarana perkebunan	%	68.00	60.00	88.24
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7 8	Persentase ternak tervaksin	%	50.00	61.25	122.5 0
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN	7 9	Persentase Pengendalia n dan Penanggulan gan bencana Perkebunan	%	74.00	80.00	108.1 1
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	8 0	Perusahaan yang mendapatka n rekomentek	Perus ahaan	0	0	-
			8 1	Perusahaan yang dibina	Perus ahaan	15	14	93.33
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	8 2	Persentase koperasi, poktan, gapoktan dan UPPB yang dibina	%	56.14	60.00	106.8 8
		Jumlah Capaian					93.50	Sanga t Baik
1 4	Dinas Lingkung an Hidup dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8 3	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predik at	BB	BB	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
	Perhubu ngan	KABUPATEN/KO TA							
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	8 4	Persentase dokumen telaah kebijakan yang telah mengakomo dir RPPLH dan KLHS Kabupaten	%	100.0 0	100.00	100.0 0	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	8 5	Persentase Pemantauan Kualitas Udara berdasarkan klaster	%	88.92	93.76	105.4 4	
			8 6	Persentase Pemantauan Kualitas Air	%	52.90	65.00	122.8 7	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	8 7	Luas Ruang Terbuka Hijau Terkelola	Ha	7.20	7.20	100.0 0	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8 8	Persentase Penanganan Limbah B3	%	70.00	70.00	100.0 0	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	8 9	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	%	100.0 0	300.00	300.0 0	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	90	Persentase Pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti	%	100.00	166.67	166.67	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	91	Cakupan pengelolaan sampah skala perkotaan	%	66,704.44	11,261.60	16.88	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	92	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	93	Cakupan pengelolaan sampah skala perkotaan	%				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	94	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%			-	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	95	Persentase Pengelolaan Pelayaran	%			-	
		Jumlah Capaian						100.99	Sangat Baik
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96	Predikat AKIP Perangkat Daerah		A	A	100.00	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
1 6	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	9 7	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	%	75.00	77.77	103.6 9	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	9 8	Persentase PD dan Lembaga yang memanfaatkan data profil kependudukan	%	75.00	77.77	103.6 9	
		Jumlah Capaian						102.4 6	Sanga t Baik
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	9 9	Predikat AKIP Perangkat Daerah		AA	AA		
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1 0 0	Persentase kerja sama desa dengan desa lainnya, lembaga keuangan, badan usaha dan swasta	%	100.0 0	100.00	100.0 0	
1 6	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1 0 1	Persentase penyelengga raan Administrasi Pemerintaha n Desa	%	100.0 0	100.00	100.0 0	
		PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1 0 2	Persentase Pemberdaya an Lembaga kemasayarak atan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	%	100.0 0	100.00	100.0 0	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		Jumlah Capaian						100.00	Sangat Baik
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103	Predikat AKIP Perangkat Daerah		100.00	95.00	90.94	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	104	Persentase informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpublikasikan kepada masyarakat	%	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	105	Persentase cakupan pengelolaan e-government	%	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	106	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik daerah dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	%	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	107	Persentase Informasi yang diamankan melalui jaringan sandi	%	100.00	100.00	100.00	
		Jumlah Capaian						98.19	Sangat Baik



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	BB	BB	100.00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	109	Persentase pemenuhan dokumen penanaman modal	%	1	1.00	100.00	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	110	Persentase Capaian Promosi Penanaman Modal	%	100.00	50.00	50.00	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	111	Persentase realisasi penerbitan perizinan dan non perizinan	%	100.00	99.56	99.56	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	112	Total pelaku usaha yang melakukan investasi	Pelaku Usaha	42.00	49.00	116.67	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	113	Persentase penerbitan perizinan berbasis sistem informasi	%	100.00	100.00	100.00	
		Jumlah Capaian						94.37	Sangat Baik
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	BB	B		



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	115 Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader yang berprestasi di tingkat provinsi	%	20.00	17.87	89.35	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	116 Persentase atlit yang berprestasi ditingkat provinsi	%	64.00	55.00	85.94	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	117 Persentase SDM kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi	%	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	118 Persentase kenaikan pengunjung objek wisata	%	11.00	15.12	137.45	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	119 Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari kalender event tahunan	%	4.00	5.00	125.00	
		Jumlah Capaian					106.29	Sangat Baik
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120 Predikat AKIP Perangkat Daerah		B predikat	B predikat	100.00	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1 2 1 Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	%	60.00 %	192.89 %	321.4 8	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1 2 2 Persentase arsip yang terkelola di jaringan informasi kearsipan (e-arsip)	%	20.00 %	20.00 %	100.0 0	
		Jumlah Capaian					173.8 3	Sanga t Baik
2 1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 2 3 Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	100.0 0	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1 2 4 Jumlah Unit Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Unit Usaha	8	8.00	100.0 0	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	1 2 5 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	7	7.00	100.0 0	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1 2 6 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Org	14	14.00	100.0 0	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PEMBERDAYAA N USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	1 2 7 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendamping anTerhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	15	15	100.0 0	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1 2 8 Persentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola	%	100	100	100.0 0	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1 2 9 Persentase ketersediaan harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100	100.0 0	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1 3 0 Persentase usaha perdagangan dengan alat ukur/timban g yang terstandar	%	100	100	100.0 0	
		PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN	1 3 1 Persentase Pameran Produk Lokal yang diikuti	%	100	100	100.0 0	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PRODUK DALAM NEGERI							
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	132	Persentase dokumen perencanaan pembangunan industri yang disusun	%	100	100	100.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	133	Persentase ketersediaan informasi industri	%	100	100	100.00	
		Jumlah Capaian						100.00	Sangat Baik
222	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134	Predikat AKIP Perangkat Daerah					
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	135	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	%	10.00	10.00	100.00	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	136	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	500.00	343.00	68.60	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	137	Persentase peningkatan harmonisasi Hubungan Industrial	%	15.00	26.00	173.33	
		Jumlah Capaian						110.48	Sangat Baik
23	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	138	Predikat AKIP		A	A	100.00	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Perangkat Daerah					
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 3 9	Persentase koordinasi kegiatan pemerintah an dan kesejahteraa n rakyat	%	100.0 0	100.00	100.0 0	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DA PEMBANGUNAN	1 4 0	Persentase koordinasi kegiatan perekonomia n dan pembanguna n	%	100.0 0	100.00	100.0 0	
		Jumlah Capaian						100.0 0	Sanga t Baik
2 4	Sekretari at DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	1 4 1	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	70.00	70.00	100.0 0	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1 4 2	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100.0 0	100.00	100.0 0	
		Jumlah Capaian						100.0 0	Sanga t Baik
2 5	Badan Perenca naan Pemban gunan Daerah dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	1 4 3	Predikat AKIP Perangkat Daerah		A	A	100.0 0	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
	Penelitian, Pengembangan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1 4 4 Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	%	97.78	96.03	98.21	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 4 5 Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	97.30	95.32	97.97	
			1 4 6 Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	97.78	100	102.27	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 4 7 Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100.00	93.05	93.05	
			1 4 8 Persentase implementasi rencana kelitbangan		100.00	100	100	
			1 4 9 Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	40.54	65.85	162.43	
		Jumlah Capaian					107.70	Sangat Baik
26	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 5 0 Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	A	A	100.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1 5 1 Persentase dokumen terkait APBD dan APBD-P terbit tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100.00	100.00	100.00	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
			1 5 2 Persentase dokumen keuangan daerah yang terbit sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100.0 0	100.00	100.0 0	
			1 5 3 Pesentase Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang sesuai SAP	%	100.0 0	100.00	100.0 0	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1 5 4 Persentase laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai aturan yang berlaku	%	100.0 0	100.00	100.0 0	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1 5 5 Persentase capaian pajak daerah dan pendapatan lainnya	%	100	102	102.0 0	
		Jumlah Capaian					100.3 3	Sanga t Baik
2 7	Badan Kepegaw aian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 5 6 Predikat AKIP Perangkat Daerah		BB	A		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1 5 7 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	%	97.00	97.41	100.4 2	
			1 5 8 Persentase Penempatan ASN Sesuai pengembangan Karir	%	9.00	10.53	117.0 0	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	159	Persentase Peningkatan kompetensi pejabat struktural	%	4.20	5.46	130.00	
		Jumlah Capaian						111.86	Sangat Baik
28	Inspektorat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	A	A	100.00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	161	Persentase Rekomendasi Temuan Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	0.84	0.83	98.96	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	162	Level kapabilitas APIP	Level	3.00	3.00	100.00	
		Jumlah Capaian						99.65	Sangat Baik
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163	Predikat AKIP Perangkat Daerah		BB	BB		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	164	Persentase koordinasi penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100.00	97.90	97.90	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1 6 5	Tingkat partisipasi pemilih	%	80.00	98.81	123.5 1	
		PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN	1 6 6	Persentase Ormas dan LSM yang aktif melaksana n kegiatan sesuai aturan dan menyampaik an laporan	%	100.0 0	84.62	84.62	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1 6 7	Persentase koordinasi pembinaan dan pengembang an ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100.0 0	94.74	94.74	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1 6 8	Persentase penegakan kebijakan kewaspadaa n nasional dan pengangana n konflik sosial	%	100.0 0	91.33	91.33	
		Jumlah Capaian						98.68	Sanga t Baik
3 0	Kecamat an Tebo Tengah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1 6 9	Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	B	100.0 0	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	170	Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100.00	96.41	96.41
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	171	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100.00	89.70	89.70
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	172	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	%	100.00	100.00	100.00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	173	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100.00	99.61	99.61
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	174	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100.00	99.24	99.24
31	Kecamatan Tebo Ilir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	175	Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	B	100.00



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	176 Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100.00	
32	Kecamatan Tebo Ulu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	177 Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	B	100.00	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	178 Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	90.00	90.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	179 Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	99.00	99.00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	180 Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	%	100	83.00	83.00	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	181 Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	98.00	98.00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANP	182 Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan	%	100	98.00	98.00	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		EMERINTAHAN DESA		Pemerintah Desa					
3 3	Kecamat an Sumay	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	1 8 3	Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	B	100.0 0	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 8 4	Presentase Capaian Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik	%	100.0 0	99.00	99.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 8 5	Presentase Capaian Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100.0 0	83.00	83.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 8 6	Presentase Capaian Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	83.00	83.00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 8 7	Presentase lingkungan yang aman yang konduusif	%	100	98.00	98.00	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1 8 8	Presentase Capaian Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum	%	100	98.00	98.00	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	189	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	98.00	98.00	
34	Kecamatan Rimbo Bujang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	190	Predikat AKIP Perangkat Daerah		100.00	96.69	100.00	
		PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	191	Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100.00	79.16	79.16	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	192	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100.00	99.40	99.40	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	193	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	%	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	194	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100.00	100	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	195	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100.00	100	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
			Pemerintah Desa					
3 5	Kecamat an Rimbo Ilir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	1 9 6 Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	B	100	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 9 7 Presentase Capaian Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik	%	100	98	98.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 9 8 Presentase Capaian Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	98	98.00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 9 9 Presentase lingkungan yang aman yang kondufif	%	100	98	98.00	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2 0 0 Presentase Capaian Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum	%	100	98	98.00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANP EMERINTAHAN DESA	2 0 1 Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	98	98.00	



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
36	Kecamatan Rimbo Ulu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	202	Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	B	100.00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	203	Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	98	98.00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	204	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	98	98.00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	205	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	%	100	98	98.00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	206	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	98	98.00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	207	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	98	98.00	
37	Kecamatan Tengah Ilir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	208	Predikat AKIP Perangkat Daerah		AA	AA		



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		KABUPATEN/KO TA						
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 0 9	Presentase Capaian Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik	%	100	98	98.00
		PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2 1 0	Presentase Capaian Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	98	98.00
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2 1 1	Presentase Capaian Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum	%	100	98	98.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANP EMERINTAHAN DESA	2 1 2	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	98	98.00
3 8	Kecamat an Serai Serumpu n	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	2 1 3	Predikat AKIP Perangkat Daerah		A	A	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 1 4	Presentase Capaian Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik	%	100	100	100.0 0



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6 x 100	9
39	Kecamatan VII Koto Ilir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	215	Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	B	100.00	
		PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	216	Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	99.98	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	217	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	99.91	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	218	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	%	100	100	100.00	
		PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	219	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	99.92	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	220	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	99.99	
40	Kecamatan VII Koto	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	221	Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	B	100.00	



N o	Perangk at Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t 2024	Realis asi 2024	Tingk at Capai an (%)	Kateg ori Capai an
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		KABUPATEN/KO TA						
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 2 2	Presentase Capaian Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik	%	100	90.00	90.00
		PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2 2 3	Presentase Capaian Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	99.00	99.00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2 2 4	Presentase lingkungan yang aman yang konduisif	%	100	83.00	83.00
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2 2 5	Presentase Capaian Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum	%	100	98.00	98.00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANP EMERINTAHAN DESA	22 6	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	98.00	98.00
4 1	Kecamat an Muara Tabir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	2 2 7	Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	B	78.96
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN	2 2 8	Presentase Capaian Penyelengga	%	100	90.00	90.00



No	Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9
		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	raan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	229 Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	99.00	99.00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	230 Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	%	100	83.00	83.00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	231 Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	98.00	98.00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	232 Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	98.00	98.00	
		Jumlah Capaian 12 Kecamatan					96.47	Sangat Baik
		Rata-rata capaian Perangkat Daerah					103,26	Sangat Baik

Sumber : Data Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daeah berdasarkan Program TA.2024

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa akumulasi Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara keseluruhan mencapai **99,85** persen dengan kategori **Sangat Baik**. Begitu juga untuk Capaian Indikator Kinerja di masing-masing Perangkat Daerah rata-rata mencapai 90 hingga 100 persen bahkan ada beberapa perangkat Daerah yang



capaiannya melebihi 100 persen dan melebihi dari target yang ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik**.

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2024 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, terbagi dalam 8 bagian Urusan yaitu :

- 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.**
- 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.**
- 3. Urusan Pemerintahan Pilihan.**
- 4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.**
- 5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.**
- 6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.**
- 7. Unsur Kewilayahan**
- 8. Unsur Pemerintahan Umum**

- I. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.**

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terbagi lagi menjadi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**
- 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**



Selanjutnya semua urusan tersebut tersebar di 9 (sembilan) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp821.242.700.751,-** dan terealisasi sebesar **Rp731.472.651.497,13,-** atau **89.07** persen atau dengan kategori **Baik** dengan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dengan alokasi dana sebesar Rp346.513.034.209,- dan terealisasi sebesar Rp335.192.757.567,- atau 96,73 persen.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp123.965.542.651,- dan terealisasi sebesar Rp111.960.765.852,10,- atau 90,32 persen.

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) STS Tebo

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) STS Tebo dengan alokasi dana sebesar Rp92.292.002.797,- dan terealisasi sebesar Rp81.307.811.568,- atau 88,10 persen, penyebab kurang maksimalnya capaian realisasi terjadi pada kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, terjadinya kenaikan harga pada Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang menyebabkan tidak dapat dibelanjakan dan atau adanya penurunan harga sehingga terdapat sisa anggaran.

4. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, dengan alokasi dana sebesar Rp166.977.284.583,- dan terealisasi sebesar Rp140.294.778.776,31,- atau 84,02 persen, penyebab kurang maksimalnya realisasi dikarenakan adanya tunda bayar di beberapa kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2024 serta adanya pemindahan kegiatan ke subkegiatan yang lain dan menyebabkan terdapat sisa anggaran.

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan alokasi dana sebesar Rp40.464.509.101,- terealisasi sebesar Rp38.238.612.421,- atau 94,50 persen.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp30.670.484.990,- dan terealisasi sebesar Rp5.668.652.777,72,- atau **18,48** persen, penyebab kurang maksimalnya realisasi dikarenakan adanya dana hibah yang masuk di akhir Desember tahun 2024. Sesuai ketentuan yang berlaku terkait mekanisme pelaksanaan penganggaran bahwa kegiatan tidak bisa lagi dilaksanakan di akhir tahun. Selanjutnya dana hibah sebesar **Rp24.533.453.000** yang diperuntukkan pada salah satu kegiatan di BPBD ini tidak bisa terlaksana dan dialihkan menjadi SILPA di penganggaran tahun berikutnya.
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.274.166.601,- terealisasi sebesar Rp6.065.446.888,- atau 96,67 persen.
8. Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi dana sebesar Rp6.926.633.965,- terealisasi sebesar Rp6.186.152.495,- atau 89,31 persen.
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dengan alokasi dana sebesar Rp7.159.041.854,- terealisasi sebesar Rp6.557.673.152,- atau 91,60 persen.

Adapun rincian realisasi masing- masing Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2. 83

**Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Tahun Anggaran 2024**



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	821,242,700,751.00	731,472,651,497.13	89.07
I.I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	346,513,034,209.00	335,192,757,567.00	96.73
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	346,513,034,209.00	335,192,757,567.00	96.73
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	227,964,769,936.00	218,605,970,681.00	95.89
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	844,999,000.00	715,357,807.00	84.66
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	223,414,825,738.00	214,726,608,644.00	96.11
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,000,000.00	96,916,184.00	96.92
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,000,000.00	41,717,013.00	92.70
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	741,181,943.00	732,241,878.00	98.79
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,108,765,355.00	1,798,294,309.00	85.28
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709,997,900.00	494,834,846.00	69.70
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	115,957,764,273.00	114,034,779,023.00	98.34
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	81,484,877,579.00	80,819,676,705.00	99.18
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18,986,992,390.00	18,479,704,355.00	97.33
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12,069,089,522.00	11,511,325,004.00	95.38



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,416,804,782.00	3,224,072,959.00	94.36
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	200,000,000.00	187,403,823.00	93.70
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100,000,000.00	90,150,400.00	90.15
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100,000,000.00	97,253,423.00	97.25
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2,340,500,000.00	2,314,604,040.00	98.89
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,340,500,000.00	2,314,604,040.00	98.89
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
I.II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	216,257,545,448.00	193,268,577,420.10	89.37
2	RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo	92,292,002,797.00	81,307,811,568.00	88.10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76,323,616,957.00	66,454,354,540.00	87.07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,963,999,119.00	20,792,380,111.00	99.18
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,500,000.00	12,213,000.00	97.70
	Pengadaan Barang Milik Daerah	248,558,049.00	237,942,800.00	95.73



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,129,910,524.00	5,104,945,648.00	99.51
	Peningkatan Pelayanan BLUD	49,968,649,265.00	40,306,872,981.00	80.66
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15,968,385,840.00	14,853,457,028.00	93.02
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15,755,833,950.00	14,643,336,362.00	92.94
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	212,551,890.00	210,120,666.00	98.86
3	Dinas Kesehatan	123,965,542,651.00	111,960,765,852.10	90.32
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72,639,874,896.00	70,857,252,811.10	97.55
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,312,839.00	26,235,007.00	74.29
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52,516,840,170.00	51,968,368,504.00	98.96
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	87,579,943.00	82,068,943.00	93.71
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,199,650.00	6,782,650.00	66.50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201,128,949.00	187,227,503.00	93.09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,062,200,540.00	2,043,448,058.00	99.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	812,915,824.00	666,708,286.00	82.01



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	16,913,696,981.00	15,876,413,860.10	93.87
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48,467,000,501.00	38,842,317,670.00	80.14
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8,075,735,235.00	7,599,035,048.00	94.10
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39,821,158,267.00	30,999,099,353.00	77.85
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	423,390,000.00	145,294,400.00	34.32
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146,716,999.00	98,888,869.00	67.40
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,494,162,625.00	1,000,577,108.00	66.97
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	60,455,700.00	36,108,518.00	59.73
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	250,632,468.00	100,637,790.00	40.15
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	1,183,074,457.00	863,830,800.00	73.02



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	432,899,329.00	352,104,789.00	81.34
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	93,954,495.00	78,132,636.00	83.16
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	172,810,187.00	152,273,437.00	88.12
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	166,134,647.00	121,698,716.00	73.25
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	931,605,300.00	908,513,474.00	97.52
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,100,000.00	28,437,000.00	94.48
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	187,299,500.00	182,016,474.00	97.18



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	714,205,800.00	698,060,000.00	97.74
I.III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	166,977,284,583.00	140,294,778,776.31	84.02
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	166,977,284,583.00	140,294,778,776.31	84.02
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,308,463,699.00	10,751,925,991.00	95.08
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114,175,798.00	113,946,350.00	99.80
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,691,573,665.00	4,560,846,391.00	97.21
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98,880,000.00	98,880,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135,000,000.00	134,985,067.00	99.99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	945,335,441.00	943,102,548.00	99.76
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,358,522,237.00	2,937,511,897.00	87.46
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678,788,735.00	678,376,171.00	99.94
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,286,187,823.00	1,284,277,567.00	99.85
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3,491,441,988.00	2,421,969,164.00	69.37



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,574,240,369.00	1,062,221,400.00	67.48
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,917,201,619.00	1,359,747,764.00	70.92
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12,568,928,897.00	11,999,890,452.95	95.47
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12,568,928,897.00	11,999,890,452.95	95.47
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6,486,872,679.00	5,781,430,630.39	89.13
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,486,872,679.00	5,781,430,630.39	89.13
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5,663,089,777.00	5,107,190,929.69	90.18
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,663,089,777.00	5,107,190,929.69	90.18
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	23,978,348,970.00	13,933,773,598.03	58.11
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	23,978,348,970.00	13,933,773,598.03	58.11



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	101,986,575,227.00	88,894,740,584.25	87.16
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	101,986,575,227.00	88,894,740,584.25	87.16
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	333,724,815.00	267,991,350.00	80.30
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	333,724,815.00	267,991,350.00	80.30
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,159,838,531.00	1,135,866,076.00	97.93
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	885,242,231.00	871,257,626.00	98.42
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	274,596,300.00	264,608,450.00	96.36
I.IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40,464,509,101.00	38,238,612,421.00	94.50
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	40,464,509,101.00	38,238,612,421.00	94.50
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,976,339,961.00	2,675,791,804.00	89.90
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,851,449.00	8,608,950.00	97.26
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,096,811,996.00	1,834,325,521.00	87.48



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38,400,000.00	38,400,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,000,000.00	39,947,900.00	99.87
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402,581,822.00	393,835,123.00	97.83
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,263,764.00	14,100,000.00	98.85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182,720,850.00	158,723,310.00	86.87
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192,710,080.00	187,851,000.00	97.48
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	108,332,675.00	64,770,100.00	59.79
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	49,996,100.00	15,063,900.00	30.13
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	58,336,575.00	49,706,200.00	85.21
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,637,574,293.00	1,489,222,523.00	90.94
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	300,000,000.00	167,739,407.00	55.91
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,337,574,293.00	1,321,483,116.00	98.80
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA	35,742,262,172.00	34,008,827,994.00	95.15



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	35,742,262,172.00	34,008,827,994.00	95.15
I.V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43,871,285,556.00	17,920,252,160.72	40.85
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30,670,484,990.00	5,668,652,777.72	18.48
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,945,714,460.00	3,529,766,793.72	89.46
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,972,923,681.00	1,848,263,664.00	93.68
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,840,000.00	6,840,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126,199,150.00	124,212,835.00	98.43
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402,837,660.00	396,209,742.00	98.35
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161,043,969.00	160,502,735.00	99.66
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,275,870,000.00	993,737,817.72	77.89
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	26,724,770,530.00	2,138,885,984.00	8.00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	34,221,830.00	34,013,084.00	99.39
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,336,865,700.00	1,286,735,700.00	96.25



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	820,230,000.00	818,137,200.00	99.74
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	24,533,453,000.00	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6,274,166,601.00	6,065,446,888.00	96.67
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,033,866,601.00	3,826,851,388.00	94.87
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68,758,089.00	68,506,200.00	99.63
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,648,338,050.00	2,496,474,624.00	94.27
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158,500,000.00	156,154,640.00	98.52
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	247,848,647.00	247,661,214.00	99.92
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180,679,950.00	180,469,650.00	99.88
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280,886,902.00	246,771,264.00	87.85
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433,254,963.00	415,213,796.00	95.84
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2,240,300,000.00	2,238,595,500.00	99.92



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,198,800,000.00	2,197,296,200.00	99.93
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	6,000,000.00	5,999,600.00	99.99
	Investigasi Kejadian Kebakaran	15,000,000.00	14,999,700.00	100.00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	20,500,000.00	20,300,000.00	99.02
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6,926,633,965.00	6,186,152,495.00	89.31
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,246,053,931.00	4,620,952,815.00	88.08
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,050,000.00	27,050,000.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,729,959,485.00	2,533,875,519.00	92.82
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,074,040.00	80,683,740.00	80.62
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380,321,066.00	330,398,216.00	86.87
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70,072,300.00	68,322,300.00	97.50
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,448,580,150.00	1,314,861,730.00	90.77
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489,996,890.00	265,761,310.00	54.24
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,680,580,034.00	1,565,199,680.00	93.13



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,680,580,034.00	1,565,199,680.00	93.13
I.VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7,159,041,854.00	6,557,673,152.00	91.60
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7,159,041,854.00	6,557,673,152.00	91.60
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,868,866,117.00	4,395,341,740.00	90.27
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63,973,585.00	63,954,008.00	99.97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,467,048,131.00	3,038,889,188.00	87.65
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46,802,225.00	37,798,700.00	80.76
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000.00	29,997,900.00	99.99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447,942,702.00	446,848,270.00	99.76
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185,180,440.00	184,619,256.00	99.70
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195,138,536.00	190,770,769.00	97.76
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432,780,498.00	402,463,649.00	92.99
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	267,569,886.00	264,029,970.00	98.68
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	185,723,456.00	183,157,670.00	98.62



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	81,846,430.00	80,872,300.00	98.81
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	900,359,987.00	873,752,800.00	97.04
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	786,317,687.00	772,506,700.00	98.24
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	114,042,300.00	101,246,100.00	88.78
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	417,687,103.00	364,191,998.00	87.19
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	417,687,103.00	364,191,998.00	87.19
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	607,626,867.00	564,298,394.00	92.87
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	450,295,113.00	406,966,640.00	90.38
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	157,331,754.00	157,331,754.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	96,931,894.00	96,058,250.00	99.10
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	96,931,894.00	96,058,250.00	99.10



Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2024

II. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terbagi lagi menjadi 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**
- 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- 7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- 8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
- 9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**
- 10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**
- 11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
- 12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**
- 13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
- 14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**
- 15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**
- 16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**
- 17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**
- 18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Penyelenggaraan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh 14 (empat belas) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp76.332.301.185,-** terealisasi sebesar



Rp71.654.818.774,05,- atau **93,88** persen dengan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi dana sebesar Rp1.862.742.393,- dan terealisasi sebesar Rp1.811.259.053,- atau 97,24 persen.
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan alokasi dana sebesar Rp1.323.631.959,- dan terealisasi sebesar Rp1.147.224.745,- atau 86,67 persen.
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp 2.909.923.181,- dan terealisasi sebesar Rp2.752.383.488,- atau 94,59 persen.
4. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan alokasi dana sebesar Rp7.082.180.939,- dan terealisasi sebesar Rp6.805.203.116,- atau 96,09 persen.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan alokasi dana sebesar Rp165.691.400,- dan terealisasi sebesar Rp92.315.400,- atau 55.72 persen. (Khusus urusan bidang pertanahan)
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan alokasi dana sebesar Rp16.071.713.349,- dan terealisasi sebesar Rp14.852.356.406,02,- atau 92,41 persen.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi dana sebesar Rp4.873.535.639,- dan terealisasi sebesar Rp4.681.806.275,- atau 96,07 persen.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi dana sebesar Rp8.636.305.638,- dan terealisasi sebesar Rp8.527.208.106.95,- atau 98,74 persen.
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi dana sebesar Rp9.063.089.519,- dan terealisasi sebesar Rp8.619.559.455,- atau 95,11 persen.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi dana sebesar Rp7.472.985.026,- dan terealisasi sebesar Rp7.099.909.550,- atau 95,01 persen.



11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi dana sebesar Rp191.334.678,- dan terealisasi sebesar Rp166.173.492,- atau 96,85 persen.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi dana sebesar Rp4.248.448.394,- dan terealisasi sebesar Rp3.339.903.661 atau 78,61 persen.
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp7.303.261.877,- dan terealisasi sebesar Rp6.836.551.957,- atau 93,61 persen.
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi dana sebesar Rp1.970.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.888.876.435.09,- atau 95,88 persen.

Adapun rincian realisasi masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2. 84

Realisasi Anggaran Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2024

NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	76,322,301,185.00	71,654,818,774.06	93.88
II.I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1,862,742,393.00	1,811,259,053.00	97.24
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,862,742,393.00	1,811,259,053.00	97.24
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,440,935,195.00	1,389,151,895.00	96.41
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,563,067.00	2,543,800.00	99.25
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,114,663,144.00	1,063,376,709.00	95.40
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,205,631.00	81,000,000.00	99.75



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,189,798.00	53,981,283.00	99.62
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,222,000.00	28,221,595.00	100.00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	14,999,950.00	14,968,630.00	99.79
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	14,999,950.00	14,968,630.00	99.79
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	197,227,677.00	197,170,489.00	99.97
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	197,227,677.00	197,170,489.00	99.97
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	55,370,000.00	55,349,569.00	99.96
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	55,370,000.00	55,349,569.00	99.96
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	154,209,571.00	154,618,470.00	100.27
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,155,870.00	40,132,520.00	99.94
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	114,053,701.00	114,485,950.00	100.38
II.II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,323,631,959.00	1,147,224,745.00	86.67
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,323,631,959.00	1,147,224,745.00	86.67
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	587,504,174.00	514,002,205.00	87.49
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	254,271,100.00	203,699,390.00	80.11
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000.00	188,469,175.00	94.23



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	133,233,074.00	121,833,640.00	91.44
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	276,062,980.00	196,969,453.00	71.35
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	276,062,980.00	196,969,453.00	71.35
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	33,490,420.00	23,236,620.00	69.38
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33,490,420.00	23,236,620.00	69.38
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	426,574,385.00	413,016,467.00	96.82
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	285,381,300.00	273,682,330.00	95.90
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	141,193,085.00	139,334,137.00	98.68
II.III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9,992,104,120.00	9,557,586,604.00	95.65
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2,909,923,181.00	2,752,383,488.00	94.59
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,286,227,352.00	2,140,453,124.00	93.62
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,990,414,056.00	1,853,065,091.00	93.10
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,220,000.00	11,220,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,000,000.00	7,798,300.00	97.48
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120,593,296.00	120,445,954.00	99.88
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61,000,000.00	52,925,779.00	86.76



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,000,000.00	89,998,000.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	192,925,809.00	192,198,944.00	99.62
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	192,925,809.00	192,198,944.00	99.62
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	350,785,120.00	340,891,390.00	97.18
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	122,600,120.00	122,395,412.00	99.83
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	118,185,000.00	108,675,400.00	91.95
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40,034,900.00	39,390,900.00	98.39
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30,034,900.00	29,816,000.00	99.27
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000.00	9,574,900.00	95.75
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	39,950,000.00	39,449,130.00	98.75
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	39,950,000.00	39,449,130.00	98.75
4	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	7,082,180,939.00	6,805,203,116.00	96.09
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,082,180,939.00	6,805,203,116.00	96.09
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208,693,911.00	197,478,687.00	94.63
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,551,157,660.00	5,308,703,039.00	95.63
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,359,000.00	14,330,000.00	99.80
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,000,000.00	35,973,048.00	99.93



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342,104,302.00	341,966,219.00	99.96
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22,467,768.00	22,453,000.00	99.93
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462,991,420.00	453,705,082.00	97.99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444,406,878.00	430,594,041.00	96.89
II.IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	165,691,400.00	92,315,400.00	55.72
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	165,691,400.00	92,315,400.00	55.72
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	165,691,400.00	92,315,400.00	55.72
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	165,691,400.00	92,315,400.00	55.72
II.V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15,119,826,729.00	13,938,771,786.81	92.19
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	15,119,826,729.00	13,938,771,786.81	92.19
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,865,521,747.00	6,369,690,849.81	92.78
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,641,540.00	33,222,584.00	90.67
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,991,896,622.00	4,722,871,281.00	94.61
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36,840,000.00	36,840,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	201,346,000.00	183,590,082.00	91.18
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332,324,921.00	330,981,141.00	99.60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,762,105.00	59,126,060.00	98.94



N0.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615,583,559 .00	579,035,396 .00	94.0 6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591,127,000 .00	424,024,305 .81	71.7 3
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	750,959,875 .00	725,827,558 .00	96.6 5
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	392,328,375 .00	371,884,740 .00	94.7 9
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	358,631,500 .00	353,942,818 .00	98.6 9
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	668,121,527 .00	667,163,807 .00	99.8 6
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	668,121,527 .00	667,163,807 .00	99.8 6
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	807,553,999 .00	780,629,359 .00	96.6 7
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	807,553,999 .00	780,629,359 .00	96.6 7
	Penyimpanan sementara Limbah B3	25,184,255. 00	25,086,575. 00	99.6 1
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	107,085,740 .00	101,586,237 .00	94.8 6
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	107,085,740 .00	101,586,237 .00	94.8 6
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	13,567,000. 00	9,463,790.0 0	69.7 6
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	13,567,000. 00	9,463,790.0 0	69.7 6
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5,881,832,5 86.00	5,259,323,6 11.00	89.4 2
	Pengelolaan Sampah	5,881,832,5 86.00	5,259,323,6 11.00	89.4 2



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
II.VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,873,535,639.00	4,681,806,275.00	96.07
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,873,535,639.00	4,681,806,275.00	96.07
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,482,083,139.00	4,294,266,275.00	95.81
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,800,069,261.00	2,674,051,831.00	95.50
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,920,000.00	13,920,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,500,000.00	11,924,638.00	53.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,188,768,234.00	1,164,470,087.00	97.96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,605,644.00	307,201,140.00	94.35
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131,220,000.00	122,698,579.00	93.51
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	391,452,500.00	387,540,000.00	99.00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	391,452,500.00	387,540,000.00	99.00
II.VI I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,636,305,638.00	8,527,208,106.95	98.74
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,636,305,638.00	8,527,208,106.95	98.74
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,979,497,741.00	4,877,610,287.95	97.95
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,838,515.00	6,838,515.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,097,689,181.00	2,005,089,084.00	95.59
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,000,000.00	59,810,352.00	99.68



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402,334,742.00	401,967,416.00	99.91
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,974,181,303.00	1,970,454,581.00	99.81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438,454,000.00	433,450,339.95	98.86
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	31,740,374.00	31,663,320.00	99.76
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	31,740,374.00	31,663,320.00	99.76
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	844,052,556.00	843,120,988.00	99.89
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	844,052,556.00	843,120,988.00	99.89
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2,781,014,967.00	2,774,813,511.00	99.78
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,781,014,967.00	2,774,813,511.00	99.78
II.VI II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9,063,089,519.00	8,619,559,455.00	95.11
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,063,089,519.00	8,619,559,455.00	95.11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,294,043,129.00	3,021,590,495.00	91.73
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,808,286.00	37,622,130.00	94.51
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,123,541,793.00	1,918,884,097.00	90.36
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29,300,000.00	22,890,000.00	78.12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26,921,076.00	26,744,770.00	99.35



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279,617,065.00	261,519,437.00	93.53
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	471,615,000.00	471,615,000.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,859,909.00	38,801,397.00	69.46
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267,380,000.00	243,513,664.00	91.07
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	95,815,200.00	89,814,463.00	93.74
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	52,805,400.00	50,354,163.00	95.36
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	43,009,800.00	39,460,300.00	91.75
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3,711,154,390.00	3,546,602,079.00	95.57
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,775,000,000.00	1,682,308,552.00	94.78
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	512,127,990.00	480,741,414.00	93.87
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	895,834,400.00	892,478,513.00	99.63
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	528,192,000.00	491,073,600.00	92.97
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,962,076,800.00	1,961,552,418.00	99.97
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,962,076,800.00	1,961,552,418.00	99.97
II.IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	951,886,620.00	913,584,619.21	95.98
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	951,886,620.00	913,584,619.21	95.98



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	951,886,620.00	913,584,619.21	95.98
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	301,731,930.00	274,554,243.21	90.99
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	525,154,690.00	514,703,470.00	98.01
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	125,000,000.00	124,326,906.00	99.46
II.X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,104,048,850.00	6,742,518,798.00	94.91
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,104,048,850.00	6,742,518,798.00	94.91
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,180,892,408.00	3,917,650,403.00	93.70
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,939,233,942.00	2,679,107,050.00	91.15
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17,520,000.00	17,520,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,110,924.00	30,010,000.00	99.66
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244,161,124.00	242,469,381.00	99.31
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	803,132,978.00	802,785,272.00	99.96
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146,733,440.00	145,758,700.00	99.34
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,682,085,303.00	1,602,098,454.00	95.24
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,682,085,303.00	1,602,098,454.00	95.24
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1,241,071,139.00	1,222,769,941.00	98.53
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	543,393,368.00	531,557,509.00	97.82



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	697,677,771.00	691,212,432.00	99.07
II.XI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	191,334,678.00	166,173,492.00	86.85
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	191,334,678.00	166,173,492.00	86.85
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	59,948,100.00	55,012,217.00	91.77
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	59,948,100.00	55,012,217.00	91.77
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	29,499,200.00	25,834,041.00	87.58
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29,499,200.00	25,834,041.00	87.58
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	25,000,000.00	23,864,000.00	95.46
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	23,864,000.00	95.46
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	76,887,378.00	61,463,234.00	79.94
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	76,887,378.00	61,463,234.00	79.94
II.XI I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4,248,448,394.00	3,339,903,661.00	78.61
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,248,448,394.00	3,339,903,661.00	78.61
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,324,936,935.00	2,630,209,203.00	79.11
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,006,044.00	14,931,762.00	99.50
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,402,340,877.00	1,783,364,921.00	74.23



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,000,000.00	34,977,098.00	99.93
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255,911,691.00	251,966,775.00	98.46
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55,160,999.00	54,600,000.00	98.98
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396,833,324.00	345,817,647.00	87.14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164,684,000.00	144,551,000.00	87.77
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	25,421,032.00	22,743,500.00	89.47
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	25,421,032.00	22,743,500.00	89.47
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	30,963,500.00	30,546,487.00	98.65
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30,963,500.00	30,546,487.00	98.65
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	97,782,991.00	97,683,906.00	99.90
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	97,782,991.00	97,683,906.00	99.90
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	664,441,950.00	456,280,500.00	68.67
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	664,441,950.00	456,280,500.00	68.67
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	104,901,986.00	102,440,065.00	97.65
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104,901,986.00	102,440,065.00	97.65



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
II.XI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7,303,261,877.00	6,836,551,957.00	93.61
14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	7,303,261,877.00	6,836,551,957.00	93.61
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,315,966,253.00	2,987,774,781.00	90.10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,235,122,203.00	1,946,722,824.00	87.10
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43,440,000.00	43,440,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,500,000.00	19,807,800.00	52.82
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336,808,824.00	335,234,090.00	99.53
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,587,529.00	3,587,529.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387,352,134.00	375,339,444.00	96.90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272,155,563.00	263,643,094.00	96.87
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	553,425,400.00	424,169,052.00	76.64
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	253,367,400.00	253,102,274.00	99.90
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300,058,000.00	171,066,778.00	57.01
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3,083,870,224.00	3,074,608,124.00	99.70
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	366,237,459.00	365,259,774.00	99.73
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,084,432,792.00	1,078,429,700.00	99.45
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	62,385,675.00	60,498,850.00	96.98



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	100.00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	170,814,298.00	170,419,800.00	99.77
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00
II.XI V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	218,443,998.00	207,534,655.00	95.01
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	218,443,998.00	207,534,655.00	95.01
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	218,443,998.00	207,534,655.00	95.01
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	218,443,998.00	207,534,655.00	95.01
II.X V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	150,492,178.00	149,856,097.00	99.58
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	150,492,178.00	149,856,097.00	99.58
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	150,492,178.00	149,856,097.00	99.58
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150,492,178.00	149,856,097.00	99.58
II.X VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1,970,000,000.00	1,888,876,435.09	95.88
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,970,000,000.00	1,888,876,435.09	95.88
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,250,000,000.00	1,200,425,417.00	96.03
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000.00	954,866,237.00	95.49
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	98,932,180.00	98.93



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	146,627,000.00	97.75
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	420,000,000.00	392,266,488.00	93.40
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	420,000,000.00	392,266,488.00	93.40
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	50,000,000.00	49,808,040.00	99.62
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	49,808,040.00	99.62
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	250,000,000.00	246,376,490.09	98.55
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	250,000,000.00	246,376,490.09	98.55
II/X VII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2,979,143,133.00	2,866,067,996.00	96.20
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,979,143,133.00	2,866,067,996.00	96.20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,752,781,895.00	2,648,039,637.00	96.20
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,942,657,224.00	1,868,617,975.00	96.19
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,840,000.00	6,840,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307,653,339.00	305,177,390.00	99.20
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189,117,129.00	188,720,000.00	99.79
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206,285,128.00	188,838,772.00	91.54
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,229,075.00	89,845,500.00	89.64
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	226,361,238.00	218,028,359.00	96.32



NO.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	147,574,524.00	145,811,859.00	98.81
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78,786,714.00	72,216,500.00	91.66
II/I X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	168,314,060.00	168,019,638.00	99.83
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	168,314,060.00	168,019,638.00	99.83
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	168,314,060.00	168,019,638.00	99.83
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	56,954,060.00	56,882,080.00	99.87
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	44,000,000.00	43,973,309.00	99.94
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	67,360,000.00	67,164,249.00	99.71

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2024

III. Urusan Pemerintahan Pilihan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan terbagi menjadi 5 (lima) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**
- 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan oleh 5 (lima) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp17.582.006.373,-** terealisasi sebesar **Rp16.670.619.004,63,-** atau **94,82** persen dengan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp791.945.649,- dan terealisasi sebesar Rp788.634.482,- atau 99,58 persen.



2. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan alokasi dana sebesar Rp1.545.152.693,- dan terealisasi sebesar Rp1.404.002.058,- atau 90,86 persen.
3. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan alokasi dana sebesar Rp1.566.902.689,- dan terealisasi sebesar Rp1.533.571.951,76,- atau 97,87 persen.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan alokasi dana sebesar Rp7.394.448.972,- dan terealisasi sebesar Rp7.051.547.434,- atau 95,36 persen.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi dana sebesar Rp6.283.553.370,- dan terealisasi sebesar Rp5.892.863.078,87,- atau 93,78 persen.

Adapun rincian realisasi masing- masing Urusan Pemerintahan Pilihan masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2. 85

**Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan
Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17,582,006,373.00	16,670,619,004.63	94.82
III.I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	791,945,649.00	788,634,482.00	99.58
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	791,945,649.00	788,634,482.00	99.58
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	59,758,114.00	58,654,800.00	98.15
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	59,758,114.00	58,654,800.00	98.15
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	194,808,210.00	194,099,400.00	99.64
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	194,808,210.00	194,099,400.00	99.64
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	499,573,325.00	498,300,282.00	99.75
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	499,573,325.00	498,300,282.00	99.75
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	37,806,000.00	37,580,000.00	99.40
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	37,806,000.00	37,580,000.00	99.40



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
III.II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1,545,152,693.00	1,404,002,058.00	90.86
2	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1,545,152,693.00	1,404,002,058.00	90.86
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	105,407,397.00	104,702,738.00	99.33
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	105,407,397.00	104,702,738.00	99.33
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,283,222,209.00	1,145,811,454.00	89.29
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,283,222,209.00	1,145,811,454.00	89.29
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	156,523,087.00	153,487,866.00	98.06
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	156,523,087.00	153,487,866.00	98.06
III.III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8,961,351,661.00	8,585,119,385.76	95.80
3	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	1,566,902,689.00	1,533,571,951.76	97.87
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	75,100,909.00	74,562,906.00	99.28
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	75,100,909.00	74,562,906.00	99.28
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	970,784,292.00	944,349,086.76	97.28
	Pengembangan Prasarana Pertanian	970,784,292.00	944,349,086.76	97.28
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	85,550,649.00	85,320,837.00	99.73
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	85,550,649.00	85,320,837.00	99.73
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	435,466,839.00	429,339,122.00	98.59
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	435,466,839.00	429,339,122.00	98.59
4	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7,394,448,972.00	7,051,547,434.00	95.36
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,365,162,326.00	4,095,105,283.00	93.81
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,500,000.00	13,499,593.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,297,369,920.00	3,109,127,383.00	94.29
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,240,000.00	15,240,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000.00	29,563,502.00	98.55



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	372,316,338.00	359,155,952.00	96.47
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58,754,985.00	58,730,750.00	99.96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,287,384.00	166,776,153.00	94.07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400,693,699.00	343,011,950.00	85.60
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,605,253,207.00	1,565,432,014.00	97.52
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	91,780,184.00	90,883,200.00	99.02
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	672,901,748.00	636,326,409.00	94.56
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	840,571,275.00	838,222,405.00	99.72
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,068,944,585.00	1,053,872,266.00	98.59
	Pengembangan Prasarana Pertanian	1,068,944,585.00	1,053,872,266.00	98.59
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	209,010,308.00	201,277,800.00	96.30
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	152,126,290.00	149,190,300.00	98.07
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	56,884,018.00	52,087,500.00	91.57
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	26,488,478.00	26,176,300.00	98.82
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	26,488,478.00	26,176,300.00	98.82
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	54,508,150.00	48,294,400.00	88.60
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	54,508,150.00	48,294,400.00	88.60
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	65,081,918.00	61,389,371.00	94.33
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	65,081,918.00	61,389,371.00	94.33



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
III.IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1,602,287,013.00	1,473,299,165.87	91.95
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,602,287,013.00	1,473,299,165.87	91.95
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	535,511,300.00	411,007,112.87	76.75
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	510,000,000.00	385,495,812.87	75.59
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	25,511,300.00	25,511,300.00	100.00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	321,882,188.00	321,882,188.00	100.00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	321,882,188.00	321,882,188.00	100.00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	83,960,060.00	83,951,355.00	99.99
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	83,960,060.00	83,951,355.00	99.99
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	660,933,465.00	656,458,510.00	99.32
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	660,933,465.00	656,458,510.00	99.32
III.V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4,681,269,357.00	4,419,563,913.00	94.41
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4,681,269,357.00	4,419,563,913.00	94.41
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,935,589,729.00	3,685,826,067.00	93.65
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,293,260.00	47,065,829.00	99.52
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,394,659,063.00	2,272,292,488.00	94.89
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20,280,000.00	16,200,000.00	79.88
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39,554,200.00	39,272,103.00	99.29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310,111,576.00	309,308,872.00	99.74
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239,832,376.00	225,618,517.00	94.07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498,230,854.00	496,010,803.00	99.55



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385,628,400.00	280,057,455.00	72.62
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	673,867,928.00	661,971,446.00	98.23
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	673,867,928.00	661,971,446.00	98.23
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	71,811,700.00	71,766,400.00	99.94
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	71,811,700.00	71,766,400.00	99.94

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2024

IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terbagi menjadi 2 (dua) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

- 1. Sekretariat Daerah**
- 2. Sekretariat DPRD**

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp101.307.701.520,-** terealisasi sebesar **Rp98.089.823.938,28,-** atau **96,82** persen dengan Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp39.798.495.151,- dan terealisasi sebesar Rp37.911.432.813,08,- atau 95,26 persen.
2. Sekretariat DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp61.509.206.369,- dan terealisasi sebesar Rp60.178.391.125,20,- atau 97,84 persen.

Adapun rincian realisasi masing- masing Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2. 86
Realisasi Anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2024



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
IV.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	101,307,701,520.00	98,089,823,938.28	96.82
IV.I	SEKRETARIAT DAERAH	39,798,495,151.00	37,911,432,813.08	95.26
1	Sekretariat Daerah	39,798,495,151.00	37,911,432,813.08	95.26
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31,671,551,580.00	30,028,663,228.00	94.81
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,021,800.00	31,219,198.00	97.49
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,155,687,970.00	11,367,836,136.00	93.52
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	59,716,870.00	59,163,880.00	99.07
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	528,915,153.00	519,469,417.00	98.21
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,723,993,897.00	6,401,470,072.00	95.20
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,158,839,188.00	1,156,339,178.00	99.78
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,136,764,142.00	2,850,762,045.00	90.88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,350,607,671.00	2,199,243,558.00	93.56
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	290,000,000.00	283,674,400.00	97.82
	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	804,361,189.00	767,656,400.00	95.44
	Penataan Organisasi	645,643,700.00	624,555,913.00	96.73
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3,785,000,000.00	3,767,273,031.00	99.53
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7,072,432,386.00	6,845,404,146.08	96.79
	Administrasi Tata Pemerintahan	850,672,300.00	758,589,138.08	89.18
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5,058,289,036.00	4,938,785,705.00	97.64
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,083,740,550.00	1,068,857,147.00	98.63
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	79,730,500.00	79,172,156.00	99.30
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,054,511,185.00	1,037,365,439.00	98.37
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	294,110,670.00	289,517,396.00	98.44
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	64,346,800.00	63,868,539.00	99.26
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	475,579,955.00	464,997,245.00	97.77
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	220,473,760.00	218,982,259.00	99.32
IV.II	SEKRETARIAT DPRD	61,509,206,369.00	60,178,391,125.20	97.84
2	Sekretariat DPRD	61,509,206,369.00	60,178,391,125.20	97.84



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,439,009,295.00	31,335,502,570.20	96.60
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,026,898.00	19,237,800.00	96.06
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,837,955,294.00	3,692,533,204.00	96.21
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	390,353,144.00	381,344,242.00	97.69
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,382,504,104.00	2,298,037,195.00	96.45
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	471,615,000.00	415,900,000.00	88.19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,477,342,191.00	1,384,615,982.00	93.72
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	753,393,922.00	522,396,378.20	69.34
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17,879,312,307.00	17,607,542,801.00	98.48
	Layanan Administrasi DPRD	5,226,506,435.00	5,013,894,968.00	95.93
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	29,070,197,074.00	28,842,888,555.00	99.22
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	600,000,000.00	536,511,617.00	89.42
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	339,995,000.00	318,274,150.00	93.61
	Peningkatan Kapasitas DPRD	2,811,668,197.00	2,767,269,831.00	98.42
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3,774,125,700.00	3,731,208,724.00	98.86
	Fasilitasi Tugas DPRD	21,544,408,177.00	21,489,624,233.00	99.75

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2024

V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terbagi menjadi 4 (empat) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

1. **Perencanaan**
2. **Kepegawaian**
3. **Pendidikan dan Pelatihan**
4. **Penelitian dan Pengembangan**

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar



Rp260.280.406.632,- terealisasi sebesar **Rp246.999.148.027,-** atau **94,90** persen dengan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan dengan alokasi dana sebesar Rp10.678.084.092,- dan terealisasi sebesar Rp9.913.707.657,- atau 92,84 persen.
2. Badan Keuangan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp231.239.726.580,- dan terealisasi sebesar Rp219.162.739.436,- atau 94,78 persen.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi dana sebesar Rp18.362.295.960,- dan terealisasi sebesar Rp17.922.700.934,- atau 97,60 persen.

Adapun rincian realisasi masing- masing Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2. 87

**Realisasi Anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintrahan
Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	260,280,406,632.00	246,999,148,027.00	94.90
V.I	PERENCANAAN	10,353,872,125.00	9,590,755,703.00	92.63
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan	10,353,872,125.00	9,590,755,703.00	92.63
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,125,754,010.00	5,908,044,323.00	96.45
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,899,484,664.00	3,809,205,814.00	97.68
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194,000,000.00	181,856,980.00	93.74
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	745,818,047.00	734,639,147.00	98.50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	570,763,000.00	556,500,000.00	97.50
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311,286,973.00	263,987,719.00	84.81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404,401,326.00	361,854,663.00	89.48



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,278,713,414.00	1,989,499,023.00	87.31
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,252,634,229.00	1,209,147,508.00	96.53
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	489,163,920.00	474,921,046.00	97.09
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	536,915,265.00	305,430,469.00	56.89
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,949,404,701.00	1,693,212,357.00	86.86
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	687,062,833.00	648,735,617.00	94.42
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	626,564,255.00	532,725,994.00	85.02
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	635,777,613.00	511,750,746.00	80.49
V.II	KEUANGAN	231,239,726,580.00	219,162,739,436.00	94.78
2	Badan Keuangan Daerah	231,239,726,580.00	219,162,739,436.00	94.78
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,279,032,210.00	9,441,822,288.00	91.86
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73,265,986.00	59,363,800.00	81.03
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,100,143,545.00	7,353,736,964.00	90.79
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31,920,000.00	23,862,000.00	74.76
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135,705,000.00	126,040,000.00	92.88
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782,285,995.00	768,956,344.00	98.30
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83,348,240.00	82,864,997.00	99.42
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622,585,899.00	607,358,878.00	97.55
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449,777,545.00	419,639,305.00	93.30
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	218,227,586,900.00	207,350,504,886.00	95.02
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,124,071,987.00	1,049,537,012.00	93.37



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,015,062,039.00	957,747,956.00	94.35
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	634,376,645.00	625,402,774.00	98.59
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	215,454,076,229.00	204,717,817,144.00	95.02
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,464,941,579.00	1,314,787,979.00	89.75
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,464,941,579.00	1,314,787,979.00	89.75
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,268,165,891.00	1,055,624,283.00	83.24
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,268,165,891.00	1,055,624,283.00	83.24
V.III	KEPEGAWAIAN	18,179,981,960.00	17,750,375,234.00	97.64
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18,179,981,960.00	17,750,375,234.00	97.64
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,210,654,484.00	15,902,709,289.00	98.10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	24,652,400.00	98.61
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,364,153,601.00	15,066,150,674.00	98.06
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,200,000.00	13,160,000.00	99.70
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39,205,010.00	39,044,000.00	99.59
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381,063,629.00	380,493,603.00	99.85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,193,070.00	192,590,796.00	96.20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187,839,174.00	186,617,816.00	99.35
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,969,327,476.00	1,847,665,945.00	93.82
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	805,753,350.00	801,982,378.00	99.53
	Mutasi dan Promosi ASN	976,000,000.00	858,270,783.00	87.94
	Pengembangan Kompetensi ASN	138,286,626.00	138,172,454.00	99.92
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49,287,500.00	49,240,330.00	99.90
V.III	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	182,614,000.00	172,325,700.00	94.37
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	182,614,000.00	172,325,700.00	94.37
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	182,614,000.00	172,325,700.00	94.37



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	182,614,000.00	172,325,700.00	94.37
V.IV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	324,211,967.00	322,951,954.00	99.61
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan	324,211,967.00	322,951,954.00	99.61
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	324,211,967.00	322,951,954.00	99.61
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	324,211,967.00	322,951,954.00	99.61

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2024

VI. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri dari 1 (Urusan) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Inspektorat Daerah

Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp11,985,538,898,-** terealisasi sebesar **Rp11,282,112,503,-** atau **94,13** persen dan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Adapun rincian realisasi masing-masing Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2. 88

Realisasi Anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11,985,538,898.00	11,282,112,503.00	94.13
VI.I	INSPEKTORAT DAERAH	11,985,538,898.00	11,282,112,503.00	94.13
1	Inspektorat	11,985,538,898.00	11,282,112,503.00	94.13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,339,020,852.00	9,775,569,483.00	94.55



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,526,771,925.00	7,241,359,905.00	96.21
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	740,695,192.00	699,156,777.00	94.39
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	662,195,356.00	647,081,682.00	97.72
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	842,560,000.00	668,088,000.00	79.29
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333,813,559.00	308,053,771.00	92.28
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232,984,820.00	211,829,348.00	90.92
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,384,394,052.00	1,300,237,224.00	93.92
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,239,190,052.00	1,157,502,264.00	93.41
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	145,204,000.00	142,734,960.00	98.30
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	262,123,994.00	206,305,796.00	78.71
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4,373,212.00	2,170,000.00	49.62
	Pendampingan dan Asistensi	257,750,782.00	204,135,796.00	79.20

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2024

VII. Unsur Kewilayahan

Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan terdiri dari 1 (Urusan) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu Urusan Kecamatan yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan Target Anggaran sebesar Rp.38.512.304.142,- dan Realisasi sebesar Rp.36.633.281.719,28 atau 95,12 persen.

Adapun rincian realisasi masing- masing Unsur Kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2. 89
Realisasi Anggaran Unsur Kewilayahan
Tahun Anggaran 2024



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
VII	UNSUR KEWILAYAHAN	38,512,304,142.00	36,633,281,719.28	95.12
VII.I	KECAMATAN	38,512,304,142.00	36,633,281,719.28	95.12
1	Kecamatan Tebo Tengah	6,027,941,177.00	5,790,758,803.00	96.07
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,653,526,340.00	4,505,869,035.00	96.83
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,278.00	2,000,278.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,931,093,076.00	3,789,924,213.00	96.41
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	247,994,647.00	247,148,280.00	99.66
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15,271,736.00	15,122,813.00	99.02
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230,748,003.00	228,509,651.00	99.03
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170,418,600.00	167,163,800.00	98.09
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	670,277,850.00	646,231,819.00	96.41
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	293,200,293.00	293,200,293.00	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	377,077,557.00	353,031,526.00	93.62
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	632,679,504.00	567,499,314.00	89.70
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	430,000,000.00	365,111,220.00	84.91
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	58,679,300.00	58,671,000.00	99.99
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	144,000,204.00	143,717,094.00	99.80



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53,689,492.00	53,480,492.00	99.61
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	53,689,492.00	53,480,492.00	99.61
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11,767,991.00	11,678,143.00	99.24
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,767,991.00	11,678,143.00	99.24
2	Kecamatan Tebo Ilir	4,164,151,672.00	4,088,744,544.00	98.19
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,394,857,024.00	3,319,621,469.00	97.78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,736,974,820.00	2,663,916,304.00	97.33
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34,000,000.00	33,904,600.00	99.72
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228,969,958.00	228,775,860.00	99.92
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29,998,353.00	29,998,353.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228,736,035.00	227,752,365.00	99.57



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130,177,858.00	129,273,987.00	99.31
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	269,999,872.00	269,987,613.00	100.00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	249,999,872.00	249,987,613.00	100.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	423,991,963.00	423,845,222.00	99.97
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200,000,000.00	199,999,697.00	100.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	123,992,000.00	123,855,000.00	99.89
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	99,999,963.00	99,990,525.00	99.99
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	67,999,315.00	67,990,240.00	99.99
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	67,999,315.00	67,990,240.00	99.99
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4,303,498.00	4,300,000.00	99.92
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4,303,498.00	4,300,000.00	99.92
3	Kecamatan Tebo Ulu	4,848,712,729.00	4,402,558,027.00	90.80



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,979,031,035.00	3,532,913,212.00	88.79
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,384,546,097.00	2,942,917,503.00	86.95
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,159,644.00	8,080,000.00	99.02
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31,888,775.00	31,887,607.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228,015,803.00	226,323,136.00	99.26
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42,816,665.00	42,816,665.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196,864,839.00	196,127,039.00	99.63
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,739,212.00	84,761,262.00	97.72
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	413,959,978.00	413,923,845.00	99.99
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	128,785,081.00	128,784,380.00	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	285,174,897.00	285,139,465.00	99.99
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	324,498,710.00	324,497,964.00	100.00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200,000,000.00	199,999,867.00	100.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24,498,900.00	24,498,650.00	100.00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	99,999,810.00	99,999,447.00	100.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	123,223,006.00	123,223,006.00	100.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	123,223,006.00	123,223,006.00	100.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
4	Kecamatan Rimbo Bujang	4,799,758,635.00	4,590,261,654.00	95.64
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,000,731,672.00	2,901,272,154.00	96.69
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,240,345,831.00	2,141,144,859.00	95.57
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12,240,000.00	12,240,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301,020,241.00	300,998,784.00	99.99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352,221,700.00	351,984,611.00	99.93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,903,900.00	74,903,900.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	492,497,710.00	389,838,064.00	79.16
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42,499,135.00	42,497,320.00	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	449,998,575.00	347,340,744.00	77.19



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,220,019,705.00	1,212,641,888.00	99.40
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	600,000,000.00	592,622,183.00	98.77
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	471,000,000.00	471,000,000.00	100.00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	149,019,705.00	149,019,705.00	100.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,509,827.00	5,509,827.00	100.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4,009,827.00	4,009,827.00	100.00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	77,999,721.00	77,999,721.00	100.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	77,999,721.00	77,999,721.00	100.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
5	Kecamatan Sumay	2,421,859,584.00	2,342,971,294.00	96.74
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,021,432,055.00	1,942,613,365.00	96.10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,007,775.00	5,923,775.00	98.60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,558,966,092.00	1,483,963,709.00	95.19



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133,297,876.00	133,297,613.00	100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,892,654.00	34,892,654.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,434,964.00	172,434,964.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59,832,694.00	56,100,650.00	93.76
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	299,434,515.00	299,364,915.00	99.98
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	149,434,654.00	149,365,054.00	99.95
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	149,999,861.00	149,999,861.00	100.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74,993,014.00	74,993,014.00	100.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74,993,014.00	74,993,014.00	100.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
6	Kecamatan VII Koto	2,377,147,280.00	2,227,636,145.00	93.71
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,012,356,503.00	1,884,403,055.00	93.64
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,499,108.00	7,406,708.00	98.77
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,417,724,468.00	1,314,844,045.00	92.74
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,355,430.00	13,680,000.00	89.09
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	18,395,250.00	91.98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305,624,847.00	292,786,097.00	95.80
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44,370,866.00	43,577,626.00	98.21
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141,513,418.00	137,030,823.00	96.83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,268,366.00	56,682,506.00	94.05
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	184,945,337.00	166,615,260.00	90.09
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,999,975.00	7,999,975.00	80.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24,945,442.00	23,195,442.00	92.98
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	149,999,920.00	135,419,843.00	90.28
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	99,980,400.00	99,244,522.00	99.26
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	99,980,400.00	99,244,522.00	99.26



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,999,916.00	4,146,848.00	82.94
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4,999,916.00	4,146,848.00	82.94
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74,865,124.00	73,226,460.00	97.81
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74,865,124.00	73,226,460.00	97.81
7	Kecamatan Rimbo Ulu	2,487,157,764.00	2,295,921,022.00	92.31
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,979,258,770.00	1,790,039,476.00	90.44
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,099,342.00	10,095,862.00	99.97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,326,132,120.00	1,139,698,054.00	85.94
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500,000.00	500,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350,657,365.00	350,384,263.00	99.92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193,999,500.00	193,592,097.00	99.79
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,070,443.00	84,969,200.00	97.59
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	170,408,727.00	170,268,090.00	99.92
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7,999,753.00	7,997,575.00	99.97
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	4,021,000.00	3,891,800.00	96.79



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	158,387,974.00	158,378,715.00	99.99
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	175,994,077.00	175,917,941.00	99.96
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25,994,394.00	25,968,516.00	99.90
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	149,999,683.00	149,949,425.00	99.97
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29,999,825.00	29,990,415.00	99.97
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29,999,825.00	29,990,415.00	99.97
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124,996,365.00	123,205,100.00	98.57
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	124,996,365.00	123,205,100.00	98.57
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00
8	Kecamatan Rimbo Ilir	2,340,628,556.00	2,310,984,172.00	98.73
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,935,118,734.00	1,905,517,974.00	98.47
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,388,903,125.00	1,362,903,887.00	98.13
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,960,000.00	6,960,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299,452,715.00	299,259,408.00	99.94
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128,528,666.00	126,095,651.00	98.11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,274,228.00	80,299,028.00	98.80
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	174,993,708.00	174,976,181.00	99.99
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	149,993,708.00	149,976,181.00	99.99
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	158,517,202.00	158,491,105.00	99.98
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20,990,000.00	20,990,000.00	100.00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	137,527,202.00	137,501,105.00	99.98
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64,999,712.00	64,999,712.00	100.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64,999,712.00	64,999,712.00	100.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4,999,200.00	4,999,200.00	100.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	4,999,200.00	4,999,200.00	100.00



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pengawasan Pemerintahan Desa			
9	Kecamatan Tengah Ilir	2,443,809,062.00	2,406,687,734.28	98.48
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,595,454,704.00	1,558,867,976.00	97.71
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,132,915,292.00	1,103,792,860.00	97.43
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,080,000.00	10,080,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207,609,975.00	207,577,305.00	99.98
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,846,124.00	27,414,498.00	78.67
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107,308,013.00	107,308,013.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,695,300.00	62,695,300.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	638,375,294.00	638,374,094.28	100.00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	633,375,294.00	633,374,094.28	100.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	107,981,829.00	107,448,429.00	99.51
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24,990,000.00	24,961,600.00	99.89
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	82,991,829.00	82,486,829.00	99.39
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79,197,235.00	79,197,235.00	100.00



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	79,197,235.00	79,197,235.00	100.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22,800,000.00	22,800,000.00	100.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22,800,000.00	22,800,000.00	100.00
10	Kecamatan Serai Serumpun	2,446,990,438.00	2,372,694,767.00	96.96
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,059,978,764.00	1,985,771,892.00	96.40
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,614,390,841.00	1,546,359,219.00	95.79
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,160,000.00	14,160,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178,949,917.00	178,949,616.00	100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71,993,070.00	68,099,070.00	94.59
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128,024,936.00	127,785,187.00	99.81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,460,000.00	41,418,800.00	95.30
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	168,750,210.00	168,730,210.00	99.99
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18,990,000.00	18,990,000.00	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	149,760,210.00	149,740,210.00	99.99
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	153,265,083.00	153,264,726.00	100.00



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142,265,083.00	142,264,726.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64,996,381.00	64,927,939.00	99.89
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64,996,381.00	64,927,939.00	99.89
11	Kecamatan VII Koto Ilir	2,318,202,489.00	2,105,164,257.00	90.81
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,928,957,870.00	1,716,052,018.00	88.96
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,548,542,325.00	1,336,163,643.00	86.29
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,280,000.00	11,280,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,000,000.00	14,958,000.00	99.72
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141,054,860.00	140,981,145.00	99.95
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,583,951.00	40,583,951.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125,998,380.00	125,978,639.00	99.98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,498,354.00	46,106,640.00	99.16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	146,019,782.00	145,984,794.00	99.98
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	146,019,782.00	145,984,794.00	99.98
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	166,002,791.00	165,913,245.00	99.95



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75,000,431.00	74,992,205.00	99.99
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	91,002,360.00	90,921,040.00	99.91
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7,205,446.00	7,199,500.00	99.92
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7,205,446.00	7,199,500.00	99.92
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70,016,600.00	70,014,700.00	100.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	70,016,600.00	70,014,700.00	100.00
12	Kecamatan Muara Tabir	1,835,944,756.00	1,698,899,300.00	92.54
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,466,747,240.00	1,329,845,264.00	90.67
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,866,681.00	7,816,681.00	99.36
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	983,846,696.00	854,738,772.00	86.88
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,280,000.00	11,280,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,000,000.00	39,954,000.00	99.89
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196,742,397.00	196,607,624.00	99.93
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36,099,263.00	36,099,263.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,422,163.00	107,508,584.00	93.96
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,490,040.00	75,840,340.00	99.15



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	180,292,592.00	180,292,592.00	100.00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,299,200.00	5,299,200.00	100.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24,995,842.00	24,995,842.00	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	149,997,550.00	149,997,550.00	100.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	99,996,345.00	99,996,345.00	100.00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	99,996,345.00	99,996,345.00	100.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,280,000.00	4,280,000.00	100.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4,280,000.00	4,280,000.00	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81,495,099.00	81,415,099.00	99.90
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	81,495,099.00	81,415,099.00	99.90
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,133,480.00	3,070,000.00	97.97
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3,133,480.00	3,070,000.00	97.97

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31
Desember TA. 2024

VIII. Unsur Pemerintahan Umum.



Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (Urusan) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu Urusan **Kesatuan Bangsa dan Politik** yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Target Anggaran sebesar Rp.34.679.312.779,- dan Realisasi sebesar Rp.33.933.938.541 atau 97,85 persen.

Adapun rincian realisasi masing- masing Unsur Kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Unsur Pemerintahan Umum
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	34,679,312,779.00	33,933,938,541.00	97.85
VIII.I	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34,679,312,779.00	33,933,938,541.00	97.85
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34,679,312,779.00	33,933,938,541.00	97.85
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,128,133,475.00	2,845,943,357.00	90.98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,965,506,785.00	1,717,551,752.00	87.38
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21,840,000.00	21,840,000.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000.00	9,129,850.00	91.30
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303,398,076.00	297,746,470.00	98.14
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	526,995,040.00	505,120,000.00	95.85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207,782,018.00	203,278,483.00	97.83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,611,556.00	91,276,802.00	98.56
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,379,355,200.00	1,350,411,424.00	97.90



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,379,355,200.00	1,350,411,424.00	97.90
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	29,094,648,793.00	28,747,436,402.00	98.81
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	29,094,648,793.00	28,747,436,402.00	98.81
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	186,152,400.00	176,365,500.00	94.74
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	186,152,400.00	176,365,500.00	94.74
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	891,022,911.00	813,781,858.00	91.33
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	891,022,911.00	813,781,858.00	91.33

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2024

Mengakomodir penyelenggaraan seluruh urusan tersebut di atas, tentunya harus berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah,



Efisiensi, Efektifitas, Pembagian Habis Tugas, Rentang kendali, Tata kerja yang jelas dan Fleksibilitas. Untuk itu susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tebo disusun dengan mengacu pada kondisi, Kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.254.634.663.544,32,- atau sebesar 96,43 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.301.093.783.247,-. Target, realisasi, dan capaian masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2. 90
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2024

N o	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian %
	PENDAPATAN DAERAH	1. 301. 093. 783. 24 7	1. 254. 634. 663. 54 4, 32	96, 43
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99. 350. 801. 031, 0 0	97 . 477 , 335. 537, 32	98, 11
2	PENDAPATAN TRANSFER	1. 777. 209. 529, 21 6, 00	1. 132. 623. 875. 00 7, 00	96, 21
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24. 533. 453. 000, 0 0	24. 533. 453. 000, 0 0	100, 0 0

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.97.477.335.537,32 atau 98,11 persen dari target sebesar Rp.99.350.801.031,00, meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp25.946.092.811,00,- atau 102,78 persen dari target sebesar Rp25.245.000.000,00,-, retribusi daerah terealisasi sebesar Rp52.434.009.352,46,- atau 116,59 persen dari target sebesar Rp44.973.520.830,00,- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp11.575.080.402,39,- atau 105,56 persen dari target sebesar Rp10.965.080.402,00,- dan lain-lain pendapatan asli daerah yang



sah tereslisasi sebesar Rp7.522.752.977,47,-atau 41,41 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp18.167.199.799,00. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2. 91

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

N o	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99.350.801.031,0 0	97.477.335.537,3 2	98,11
1	Pajak Daerah	25.245.000.000,0 0	25.946.092.811,0 0	102,78
2	Retribusi Daerah	44.973.520.830,0 0,-	52.434.009.352,4 6,-	116,59
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.965.080.402,0 0	11.575.080.402,3 9	105,56
4	Lain-lain PAD yang Sah	18.167.199.799,0 0	7.522.752.977,47	41,41

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.132.623.875.007,00,- atau 96,21 persen dari target sebesar Rp1.777.209.529.216,00,- meliputi realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebesar Rp1.065.329.569.108,00, atau 97,85 persen dari target sebesar Rp1.065.792.889.000,00,- selanjutnya Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp67.294.305.899,00,- atau 76,11 persen dari target sebesar Rp88.416.640.216,00,-. Rincian target, realisasi dan capaian Pendapatan Transfer Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2. 92

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Tahun 2024

N o	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN TRANSFER	1.777.209.529.216,00	1.132.623.875.007,00	96,21



1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	1.065.792.889.000,00	1.065.329.569.108,00	97,85
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.416.640.216,00	67.294.305.899,00	76,11

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 meliputi realisasi Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat sebesar Rp24.533.453.000,00,- atau 100 persen dari target sebesar Rp24.533.453.000,00,-. Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2. 93

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024

N o	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.533.453.000,00	24.533.453.000,00	100,00
1	Pendapatan Hibah	24.533.453.000,00	24.533.453.000,00	100,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

4. Pengelolaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja pembangunan daerah, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.361.912.272.280,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp1.246.736.394.004.38. atau sebesar 91,54 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2. 94

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024

N o	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	1,361,912,272,280	1,246,736,394,004.38	91.54



N o	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI	882, 532, 227, 025	826, 988, 265, 740.33	93. 71
	Belanja Pegawai	455, 275, 234, 836	436, 611, 033, 884. 80	95. 90
	Belanja Barang dan Jasa	377, 962, 131, 496	341, 972, 686, 339. 53	90. 48
	Belanja Bunga	7, 391, 886, 161	7, 391, 886, 161	100. 00
	Belanja Subsidi	1, 070, 513, 315	1, 070, 115, 987	99. 96
	Belanja Hibah	40, 832, 461, 217	39, 942, 543, 368	97. 82
2	BELANJA MODAL	272, 619, 528, 708	223, 723, 473, 474.05	82. 06
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42, 879, 988, 497	41, 686, 656, 343	97. 22
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63, 023, 062, 071	54, 574, 611, 879. 55	86. 59
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160, 016, 253, 081	120, 761, 942, 241. 50	75. 47
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6, 108, 286, 659	6, 108, 324, 610	100. 00
	Belanja Modal Aset Lainnya	591, 938, 400	591, 938, 400	100. 00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2, 312, 630, 847	509, 619, 684	22. 04
	Belanja Tidak Terduga	2, 312, 630, 847. 00	509, 619, 684	22. 04
4	BELANJA TRANSFER	204, 447, 885, 700	195, 515, 035, 106	95. 63
	Belanja Bagi Hasil	2, 980, 237, 500. 00	2, 874, 145, 906. 00	96. 44
	Belanja Bantuan Keuangan	201, 467, 648, 200. 00	192, 640, 889, 200. 00	95. 62

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

5. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berikut adalah anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 2. 95
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2024

N o	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN DAERAH	60. 818. 489. 034	60. 818. 489. 034	100
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80. 810. 717. 249	80. 810. 717. 249	100
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80. 810. 717. 249	80. 810. 717. 249	100
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80. 810. 717. 249	80. 810. 717. 249	100
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19. 992. 228. 216	19. 992. 228. 216	100
	Penyertaan Modal Daerah	0, 00	0, 00	0, 00



N o	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.992.228.216	19.992.228.216	100
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.992.228.216	19.992.228.216	100
	PEMBIAYAAN NETTO	60.818.489.033	60.818.489.033	100
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	68.716.758.573,94	0,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

2.4.1 Capaian Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tebo

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.



Dalam pelaksanaan pembangunan, capaian pelaksanaan SPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. 96

Capaian Pelaksanaan SPM yang Diselenggarakan Di Kabupaten Tebo Tahun 2024

CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN 2024

No	Indikator SPM Pendidikan	Capaian	
		Skor	Level
1	A.1 Kemampuan Literasi SD	54,58	Sedang
2	A.1 Kemampuan Literasi SMP	64	Sedang
3	A.2 Skor Kemampuan Numerasi SD	42,01	Sedang
4	A.2 Skor Kemampuan Numerasi SMP	57,36	Sedang
5	B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	70,93	Kurang
6	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 SD	98,19	Baik
7	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 SMP	98,19	Baik
8	B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	17,29	Kurang
9	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	25,62	Kurang
10	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	50,24	Sedang
11	D.10 Iklim Inklusivitas SD	54,1	Sedang
12	D.10 Iklim Inklusivitas SMP	53,75	Sedang
13	D.4 Iklim Keamanan SD	70,83	Baik
14	D.4 Iklim Keamanan SMP	66,31	Baik
15	D.8 Iklim Kebinekaan SD	70,39	Baik
16	D.8 Iklim Kebhinekaan SMP	69,64	Baik

CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN 2024

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	7.025	5227	Orang	74,41
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	7013	5300	Orang	75,57
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan layanan kesehatan	6568	5232	Orang	79,66



No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah balita usia 0-59 bulan mendapatkan layanan kesehatan	26182	20717	Orang	79,13
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Jumlah anak usia anak pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	55.242	55.056	Orang	99,66
6.	Pelayanan Pada Usia Produktif				
	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	228.859	228.859	Orang	100
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan skrining kesehatan	31.459	26.519	Orang	84,30
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi				
	Jumlah penderita hipertensi usia > 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan	77.835	700.27	Orang	89,97
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)				
	Jumlah penderita diabetes militus usia > 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan	2953	2953	Orang	100,00
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	675	625	Orang	92,59
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	Jumlah oarng terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar	4701	2719	Orang	57,84
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya				
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.197	4978	Orang	80,33

CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM 2024

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Satuan
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100.00	68.60	%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	100.00	87,97	%

CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 2024

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			%
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota			
	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	--	--
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena			



No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			%
	Indikator	Target	Realisasi	
	relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota			
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	--	--	--

CAPAIAN SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2023

- a. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal		
	Indikator	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya pengamanan dalam kegiatan masyarakat	100	100
2.	Meningkatkan Trantibum dan Tranmas	98	98
3.	Terlaksananya sosialisasi bagi Linmas	100	100

- b. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	A. Cakupan pelayanan bencana kebakaran hutan dan lahan	100%	100%	100%
		B. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen karhutla	100%	100%	100%
		C. Prosentase aparaturnya TRC yang memenuhi standar kualifikasi	28 orang	28 Orang	100%
		D. Jumlah kendaraan dan alat operasional karhutla	9 Unit	9 Unit	100%
		E. Penanggulangan korban bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung	100%	100%	100%
		F. Bantuan sosial bagi korban bencana	100%	100%	2024

- c. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal



	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	100 %	100 %

CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL 2024

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantas di luar panti				
	Jumlah penyandang cacat fisik mental / Disabilitas ,yang telah menerima bantuan sosial	450	655	Jiwa	145%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti				
	Jumlah Anak Terlantar yang telah menerima bantuan sosial	450	600	Jiwa	133%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti				
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang telah menerima bantuan sosial	100	209	Jiwa	209%
4.	Rehabilitasi Sosial Eks Penyandang Penyakit Sosial (PSK, NARKOBA, Gangguan Jiwa dan Penyakit Sosial Lainnya di Luar Panti				
	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (PSK, NARKOBA, Gangguan Jiwa dan Penyakit Sosial Lainnya) yang mendapatkan bantuan	-	-	Jiwa	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten				
	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	200	396	Jiwa	198%

2.6 Permasalahan Pembangunan

2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 disusun dengan mengangkat tema:



“Pembangunan ekonomi berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan, pengembangan SDM yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk Tebo Maju dan sejahtera”.

Berdasarkan tema tersebut, dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, perhatian terhadap permasalahan yang menghambat pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan merupakan hal yang mendasar. Analisis mendalam terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh daerah menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif. Pembahasan mengenai permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan utama dalam konteks Kabupaten Tebo mencakup:

Tabel. 2. 97
Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Ekonomi	Kesejahteraan masyarakat belum memadai	Pertumbuhan sektor industri pengolahan belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM belum memadai
			Sarana dan prasarana IKM belum memadai
		Pertumbuhan sektor pariwisata belum optimal	Pengembangan daya tarik destinasi wisata belum optimal
			Promosi destinasi wisata kurang memadai
			Pengembangan SDM pelaku wisata belum optimal
			Kapasitas produksi ekonomi kreatif belum memadai
			Kualitas produk ekonomi kreatif belum memadai
		Pengembangan BUMD belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia pengelola belum optimal
		Pembentukan modal tetap bruto belum memadai	Identifikasi potensi investasi belum optimal
			Promosi investasi belum memadai
		Ekspor barang dan jasa belum memadai	Quality control produk belum memadai
			Kerjasama pemasaran ekspor belum optimal
		Pertumbuhan sub sektor perikanan belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia perikanan belum optimal
			Sarana dan prasarana perikanan belum memadai
			Metode budidaya perikanan masih konvensional



Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Ketimpangan pendapatan masyarakat	Usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil belum memadai	Quality control produk belum memadai
			Produksi usaha mikro khususnya usaha non-pertanian belum memadai
		Volume usaha koperasi belum memadai	Kualitas produk usaha mikro belum memadai
			Kapasitas pemasaran produk usaha mikro belum optimal
	Pengangguran terbuka masih perlu diturunkan	Kesempatan kerja belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi belum optimal
			Kesesuaian kompetensi dengan permintaan pasar belum memadai
			Jaringan pemasaran tenaga kerja belum memadai
	Pengembangan ekonomi hijau belum optimal	Pertumbuhan sektor pertanian belum optimal	Kompetensi tenaga kerja belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia petani belum optimal
			Sarana dan prasarana pertanian belum memadai
			Metode budidaya pertanian masih konvensional
			Bencana pertanian
			Quality control produk belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia peternak belum optimal
			Sarana dan prasarana peternakan belum memadai
			Metode budidaya peternakan masih konvensional
			Serangan penyakit ternak masih terjadi
			Quality control produk belum memadai
	Stabilitas inflasi masih perlu dijaga secara berkesinambungan	Stabilitas harga barang dan jasa	Stabilitas harga barang pokok dan barang penting belum optimal
			Fluktuasi stok harga barang perdagangan
Transformasi Sosial	Kualitas sumber daya manusia masih belum optimal	belum optimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas	kebutuhan tenaga pendidik masih belum terpenuhi
			kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan
			sarana dan prasarana berkualitas penunjang layanan pendidikan masih belum merata
			manajemen dan tata kelola pendidikan masih belum optimal



Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal masih belum optimal
			kesadaran masyarakat di beberapa wilayah terhadap pendidikan masih perlu ditingkatkan
		belum optimalnya penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas	kebutuhan tenaga kesehatan di daerah masih belum terpenuhi
			kompetensi tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan
			sarana dan prasarana berkualitas penunjang layanan kesehatan masih belum merata
			manajemen dan tata kelola kesehatan masih belum optimal
			pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan masih belum optimal
			kebijakan penerapan sistem kesehatan terintegrasi masih belum optimal
			penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular masih perlu ditingkatkan
			pembudayaan hidup sehat dan upaya promotif-preventif masih belum optimal
	belum optimalnya pengentasan kemiskinan	belum optimalnya layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial	cakupan layanan perlindungan sosial masih terbatas pada kelompok tertentu
			integrasi data penerima bantuan masih belum optimal
			koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penanganan masalah sosial masih belum optimal
Transformasi Tata Kelola	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Belum optimalnya reformasi birokrasi berdampak	Belum optimalnya integrasi data antar PD
			Belum optimalnya kolaborasi PD dalam peningkatan kinerja
		Belum optimalnya implementasi sistem merit	Belum optimalnya manajemen talenta
			Pengembangan sumber daya manusia belum optimal
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya implementasi SKJ
			Kualitas pelayanan publik di luar MPP belum optimal
		Belum optimalnya	Belum optimalnya tindak lanjut dari pengaduan
			Belum optimalnya pengendalian internal



Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	pengawasan daerah	Implementasi Zona Intergritas (ZI) belum optimal
			Belum optimalnya pengawasan di level Desa
		Pengendalian pencemaran sungai belum optimal	Pemantauan titik sampel air belum optimal
			Belum optimalnya pencegahan dan pengawasan aktivitas tambang emas ilegal (PETI)
			Meningkatnya akumulasi sedimen pada jaringan sungai
			Belum optimalnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terintegrasi
		Menurunnya kualitas tutupan lahan	Meluasnya alih fungsi lahan
			Belum optimalnya rehabilitasi lahan pasca tambang
			Pemulihan lahan kritis masih perlu ditingkatkan
		Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal	infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah belum lengkap
			Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanganan sampah masih rendah
		Belum maksimalnya kualitas perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Kualitas kajian lingkungan hidup masih perlu diperkuat
			Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Belum optimalnya pelestarian lingkungan hutan
			Banyaknya alih fungsi lahan menjadi terbangun
			Pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Aksesibilitas wilayah untuk kesejahteraan masyarakat	Pembangunan jalan yang belum merata dan berkualitas
			Masih banyaknya rumah tidak layak huni
			Akses air minum dan sanitasi yang masih terbatas
	Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif	Belum optimalnya upaya penanggulang an risiko kelompok rentan	Belum optimalnya pengarusutamaan gender
			Pemenuhan ruang dan hak anak masih belum optimal
			Belum memiliki layanan rumah singgah dan penampungan yang representatif
			Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tebo 2025-2030



2.6.2 Identifikasi Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan pemerintah daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel. 2. 98
Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Penyelenggaraan layanan pendidikan masih belum optimal	jumlah guru masih belum terpenuhi
			Sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Sebaran tenaga pendidik dan kependidikan masih belum merata
			Tata kelola pendidikan masih belum optimal
			integrasi antara pendidikan formal dan pesantren masih belum optimal
			Kesejahteraan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan
			pengembangan dan Penerapan kurikulum lokal serta pendidikan karakter masih belum optimal
			pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pendidikan masih belum optimal
2	Kesehatan	Penyelenggaraan layanan kesehatan masih belum optimal	Kebutuhan tenaga kesehatan masih belum terpenuhi
			sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
			Kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan masih belum optimal
			Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan masih belum optimal
			pembudayaan pola hidup bersih dan sehat masih belum optimal
			Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular masih belum optimal
			Tata kelola rumah sakit masih belum optimal
			Belum terpenuhinya sarana dan prasarana RS yang sesuai standar
			Belum terpenuhinya sarana dan prasarana RS yang sesuai standar



No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kualitas jaringan jalan dalam kondisi mantap yang terus menurun	kurangnya pemeliharaan dan pengawasan jalan terbangun
			belum adanya masterplan desain jalan
			masih banyaknya ruas jalan dengan material tanah dan batu
		Sarana Prasarana SDA yang masih terbatas	sarana dan prasarana untuk normalisasi sungai masih terbatas
			pembebasan lahan sekitar sungai masih banyak kendala
			belum semua kawasan pertanian terfasilitasi jaringan irigasi teknis
			masih terbatasnya pembangunan turap untuk tebing sungai besar
		belum meratanya akses air minum dan sanitasi masyarakat	Kualitas air layak, belum aman
			belum terpenuhinya akses air (PAMSIMAS) di kawasan seberang sungai
			Kondisi eksisting karakteristik daerah yang sulit untuk pelayanan air
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan PSU permukiman belum optimal	menurunnya akses sanitasi layak masyarakat
			kurangnya pemeliharaan dan pengawasan fasilitas LPJU
			pembangunan rapat beton belum merata
			drainase permukiman yang belum optimal
		Penanganan kawasan kumuh belum optimal	tempat pembuangan sampah yang tidak terpenuhi
			belum adanya baseline numerik kawasan kumuh
			belum adanya dokumen penanganan kawasan permukiman (RP3KP)
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Masih tingginya tingkat kriminalitas daerah	penanganan RTLH belum optimal
			kerapatan antar rumah yang tinggi
		Belum optimalnya tingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana	Fasilitasi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik belum optimal
			Penguatan pencegahan tindak kejahatan belum optimal
			Belum Optimalnya mitigasi dan sinergitas semua elemen dalam penanganan bencana
			Pengurangan Risiko Bencana belum dilaksanakan secara menyeluruh
6	Sosial	Layanan peningkatan kebutuhan dasar PPKS masih terbatas	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemadam dan penyelamatan
			Belum adanya pusat rehabilitasi sosial yang menyebabkan minimnya layanan ODGJ dan lansia terlanter
			Belum kuatnya basis data penerima bantuan sosial yang menyebabkan bantuan sosial belum tepat sasaran



No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			Minimnya jaminan sosial terkait kebencanaan akibat belum adanya dapur umum dan belum berfungsinya kampung siaga bencana
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja	Rendahnya kesesuaian ketersediaan tenaga kerja dengan tingkat kebutuhannya	Masih rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja
			Pelatihan tenaga kerja masih belum optimal
			Akses masyarakat terhadap informasi tenaga kerja masih belum merata
			Kesempatan lapangan usaha mandiri masih rendah
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya keberdayaan perempuan	Belum optimalnya pengarusutamaan gender
			Belum optimalnya akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik
		Belum optimalnya perlindungan anak	Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
			Layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan pada anak belum optimal
			Kasus pernikahan dini masih cukup banyak
9	Pangan	Ketahanan pangan belum optimal	Belum optimalnya penegakan regulasi penetapan kawasan pertanian yang berkelanjutan
			Keterjangkauan pangan belum optimal
			Pemanfaatan pangan belum memadai
			Belum optimalnya pengembangan cadangan pangan di tingkat masyarakat
10	Pertanahan	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan	Tertib pengelolaan pertanahan belum optimal
			Tingginya konflik penguasaan atas tanah
			Belum optimalnya fasilitasi penerbitan sertifikat tanah masyarakat
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengelola lingkungan	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah
			Belum optimalnya pembinaan hidup pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
			Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
			Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan masih belum lengkap dan belum menjangkau seluruh masyarakat
			Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih rendah
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam setiap program LPM	Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih belum optimal
			Belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa/BUMDes
			Kualitas aparatur desa masih perlu ditingkatkan



No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendahnya kepesertaan KB aktif	Akses dan kualitas pelayanan KB yang belum merata
			Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi masih rendah
15	Perhubungan	Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan perhubungan kurang memadai	Belum optimalnya kualitas sistem angkutan jalan darat dan sungai
			Kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas perhubungan masih rendah
16	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan informasi publik	Masih kurangnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Belum optimalnya proses administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik berbasis elektronik	Belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintah
			Belum optimalnya pengembangan sistem TIK
			Kapasitas SDM TIK masih terbatas
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kapasitas manajerial koperasi belum optimal	Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
			Kapasitas SDM pengelola koperasi belum optimal
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi K-UKM belum optimal	Kurangnya daya saing KUMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen
			Masih minimnya pelaku UMKM memanfaatkan IT dalam pemasaran
18	Penanaman Modal	Realisasi investasi masih perlu ditingkatkan	Belum efektifnya promosi investasi
			Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menarik investor
			Prosedur pelayanan perizinan belum efektif
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan, dan kegiatan kepemudaan	Minimnya sarana dan prasarana pengembangan kepemudaan dan olahraga
20	Statistik	Belum optimalnya penanganan data statistik sektoral	Penguatan sumber perencanaan dan sumber data belum optimal dilaksanakan
			Pengumpulan data statistik sektoral yang belum optimal
21	Persandian	Belum adanya jaminan keamanan data dan informasi	Kurangnya keterampilan SDM pengelolaan persandian
			Urusan persandian belum dimasukkan dalam perencanaan



No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
22	Kebudayaan	Pengembangan pelestarian budaya dan kearifan lokal daerah belum optimal	Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur Sarana promosi kebudayaan masih belum optimal
23	Perpustakaan	Budaya literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan	Belum terpenuhinya kebutuhan pustakawan Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan Masih kurangnya kesadaran institusi dalam mengelola perpustakaan Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan Masih terbatasnya koleksi bacaan baik cetak maupun digital belum tersedianya perpustakaan daerah Kompetensi pengelola perpustakaan masih belum optimal
24	Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah	masih terbatasnya jumlah tenaga arsip aris belum optimalnya tata kelola arsip di daerah belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip di daerah masih minimnya kesadaran institusi dalam mengelola arsip
Urusan Pemerintahan Pilihan			
25	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan	Belum optimalnya produksi benih perikanan dalam menunjang produksi perikanan daerah Tingginya biaya input produksi dan kenaikan harga ikan yang tidak seimbang Lemahnya kelembagaan/administrasi kelompok pengolahan dan pemasaran ikan Rendahnya mutu hasil produk olahan ikan
26	Pariwisata	Belum optimalnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Belum optimalnya promosi wisata Pengembangan daya tarik destinasi belum optimal Pengembangan ekonomi kreatif belum memadai
27	Pertanian	Produksi pertanian belum optimal	Belum optimalnya pembinaan terhadap petani dalam peningkatan produktivitas pertanian Belum optimalnya keberagaman pengadaan bibit untuk wilayah yang memiliki potensi baru Belum optimalnya pengolahan hasil pertanian Belum efektifnya alur tata niaga pangan
		Produksi hasil peternakan belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia peternak belum memadai Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai Metode peternakan masih konvensional



No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
28	Perdagangan	Pengembangan sektor perdagangan belum optimal	Masih kurangnya kecukupan produk lokal sehingga masih menggantungkan pada pasokan luar daerah
			Rendahnya nilai ekspor daerah dalam bidang perdagangan
29	Perindustrian	Pengembangan IKM belum optimal	Belum optimalnya daya saing bidang industri
			Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung perindustrian
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
30	Sekretariat Daerah	Capaian reformasi birokrasi belum optimal	Lambatnya koordinasi terkait pembaruan data dari perangkat daerah
			SKM belum dapat dilaksanakan
			Reformasi birokrasi berdampak belum optimal
		Belum optimalnya pelayanan publik di luar MPP	
		Penataan batas wilayah belum optimal	Pelacakan batas baru terlaksana sebanyak 6 dari 20 segmen
31	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya kualitas layanan bagi pimpinan DPRD	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor
			Presentase Prolegda yang terfasilitasi masih belum optimal
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
32	Perencanaan Pembangunan	Konsistensi perencanaan belum optimal	Indikator kinerja belum mengimplementasikan SMART-C
			Tantangan penyesuaian peraturan teknis dari pemerintah pusat terkait nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinamis
			Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal
33	Keuangan	Kapasitas fiskal dan penganggaran daerah belum optimal	Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat
			Perusahaan Umum Daerah belum optimal berkontribusi terhadap pendapatan daerah
			Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
			Ketertiban pengelolaan keuangan daerah belum optimal
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya implementasi sistem merit	Pengembangan sumber daya manusia belum optimal
			Implementasi manajemen talenta belum optimal
			Belum optimalnya implementasi Standar Kompetensi Jabatan
35	Penelitian dan Pengembangan	Riset dan inovasi belum optimal	Ekosistem riset dan inovasi daerah belum optimal
			Masih terbatasnya fungsional peneliti
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
36	Inspektorat Daerah	Belum optimalnya pengawasan daerah dan perangkat daerah	Implementasi Zona Integritas (ZI) belum optimal
			Belum adanya integrasi pengukuran kinerja instansi pemerintah
			Miskomunikasi dan miskonsepsi terhadap inspektorat oleh perangkat daerah
			Belum optimalnya pengawasan di level desa
Unsur Kewilayahan			



No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
37	Kecamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat	Standar sarana prasarana pelayanan belum terpenuhi secara optimal
		Belum optimalnya koordinasi kewilayahan	Peran koordinasi pendataan belum optimal
			Tantangan penyelesaian konflik di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya fasilitasi pembangunan desa	Belum optimalnya pendampingan pengembangan potensi kewilayahan di desa-desa
Unsur Pemerintahan Umum			
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum optimalnya pembinaan dan koordinasi antar masyarakat	Potensi konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat
			Ketergantungan masyarakat dengan pemodal
			Rendahnya partisipasi dan pendidikan politik

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tebo 2025-2030

Tabel T-C. 19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2024
Kabupaten Tebo

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	2,630,932,514.03	100%	181,832,009,518.00	BB	227,964,769,936.00	BB	218,632,533,257.00	BB	96%		400,464,542,775.00		15221%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun			51 Dokumen	892,495,748.00	51 Dokumen	844,999,000.00	51 Dokumen	715,357,807.00	51 Dokumen	85%		1,607,853,555.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	199,750,000.00	2 Dokumen	149,999,000.00	2 Dokumen	89,018,715.00	2 Dokumen	59%		288,768,715.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5 Dokumen	34,886,000.00	5 Dokumen	35,000,000.00	5 Dokumen	30,750,000.00	5 Dokumen	88%		65,636,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	34,719,600.00	2 Dokumen	35,000,000.00	2 Dokumen	33,661,272.00	2 Dokumen	96%		68,380,872.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	33,991,448.00	2 Dokumen	35,000,000.00	2 Dokumen	35,000,000.00	2 Dokumen	100%		68,991,448.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	34,806,000.00	2 Dokumen	35,000,000.00	2 Dokumen	31,639,020.00	2 Dokumen	90%		66,445,020.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	499,983,700.00	12 Laporan	500,000,000.00	12 Laporan	440,360,000.00	12 Laporan	88%		940,343,700.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26 Laporan	54,359,000.00	26 Laporan	55,000,000.00	26 Laporan	54,928,800.00	26 Laporan	100%		109,287,800.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil Administrasi Keuangan			10 Dokumen	177,160,930,954.00	12 Laporan	223,414,825,738.00	12 Laporan	214,753,171,220.00	12 Laporan	96%		391,914,102,174.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1400 Orang	177,110,930,954.00	1400 Orang	223,364,825,738.00	1400 Orang	214,706,712,386.00	1400 Orang	96%		391,817,643,340.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			10 Dokumen	50,000,000.00	10 Dokumen	50,000,000.00	10 Dokumen	46,458,834.00	10 Dokumen	93%		96,458,834.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah			12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	96,916,184.00	12 Laporan	97%		196,916,184.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	96,916,184.00	12 Laporan	97%		196,916,184.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Kepegawaian perangkat Daerah			5 Kegiatan	89,761,000.00	30 Orang	45,000,000.00	30 Orang	41,717,013.00	30 Orang	93%		131,478,013.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5 Kegiatan	89,761,000.00	30 Orang	45,000,000.00	30 Orang	41,717,013.00	30 Orang	93%		131,478,013.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum			100.00%	1,055,897,010.00	100.00%	741,181,943.00	100.00%	732,241,878.00	100.00%	99%		1,788,138,888.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			15 Paket	93,600,000.00	15 Paket	93,600,000.00	15 Paket	93,559,255.00	15 Paket	100%		187,159,255.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2,311,719.00	1 Paket	109,999,843.00	1 Paket	101,780,961.00	1 Paket	93%		104,092,680.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	145,000,000.00	12 Paket	107,499,059.00	12 Paket	107,497,654.00	12 Paket	100%		252,497,654.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			15 Paket	150,000,000.00	15 Paket	149,999,700.00	15 Paket	149,999,590.00	15 Paket	100%		299,999,590.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			250 Dokumen	80,000,000.00	250 Dokumen	45,083,341.00	250 Dokumen	45,000,000.00	250 Dokumen	100%		125,000,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			2 Laporan	135,000,000.00	2 Laporan	35,000,000.00	2 Laporan	34,995,000.00	2 Laporan	100%		169,995,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200 Laporan	449,985,291.00	200 Laporan	200,000,000.00	200 Laporan	199,408,418.00	200 Laporan	100%		649,394,709.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah			96.53%	1,997,029,788.00	100.00%	2,108,765,355.00	100.00%	1,798,294,309.00	100.00%	85%		3,795,324,097.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	1,040,742,200.00	12 Laporan	1,003,800,000.00	12 Laporan	951,173,582.00	12 Laporan	95%		1,991,915,782.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			13 Laporan	119,443,588.00	12 Laporan	264,659,555.00	12 Laporan	120,863,927.00	12 Laporan	46%		240,307,515.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			14 Laporan	836,844,000.00	12 Laporan	840,305,800.00	12 Laporan	726,256,800.00	12 Laporan	86%		1,563,100,800.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah			94.85%	535,895,018.00	100.00%	709,997,900.00	100.00%	494,834,846.00	100.00%	70%		1,030,729,864.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			96 Unit	335,895,018.00	96 Unit	534,999,700.00	96 Unit	319,924,365.00	96 Unit	60%		655,819,383.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	200,000,000.00	20 Unit	174,998,200.00	20 Unit	174,910,481.00	20 Unit	100%		374,910,481.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga PAUD, SD & SMP yang terakreditasi A	12%	114,532,479,692.16	8%	108,643,460,021.00	9%	115,957,764,273.00	9%	101,622,584,404.00	9%	88%		210,266,044,425.00	184%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APM SD			98.49%	75,679,994,030.00	98.29%	81,484,877,579.00	98.29%	70,766,743,065.00	98.20%	87%		146,446,737,095.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			30 Ruang	6,134,208,388.00	5 Ruang	1,541,500,000	5 Ruang	1,506,398,139.00	5 Ruang	98%		7,640,606,527.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			5 Ruang	3,000,000.00		10,000,000.00		5,834,000		58%		8,834,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			70 Unit	14,405,999,867.00	30 Ruang	26,807,040,569.00	30 Ruang	26,418,440,328.00	30 Ruang	99%		40,824,440,195.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun			5 unit	100,420,559.00								100,420,559.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			20 Ruang	1,823,259,876.00								1,823,259,876.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia						1,259,999,870.00		1,227,690,501		97%		1,227,690,501.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					499,134,000.00								499,134,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			420 Peserta Didik	173,562,500.00	420 Peserta Didik	250,000,000.00	420 Peserta Didik	243,352,676	420 Peserta Didik	97%		416,915,176.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar					20 Ruang	50,000,000.00	20 Ruang	5,628,000	20 Ruang	11%		5,628,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			396 Peserta Didik	339,920,000.00	396 Peserta Didik	450,000,000.00	396 Peserta Didik	411,364,364	396 Peserta Didik	91%		751,284,364.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Nakaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			200 Orang	881,155,240.00	200 Orang	195,000,000.00	200 Orang	194,572,600	200 Orang	100%		1,075,727,840.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Diaksarakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			250 Satuan Pendidikan	86,712,100.00	250 Satuan Pendidikan	120,000,000.00	250 Satuan Pendidikan	113,828,000	250 Satuan Pendidikan	95%		200,540,100.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			270 Satuan Pendidikan	50,545,740,000.00	270 Satuan Pendidikan	50,551,337,140.00	270 Satuan Pendidikan	40,437,934,457.00	270 Satuan Pendidikan	80%		90,983,674,457.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			25 Orang	158,800,000.00	25 Orang	250,000,000.00	25 Orang	201,700,000	25 Orang	81%		360,500,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					160,051,500.00								160,051,500.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					350,947,800.00								350,947,800.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					17,062,200.00								17,062,200.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase lembaga PAUD, SD & SMP yang terakreditasi A	96.69%	16,696,934,080.00	2 Dokumen	18,986,992,390.00	2 Dokumen	18,489,179,356.00	2 Dokumen	18,489,179,356.00	2 Dokumen	97%		35,186,113,436.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			20 Ruang	1,039,408,545.00								1,039,408,545.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun			5 unit	13,895,100.00								13,895,100.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			30 Unit	13,593,254,874.00	25 Orang	5,234,510,300	25 Orang	5,150,890,372.00	25 Orang	98%		18,744,145,246.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			35 Ruang	581,457,361.00	83.29%	11,715,956,600	83.29%	11,613,584,213	83.29%	99%		12,195,041,574.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket			520,800.00	20 Ruang	1,036,532,990	20 Ruang	1,022,131,000	20 Ruang	99%		1,022,651,800.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					334,753,500.00								334,753,500.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			134 Peserta Didik	62,639,700.00	30 unit	100,000,000	30 unit	99,491,900	30 unit	99%		162,131,600.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					5 unit	199,992,500	5 unit	0	5 unit	0%		-			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			67 Peserta Didik	42,611,200.00	35 Ruang	50,000,000	35 Ruang	24,432,780.00	35 Ruang	49%		67,043,980.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			504 Peserta Didik	249,553,500.00	1 Paket	200,000,000	1 Paket	177,762,610	1 Paket	89%		427,316,110.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			120 Orang	281,073,600.00	1 Paket	100,000,000	1 Paket	99,900,000	1 Paket	100%		380,973,600.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			67 Satuan Pendidikan	99,530,200.00	134 Peserta Didik	150,000,000	134 Peserta Didik	148,486,481	134 Peserta Didik	99%		208,016,681.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana			25 Orang	193,456,000.00	67 Peserta Didik	200,000,000.00	67 Peserta Didik	152,500,000	67 Peserta Didik	76%		345,956,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					126,531,000.00								126,531,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					118,248,700.00								118,248,700.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga PAUD, SD & SMP yang terakreditasi A			79.50%	12,905,998,675.00	504 Peserta didik	12,069,089,522.00	504 Peserta didik	11,470,189,024.00	504 Peserta didik	95%		24,376,187,699.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibanun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibanun			5 Unit	3,634,213,775.00	120 Orang	3,294,785,601.00	120 Orang	3,278,619,856.00	120 Orang	100%		6,912,833,631.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			1 Paket	469,988,800.00	67 Sekolah	149,774,300	67 Sekolah	142,776,500	67 Sekolah	95%		612,765,300.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD					360,873,400.00								360,873,400.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			490 Peserta Didik	439,187,200.00	25 Orang	200,000,000	25 Orang	156,630,350	25 Orang	78%		595,817,550.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					2 Dokumen	619,999,471	2 Dokumen	618,399,209	2 Dokumen	100%		618,399,209.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			7990 Peserta Didik	187,069,000.00	120 Orang	535,857,950	120 Orang	530,182,313	120 Orang	99%		717,251,313.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD				50 Satuan Pendidikan	76,337,994.00								76,337,994.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			664 Orang	2,095,812,360.00		2,152,349,600		1,680,453,140		78%		3,776,265,500.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			20 Orang	180,642,600.00	5 unit	215,000,000	5 unit	211,536,890	5 unit	98%		392,179,490.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			50 Lembaga	522,073,546.00	76.90%	149,994,400	76.90%	149,928,428	76.90%	100%		672,001,974.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				4,939,800,000.00	10 Paket	4,601,328,200.00	10 Paket	4,561,957,020.00	10 Paket	99%		9,501,757,020.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi					1 Paket	150,000,000	1 Paket	139,705,318	1 Paket	93%		139,705,318.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan:	Persentase Tingkat partisipasi warga usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			100.00%	3,360,533,236.00	7990 Peserta Didik	3,416,804,782.00	7990 Peserta Didik	896,472,959.00	7990 Peserta Didik	26%		4,257,006,195.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					74,961,590.00								74,961,590.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan					25,208,000.00	50 Satuan Pendidikan	25,022,142.00	50 Satuan Pendidikan	24,900,174.00	50 Satuan Pendidikan	100%		50,108,174.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			5 Unit	49,790,850.00	664 Orang	189,000,000.00	664 Orang	145,739,360	664 Orang	77%		195,530,210.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar			32 Kelompok	220,498,200.00	20 Orang	350,000,000	20 Orang	348,366,000	20 Orang	100%		568,864,200.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				7 PKBM	434,716,866.00								434,716,866.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			30 Orang	86,684,000.00	50 Satuan Pendidikan	160,000,000	50 Satuan Pendidikan	159,635,200	50 Satuan Pendidikan	100%		246,519,200.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			30 Orang	63,730,550.00	4.89%	49,996,640	4.89%	49,336,410	4.89%	99%		113,066,960.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			23 Lembaga	157,243,180.00	1 Unit	2,562,786,000.00	1 Unit	89,743,750	1 Unit	4%		246,986,930.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					2,247,700,000.00								2,247,700,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di						50 Satuan Pendidikan	80,000,000	50 Satuan Pendidikan	78,552,065	50 Satuan Pendidikan	98%		78,552,065.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase standar kompetensi yang terpenuhi pada kurikulum muatan	100%	502,078,388.97	100%	251,980,300.00	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	187,403,823.00	1 Unit	94%		439,384,123.00		88%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			321 Sekolah	148,896,000.00	5 Paket	100,000,000	5 Paket	90,150,400.00	5 Paket	90%		239,046,400.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				148,896,000.00	2801 Peserta Didik	100,000,000	2801 Peserta Didik	90,150,400		90%		239,046,400.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			4 Kegiatan	103,084,300.00	8 Satuan Pendidikan	100,000,000	8 Satuan Pendidikan	97,253,423.00	8 Satuan Pendidikan	97%		200,337,723.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				63,421,100.00	100 Orang	50,000,000	100 Orang	49,960,663	100 Orang	100%		113,381,763.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				39,663,200.00	50 Orang	50,000,000	50 Orang	47,292,760	50 Orang	95%		86,955,960.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan guru tersertifikasi di masing-masing sekolah	82%	2,877,411,247.17	78%	2,691,826,000.00	23 Satuan Pendidikan	2,340,500,000.00	23 Satuan Pendidikan	2,314,604,040.00	23 Satuan Pendidikan	99%		5,006,430,040.00		174%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			324 Orang	2,691,826,000.00	23 Satuan Pendidikan	2,340,500,000	23 Satuan Pendidikan	2,314,604,040.00	23 Satuan Pendidikan	99%		5,006,430,040.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			324 Orang	2,691,826,000.00	100%	2,340,500,000	100%	2,314,604,040	100%	99%		5,006,430,040.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Izin Pendidikan yang diterbitkan	100%	2,013,685,794.63	100%	-	1 Kegiatan	50,000,000.00	1 Kegiatan	50,000,000.00	1 Kegiatan	100%		50,000,000.00		2%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD/ Non Formal			5 Dokumen	-	352 Orang	50,000,000	352 Orang	50,000,000	352 Orang	100%		50,000,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			5 Dokumen		2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	100%		50,000,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1,041,528,074.00		1,970,000,000.00		1,888,876,435.09							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1,041,528,074.00		1,970,000,000.00		1,888,876,435.09							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya daerah yang mendapatkan HAKI	50%	1,029,260,697.38	13 Kegiatan	699,400,074.00	79%	1,250,000,000.00	79%	1,200,425,417.00	79%	96%		1,899,825,491.00		185%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pegelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			19 Objek	449,568,474.00	324	1,000,000,000	324	954,866,237.00	324	95%		1,404,434,711.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			9 Event/ Hakki	399,598,724	5 Dokumen	600,000,000.00	5 Dokumen	582,412,717	5 Dokumen	97%		982,011,441.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			7 Sekolah	49,969,750		400,000,000.00		372,453,520		93%		422,423,270.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			6 Tari/Musik Daerah	50,000,000.00	42.00%	100,000,000.00	42.00%	98,932,180.00	42.00%	99%		148,932,180.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			6 Tari/Musik Daerah	50,000,000.00	19 Objek	100,000,000.00	19 Objek	98,932,180.00	19 Objek	99%		148,932,180.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Lembaga SDM Lembaga Adat yang terbina			20 Orang	199,831,600.00	19 Objek	150,000,000.00	19 Objek	146,627,000.00	19 Objek	98%		346,458,600.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				50,000,000.00								50,000,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina			20 Orang	149,831,600.00	7 Orang	150,000,000.00	7 Orang	146,627,000.00	7 Orang			296,458,600.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase pengurangan event Budaya dari kalender event tahunan pariwisata	40%	213,182,483.96	30 Orang/ Legalitas	249,408,000.00	6 Laporan	420,000,000.00	6 Laporan	392,266,488.00	6 Laporan	93%		641,674,488.00	301%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Seniman yang mendapatkan pelatihan			30 Orang/ Legalitas	249,408,000.00	6 Laporan	420,000,000.00	6 Laporan	392,266,488.00	6 Laporan	93%		641,674,488.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			20 Orang	205,000,000.00	4 Objek	350,000,000.00	4 Objek	346,318,488.00	4 Objek	99%		551,318,488.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				44,408,000.00	4 Objek	70,000,000.00	4 Objek	45,948,000.00	4 Objek			90,356,000.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pemanfaatan data dan informasi sejarah	70%	100,415,677.73	20 Orang	23,151,200.00	20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	49,808,040.00	20 Orang	100%		72,959,240.00	73%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benda Cagar Budaya dan Tradisi yang dilindungi dan dijadikan koleksi permuseuman				23,151,200.00	35.00%	50,000,000.00	35.00%	49,808,040.00	35.00%	100%		72,959,240.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				23,151,200.00	24 Orang	50,000,000.00	24 Orang	49,808,040.00	24 Orang	100%		72,959,240.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase bangunan dan situs budaya yang mendapatkan sertifikat pelestarian	35%	215,893,707.26	8 situs Cagar Budaya	49,683,600.00	20 Orang	250,000,000.00	20 Orang	246,376,490.09	20 Orang	99%		296,060,090.09	137%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah situs/benda diduga cagar budaya yang ditetapkan dan ditetapkan			8 situs Cagar Budaya	49,683,600.00	10 Grup	250,000,000.00	10 Grup	246,376,490.09	10 Grup	99%		296,060,090.09			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			8 Objek	24,879,200.00	60%	50,000,000.00	60%	49,090,197.00	60%	98%		73,969,397.09			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			1 Objek	24,804,400.00	4 Dokumen	200,000,000.00	4 Dokumen	197,286,293.00	4 Dokumen	99%		222,090,693.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Koleksi dan SDM Permuseuman yang dikelola	40%	50,207,838.90	8 situs Cagar Budaya	19,885,200.00								19,885,200.00	40%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi yang dikelola			8 situs Cagar Budaya	19,885,200.00								19,885,200.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	8 situs Cagar Budaya				19,885,200.00								19,885,200.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
TOTAL							294,480,803,913.00		348,483,034,209.00		324,696,007,959.09		93%						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							83,190,277,136.00		123,965,542,651.06		111,275,652,239.00								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							83,190,277,136.00		123,965,542,651.06		111,275,652,239.00								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	48,653,418,605.00		55,001,492,666.00		72,639,874,896.06		70,161,874,647.00		97%		125,163,367,313.00	257%		DINAS KESEHATAN	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					73,393,477.00		35,312,839.00		26,585,007.00		75%		99,978,484.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 dokumen	64,218,377.00	3 dokumen	27,812,563.00	3 dokumen	24,738,063.00	3 dokumen	89%		88,956,440.00			DINAS KESEHATAN	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Laporan	8,175,100.00	6 Laporan	7,500,276.00	6 Laporan	1,846,944.00	6 Laporan	25%		11,022,044.00			DINAS KESEHATAN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					51,216,790,943.00		52,516,840,170.00		51,325,995,584.00		98%		102,542,786,527.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			80 orang	50,721,556,443.00	630	52,103,989,305.00	630	50,923,562,364.00	630	98%		101,645,118,807.00			DINAS KESEHATAN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3 dokumen	483,065,000.00	48	406,476,000.00	48	398,714,000.00	48	98%		881,779,000.00			DINAS KESEHATAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			3 Laporan	12,169,500.00	3	6,374,865.00	3	3,719,220.00	3	58%		15,888,720.00			DINAS KESEHATAN	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					121,687,368.00		87,579,943.00		82,068,943.00		94%		203,756,311.00			DINAS KESEHATAN	

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			3 Laporan	121,687,368	3	87,579,943.00	3	82,068,943.00	3	94%		203,756,311.00			DINAS KESEHATAN	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					21,574,000.00		10,199,650.00		6,782,650.00		66%		28,356,650.00			DINAS KESEHATAN	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			2 Peraturan	21,574,000	85	10,199,650.00	20	6,782,650.00	20	66%		28,356,650.00			DINAS KESEHATAN	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			1 Peraturan												DINAS KESEHATAN	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					399,740,949.00		201,128,949.00		186,947,503.00		94%		588,688,452.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Paket	-	10	3,815,838	1	3,815,838	1	100%		3,815,838.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	41,398,300								41,398,300.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	12,500,000	1	9,501,000	1	76%		9,501,000.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100 Paket	9,704,050	100	3,824,322	3	3,824,322	3	100%		13,528,372.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			10 Dokumen	4,643,800	10	7,715,687	5	4,563,318	5	59%		9,207,118.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			15 Paket	39,021,700	15	20,773,102	5	20,773,102	5	100%		59,794,802.00			DINAS KESEHATAN	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			300 Paket	-	30	6,000,000	-	-	-	0%		-			DINAS KESEHATAN	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40 Laporan	304,973,099	40	146,500,000	40	146,469,923	40	100%		451,443,022.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,252,850,964.00		2,062,200,540.00		2,041,720,142.00		99%		4,294,571,106.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyerat					-								-			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			88%	446,060,964	12	454,198,740.00	12	453,826,796.00	12	100%		899,887,760.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			99%	1,806,790,000	190	1,608,001,800.00	146	1,587,893,346.00	146	99%		3,394,683,346.00			DINAS KESEHATAN	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					915,454,965.00		812,915,824.00		668,436,202.00		82%		1,583,891,167.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			68 Unit	879,660,965	68	800,903,354	40	665,688,286	40	83%		1,545,349,251.00			DINAS KESEHATAN	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	34,594,000								34,594,000.00			DINAS KESEHATAN	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	1,200,000	10	12,012,470	2	2,747,916	2	23%		3,947,916.00			DINAS KESEHATAN	
		Peningkatan Pelayanan BLUD							16,913,696,981.06		15,821,338,616.00		94%		15,821,338,616.00			DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					20	16,913,696,981	20	15,821,338,616	20	94%		15,821,338,616.00			DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				78%	50,261,613,376.89		26,792,852,647.00		48,467,000,501.00		80%		65,645,156,468.00		131%	DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai > 90%				11,538,241,643.00		8,075,735,235.00		7,600,199,048.00		94%		19,138,440,691.00			DINAS KESEHATAN	
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			3 Unit	894,288,000	3	469,256,000	1	234,568,900		50%		1,128,856,900.00			DINAS KESEHATAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana - Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			2 Unit	834,030,080	5	171,093,500		-		0%		834,030,080.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			2 Unit	227,832,634								227,832,634.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100									-			DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			100	3,688,659,000	43	3,957,125,732	6	3,940,409,903		100%		7,629,068,903.00			DINAS KESEHATAN	

		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		100 Paket	2,700,074,115	80	3,368,710,283	80	3,344,694,329	99%	6,044,768,444.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai			10 Paket	3,027,675,504						3,027,675,504.00	DINAS KESEHATAN	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		5 Unit	48,360,360	6	109,549,720	31	80,525,916	74%	128,886,276.00	DINAS KESEHATAN	
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		239	117,321,950						117,321,950.00	DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai > 90%			15,015,993,580.00		39,821,158,267.00		31,016,076,504.00	78%	46,034,070,084.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100%	171,677,400	6965	667,085,500	5227	626,691,000	94%	798,368,400.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100%	193,353,250	6649	698,694,000	5300	675,487,336	97%	868,840,586.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100%	47,775,700	6332	166,637,832	5261	157,085,500	94%	204,861,200.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100%	305,624,000	24714	41,741,800	20717	35,805,900	86%	341,429,900.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100%	39,228,600	55075	824,136,200		802,737,000	97%	841,965,600.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100%	131,116,150	204950	55,385,800	233328	42,064,318	76%	173,180,468.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100%	40,672,200	36354	43,291,200		26,767,461	62%	67,439,661.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100%	40,949,000	63571	44,233,900	70027	43,068,000	97%	84,017,000.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100%	348,621,700	3012	619,997,033	3790	540,551,650	87%	889,173,350.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		100%	63,852,450	630	58,585,000	625	51,907,149	89%	115,759,599.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		100%	45,396,000	2457	385,043,756	2717	253,909,050	66%	299,305,050.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		100%	140,961,560	6197	99,652,000	4836	72,835,400	73%	213,796,960.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		100%	46,509,700	18	39,538,800	12	37,485,800	95%	83,995,500.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		81%	188,872,720	3	4,615,325,011	3	3,413,728,000	74%	3,602,600,720.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		80%	51,611,850	2	37,048,800	2	30,097,100	81%	81,708,950.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		55%	161,420,221	6	1,723,633,300	6	1,659,865,640	96%	1,821,285,861.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		100%	112,627,200	12	259,947,837	12	238,186,835	92%	350,814,035.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		80%	7,225,600	20	13,091,500		12,228,000	93%	19,453,600.00	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	91,655,700	5891	1,391,645,657	5046	1,256,299,500	90%	1,347,965,200.00	DINAS KESEHATAN	

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			100%	40,760,000								40,760,000.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100%	18,444,550	7	75,089,567	8	70,318,218	8	94%		88,762,768.00			DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		80%	462,516,777	20	3,001,915,200	17	2,685,021,389	17	89%		3,147,538,166.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		45%	11,867,208,652	20	13,283,358,835	20	12,829,712,371	20	97%		24,696,921,023.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			100%	-	120	136,606,799		48,759,399		36%		48,759,399.00			DINAS KESEHATAN	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		100%	-	20	8,633,976,206	20	2,973,502,466	20	34%		2,973,502,466.00			DINAS KESEHATAN	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		10 Dokumen	52,979,000	2	96,822,600	2	54,675,989	2	56%		107,654,989.00			DINAS KESEHATAN	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		100%	148,083,600	3	253,440,000	1	115,627,500	1	46%		263,711,100.00			DINAS KESEHATAN	
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		100%		12	208,670,000	12	189,280,000	12	91%		189,280,000.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100%	-	967	197,510,000	560	156,638,500	560	79%		156,638,500.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24	48,363,200	19	33,201,350	19	69%		33,201,350.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria		100%	196,850,000	5891	188,214,016	3571	180,421,467	3571	96%		377,271,467.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				1	469,410,000	1	461,430,000	1	98%		461,430,000.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak				1	1,443,066,918	1	1,242,687,216	1	86%		1,242,687,216.00			DINAS KESEHATAN	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksananya Pemenuhan Layanan Sekretariat			52,572,027.00		423,390,000.00		134,794,400.00		32%		187,366,427.00			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			24785999									-			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			3 Dokumen	52,572,027	3	423,390,000	3	134,794,400		32%		187,366,427.00			DINAS KESEHATAN	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)			186,045,397.00		146,716,999.00		99,233,869.00		68%		285,279,266.00			DINAS KESEHATAN	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		20 Unit	186,045,397	22	146,716,999	22	99,233,869	22	68%		285,279,266.00			DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Bersertifikat Kompetensi	92%		205,486,676.62		411,578,023.00		1,494,162,625.00		67%		1,412,155,131.00		687%	DINAS KESEHATAN	
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Ketersediaan SDM Kesehatan			63,857,300.00		60,455,700.00		36,108,518.00		60%		99,965,818.00			DINAS KESEHATAN	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		90%	63,857,300	514	60,455,700	575	36,108,518		60%		99,965,818.00			DINAS KESEHATAN	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				127,444,723.00		250,632,468.00		100,637,790.00		40%		228,082,513.00			DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		80%	50,196,523	2399	10,403,100	2058	10,081,515		97%		60,278,038.00			DINAS KESEHATAN	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		80%	77,248,200	21	240,229,368	21	90,556,275		38%		167,804,475.00			DINAS KESEHATAN	

[illegible]

		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				300,871,000.00													DINAS KESEHATAN	
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	24 Kampung KB		17,706,200													DINAS KESEHATAN	
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			43,164,800													DINAS KESEHATAN	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB				240,000,000													DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penurunan Persentase Angka Keluarga Pra Sejahtera	8 % Keluarga Pra KS	186,906,758.78	2,842,223,600.00								2,842,223,600.00			1521%	DINAS KESEHATAN		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2,842,223,600.00													DINAS KESEHATAN	
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	5 Kelompok		61,453,600													DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1,257,210,000													DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Kelompok		1,467,700,000													DINAS KESEHATAN	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		2 Kegiatan		55,860,000													DINAS KESEHATAN	
TOTAL						88,974,754,783.00		123,965,542,651.06		111,275,652,239.00		90%								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						68,798,978,735.00		92,292,002,797.00		81,312,956,738.00										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	48,948,643,930.09	58,538,428,030.00	A	76,323,616,957.00		66,459,499,540.00				124,997,927,570.00			255%	RSUD		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji yang dibayarkan pada tahun berjalan			18,876,651,988.00	100	20,963,999,119.00	99.21	20,797,525,111.00	99.21	99%		39,674,177,099.00				RSUD		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			18,876,651,988	2520	20,963,999,119	2520	20,797,525,111	2520	99%		39,674,177,099.00				RSUD		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			148,190,000.00	100	12,500,000.00	100	12,213,000.00	100	98%		160,403,000.00				RSUD		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1	12,500,000	1	12,213,000	1	98%		12,213,000.00						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				148,190,000								148,190,000.00				RSUD		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase mebel yang diadakan pada tahun berjalan			-	100	248,558,049.00	95.73	237,942,800.00	95.73	96%		237,942,800.00				RSUD		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				49	248,558,049	84	237,942,800	84	96%		237,942,800.00				RSUD		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian Laporan Penyediaan Jasa Penunjang			4,122,164,624.00	100	5,129,910,524.00	99.51	5,104,945,648.00	99.51	100%		9,227,110,272.00				RSUD		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1,378,249,286	36	1,223,110,860	36	1,214,153,670	36	99%		2,592,402,956.00				RSUD		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2,743,915,338	2	3,906,799,664	2	3,890,791,978	2	100%		6,634,707,316.00				RSUD		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Unit Layanan dan Pendukung yang beroperasi secara Optimal			35,391,421,418.00	100	49,968,649,265.00	80.66	40,306,872,981.00	80.66	81%		75,698,294,399.00				RSUD		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			35,391,421,418	1	49,968,649,265	1	40,306,872,981	1	81%		75,698,294,399.00				RSUD		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penduduk yang memanfaatkan RSUD	3.21	56,110,311,830.38	10,260,550,705.00	3%	15,968,385,840.00	3%	14,853,457,198.00	3%	93%		25,114,007,903.00			45%	RSUD		

		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar				10,260,550,705.00	58%	15,755,833,950.00	73.23%	14,643,336,532.00	73.23%	93%		24,903,887,237.00			RSUD	
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya													-			RSUD	
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit					1	1,613,677,684	1	1,609,884,523	1	100%		1,609,884,523.00			RSUD	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					2,620,000,000								2,620,000,000.00			RSUD	
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1,573,008,400	47	7,474,417,426	48	7,311,537,470	48	98%		8,884,545,870.00			RSUD	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2,539,771,912	24	6,667,738,840	24	5,721,914,539	24	86%		8,261,686,451.00			RSUD	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai					3,527,770,393											RSUD	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang lengkap					100%	212,551,890.00	100%	210,120,666.00	73.23%	99%		210,120,666.00			RSUD	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit					12	212,551,890	1	210,120,666	1	99%		210,120,666.00			RSUD	
		TOTAL					68,798,978,735.00		92,292,002,797.00		81,312,956,738.00		88%						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					241,461,716,955.00		166,175,106,500.00		140,311,810,042.81								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	12,761,052,541.65		9,365,391,839.00		11,443,111,954.00		10,717,065,991.00		94%		20,082,457,830.00		157%	DINAS PUPR	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13,719,200.00		114,175,798.00		113,946,350.00		100%		127,665,550.00			DINAS PUPR	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13,719,200	3 Laporan	114,175,798.00	3 Laporan	113,946,350.00	3 Laporan	100%		127,665,550.00			DINAS PUPR		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja dan keuangan				5,605,592,666.00		4,691,573,665.00		4,560,846,391.00		97%		10,166,439,057.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4,844,840,666	39 Orang/bulan	4,089,089,165.00	39 Orang/bulan	3,958,452,391.00	39 Orang/bulan	97%		8,803,293,057.00			DINAS PUPR	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				760,752,000	12 Dokumen	602,484,500.00	12 Dokumen	602,394,000.00	12 Dokumen	100%		1,363,146,000.00			DINAS PUPR	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				118,320,000.00		98,880,000.00		98,880,000.00		100%		217,200,000.00			DINAS PUPR	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				118,320,000	3 Laporan	98,880,000.00	3 Laporan	98,880,000.00	3 Laporan	100%		217,200,000.00			DINAS PUPR	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan				30,000,000.00		135,000,000.00		134,985,067.00		100%		164,985,067.00			DINAS PUPR	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30,000,000	7 Orang	135,000,000.00	7 Orang	134,985,067.00	7 Orang	100%		164,985,067.00			DINAS PUPR	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,028,582,107.00		910,474,216.00		908,242,548.00		100%		1,936,824,655.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				39,994,900	12 Paket	31,641,280.00	12 Paket	31,580,000.00	12 Paket	100%		71,574,900.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100,030,000	10 unit	112,004,697.00	10 unit	110,311,065.00	10 unit	98%		210,341,065.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					49,999,400	12 Paket	34,861,225.00	12 Paket	34,860,000.00	12 Paket	100%		84,859,400.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				236,387,000	12 Paket	210,008,185.00	12 Paket	209,907,089.00	12 Paket	100%		446,294,089.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				81,550,000	12 Paket	42,451,686.00	12 Paket	42,449,686.00	12 Paket	100%		123,999,686.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				61,150,000	12 Dokumen	70,958,368.00	12 Dokumen	70,905,200.00	12 Dokumen	100%		132,055,200.00			DINAS PUPR	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				68,310,000	12 Laporan	43,410,000.00	12 Laporan	43,400,000.00	12 Laporan	100%		111,710,000.00			DINAS PUPR	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				441,160,207	70 Laporan	400,000,000.00	70 Laporan	399,689,508.00	70 Laporan	100%		840,849,715.00			DINAS PUPR	
		Pengadaan Barang Milik Daerah					1,143,800,000.00		3,358,522,237.00		2,937,511,897.00		87%		4,081,311,897.00			DINAS PUPR	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				337,500,000								337,500,000.00			DINAS PUPR	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				222,800,000								222,800,000.00			DINAS PUPR	
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unti Alat Besar yang Disediakan				535,060,000	1 Unit	3,151,034,101.00	1 Unit	2,730,027,897.00	1 Unit	87%		3,265,087,897.00			DINAS PUPR	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48,440,000	8 Unit	133,363,136.00	8 Unit	133,359,000.00	8 Unit	100%		181,799,000.00			DINAS PUPR	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	74,125,000.00	1 Unit	74,125,000.00	1 Unit	100%		74,125,000.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					757,270,485.00		678,788,735.00		678,376,171.00		100%		1,435,646,656.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10,000,000	1 Laporan	12,937,500.00	1 Laporan	12,930,000.00	1 Laporan	100%		22,930,000.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				117,030,485	12 Laporan	210,250,555.00	12 Laporan	209,845,491.00	12 Laporan	100%		326,875,976.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				630,240,000	12 Laporan	455,600,680.00	12 Laporan	455,600,680.00	12 Laporan	100%		1,085,840,680.00			DINAS PUPR	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah					668,107,381.00		1,455,697,303.00		1,284,277,567.00		88%		1,952,384,948.00			DINAS PUPR	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				304,002,560	36 Unit	312,229,111.00	36 Unit	311,713,370.00	36 Unit	100%		615,715,930.00			DINAS PUPR	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				239,304,821	15 Unit	881,068,712.00	15 Unit	879,739,197.00	15 Unit	100%		1,119,044,018.00			DINAS PUPR	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32,200,000	120 Unit	92,890,000.00	120 Unit	92,825,000.00	120 Unit	100%		125,025,000.00			DINAS PUPR	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				92,600,000	5 Unit	169,509,480.00	5 Unit	-	5 Unit	0%		92,600,000.00			DINAS PUPR	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	73%		8,043,200,255.76	7,651,932,735.00		2,554,615,650.00		1,884,360,430.50		74%		9,536,293,165.50	119%		DINAS PUPR	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Normalisasi/Restorasi sungai (luas daerah yang tidak terimbas banjir)				1,306,757,265.00		637,414,031.00		524,612,666.50		82%		1,831,369,931.50			DINAS PUPR	
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai, Terkendalinya banjir pada badan-badan sungai				1,224,826,200	5 Paket	637,414,031.00	5 Paket	524,612,666.50	5 Paket	82%		1,749,438,866.50			DINAS PUPR	
		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan movev					1 Dokumen	936,826,338.00	1 Dokumen	537,608,733.00	1 Dokumen	57%		537,608,733.00			DINAS PUPR	
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				81,931,065								81,931,065.00			DINAS PUPR	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Prime, Panjang Jaringan sekunder, yang terbangunnya dan terhabilitasi jaringan				6,345,175,470.00		1,917,201,619.00		1,359,747,764.00		71%		7,704,923,234.00			DINAS PUPR	
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1,244,531,599	4 Paket	304,994,329	4 Paket	219,350,950	4 Paket	72%		1,463,882,549.00			DINAS PUPR	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3,831,041,069	12 Paket	813,311,147	12 Paket	745,380,749	12 Paket	92%		4,576,421,818.00			DINAS PUPR	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperseleksi dan Dipelihara				82,273,316	5 Paket	310,289,413	5 Paket	307,207,364	5 Paket	99%		389,480,680.00			DINAS PUPR	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi				1,187,329,486	1 Dokumen	488,606,730	1 Dokumen	87,808,701	1 Dokumen	18%		1,275,138,187.00			DINAS PUPR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	72%		32,990,369,806.80	24,325,156,228.00		12,568,928,897.00		11,993,390,452.95		95%		36,318,546,680.95	110%		DINAS PUPR	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	KK yang mendapatkan akses air minum				24,325,156,228.00		12,568,928,897.00		11,993,390,452.95		95%		36,318,546,680.95			DINAS PUPR	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				483,703,357	2 Doc, 100 orang	484,792,000.00	2 Doc, 100 orang	482,928,064.00	2 Doc, 100 orang	100%		966,631,421.00			DINAS PUPR	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis				11 Doc	821,606,850.00	11 Doc	539,253,930.00	11 Doc	66%			539,253,930.00			DINAS PUPR	
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM					559,836,195								559,836,195.00			DINAS PUPR	

		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK sasaran (Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum)				6,325,730.239	675 SR	4,253,014,676.00	675 SR	4,244,380,000.00	675 SR	100%		10,570,110,239.00			DINAS PUPR	
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Penambahan Jaringan dan pemasangan Sambungan Rumah SPAM Perdesaan (tambahan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum)					3450 SR	2,201,392,801.00	3450 SR	1,986,623,199.97	3450 SR	90%		1,986,623,199.97			DINAS PUPR	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Penambahan Jaringan dan pemasangan Sambungan Rumah SPAM Perkotaan (tambahan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum)				1,713,209.905	5.5 km	4,146,834,008.00	5.5 km	4,086,808,205.69	5.5 km	99%		5,800,018,110.69			DINAS PUPR	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan air minum (SPAM)	Jumlah SPAM Perdesaan Optimal					3 Unit	300,500,000.00	3 Unit	299,938,840.00	3 Unit	100%		299,938,840.00			DINAS PUPR	
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					495,011,806								495,011,806.00			DINAS PUPR	
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perdesaan				143,866,150	3 Unit	156,788,562.00	3 Unit	150,280,665.00	3 Unit	96%		294,146,815.00			DINAS PUPR	
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan	Jumlah SPAM Perdesaan Optimal					3 Unit	204,000,000.00	3 Unit	203,177,548.29	3 Unit	100%		203,177,548.29			DINAS PUPR	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					14,400,178.976								14,400,178.976.00			DINAS PUPR	
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan					203,619,600								203,619,600.00			DINAS PUPR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi dasar	89%		15,026,806,527.36	13,642,863,677.00		6,486,872,679.00		5,781,430,630.39		88%		19,424,294,307.39		129%	DINAS PUPR	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik (Dengan Satuan Rumah Tangga)				13,642,863,677.00		6,486,872,679.00		5,781,430,630.39		88%		19,424,294,307.39			DINAS PUPR	
		Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), Rumah Tangga Akses SPAL				13,642,863,677	1178 Unit	6,486,872,679.00	1178 Unit	5,781,430,630.39	1178 Unit	89%		19,424,294,307.39			DINAS PUPR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan/titik terbebas dari genangan	1 titik/kawasan		4,583,975,691.26	9,651,505,542.00		5,663,089,777.00		5,107,190,929.69		90%		14,758,696,471.69		322%	DINAS PUPR	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan				9,651,505,542.00		5,663,089,777.00		5,107,190,929.69		90%		14,758,696,471.69			DINAS PUPR	
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				9,651,505,542	561 m3	5,663,089,777.00	560.5 m3	5,107,190,929.69	560.5 m3	90%		14,758,696,471.69			DINAS PUPR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pembangunan infrastruktur pada permukiman yang layak huni	100%		11,131,666,198.75	24,695,158,384.00								24,695,158,384.00		222%	DINAS PUPR	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan terpelihara				24,695,158,384.00											DINAS PUPR	
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					24,695,158,384											DINAS PUPR	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase fungsi bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	80%		10,707,720,656.23	37,558,348,262.00		23,978,348,970.00		13,933,773,598.03		58%		51,492,121,860.03		481%	DINAS PUPR	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Layanan Publik yang dibangun (Dengan Satuan:Unit)				37,558,348,262.00		23,978,348,970.00		13,933,773,598.03		58%		51,492,121,860.03			DINAS PUPR	
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBIS	Persentase Dokumen perizinan bangunan yang diterbitkan				290,553,630	80 Dok	290,863,815.00	80 Dok	262,753,000.00		90%		553,306,630.00			DINAS PUPR	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Prasarana Publik terbangun dan/ dipelihara				37,267,794,632	5 Unit	23,687,485,155.00	5 Unit	13,671,020,598.03		58%		50,938,815,230.03			DINAS PUPR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	50%		69,687,497,361.20	112,665,945,355.00		101,986,575,227.00		89,490,740,584.25		88%		202,156,685,939.25		290%	DINAS PUPR	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					112,665,945,355.00		101,986,575,227.00		89,490,740,584.25		88%		202,156,685,939.25			DINAS PUPR	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				177,449,810	1 Doc	547,516,692.00	1 Doc	146,219,942.50	1 Doc	27%		323,669,752.50			DINAS PUPR	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya				750,606,205	1 Doc	15,593,348,644.00	1 Doc	14,305,433,126.67	1 Doc	92%		15,056,041,331.67			DINAS PUPR	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				10,365,074,923	22 Km	33,302,045,357.00	22 Km	29,837,118,887.61	22 Km	90%		40,202,193,810.61			DINAS PUPR	

		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				67,817,730,551	11 Km	28,853,026,981.00	11 Km		26,875,654,810.44	11 Km	93%			94,693,385,361.44			DINAS PUPR		
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan				7,681,617,825	6 Km	1,534,419,426.00	6 Km		982,625,687.42	6 Km	64%			8,664,243,512.42			DINAS PUPR		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				16,370,075,974	2 Km	8,049,265,764.00	2 Km		6,251,357,811.45	2 Km	78%			22,621,433,785.45			DINAS PUPR		
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				7,869,323,732	14 Box Culvert, 1 Jembatan	1,945,401,676.00	14 Box Culvert, 1 Jembatan		1,714,573,027.16	14 Box Culvert, 1 Jembatan	88%			9,583,896,759.16			DINAS PUPR		
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan				751,804,410	3 Jembatan	514,815,520.00	3 Jembatan		311,930,995.00	3 Jembatan	61%			1,063,735,405.00			DINAS PUPR		
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan				882,259,925	3 Jembatan	11,646,735,167.00	3 Jembatan		9,065,826,296.00	3 Jembatan	78%			9,948,086,221.00			DINAS PUPR		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan rencana	100%	260,388,125.04		182,477,353.00		333,724,815.00			267,991,350.00		80%			450,468,703.00		173%	DINAS PUPR		
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil				182,477,353.00		333,724,815.00			267,991,350.00		80%			450,468,703.00			DINAS PUPR		
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					160,806,250	60 orang	310,170,215.00	126 orang		245,339,950.00	126 orang	79%			406,146,200.00			DINAS PUPR		
		Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				21,671,103	1 dokumen	23,554,600.00	1 dokumen		22,651,400.00	1 dokumen	96%			44,322,503.00			DINAS PUPR		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		DINAS PUPR		
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		DINAS PUPR		
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		DINAS PUPR		
		Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi																		DINAS PUPR		
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)																		DINAS PUPR		
		Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional																		DINAS PUPR		
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi																		DINAS PUPR		
		Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diberikan																		DINAS PUPR		
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi																		DINAS PUPR		
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi																		DINAS PUPR		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	100%	1,555,836,196.87		1,722,937,580.00		1,159,838,531.00			1,135,866,076.00		98%			2,858,803,656.00		184%	DINAS PUPR		
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota					1,403,192,330.00		885,242,231.00			871,257,626.00		98%			2,274,449,956.00			DINAS PUPR		
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota				1,403,192,330	2 Dokumen	885,242,231.00	2 Dokumen		871,257,626.00	2 Dokumen	98%			2,274,449,956.00			DINAS PUPR		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					319,745,250.00		274,596,300.00			264,608,450.00		96%			584,353,700.00			DINAS PUPR		
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					319,745,250	12 Dokumen	274,596,300.00	12 Dokumen		264,608,450.00	12 Dokumen	96%			584,353,700.00			DINAS PUPR		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			DINAS PUPR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni	0.6937	210,541,922.13		54,410,200.00										54,410,200.00		26%	DINAS PUPR		
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					7,596,500.00													DINAS PUPR		
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				7,596,500													DINAS PUPR		
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					46,813,700.00													DINAS PUPR		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				46,813,700													DINAS PUPR		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan kondisi rumah tidak layak huni yang ditangani dan Luasan kawasan kumuh yang ditangani	1 dokumen	1,541,009,012.49		1,598,947,799.00										1,598,947,799.00		104%	DINAS PUPR		
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					488,262,959.00													DINAS PUPR		
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh					488,262,959													DINAS PUPR		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha					1,110,684,840.00													DINAS PUPR		

		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				1,008,324,500											DINAS PUPR	
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				102,360,340											DINAS PUPR	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan kawasan yang didukung PSU baik	840 titik/kawasan		8,158,686,833.26		18,441,187,484.00							18,441,187,484.00		226%	DINAS PUPR	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						18,441,187,484.00										DINAS PUPR	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian					18,441,187,484										DINAS PUPR	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						76,953,400.00										DINAS PUPR	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah pemda yang tersertifikasi	0.75		192,048,335.48		76,953,400.00							76,953,400.00		40%	DINAS PUPR	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						76,953,400.00										DINAS PUPR	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					76,953,400										DINAS PUPR	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																DINAS PUPR	
		TOTAL					241,538,670,355.00		166,175,106,500.00				140,311,810,042.81		84%				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					-	40,630,200,501.00					38,339,927,821.00					DINAS PERKIM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	2,976,339,961.00					2,675,791,804.00		90%		#DIV/0!	DINAS PERKIM	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	8,851,449.00				8,608,950.00		97%		8,608,950.00		DINAS PERKIM	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1	8,851,449.00	1		8,608,950.00		97%		8,608,950.00		DINAS PERKIM	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,096,811,996.00			1,834,325,521.00		87%		1,834,325,521.00		DINAS PERKIM	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					228	1,964,481,996.00	276		1,710,590,521.00		87%		1,710,590,521.00		DINAS PERKIM	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	132,330,000.00	12		123,735,000.00		94%		123,735,000.00		DINAS PERKIM	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							38,400,000.00			38,400,000.00		100%		38,400,000.00		DINAS PERKIM	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12	38,400,000.00	12		38,400,000.00		100%		38,400,000.00		DINAS PERKIM	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							40,000,000.00			39,947,900.00		100%		39,947,900.00		DINAS PERKIM	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					4	40,000,000.00	5		39,947,900.00		100%		39,947,900.00		DINAS PERKIM	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							402,581,822.00			393,835,123.00		98%		393,835,123.00		DINAS PERKIM	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3	17,328,413.00	3		17,226,200.00		99%		17,226,200.00		DINAS PERKIM	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2	127,452,244.00	2		126,175,000.00		99%		126,175,000.00		DINAS PERKIM	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					3	15,137,665.00	3		14,680,000.00		97%		14,680,000.00		DINAS PERKIM	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5	51,083,296.00	5		50,106,000.00		98%		50,106,000.00		DINAS PERKIM	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10	16,017,653.00	10		15,248,800.00		95%		15,248,800.00		DINAS PERKIM	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					19	21,960,151.00	19		18,215,000.00		83%		18,215,000.00		DINAS PERKIM	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					10	12,580,000.00	12		12,305,000.00		98%		12,305,000.00		DINAS PERKIM	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	141,022,400.00	1		139,879,123.00		99%		139,879,123.00		DINAS PERKIM	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							14,263,764.00			14,100,000.00		99%		14,100,000.00		DINAS PERKIM	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3	14,263,764.00	3		14,100,000.00		99%		14,100,000.00		DINAS PERKIM	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						182,720,850.00		158,723,310.00		87%		158,723,310.00			DINAS PERKIM	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0	5,516,550.00	0	5,500,000.00		100%		5,500,000.00			DINAS PERKIM	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12	30,204,000.00	4	6,223,310.00		21%		6,223,310.00			DINAS PERKIM	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	147,000,300.00	12	147,000,000.00		100%		147,000,000.00			DINAS PERKIM	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						192,710,080.00		187,851,000.00		97%		187,851,000.00			DINAS PERKIM	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27	119,264,000.00	8	114,550,000.00		96%		114,550,000.00			DINAS PERKIM	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14	15,040,000.00	14	14,940,000.00		99%		14,940,000.00			DINAS PERKIM	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2	58,406,080.00	2	58,361,000.00		100%		58,361,000.00			DINAS PERKIM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						108,332,675.00		64,770,100.00		60%		64,770,100.00		#DIV/0!	DINAS PERKIM	
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						49,996,100.00		15,063,900.00		30%		15,063,900.00			DINAS PERKIM	
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				100	49,996,100.00	36	15,063,900.00		30%		15,063,900.00			DINAS PERKIM	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						58,336,575.00		49,706,200.00		85%		49,706,200.00			DINAS PERKIM	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				12	58,336,575.00	2	49,706,200.00		85%		49,706,200.00			DINAS PERKIM	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						1,637,574,293.00		1,489,222,523.00		91%		1,489,222,523.00		#DIV/0!	DINAS PERKIM	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						300,000,000.00		167,739,407.00		56%		167,739,407.00			DINAS PERKIM	
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Review/Terlegalisasi				1	300,000,000.00	2	167,739,407.00		56%		167,739,407.00			DINAS PERKIM	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1,337,574,293.00		1,321,483,116.00		99%		1,321,483,116.00			DINAS PERKIM	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki				50	1,136,743,883.00	45	1,132,551,661.00		100%		1,132,551,661.00			DINAS PERKIM	
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				250	200,830,410.00	628	188,931,455.00		94%		188,931,455.00			DINAS PERKIM	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						35,742,262,172.00		34,008,827,994.00		95%		34,008,827,994.00		#DIV/0!	DINAS PERKIM	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						35,742,262,172.00		34,008,827,994.00		95%		34,008,827,994.00			DINAS PERKIM	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				114	35,742,262,172.00	119	34,008,827,994.00		95%		34,008,827,994.00			DINAS PERKIM	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						165,691,400.00		92,315,400.00		56%		92,315,400.00		#DIV/0!	DINAS PERKIM	
		Penggunaan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						165,691,400.00		92,315,400.00		56%		92,315,400.00			DINAS PERKIM	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				10	165,691,400.00	0	92,315,400.00		56%		92,315,400.00			DINAS PERKIM	
		TOTAL						40,630,200,501.00		38,330,927,821.00		94%						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					-	9,063,089,519.00		8,619,559,455.00							DINAS PP & KB	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,294,043,129.00		3,021,590,495.00		92%		3,021,590,495.00		#DIV/0!	DINAS PP & KB	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						39,808,286.00		37,622,130.00		95%		37,622,130.00			DINAS PP & KB	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3	25,308,286.00	3	24,895,800.00	98%		24,895,800.00			DINAS PP & KB	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	14,500,000.00	4	12,726,330.00	88%		12,726,330.00			DINAS PP & KB	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,123,541,793.00		1,918,884,097.00	90%		1,918,884,097.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					16	2,024,880,928.00	16	1,821,189,584.00	90%		1,821,189,584.00			DINAS PP & KB	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3	87,286,000.00	3	86,461,000.00	99%		86,461,000.00			DINAS PP & KB	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					3	11,374,865.00	3	11,233,513.00	99%		11,233,513.00			DINAS PP & KB	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							29,300,000.00		22,890,000.00	78%		22,890,000.00			DINAS PP & KB	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					4	29,300,000.00	4	22,890,000.00	78%		22,890,000.00			DINAS PP & KB	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							26,921,076.00		26,744,770.00	99%		26,744,770.00			DINAS PP & KB	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					4	26,921,076.00	4	26,744,770.00	99%		26,744,770.00			DINAS PP & KB	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							279,617,065.00		261,519,437.00	94%		261,519,437.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	12,192,300.00	1	12,192,300.00	100%		12,192,300.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	12,500,000.00	1	12,500,000.00	100%		12,500,000.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1	7,208,400.00	1	6,053,100.00	84%		6,053,100.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1	83,321.00	-	-	0%		-			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1	37,633,044.00	1	22,843,961.00	61%		22,843,961.00			DINAS PP & KB	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10	210,000,000.00	10	207,930,076.00	99%		207,930,076.00			DINAS PP & KB	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah							471,615,000.00		471,615,000.00	100%		471,615,000.00			DINAS PP & KB	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1	471,615,000.00	1	471,615,000.00	100%		471,615,000.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							55,859,909.00		38,801,397.00	69%		38,801,397.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1	14,859,909.00	1	5,801,397.00	39%		5,801,397.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4	41,000,000.00	4	33,000,000.00	80%		33,000,000.00			DINAS PP & KB	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							267,380,000.00		243,513,664.00	91%		243,513,664.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					45	267,380,000.00	45	243,513,664.00	91%		243,513,664.00			DINAS PP & KB	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							95,815,200.00		89,814,463.00	94%		89,814,463.00		#DIV/0!	DINAS PP & KB	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							52,805,400.00		50,354,163.00	95%		50,354,163.00			DINAS PP & KB	
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					1	22,995,900.00	1	20,988,463.00	91%		20,988,463.00			DINAS PP & KB	
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					5	29,809,500.00	5	29,365,700.00	99%		29,365,700.00			DINAS PP & KB	

		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							43,009,800.00			39,460,300.00		92%		39,460,300.00			DINAS PP & KB	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12		43,009,800.00	12		39,460,300.00		92%		39,460,300.00			DINAS PP & KB	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA							3,711,154,390.00			3,546,602,079.00		96%		3,546,602,079.00		#DIV/0!	DINAS PP & KB	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							1,775,000,000.00			1,682,308,552.00		95%		1,682,308,552.00			DINAS PP & KB	
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1		82,400,000.00	1		79,343,600.00		96%		79,343,600.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1		60,000,000.00	1		45,829,000.00		76%		45,829,000.00			DINAS PP & KB	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12		739,200,000.00	12		699,510,801.00		95%		699,510,801.00			DINAS PP & KB	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				10		380,000,000.00	10		347,489,600.00		91%		347,489,600.00			DINAS PP & KB	
		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3		100,000,000.00	3		96,735,551.00		97%		96,735,551.00			DINAS PP & KB	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				4		413,400,000.00	4		413,400,000.00		100%		413,400,000.00			DINAS PP & KB	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							512,127,990.00			480,741,414.00		94%		480,741,414.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				1		499,352,490.00	1		468,113,606.00		94%		468,113,606.00			DINAS PP & KB	
		Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1		12,775,500.00	1		12,627,808.00		99%		12,627,808.00			DINAS PP & KB	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							895,834,400.00			892,478,513.00		100%		892,478,513.00			DINAS PP & KB	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya							45,095,900.00			44,794,513.00		99%		44,794,513.00			DINAS PP & KB	
		Pengkajian Kesiapan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							747,818,100.00			746,098,100.00		100%		746,098,100.00			DINAS PP & KB	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				28		55,583,800.00	28		54,302,400.00		98%		54,302,400.00			DINAS PP & KB	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya							47,336,600.00			47,283,500.00		100%		47,283,500.00			DINAS PP & KB	

[illegible]

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	2,760,912,136.95		2,807,303,435.00		3,074,136,651.00		2,895,334,481.00	94%	5,702,637,916.00	207%	BPBD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil Administrasi Keuangan				1,770,484,007.00		1,972,923,681.00		1,848,263,664.00	94%	3,618,747,671.00		BPBD	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1,700,752,007	100%	1,903,191,681.00		1,778,531,664.00	93%	3,479,283,671.00		BPBD	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				69,732,000	100%	69,732,000.00		69,732,000.00	100%	139,464,000.00		BPBD	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6,840,000.00		6,840,000.00		6,840,000.00	100%	13,680,000.00		BPBD	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6,840,000	100%	6,840,000.00		6,840,000.00	100%	13,680,000.00		BPBD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17,250,000.00		126,199,150.00		124,212,835.00	98%	141,462,835.00		BPBD	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					100%	73,399,150.00		72,412,835.00	99%	72,412,835.00		BPBD	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17,250,000	100%	52,800,000.00		51,800,000.00	98%	69,050,000.00		BPBD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					316,811,565.00		367,039,820.00		366,924,742.00	100%	683,736,307.00		BPBD	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7,643,000	100%	7,646,070.00	100%	7,646,000.00	100%	15,289,000.00		BPBD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				98,736,364	100%	51,424,593.00	100%	51,390,503.00	100%	150,126,867.00		BPBD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor yang diperlukan					100%	12,500,000.00	100%	12,500,000.00	100%	12,500,000.00		BPBD	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				42,028,900	100%	51,969,487.00	100%	51,969,487.00	100%	93,998,387.00		BPBD	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				11,600,000	100%	11,599,670.00	100%	11,550,000.00	100%	23,150,000.00		BPBD	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				31,812,000	100%	31,900,000.00	100%	31,900,000.00	100%	63,712,000.00		BPBD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				124,991,301	100%	200,000,000.00	100%	199,968,752.00	100%	324,960,053.00		BPBD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					149,881,350.00		161,043,969.00		160,502,735.00	100%	310,384,085.00		BPBD	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10,500,000	100%	10,494,900.00		10,480,000.00	100%	20,980,000.00		BPBD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				26,146,950	100%	36,300,000.00		36,254,735.00	100%	62,401,685.00		BPBD	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				113,234,400	100%	114,249,069.00		113,768,000.00	100%	227,002,400.00		BPBD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					546,036,513.00		401,134,000.00		388,590,505.00	97%	934,627,018.00		BPBD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				149,562,068	100%	233,142,000.00	100%	221,367,305.00	95%	370,929,373.00		BPBD	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7,960,000	100%	7,960,000.00	100%	7,960,000.00	100%	15,920,000.00		BPBD	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					100%	160,032,000.00	100%	159,263,200.00	100%	159,263,200.00		BPBD	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					388,514,445								BPBD	
		TOTAL					5,156,130,846.00		29,799,907,181.00		5,008,520,465.00	17%				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN					5,637,793,910.00		6,271,686,653.00		6,023,690,020.00					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	3,488,875,677.38		3,438,327,435.00		4,031,386,653.00		3,785,094,520.00	94%	7,223,421,955.00	207%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya kualitas Perencanaan SKPD				64,774,300.00		68,758,089.00		68,506,200.00	100%	133,280,500.00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,600,000	6 dokumen	6,000,000		5,750,000	96%	11,350,000.00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				53,174,300	2 dokumen	62,758,089		62,756,200	100%	115,930,500.00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6,000,000						6,000,000.00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan SKPD			2,086,531,084.00		2,648,338,050.00		2,454,717,756.00	93%		4,541,248,840.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1,978,147,084	12 bulan	2,526,703,192		2,335,293,756	92%		4,313,440,840.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			108,384,000	12 bulan	121,634,858		119,424,000	98%		227,808,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentasi Penyerapan Administrasi Perkantoran	-		15,600,000.00		15,600,000.00		15,600,000.00	100%		31,200,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			15,600,000	12 bulan	15,600,000		15,600,000	100%		31,200,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan SDM Pegawai ASN dan NON PNS	-		-		158,500,000.00		156,154,640.00	99%		156,154,640.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				155 stel	108,500,000		106,977,600	99%		106,977,600.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 orang	50,000,000		49,177,040	98%		49,177,040.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya peralatan kerja yang memadai			328,313,700.00		247,849,949.00		247,661,214.00	100%		575,974,914.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			9,963,000	1 paket	9,994,592		9,990,000	100%		19,963,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10,600,000							10,600,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			79,173,700	9 paket	80,607,132		80,530,750	100%		159,704,450.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan kantor			19,848,100	3 paket	19,999,525		19,901,164	100%		39,749,264.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			17,248,600	12 bulan	17,248,700		17,246,100	100%		34,494,700.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			191,480,300	50 laporan	120,000,000		119,993,200	100%		311,473,500.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Barang Penunjang Urusan Kantor			227,729,500.00		180,679,950.00		180,469,650.00	100%		408,199,150.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pengadaan Mebel	Terwujudnya Meja dan Kursi Kerja			26,296,000							26,296,000.00			KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			201,433,500	31 unit	180,679,950		180,469,650	100%		381,903,150.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi administrasi perkantoran			290,942,863.00		278,405,652.00		246,771,264.00	89%		537,714,127.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat										-			KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60,459,013	12 bulan	74,968,530		68,856,764	92%		129,315,777.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			11,940,000	10 unit	12,000,000		11,954,000	100%		23,894,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			218,543,850	12 bulan	191,437,122		165,960,500	87%		384,504,350.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran Pekerjaan Dukungan Dengan Peralatan Kerja Yang Baik			424,435,988.00		433,254,963.00		415,213,796.00	96%		839,649,784.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			377,501,988	15 unit	387,954,963		369,931,796	95%		747,433,784.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			46,934,000	6 unit	45,300,000		45,282,000	100%		92,216,000.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		PROGRAM Pencegahan, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN	Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	50%	2,023,519,421.62	2,399,466,475.00		2,240,300,000.00		2,238,595,500.00	100%		4,638,061,975.00	229%		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Response Time Terhadap Kebakaran dan Penyelamatan			2,313,328,475.00		2,198,800,000.00		2,197,296,200.00	100%		4,510,616,675.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya			1,902,256,100	12 dokumen	1,868,700,000		1,868,492,000	100%		3,770,748,100.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				362,965,275	90 laporan	295,700,000		295,033,500	100%		657,998,775.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				19,305,400	100 laporan	19,400,000		19,202,500	99%		38,507,900.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beraoun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beraoun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				28,793,700	2 dokumen	15,000,000		14,568,200	97%		43,361,900.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terwujudnya pengendalian operasional pemadaman dan rescue				9,658,700.00		6,000,000.00		5,999,600.00	100%		15,658,300.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				9,658,700	12 dokumen	6,000,000		5,999,600	100%		15,658,300.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaiakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Tersediannya Laporan Kejadian Kebakaran				14,973,100.00		15,000,000.00		14,999,700.00	100%		29,972,800.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				14,973,100	12 dokumen	15,000,000		14,999,700	100%		29,972,800.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersediannya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran				61,514,200.00		20,500,000.00		20,300,000.00	99%		81,814,200.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				58,534,200	12 dokumen	15,000,000		14,801,600	99%		73,335,800.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					2,980,000	12 dokumen	5,500,000		5,498,400	100%		8,478,400.00			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
TOTAL							5,837,793,910.00		6,271,686,653.00		6,023,690,020.00	96%						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN							6,238,946,634.00		6,926,633,965.00		6,186,152,495.00							
		PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		98%	785,893,260.68		1,569,037,200.00		1,680,580,034.00		1,565,199,680.00	93%		3,134,236,880.00		399%	SATPOL PP	
		Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1,569,037,200.00		1,680,580,034.00		1,565,199,680.00	93%		3,134,236,880.00			SATPOL PP	
		Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Diogah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1,048,729,600		1,331,038,501		1,218,379,680	92%		2,267,109,280.00			SATPOL PP	
		Penindakan atas Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				520,307,600		349,541,533		346,820,000	99%		867,127,600.00			SATPOL PP	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BB	4,976,943,696.08		4,670,909,434.00		5,246,053,931.00		4,620,952,815.00	88%		9,291,862,249.00		187%	SATPOL PP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					27,050,000.00		27,050,000.00		27,050,000.00	100%		54,100,000.00			SATPOL PP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				27,050,000		27,050,000		27,050,000	100%		54,100,000.00			SATPOL PP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,777,174,563.00		2,729,959,485.00		2,533,875,519.00	93%		5,311,050,082.00			SATPOL PP	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2,691,590,563		2,636,215,485		2,448,795,519		93%		5,140,386,082.00			SATPOL PP	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				85,584,000		93,744,000		85,080,000		91%		170,664,000.00			SATPOL PP	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2,968,000.00		100,074,040.00		80,683,740.00		81%		83,651,740.00			SATPOL PP	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						75,074,040		75,074,040		100%		75,074,040.00			SATPOL PP	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					2,968,000		25,000,000		5,609,700		22%		8,577,700.00			SATPOL PP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					333,524,757.00		380,321,066.00		330,396,216.00		87%		663,922,973.00			SATPOL PP	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13,735,100		14,999,222		14,999,222		100%		28,734,322.00			SATPOL PP	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				68,216,700		84,856,807		84,856,807		100%		153,073,507.00			SATPOL PP	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				101,648,480		95,490,907		95,490,907		100%		197,139,387.00			SATPOL PP	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15,438,350		15,438,069		15,438,069		100%		30,876,419.00			SATPOL PP	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				14,509,250		14,536,061		11,336,061		78%		25,845,311.00			SATPOL PP	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				5,000,000		5,000,000		5,000,000		100%		10,000,000.00			SATPOL PP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114,976,877		150,000,000		103,277,150		69%		218,254,027.00			SATPOL PP	
		Pengadaan Barang Milik Daerah					19,075,600.00		70,072,300.00		68,322,300.00		98%		87,397,900.00			SATPOL PP	
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Occasional							20,000,000		18,250,000		91%		18,250,000.00				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19,075,600		50,072,300		50,072,300		100%		69,147,900.00			SATPOL PP	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,303,269,614.00		1,448,580,150.00		1,314,861,730.00		91%		2,618,131,344.00			SATPOL PP	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,500,000		1,490,400		1,490,000		100%		2,990,000.00			SATPOL PP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				20,969,614		28,689,750		26,971,730		94%		47,941,344.00			SATPOL PP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1,280,800,000		1,418,400,000		1,286,400,000		91%		2,567,200,000.00			SATPOL PP	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah					207,846,900.00		489,996,890.00		265,761,310.00		54%		473,608,210.00			SATPOL PP	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7,042,600		11,788,000		10,510,700		89%		17,553,300.00			SATPOL PP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				175,950,000		195,600,000		148,840,000		76%		324,790,000.00			SATPOL PP	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15,100,000		15,100,000		15,100,000		100%		30,200,000.00			SATPOL PP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9,754,300		267,508,890		91,310,610		34%		101,064,910.00			SATPOL PP	
TOTAL							6,239,946,634.00		6,926,633,965.00		6,106,152,495.00		89%						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							6,524,369,250.00		7,159,041,379.00		6,693,673,005.00							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB		3,760,480,615.21	B	4,605,956,930.00	B	4,868,865,642.00	B	4,531,341,593.00	B	93%		9,137,298,523.00		243%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			1	33,240,614.00	1	63,973,585.00	1	63,954,008.00	1	100%		97,194,622.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33,240,614.00	1	63,973,585.00	1	63,954,008.00	1	100%		97,194,622.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan			1	3,078,412,280.00	1	3,467,048,131.00	1	3,168,853,936.00	1	91%		6,247,266,216.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2,965,313,880.00	30/12	3,352,989,731.00	30/12	3,058,223,536.00	30/12	91%		6,023,537,416.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				113,098,400.00	1	114,058,400.00	1	110,630,400.00	1	97%		223,728,800.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengelola Penatausahaan Barang Milik Daerah			2	46,801,450.00	2	46,802,250.00	2	37,798,700.00	2	81%		84,600,150.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terbayarnya Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah			46,801,450.00	2	46,802,250.00	2	37,798,700.00	2	81%		84,600,150.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2	30,000,000.00	2	29,997,900.00	2	100%		29,997,900.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU					2	30,000,000.00	4	29,997,900.00	4	100%		29,997,900.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Alat Listrik dan Penerangan		100	617,201,126.00	50	447,942,202.00	100	446,848,270.00	100	100%		1,064,139,396.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4,985,800.00	1	4,985,495.00	1	4,984,995.00	1	100%		9,970,795.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			131,146,200.00	1	167,886,092.00	1	167,788,700.00	1	100%		288,934,900.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			62,000,000.00	1	74,500,000.00	1	74,463,230.00	1	100%		136,463,230.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			24,284,850.00	1	24,289,607.00	1	23,541,500.00	1	97%		47,826,350.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4,827,400.00	2	6,121,008.00	2	5,933,000.00	2	97%		10,760,400.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			20,135,000.00	12	20,160,000.00	12	20,160,000.00	12	100%		40,295,000.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			369,911,876.00	12	150,000,000.00	12	149,976,845.00	12	100%		519,888,721.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				207,928,060.00	1	185,180,440.00	1	184,619,256.00	1	100%		392,547,316.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pengadaan Mebel					1	54,864,835.00	1	54,710,000.00	1	100%		54,710,000.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				207,928,060.00	1	130,315,605.00	1	129,909,256.00	1	100%		337,837,316.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12	171,831,032.00	12	185,138,536.00	12	190,770,769.00	12	98%		362,601,801.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			38,511,032.00	12	59,414,820.00	12	56,147,669.00	12	95%		94,658,701.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			133,320,000.00	12	135,723,716.00	12	134,623,100.00	12	99%		267,943,100.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		15	450,452,368.00	15	432,780,498.00	15	408,498,754.00	15	94%		858,951,122.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Peralisannya			42,504,200.00	15	49,511,155.00	14	49,511,155.00	14	100%		92,015,355.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			225,968,300.00	15	226,010,000.00	15	208,434,500.00	15	92%		434,402,800.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			181,979,868.00	1	157,259,343.00	1	150,553,099.00	1	96%		332,532,967.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	49%	135,124,055.58	0	108,964,450.00	45	267,569,886.00	264,029,970.00		99%		372,994,420.00		276%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terpenuhinya keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota			0	104,966,200.00	279	185,723,456.00	183,157,670.00	50	99%		288,123,870.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Fasilitas Pemberdayaan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			104,966,200.00	279	185,723,456.00	50	183,157,670.00	50	99%		288,123,870.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota		0.00%	3,998,250.00	13	81,846,430.00	13	80,872,300.00	13	99%		84,870,550.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	

		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kementerian Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				13	81,846,430.00	13	80,872,300.00	13	99%		80,872,300.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	terbinanya IK3			3,998,250.00											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang disabilitas, 54%	223,216,279.56	424,213,100.00	52	900,359,987.00	19	873,752,800.00	19	97%		1,297,965,900.00	581%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		345,524,200.00	250	786,317,687.00	1464	772,506,700.00	1464	98%		1,118,030,900.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sosial dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		197,517,100.00	180	589,012,837.00	1,409	585,524,100.00	1,409	99%		783,041,200.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		148,007,100.00	57	197,304,850.00	55	186,982,600.00	55	95%		334,989,700.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan sosial	Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	400.00%	78,688,900.00	65	114,042,300.00	55	101,246,100.00	55	88%		179,935,000.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		54,851,550.00	50	77,000,100.00	50	76,365,800.00	50	99%		131,217,350.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		23,837,350.00	15	37,042,200.00	5	24,880,300.00	5	67%		48,717,650.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Anak Terlantar	49%	60,249,406.68	47	417,687,103.00	38	364,191,998.00	38	87%		1,126,948,798.00	1870%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		119400	762,756,800.00	113000	417,687,103.00	114850	364,191,998.00	114850	87%	1,126,948,798.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Pendamping (KPM) dan KPM PKH yang mendapatkan bantuan serta graduation(lulus)		316,047,100.00	113,000	83,000,376.00	114,850	74,971,748.00	114,850	90%		391,018,848.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pengelolaan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		446,709,700.00	8,000	334,686,727.00	7,594	289,220,250.00	7,594	86%		735,929,950.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan Bencana Alam Dan Sosial	44%	200,474,879.93	537,627,870.00	42	607,626,867.00	47	564,298,394.00	47	93%	1,101,926,264.00	550%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Terpenuhi orang yang Mendapatkan Pemakanan dalam masa tanggap darurat (pengungsian)		1215	397,628,120.00	300	450,295,113.00	496	406,966,640.00	496	90%	804,594,760.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		329,745,220.00	300	253,741,623.00	396	226,195,145.00	396	89%		555,940,365.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		67,882,900.00	100	196,553,490.00	100	180,771,495.00	100	92%		248,654,395.00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	

		Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Terpenuhi Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		55	139,999,750.00	65	157,331,754.00	65	157,331,754.00	65	100%		297,331,504.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			139,999,750.00	65	157,331,754.00	65	157,331,754.00	65	100%		297,331,504.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terkota dengan baik	80%	82,146,832.62	100%	84,850,100.00	80	96,931,894.00	100	96,058,250.00	100	99%		180,908,350.00		220%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Terpeliharannya Taman Makam Pahlawan STS		1	84,850,100.00	1	96,931,894.00	1	96,058,250.00	1	99%		180,908,350.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			84,850,100	1	96,931,894.00	1	96,058,250.00	1	99%		180,908,350.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					90	626,819,481.00		1,323,631,959.00		1,146,124,745.00							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Program Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif dan	40%	343,846,115.29		385,348,475.00	35	587,504,174.00	8	513,902,205.00	8	87%		899,250,680.00		262%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarus utamaan gender (pug) kewenangan kabupaten/ kota		3500.00%	215,114,475.00	35	254,271,100.00	35	203,599,390.00	35	80%		418,713,865.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			99,893,900.00	1	118,061,074.00	1	92,283,800.00	1	78%		192,177,700.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			115,220,575.00	35	136,210,026.00	35	111,315,590.00	35	82%		226,536,165.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya organisasi masyarakat yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, ekonomi kewenangan kabupaten/ kota			79,776,800.00	15	200,000,000.00	15	188,469,175.00	15	94%		268,245,975.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			79,776,800.00	15	200,000,000.00	15	188,469,175.00	15	94%		268,245,975.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya advokasi kebijakan pendampingan kepada		100.00%	90,457,200.00	1	133,233,074.00	1	121,833,640.00	1	91%		212,290,840.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			90,457,200.00	22	92,865,480.00	22	92,478,025.00	22	100%		182,935,225.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Pengembangan KIE pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota					1	40,367,594.00	1	29,355,615.00	1	73%		29,355,615.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Capaian Keluarga Berkualitas Yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender	75%	37,290,597.06	1	127,692,806.00	65	276,062,980.00	67	196,969,453.00	67	71%		324,662,259.00		871%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/ kota		1	127,692,806.00	1	276,062,980.00	1	196,969,453.00	1	71%		324,662,259.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Pelaksanaan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak bagi kewenangan kabupaten/kota					1	115,537,400.00	1	113,767,753.00	1	98%		113,767,753.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		

		Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			127,692,806.00	1	160,525,580.00	1	83,201,700.00	1	52%		210,894,506.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase kelengkapan data gender dan anak	75%	1,004,156.78		15	33,490,420.00	10	22,236,620.00	10	66%		22,236,620.00		2214%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Pengumpulan, pengolahan analisa dan penyajian data di tingkat daerah kabupaten/kota					1	33,490,420.00	1	22,236,620.00	1	66%		22,236,620.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data kewenangan kabupaten/kota					1	33,490,420.00	1	22,236,620.00	1	66%		22,236,620.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%	72,339,373.95	100	113,778,200.00	100	426,574,385.00	107	413,016,467.00	107	97%		526,794,667.00		728%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemetrintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten / kota		1	24,068,350.00	1	285,381,300.00	1	273,682,330.00	1	96%		297,750,680.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			24,068,350.00	1	285,381,300.00	1	273,682,330.00	1	96%		297,750,680.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten / kota		30	89,709,850.00	30	141,193,085.00	37	139,334,137.00	37	99%		229,043,987.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
		Penyediaan layanan peningkatan kultas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			89,709,850.00	30	141,193,085.00	37	139,334,137.00	37	99%		229,043,987.00			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
TOTAL						7,151,188,731.00		8,482,673,338.00		7,838,797,750.00		92%							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						9,764,747,677.00		8,649,083,628.00		8,338,775,067.76							Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	7,993,538,435.15	100%	7,269,545,403.00	A	7,082,180,939.00		6,805,203,116.00	96%		14,074,748,519.00		176%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,576,913.00	100	208,693,911.00	100	197,478,687.00	100	95%		211,055,600.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1	158,912,825.00	1	148,844,966.00	1	93%		148,844,966.00					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			13,576,913.00	2	48,781,086.00	2	48,633,721.00	2						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,629,661,824.00	100	5,551,157,660.00	100	5,308,703,039.00	100	96%		10,938,364,863.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			5,528,368,824	798	5,453,627,660	798	5,217,773,039	798	96%		10,746,141,863.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			101,293.000	2	97,530.000	2.00	90,930.000	2.00						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.00%	20,350,000.00	100	14,359,000.00	100	14,330,000.00	100	100%		34,680,000.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			20,350.000	2	14,359.000	2	14,330.000	2	100%		34,680,000.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				100.00%	29,993,281.00	100	36,000,000.00	100	35,973,048.00	100	100%		65,966,329.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			29,993,281	4	36,000.000	4	35,973,048	4	100%		65,966,329.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	485,879,902.00	100	342,104,302.00	100	341,966,219.00	100	100%		827,846,121.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8,997,700.00	1	8,999,739.00	1	8,999,739.00	1	100%		17,997,439.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5,941,100.00	4	27,499,950.00	4	27,489,823.00	4						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			78,922,100.00	4	97,891,530.00	4	97,834,040.00	4						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			21,241,650.00	3	22,715,417.00	3	22,654,453.00	3						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12,948,000.00	6	9,997,666.00	6	9,991,578.00	6						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			357,829,352.00	12	175,000,000.00	12	174,996,586.00	12						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	9,888,000.00	100	22,467,768.00	100	22,453,000.00	100	100%		32,341,000.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			9,888,000.00	10	22,467,768.00	10	22,453,000.00	10	100%		32,341,000.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	585,299,883.00	100	462,991,420.00	100	453,705,082.00	100	98%		1,039,004,965.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			38,777,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	100%		39,777,000.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			73,842,883.00	1	69,995,265.00	1	69,105,081.00	1	99%		142,947,964.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			472,680,000.00	1	391,996,155.00	1	383,600,001.00	1	98%		856,280,001.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	494,895,600.00	100	444,406,878.00	100	430,594,041.00	100	97%		925,489,641.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan			445,185,000.00	110	394,416,128.00	110	380,779,506.00	110	97%		825,964,506.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14,900,000.00	8	14,999,685.00	7	14,974,685.00	7	100%		29,874,685.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14,815,000.00	13	14,999,065.00	13	14,847,850.00	13	99%		29,662,850.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19,995,600.00	1	19,992,000.00	1	19,992,000.00	1	100%		39,987,600.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Keadulaan dan Kemandirian Pangan	Persentase sumber daya ekonomi kemandirian pangan yang terbangun	100%	95,394,893.90	105%		94,922,000.00						94,922,000.00		100%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				94,922,000.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			89,922,300.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik			4,999,700.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stor PPH Ketersediaan	96%	351,770,177.50			280,626,460.00						280,626,460.00		80%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	100.00%		115,154,160.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan			34,790,000.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			45,510,010.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan			34,854,150.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	Persentase Cadangan Pangan	100.00%		106,116,500.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			106,116,500.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian Angka Kecukupan Energi dan Protein	100.00%		59,355,800.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			14,695,000.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakngan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakngan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			44,660,800.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	40,166,271.12	100%		41,882,550.00						41,882,550.00		104%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				29,875,550.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan			29,875,550.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Penanganan Kerawanan Pangan, Kewenangan kab/kota				12,007,000.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan kab/kota				12,007,000.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Total Pangan Segar asal tumbuhan (PSAT) yang bersertifikat prima	2	30,124,703.34	100%		29,588,050.00						29,588,050.00		98%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				29,588,050.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				20,002,350.00											Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota				9,585,700.00												Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana pertanian	82.23%	75,311,758.34	100%	1,021,345,550.00	82.25	75,100,909.00	95.83	74,562,906.00	95.83	99%		1,095,908,456.00	1455%		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Komoditi pangan segar yang diawasi			100.00%	1,021,345,550.00	12	75,100,909.00	23	74,562,906.00	23	99%		1,095,908,456.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				164,807,800.00	6	35,100,864.00	600%	35,067,652.00	600%	100%		199,875,452.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pendampingan Penggunaan Sarana pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				856,537,750.00	18	40,000,045.00	1700%	39,495,254.00	1700%	99%		896,033,004.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Total Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	46.42	314,565,164.73	85%	451,618,410.00	48.35	970,784,292.00	47.03	944,349,086.76	47.03	97%		1,395,967,496.76	444%		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Total Produktivitas Pangan dan Hortikultura			48.27 kulha	451,618,410.00	42.5	970,784,292.00	41.34	944,349,086.76	41.34	97%		1,395,967,496.76			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				418,125,642.00	17	928,430,000.00	17.00	911,337,702.76	17.00	98%		1,329,463,344.76			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				33,492,768.00	18	42,354,292.00	14.00	33,011,384.00	14.00	78%		66,504,152.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan OPT	100	85,791,138.48	100%	28,325,150.00	100	85,550,649.00	99.73	85,320,837.00	99.73	100%		113,645,987.00	132%		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Ketersediaan Sarana Pengendali OPT			100.00%	28,325,150.00	150/119	85,550,649.00	268	85,320,837.00	268	100%		113,645,987.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			265 Ha 0 Ha	28,325,150.00	265	85,550,649.00	264	85,320,837.00	264	100%		113,645,987.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian dan kelembagaan petani	60%	332,463,255.14	100%	546,894,104.00	100	435,466,839.00	100	429,338,122.00	100	99%		976,233,226.00	294%		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			100.00%	546,894,104.00	8	435,466,839.00	8	429,338,122.00	8	99%		976,233,226.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Peningkatan Kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				358,002,604.00	3	246,221,727.00	3	240,868,242.00	3	98%		598,870,846.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				188,891,500.00	5	189,245,112.00	5	188,470,880.00	5	100%		377,362,380.00			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		TOTAL					9,764,747,677.00		8,649,083,628.00		8,338,775,067.76		96%						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah					100	2,286,227,352.00	1	2,143,783,124.00	1	94%		2,143,783,124.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	100%		5,000,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1	5,000,000	1	4,798,300.00	1	96%		4,798,300.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah					100	1,990,414,056.00	100%	1,856,395,091.00	100%	93%		1,856,395,091.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					15	1,907,317,556	15	1,773,298,591.00	15	93%		1,773,298,591.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	83,096,500	12	83,096,500.00	12	100%		83,096,500.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah					100	11,220,000.00	100%	11,220,000.00	100%	100%		11,220,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1	11,220,000	1	11,220,000.00	1	100%		11,220,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100	8,000,000.00	100%	7,798,300.00	100%	97%		7,798,300.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					2	8,000,000.00	2	7,798,300	2	97%		7,798,300.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah					100	120,593,296.00	100%	120,445,954.00	100%	100%		120,445,954.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	14,999,668	1	14,999,668	1	100%		14,999,668.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	12,500,000	1	12,500,000	1	100%		12,500,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	4,499,748	1	4,499,748	1	100%		4,499,748.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1	3,593,880	1	3,572,352	1	99%		3,572,352.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	85,000,000	1	84,874,186	1	100%		84,874,186.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100	61,000,000.00	1	52,925,779.00	1	87%		52,925,779.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1	25,000,000	1	16,925,779	1	68%		16,925,779.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	36,000,000	1	36,000,000	1	100%		36,000,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100	90,000,000.00	100	89,998,000.00	100	100%		89,998,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					20	90,000,000.00	20	89,998,000.00	20	100%		89,998,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase sumber daya ekonomi kemandirian pangan yang terbangun					100%	192,925,809.00	1%	192,198,944.00	0%	100%		192,198,944.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur yang dimanfaatkan					100 unit	192,925,809.00	100 unit	192,198,944.00	100 unit	100%		192,198,944.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia					1 unit	187,925,809	5 unit	187,218,444.00	5 unit	100%		187,218,444.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik					1 laporan	5,000,000	1 laporan	4,980,500.00	1 laporan	100%		4,980,500.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Ketersediaan					95 Nilai	350,785,120.00	9448%	340,891,390.00	9448%	97%		340,891,390.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi	Informasi Pangan Pokok					2 dokumen	122,600,120.00	2 dokumen	122,395,412.00	2 dokumen	100%		122,395,412.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Jumlah kelompok wanita tani penerima bantuan					2 KWT		2 KWT		2 KWT							
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia					1 laporan	48,200,120.00	1 laporan	48,098,512.00	1 laporan	100%		48,098,512.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga dan Pasokan Pangan					12 dokumen	37,200,000.00	12 dokumen	37,141,700.00	12 dokumen	100%		37,141,700.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Makanan					1 laporan	37,200,000.00	1 laporan	37,155,200.00	1 laporan	100%		37,155,200.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan pangan Minimal					6%	110,000,000.00	27.91	109,820,578.00	27.91	100%		109,820,578.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					6 ton	110,000,000.00	7.588	109,820,578.00	7.588	100%		109,820,578.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	1. Persentase Peningkatan Konsumsi Energi terhadap standar konsumsi energi (% dari 2100 kkal)					2100 Kkal/Kp/thari	118,185,000.00	2,046	108,675,400.00	2,046	92%		108,675,400.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
			2. Persentase Peningkatan Konsumsi Protein terhadap standar konsumsi energi (% dari 57 kkal)					57 gr/kp/thari		55.6		55.6							
								2 dokumen	15,775,000.00	2 dokumen	14,593,000.00	2 dokumen	93%		14,593,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					2 laporan	102,410,000	3 laporan	94,082,400.00	3 laporan	92%		94,082,400.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta ketahanan dan kerentanan pangan					1 dokumen	40,034,900.00	1 dokumen	39,390,900.00	1 dokumen	98%		39,390,900.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta ketahanan dan kerentanan pangan					1 dokumen	30,034,900.00	1 dokumen	29,816,000.00	1 dokumen	99%		29,816,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan					1 dokumen	30,034,900.00	1 dokumen	29,816,000.00	1 dokumen	99%		29,816,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi					12 dokumen	10,000,000.00	12 dokumen	9,574,900.00	12 dokumen	96%		9,574,900.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyusunan Peta Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi					12 laporan	10,000,000.00	12 laporan	9,574,900.00	12 laporan	96%		9,574,900.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Total Pangan Segar asal tumbuhan (PSAT) yang bersertifikat prima 3					2 komoditi	39,950,000.00	2 komoditi	39,449,130.00	2 komoditi	99%		39,449,130.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan keamanan pangan segar					48 frekuensi	39,950,000.00	48 Frekuensi	39,449,130.00	48 Frekuensi	99%		39,449,130.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					2 sertifikat	20,000,000.00	2 sertifikat	19,763,650.00	2 sertifikat	99%		19,763,650.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Pangan dan Mutu Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan Pangan dan Mutu Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					1 dokumen	19,950,000.00	1 dokumen	19,685,480.00	1 dokumen	99%		19,685,480.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap					345.8	59,758,114.00	345.8	58,854,900.00	345.8	98%		58,854,900.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten kota	Frekuensi Pemberdayaan Nelayan Kecil					10	59,758,114.00	10	58,854,900.00	10	98%		58,854,900.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					100	59,758,114.00	100	58,854,900.00	100	98%		58,854,900.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya					677.16	194,808,210.00	677.16	194,098,400.00	677.16	100%		194,098,400.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidayaan ikan yang dibina					109	194,808,210.00	109	194,098,400.00	109	100%		194,098,400.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam satu daerah kabupaten kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten					5	194,808,210	5	194,098,400.00	5	100%		194,098,400.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan jumlah kelompok yang dibina					105	499,573,325.00	105	489,420,282.00	105	98%		489,420,282.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, waduk, rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten Kota	Jumlah Kelompok yang di awasi.					105	499,573,325.00	105	489,420,282.00	105	98%		489,420,282.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Pengawasan Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai , danau waduk, rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota					12	499,573,325	12	489,420,282	12	98%		489,420,282.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Total Konsumsi Ikan perkapita/tahun					33.46	37,806,000.00	33.46	37,580,000.00	33.46	99%		37,580,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan					17	37,806,000.00	17	37,580,000.00	17	99%		37,580,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan					16,582.50	37,806,000	16,583	37,580,000	16,583	99%		37,580,000.00			Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
		TOTAL						-	3,701,868,830.00		3,535,667,070.00		96%						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1,126,736,083.00		-		-						DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	366.911, 40	80,833,616.47			63,514,400.00							63,514,400.00		79%	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten kota						63,514,400.00							63,514,400.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meringkat Kapasitasnya					63,514,400							63,514,400.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	819.358, 02	30,124,703.34			834,930,800.00							834,930,800.00		2772%	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						834,930,800.00							834,930,800.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	

		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				834,930,800								834,930,800.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	146	223,009,162.18		180,513,683.00								180,513,683.00		81%	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten Kota					180,513,683.00								180,513,683.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengawasan Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai , danau waduk, rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				180,513,683								180,513,683.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Total konsumsi ikan perkapita/tahun	35.5	25,103,919.45		47,777,200.00								47,777,200.00		190%	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					47,777,200.00								47,777,200.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				47,777,200								47,777,200.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							7,745,690,282.00			7,394,448,972.00				7,051,547,434.00				DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	5,146,580,905.30		5,311,272,233.00	12 Dokumen	4,365,162,326.00	12 Dokumen	4,095,105,283.00	12 Dokumen	94%		9,406,377,516.00		183%	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu				6,499,800.00	12 Dokumen	13,500,000.00	12 Dokumen	13,499,593.00	12 Dokumen	100%		19,999,393.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					7 Dokumen	7,000,000	7 Dokumen	6,999,735	7 Dokumen	100%		6,999,735.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6,499,800	6 Dokumen	6,500,000	6 Dokumen	6,499,858	6 Dokumen	100%		12,999,658.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Admistrasi Keuangan					3,957,461,799.00	14 Laporan	3,297,369,920.00	14 Laporan	3,109,127,383.00	14 Laporan	94%		7,066,589,182.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				117,832,000	12 Dokumen	118,014,000	12 Dokumen	114,614,000	12 Dokumen	97%		232,446,000.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3,829,106,999	42 Orang	3,172,855,920	42 Orang	2,990,315,383	42 Orang	94%		6,819,422,382.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5,547,800	2 Dokumen	6,500,000	2 Dokumen	4,198,000	2 Dokumen	65%		9,745,800.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4,975,000											DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Admistrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah					15,240,000.00	12 laporan	15,240,000.00	12 laporan	15,240,000.00	12 laporan	100%		30,480,000.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15,240,000	12 laporan	15,240,000	12 laporan	15,240,000	12 laporan	100%		30,480,000.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kompetensi Pegawai yang dievaluasi dan ditindak lanjuti					6 Laporan	30,000,000.00	6 Laporan	29,563,502.00	6 Laporan	99%		29,563,502.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai beserta Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					8 orang	30,000,000	8 orang	29,563,502	8 orang	99%		29,563,502.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Admistrasi Umum Perangkat Daerah					528,290,735.00	2 Laporan	372,316,338.00	2 Laporan	359,155,952.00	2 Laporan	96%		887,446,687.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9,889,000	2 Paket	6,999,498	2 Paket	6,994,262	2 Paket	100%		16,883,262.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	

		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				130,777.600	3 Paket	66,840,849	3 Paket	62,942,630	3 Paket	94%		193,720,230.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan pameran yang dilakukan					1 Paket	12,500,000	1 Paket	12,500,000	1 Paket	100%		12,500,000.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				26,068,450	6 Paket	23,000,211	6 Paket	22,999,621	6 Paket	100%		49,068,071.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17,403,800	10 Dokumen	20,975,780	10 Dokumen	12,228,569	10 Dokumen	58%		29,632,369.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				15,000,000	3 Laporan	12,000,000	3 Laporan	12,000,000	3 Laporan	100%		27,000,000.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				329,151,885	3 laporan	230,000,000	3 laporan	229,490,870	3 laporan	100%		558,642,755.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90,799,500.00		58,754,985.00		58,730,750.00		100%		149,530,250.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					33,940,000								33,940,000.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					56,859,500	2 Paket	58,754,985	2 Paket	58,730,750	2 Paket	100%		115,590,250.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					191,088,358.00	4 Laporan	177,287,384.00	4 Laporan	166,776,153.00	4 Laporan	94%		357,864,511.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12,000,000	4 Laporan	11,995,650	4 Laporan	5,975,000	4 Laporan	50%		17,975,000.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				76,436,358	4 Laporan	88,098,701	4 Laporan	83,969,302	4 Laporan	95%		160,405,660.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				102,652,000	4 Laporan	77,193,033	4 Laporan	76,831,851	4 Laporan	100%		179,483,851.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					521,892,041.00		400,693,699.00		343,011,950.00		86%		864,903,991.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					323,695,041								323,695,041.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					18,225,000								18,225,000.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				139,787,000	R4 5 unit, R2 60 unit, 1 unit R3	315,699,000	R4 5 unit, R2 60 unit, 1 unit R3	259,107,950	R4 5 unit, R2 60 unit, 1 unit R3	82%		398,894,950.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 unit	49,999,999	1 unit	49,844,000	1 unit	100%		49,844,000.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40,185,000	10 Unit	34,994,700	10 Unit	34,060,000	10 Unit	97%		74,245,000.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-											DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan															DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan jumlah ternak yang terinseminasi	6900.17	1,193,433,201.06	1,442,061,278.00	5900 ekor, 2300 bibit	1,605,253,207.00	5900 ekor, 2300 bibit	1,565,432,014.00	5900 ekor, 2300 bibit	98%		3,007,493,292.00	252%			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					100,237,448.00	12 Laporan	91,780,184.00	12 Laporan	90,883,200.00	12 Laporan	99%		191,120,648.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan Spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				50,599,448	12 Laporan	53,000,000	12 Laporan	52,744,600	12 Laporan	100%		103,344,048.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pendampingan Pengguna sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				49,638,000	12 Laporan	38,780,184	12 Laporan	38,138,600	12 Laporan	98%		87,776,600.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten Kota					455,470,850.00	10500 VUB	672,901,748.00	10500 VUB	636,326,409.00	10500 VUB	95%		1,091,797,259.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	

		Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				405,545,450	24,000 VUB	627,167,646	24,000 VUB		590,980,031	24,000 VUB	94%		996,525,481.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Peningkatan Kualitas SDG Tanaman/Hewan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				49,925,400	12Laporan	45,734,102	12Laporan		45,346,378	12Laporan	99%		95,271,778.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan ternak dalam daerah Kabupaten Kota					886,352,980.00	5900 ekor	840,571,275.00	5900 ekor		838,222,405.00	5900 ekor	100%		1,724,575,385.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan Hijaun pakan ternak yang tersedia				886,352,980	6 Ton	840,571,275	6 Ton		838,222,405	6 Ton	100%		1,724,575,385.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana perkebunan	75		9,847,743.96	76,852,800.00	48.35%	1,068,944,585.00	48.35%		1,053,872,266.00	48.35%	99%		1,130,725,066.00		11482%	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengembangan Prasarana Pertanian					76,852,800.00	12 Laporan	1,068,944,585.00	12 Laporan		1,053,872,266.00	12 Laporan	99%		1,130,725,066.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				22,582,200	12 Laporan	1,028,702,510	12 Laporan		1,019,734,766	12 Laporan	99%		1,042,316,966.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan					54,270,600	12 Dokumen	40,242,075	12 Dokumen		34,137,500	12 Dokumen	85%		88,408,100.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ternak terakn	70		251,035,177.86	668,792,860.00	50%	209,010,308.00	50%		201,277,800.00	50%	96%		870,070,660.00		347%	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit Hewan menular dalam Kabupaten kota					612,825,760.00	4000 ekor	152,126,290.00	4000 ekor		148,190,300.00	4000 ekor	98%		762,016,060.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				163,002,870	12 Laporan	152,126,290	12 Laporan		149,190,300	12 Laporan	98%		312,193,170.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					449,822,890									449,822,890.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penerapan dan Pengawasan Peryaratn Teknis Kesehatan masyarakat Veteriner					55,967,100.00	14 laporan	56,884,018.00	14 laporan		52,087,500.00	14 laporan	92%		108,054,600.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					55,967,100	12 Laporan	56,884,018	12 Laporan		52,087,500	12 Laporan	92%		108,054,600.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Perkebunan	78		2,510,391.94	24,391,000.00	74%	26,488,478.00	74%		26,176,300.00	74%	99%		50,567,300.00		2014%	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					24,391,000.00	6 ha	26,488,478.00	6 ha		26,176,300.00	6 ha	99%		50,567,300.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					24,391,000	6 ha	26,488,478	6 ha		26,176,300	6 ha	99%		50,567,300.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perusahaan yang mendapatkan rekomentek	15		70,290,974.46	154,252,900.00	20 perusahaan	54,508,150.00	20 perusahaan		48,294,400.00	20 perusahaan	89%		202,547,300.00		288%	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota					154,252,900.00	15 perusahaan	54,508,150.00	15 perusahaan		48,294,400.00	15 perusahaan	89%		202,547,300.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian					154,252,900	15 Laporan	54,508,150	15 Laporan		48,294,400	15 Laporan	89%		202,547,300.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	77%		5,020,783.89	68,067,211.00	56.14%	65,081,918.00	56.14%		61,389,371.00	56.14%	94%		129,456,582.00		2578%	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					68,067,211.00	12 Unit	65,081,918.00	12 Unit		61,389,371.00	12 Unit	94%		129,456,582.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa					68,067,211	12 Unit	65,081,918	12 Unit		61,389,371	12 Unit	94%		129,456,582.00			DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
TOTAL							8,872,426,365.00		7,394,448,972.00			7,051,547,434.00		95%						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15,868,914,521.00		15,139,826,729.00			13,409,213,634.81							DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen telaah kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH dan KLHS Kabupaten	100%		53,808,484.02	890,661,431.00	100%	750,959,875.00	100%		725,827,558.00	100%	97%		1,616,488,989.00		3004%	DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					415,117,637.00	2 Dokumen	392,328,375.00	2 Dokumen		371,884,740.00	2 Dokumen	95%		787,002,377.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota					415,117,637.00									415,117,637.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota					2 Dokumen	392,328,375	2 Dokumen		371,884,740.00	2 Dokumen	95%		371,884,740.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					475,543,794.00	1 Dokumen	358,631,500.00	1 Dokumen		353,942,818.00	1 Dokumen	99%		829,486,612.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun				475,543,794.00	1 Dokumen	358,631,500	1 Dokumen		353,942,818.00	1 Dokumen	99%		829,486,612.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	

		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup																DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan Kualitas Udara berdasarkan klaster	90%	24,992,458.05	71,723,200.00	52,90 Poin 88,92 Poin	579,318,070.00	52,90 Poin 88,92 Poin	597,173,807.00	52,90 Poin 88,92 Poin	103%		668,897,007.00	2676%		DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			47,568,800.00	34 Dokumen	579,318,070.00	34 Dokumen	597,173,807.00	34 Dokumen	103%		644,742,607.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			47,568,800.00	17 Dokumen	539,619,429	17 Dokumen	539,256,100.00	17 Dokumen	100%		586,824,900.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				17 Dokumen	39,698,641	17 Dokumen	57,917,707.00	17 Dokumen	146%		57,917,707.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				24,154,400.00											DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				24,154,400.00											DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau Terkelola	7.4	449,846,059.55	749,762,735.00	7.2 Ha	807,553,999.00	7.2 Ha	739,779,359.00	7.2 Ha	92%		1,489,542,094.00	331%		DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota			749,762,735.00	7.2 Ha	807,553,999.00	7.2 Ha	739,779,359.00	7.2 Ha	92%		1,489,542,094.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				10,122,800.00								10,122,800.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			739,639,935.00	7.2 Ha	807,553,999	7.2 Ha	739,779,359.00	7.2 Ha	92%		1,479,419,294.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penanganan Limbah B3	90%	23,080,141.88	38,493,030.00	70%	25,184,255.00	70%	25,086,575.00	70%	100%		63,579,605.00	275%		DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Penyimpanan sementara Limbah B3				11,246,300.00	70%	25,184,255.00	70%	25,086,575.00	70%	100%		36,332,875.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			11,246,300.00	1 Laporan	25,184,255	1 Laporan	25,086,575.00	1 Laporan	100%		36,332,875.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				27,246,730.00								27,246,730.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemertastan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				27,246,730.00								27,246,730.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	100%	12,619,238.23	580,517,800.00	100%	107,085,740.00	100%	101,586,237.00	100%	95%		682,104,037.00	5405%		DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketataan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang di awasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izi PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten			580,517,800.00	100%	107,085,740.00	100%	101,586,237.00	100%	95%		682,104,037.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			195,650,000.00	2 Dokumen	107,085,740	6 Dokumen	101,586,237.00	6 Dokumen	95%		297,236,237.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				311,990,000.00								311,990,000.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				38,617,260.00								38,617,260.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH				34,260,540.00								34,260,540.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		100%	1,004,156.78	157,571,516.00								157,571,516.00	15692%		DINAS LH & PERHUBUNGAN		
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				157,571,516.00								157,571,516.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN		

		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				157,571,516								157,571,516.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		100%	1,004,156.78	67,247,450.00								67,247,450.00		6697%	DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				67,247,450.00								67,247,450.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				67,247,450								67,247,450.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	7,886,848.17	28,438,802.00	100%	13,567,000.00	100%	9,463,790.00	100%	70%		37,902,592.00		481%	DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota			28,438,802.00	3 Dokumen	13,567,000.00	3 Dokumen	9,463,790.00	3 Dokumen	70%		37,902,592.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dilayani			28,438,802	3 Pengaduan	13,567,000	5 Pengaduan	9,463,790.00	5 Pengaduan			37,902,592.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pengelolaan sampah skala perkotaan	10%	2,927,397,458.62	6,063,284,187.00		5,881,832,586.00		5,044,773,611.00		86%		11,108,057,798.00		379%	DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			6,063,284,187.00		5,881,832,586.00		5,044,773,611.00		86%		11,108,057,798.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				52,029,400								52,029,400.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Perangangan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sampah yang terangkut melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			5,028,280,787	66,704,44 Ton	5,881,832,586	11,261,60 Ton	5,044,773,611.00	11,261,60 Ton	86%		10,073,054,398.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				982,974,000								982,974,000.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	5,683,475,900.06	7,221,214,370.00	BB	6,974,325,204.00		6,165,522,697.81		88%		13,386,737,067.81		236%	DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tercapai			46,567,800.00	100%	36,641,540.00	100%	33,222,584.00	100%	91%		79,790,384.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16,582,700.00	5 Dokumen	11,540,800	5 Dokumen	10,431,984.00	5 Dokumen	90%		27,014,684.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29,985,100.00	5 Laporan	25,100,740	5 Laporan	22,790,600.00	5 Laporan	91%		52,775,700.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah			4,498,183,311.00	100%	4,991,792,079.00	100%	4,551,703,129.00	100%	91%		9,049,886,440.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			4,363,297,311.00	47 orang/bulan	4,857,326,079	47 orang/bulan	4,417,237,129.00	47 orang/bulan	91%		8,780,534,440.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			134,886,000.00	1 Dokumen	134,466,000	1 Dokumen	134,466,000.00	1 Dokumen	100%		269,352,000.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			36,840,000.00	100%	36,840,000.00	100%	36,840,000.00	100%	100%		73,680,000.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			36,840,000.00	2 Laporan	36,840,000	2 Laporan	36,840,000.00	2 Laporan	100%		73,680,000.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				108,312,850.00	100%	201,346,000.00	100%	183,590,082.00	100%	91%		291,902,932.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			108,312,850.00	14 orang	201,346,000	14 orang	183,590,082.00	14 orang	91%		291,902,932.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah			547,879,289.00	100%	332,324,921.00	100%	330,981,141.00	100%	100%		878,860,430.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didadatkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didadatkan			61,614,200.00	2 paket	16,156,971	2 paket	16,156,971.00	2 paket	100%		77,771,171.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			69,726,800.00	2 paket	57,499,682	2 paket	57,499,682.00	2 paket	100%		127,226,482.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			67,400,100.00	4 Paket	59,999,928	4 Paket	59,995,852.00	4 Paket	100%		127,395,952.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			6,620,400.00	8 Dokumen	8,788,964	8 Dokumen	7,812,752.00	8 Dokumen	89%		14,433,152.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			18,500,000.00	4 laporan	15,000,000	4 laporan	14,690,000.00	4 laporan	98%		33,190,000.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			324,017,789.00	20 Laporan	174,879,376	41 Laporan	174,825,884.00	41 Laporan	100%		498,843,673.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				616,501,536.00	100%	59,762,105.00	100%	59,126,060.00	100%	99%		675,627,596.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			342,790,000.00								342,790,000.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			25,986,938.00	20 Unit	12,017,600	20 Unit	12,017,600.00	20 Unit	100%		38,004,538.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			247,724,598.00	5 Unit	47,744,505	5 Unit	47,108,460.00	5 Unit	99%		294,833,058.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			621,540,935.00	100%	615,583,559.00	100%	546,035,396.00	100%	89%		1,167,576,331.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5,000,000.00	4 laporan	4,999,050	4 laporan	4,990,000.00	4 laporan	100%		9,990,000.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			168,100,935.00	12 laporan	162,144,065	12 laporan	146,805,396.00	12 laporan	91%		314,906,331.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			448,440,000.00	12 laporan	448,440,444	12 laporan	394,240,000.00	12 laporan	88%		842,680,000.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			745,388,649.00	100%	700,035,000.00	100%	424,024,305.81	100%	61%		1,169,412,954.81			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pakuinya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pakuinya			46,736,337.00	2 Unit	48,000,000	2 Unit	47,987,840.00	2 Unit	100%		94,724,177.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pakuinya			260,054,100.00	27 Unit	270,018,000	27 Unit	220,187,608.00	27 Unit	82%		480,241,708.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			45,798,000.00	68 Unit	45,640,000	43 Unit	27,371,910.00	43 Unit	60%		73,169,910.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			392,800,212.00	1 Unit	336,377,000	1 Unit	128,476,947.81	1 Unit	38%		521,277,159.81			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						2,596,667,317.00		951,886,620.00		913,584,619.21							DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	75%	142,534,029.69	2,398,740,517.00		951,886,620.00		913,584,619.21		96%		3,312,325,136.21		2324%	DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum			1,735,719,800.00	80%	301,731,930.00	80%	274,554,243.21	80%	91%		2,010,274,043.21			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			1,625,250,900	10 Unit	301,731,930	10 Unit	274,554,243.21	10 Unit	91%		1,899,805,143.21			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penyediaan Butir Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				65,170,000								65,170,000.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				45,298,900								45,298,900.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota			560,244,867.00	3 Kegiatan	525,154,690.00	3 Kegiatan	514,703,470.00	3 Kegiatan	98%		1,074,948,337.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			392,121,737.00	3 Laporan	525,154,690	3 Laporan	514,703,470	3 Laporan	98%		906,825,207.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Penengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				168,123,130.00								168,123,130.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				34,985,850.00								34,985,850.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				34,985,850								34,985,850.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				67,790,000.00	1 Laporan	125,000,000.00	1 Laporan	124,326,906.00	1 Laporan	99%		192,116,906.00			DINAS LH & PERHUBUNGAN	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			67,790,000	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	124,326,906.00	1 Laporan	99%		192,116,906.00		DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran	100%	5,020,783.89	197,926,800.00		-		-				197,926,800.00	3942%	DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				197,926,800.00								197,926,800.00		DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau				197,926,800.00								197,926,800.00		DINAS LH & PERHUBUNGAN	
		TOTAL				18,465,581,838.00		16,091,713,349.00		14,322,796,254.02		89%					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	3,283,767,949.45	4,179,594,848.00	A	4,482,083,139.00		4,294,473,066.00		96%		8,474,067,914.00	258%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang diselesaikan dengan tepat waktu			2,477,753,846.00	100%	2,800,069,261.00	100%	2,674,258,622.00	100%	96%		5,152,012,468.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2,403,113,846.00	314 Orang/ bulan	2,725,429,261.00	314 Orang/ bulan	2,599,618,622.00	314 Orang/ bulan	95%		5,002,732,468.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keutuhan SKPD			74,640,000.00	5 Dokumen	74,640,000.00	5 Dokumen	74,640,000.00	5 Dokumen	100%		149,280,000.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan Baik			13,920,000.00	100%	13,920,000.00	100%	13,920,000.00	100%	100%		27,840,000.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			13,920,000.00	3 Laporan	13,920,000.00	3 Laporan	13,920,000.00	3 Laporan	100%		27,840,000.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8,880,000.00	100%	22,500,000.00	100%	11,924,638.00	100%	53%		20,804,638.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			8,880,000.00	10 Orang	22,500,000.00	10 Orang	11,924,638.00	10 Orang	53%		20,804,638.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,226,171,135.00	100%	1,188,768,234.00	100%	1,164,470,087.00	100%	98%		2,390,641,222.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4,270,200.00	1 Paket	4,286,041.00	1 Paket	4,284,400.00	1 Paket	100%		8,554,600.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			794,757,200.00	5 Paket	563,024,468.00	5 Paket	545,028,000.00	5 Paket	97%		1,339,785,200.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			79,362,200.00	1 Paket	121,477,638.00	1 Paket	120,436,750.00	1 Paket	99%		199,798,950.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			9,893,100.00	1 Paket	17,022,159.00	1 Paket	17,021,900.00	1 Paket	100%		26,915,000.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			10,658,400.00	3 Dokumen	10,652,928.00	3 Dokumen	10,628,750.00	3 Dokumen	100%		21,287,150.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			327,230,035.00	30 Laporan	472,305,000.00	30 Laporan	467,070,287.00	30 Laporan	99%		794,300,322.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			329,700,890.00	100%	325,605,644.00	100%	307,201,140.00	100%	94%		636,902,030.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4,600,000.00	2 Laporan	4,595,400.00	2 Laporan	4,590,000.00	2 Laporan	100%		9,190,000.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			56,170,040.00	1 Laporan	56,170,040.00	1 Laporan	56,170,040.00	1 Laporan	100%		112,340,080.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			268,930,850.00	5 Laporan	264,840,204.00	5 Laporan	246,441,100.00	5 Laporan	93%		515,371,950.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara			123,168,977.00	100%	131,220,000.00	100%	122,698,579.00	100%	94%		245,867,556.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			123,168,977.00	14 Unit	131,220,000.00	14 Unit	122,698,579.00	14 Unit	94%		245,867,556.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	77%	787,440,686.36	80%	128,668,000.00	75%	391,452,500.00	78%	387,540,000.00	78%	99%	516,208,000.00	66%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan			128,668,000.00	100%	391,452,500.00	100%	387,540,000.00	100%	99%		516,208,000.00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			128.668.000.00	5 Laporan	391.452.500.00	5 Laporan	387.540.000.00	5 Laporan	99%		516.208.000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Lembaga yang memanfaatkan data profil	100%	1,004,156.78	288,105,000.00								288,105,000.00		28691%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD			288,105,000.00								288,105,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota			288,105,000.00								288,105,000.00			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		TOTAL				4,596,367,848.00		4,873,535,639.00		4,682,013,066.00		96%						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6,385,612,223.00		8,636,310,264.00		8,528,865,107.00							DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		69%	1,004,156.78	14,817,200.00	100%	31,740,000.00	100%	31,663,320.00	100%	100%		46,480,520.00		4629%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Penyelenggaraan penataan desa			14,817,200.00	100%	31,740,000.00	100%	31,663,320.00	100%	100%		46,480,520.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi			14,817,200.00	100%	31,740,000.00	100%	31,663,320.00	100%	100%		46,480,520.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	1,506,235,166.90	-								-		0%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyelenggaraan Penataan Desa				-								-			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Tata Wilayah Desa												-			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	370,117,276.62	1,055,642,705.00	100%	844,057,556.00	100%	843,057,988.00	100%	100%		1,888,700,693.00		513%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa			1,055,642,705.00	100%	844,057,556.00	100%	843,057,988.00	100%	100%		1,888,700,693.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa			29,559,926.00	100%	32,400,000.00	100%	32,380,000.00	100%	100%		61,939,926.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum desa				100%	74,629,954.00	100%	74,629,954.00	100%	100%		74,629,954.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terawasinya pelaporan keuangan desa			29,502,000.00	100%	34,966,479.00	100%	34,965,880.00	100%	100%		64,467,880.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				100%	17,489,955.00	100%	17,484,955.00	100%	100%		17,484,955.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananya Musyawarah Desa				100%	53,715,750.00	100%	53,529,750.00	100%	100%		53,529,750.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang mengikuti kegiatan evaluasi dan pengawasan perdes				100%	110,334,784.00	100%	110,239,470.00	100%	100%		110,239,470.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kegiatan pembinaan yang di laksanakan			149,305,719.00	100%	148,059,375.00	100%	147,427,324.00	100%	100%		296,733,043.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				58,089,626.00								58,089,626.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Penyusunan Profil Desa				87,339,900.00								87,339,900.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Pengelolaan Aset Desa				74,532,810.00								74,532,810.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terfasilitasinya Penetapan dan Penegasan Batas Desa			288,808,975.00	100%	222,461,402.00	100%	222,402,962.00	100%	100%		511,211,937.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diaksanakan oleh Desa				186,707,272.00								186,707,272.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Lomba Desa dan Kelurahan			151,796,477.00	100%	149,999,857.00	100%	149,997,693.00	100%	100%		301,794,170.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Adat	100%	1,536,359,870.24	2,170,548,972.00	100%	2,781,014,967.00	100%	2,774,813,511.00	100%	100%		4,945,362,483.00		322%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				2,170,548,972.00	100%	2,781,014,967.00	100%	2,774,813,511.00	100%	100%		4,945,362,483.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat berjalan dengan baik	Facilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat berjalan dengan baik			206,492,424.00	100%	284,027,490.00	100%	283,732,662.00	100%	100%		490,225,086.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				214,981,200.00	100%	614,338,125.00	99%	609,276,245.00	99%	99%		824,257,445.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				14,603,000.00	100%	9,750,000.00	99%	9,625,500.00	99%	99%		24,228,500.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				149,892,000.00	100%	149,999,986.00	100%	149,981,783.00	100%	100%		299,873,783.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1,584,580,348.00	100%	1,722,899,366.00	100%	1,722,197,321.00	100%	100%		3,306,777,669.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB		2,998,512,926.12	9500%	3,144,603,346.00	100%	4,979,497,741.00	100%	4,879,330,288.00	100%	98%	8,023,933,634.00		268%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik				-	100%	6,838,515.00	100%	6,838,515.00	100%	100%		6,838,515.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia					100%	3,591,347.00	100%	3,591,347.00	100%	100%		3,591,347.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia					100%	3,247,168.00	100%	3,247,168.00	100%	100%		3,247,168.00				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib dan benar				1,827,044,415.00	100%	2,097,689,181.00	100%	2,005,419,084.00	100%	96%		3,832,463,499.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan				1,827,044,415.00	100%	2,097,689,181.00	96%	2,005,419,084.00	96%	96%		3,832,463,499.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian				34,610,850.00	100%	60,000,000.00	100%	59,810,352.00	100%	100%		94,421,202.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				19,875,350.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	100%		49,875,350.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				14,735,500.00	100%	30,000,000.00	99%	29,810,352.00	99%	99%		44,545,852.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum				312,475,753.00	100%	402,334,742.00	100%	403,357,416.00	100%	100%		715,833,169.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terpenuhiya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				8,179,100.00	100%	17,223,870.00	100%	17,223,870.00	100%	100%		25,402,970.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					100%	13,893,025.00	100%	13,875,000.00	100%	100%		13,875,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25,002,700.00	100%	39,031,405.00	100%	39,031,405.00	100%	100%		64,034,105.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14,965,450.00	100%	21,073,000.00	100%	21,073,000.00	100%	100%		36,038,450.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				14,500,000.00	100%	29,986,050.00	100%	29,900,000.00	100%	100%		44,400,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				25,000,000.00	100%	40,000,000.00	103%	41,360,000.00	103%	103%		66,360,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				224,828,503.00	100%	241,127,392.00	100%	240,894,141.00	100%	100%		465,722,644.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Pengadaan Barang Milik Daerah					199,760,000.00								199,760,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					199,760,000.00								199,760,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				478,204,573.00	100%	1,974,181,303.00	100%	1,970,454,581.00	100%	100%		2,448,659,154.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				40,603,373.00	100%	47,999,285.00	98%	47,234,985.00	98%	98%		87,838,358.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				437,601,200.00	100%	1,926,182,018.00	100%	1,923,219,596.00	100%	100%		2,360,820,796.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah				292,507,755.00		438,454,000.00		433,450,340.00		99%		725,958,095.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				166,893,755.00	100%	125,276,000.00	27%	34,160,000.00	27%	27%		201,053,755.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara				26,410,000.00	100%	34,160,000.00	355%	121,285,000.00	355%	355%		147,695,000.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara				99,204,000.00	100%	279,018,000.00	100%	278,005,340.00	100%	100%		377,209,340.00			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
TOTAL							6,385,612,223.00		8,636,310,264.00		8,528,865,107.00		99%							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							6,643,132,947.00		7,104,048,850.00		6,328,636,928.00							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB		3,641,470,085.70	9500%	3,894,815,739.00		4,180,892,408.00		3,503,768,533.00		84%		7,398,584,272.00		203%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.00%	2,575,425,682.00		2,939,233,942.00		2,265,225,180.00		77%		4,840,650,862.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/Bulan	2,484,430,682.00	1	2,846,227,942	1	2,172,219,180	1	76%		4,656,649,862.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6 Dokumen	90,995,000.00	1	93,006,000	1	93,006,000	1	100%		184,001,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Administrasi Barang milik Daerah Pada perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				100.00%	17,999,850.00		17,520,000.00		17,520,000.00		100%		35,519,850.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Tahun	17,999,850.00	1	17,520,000	1	17,520,000	1	100%		35,519,850.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.00%	8,121,000.00		30,110,924.00		30,010,000.00		100%		38,131,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			2 Orang	3,000,000.00	3	25,000,000	3	25,000,000	3	100%		28,000,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Kegiatan	5,121,000.00	25	5,110,924	25	5,010,000	25	98%		10,131,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	365,892,036.00		244,161,124.00		242,469,381.00		99%		608,361,417.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			35 Unit	4,501,400.00	1	10,035,360	1	9,869,000	1	98%		14,370,400.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Unit	44,792,200.00	2	44,745,276	2	44,200,000	2	99%		88,992,200.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	13,886,300.00	2	26,384,421	2	25,761,648	2	98%		39,647,948.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3500 Lembar	8,549,850.00	2	8,548,237	2	8,380,700	2	98%		16,930,550.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2500 Eksemplar	4,751,900.00	7	3,283,848	7	3,283,848	7	100%		8,035,748.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Tahun	5,030,400.00	1	9,826,538	1	9,711,000	1	99%		14,741,400.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			40 Laporan	284,379,986.00	40	141,337,444	40	141,263,185	40	100%		425,643,171.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	769,043,171.00		803,132,978.00		802,785,272.00		100%		1,571,828,443.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	4,000,000.00	400	3,995,100	400	3,990,000	400	100%		7,990,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	655,600,171.00	12	676,601,090	12	676,295,272	12	100%		1,331,895,443.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Tahun	109,443,000.00	1	122,536,788	1	122,500,000	1	100%		231,943,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	158,334,000.00		146,733,440.00		145,758,700.00		99%		304,092,700.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya			0 Unit 12 Unit	123,498,000.00	12	106,848,000	12	105,999,700	12	99%		229,497,700.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	9,948,000.00	7	14,997,440	7	14,878,000	7	99%		24,826,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	24,888,000.00	2	24,888,000	2	24,881,000	2	100%		49,769,000.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Terselenggara	100%	955,628,411.33	100%	1,896,760,147.00		1,682,085,303.00		1,602,098,454.00		95%		3,498,858,601.00		366%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100.00%	1,896,760,147.00		1,682,085,303.00		1,602,098,454.00		95%		3,498,858,601.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Monitoring Opini dan aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			10 Dokumen	36,448,450.00	10	66,103,964	10	59,012,563	10	89%		95,461,013.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			4 Dokumen	1,379,399,713.00	4	1,229,339,864	4	1,169,330,230	4	95%		2,548,729,943.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			2 Dokumen	480,911,984.00	2	365,080,615	2	352,229,261	2	96%		633,141,245.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penguatan Kapasitas sumber Daya Komun	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya					1	21,560,860	1	21,526,400	1	100%		21,526,400.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Cakupan Pengelolaan e-government	85%	697,048,190.23	9900%	851,557,061.00		1,241,071,139.00		1,222,769,941.00		99%		2,074,327,062.00		298%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain/ Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Daerah			100.00%	589,787,322.00		543,393,368.00		531,557,509.00		98%		1,121,344,831.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			2 Domain	21,442,200.00	2	57,509,042	2	49,235,500	2	86%		70,677,700.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Penalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	34,866,300.00	1	35,714,700	1	33,466,300	1	94%		68,332,600.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				2 Unit	533,478,822.00	2	450,169,626	2	448,855,709	2	100%		982,334,531.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Pengelolaan E-Government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			100.00%	261,769,739.00		697,677,771.00		691,212,432.00		99%		952,982,171.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	50,272,149.00	1	176,118,997	1	170,970,102	1	97%		221,242,251.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			0 Unit 1 Unit	124,592,900.00	1	203,602,855	1	202,718,600	1	100%		327,311,500.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang			1 Unit	86,904,690.00	1	317,955,919	1	317,523,730	1	100%		404,428,420.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							64,376,900.00		218,443,998.00		207,534,655.00							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik daerah dalam penyelenggaraan	90%	25,099,209.95	100%	64,376,900.00		218,443,998.00		207,534,655.00		95%		271,911,555.00		1083%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			100.00%	64,376,900.00		218,443,998.00		207,534,655.00		95%		271,911,555.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			4 dokumen	64,376,900.00	4	84,985,640	4	74,888,530	4	88%		139,265,430.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun			1	133,458,358	1	132,646,125	1	132,646,125	1	99%		132,646,125.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							26,832,400.00		150,492,178.00		149,856,097.00							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Informasi yang diamankan melalui jaringan sandi	75%	30,123,769.47	100%	26,832,400.00		150,492,178.00		149,856,097.00		100%		176,688,487.00		587%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			100.00%	26,832,400.00		150,492,178.00		149,856,097.00		100%		176,688,487.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			2 dokumen	7,885,200.00	2	49,994,832	2	49,359,451	2	99%		57,244,651.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	18,947,200.00	1	100,497,346	1	100,496,646	1	100%	119,443,846.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
TOTAL					6,734,342,247.00		7,472,985,026.00		6,686,027,680.00		89%					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					151,948,370.00		-		-						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif yang diperiksa dan diawasi	50%	50,474,372.23	43%	48,580,910.00	-	-			48,580,910.00	96%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		35 Koperasi	48,580,910.00							48,580,910.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		83 Unit Usaha	29,544,010.00							29,544,010.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Unit Usaha	19,036,900.00							19,036,900.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI	Persentase KSPI/USP dalam keadaan sehat	72%	25,605,997.84		16,259,400.00	-	-			16,259,400.00	63%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			16,259,400.00			-	-			16,259,400.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penghargaan Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		16,259,400.00							16,259,400.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi Pengembangan Usahanya	0.65	97,863,250.00		87,108,060.00	-	-			87,108,060.00	89%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			87,108,060.00			-	-			87,108,060.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			87,108,060.00							87,108,060.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3,661,429,477.00		4,248,448,394.00		3,339,903,661.00						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan dokumen penanaman modal	100	36,149,131.89	100%	32,475,200.00	25,421,032.00	22,743,500.00	89%		55,218,700.00	153%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen	32,475,200.00			25,421,032.00	22,743,500.00	89%		55,218,700.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1 Dokumen	32,475,200.00	1	25,421,032.00	0	22,743,500.00	89%		55,218,700.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Promosi Penanaman Modal	75%	38,089,815.05		38,218,250.00	30,963,500.00	30,546,487.00	99%		68,764,737.00	176%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Dilakui		38,218,250.00			30,963,500.00	30,546,487.00	99%		68,764,737.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		38,218,250.00	2	30,963,500.00	1	30,546,487.00	99%		68,764,737.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penerbitan perizinan dan non perizinan	100%	130,412,059.94		128,622,659.00	97,782,991.00	97,683,906.00	100%		226,306,556.00	174%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		128,622,659.00			97,782,991.00	97,683,906.00	100%		226,306,556.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		66,994,970.00	1100	47,211,536.00	8109	47,186,000.00	100%		114,180,970.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			18,506,200.00	600	24,606,005.00	632	24,589,000.00	100%		43,095,200.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		43,121,480.00							43,121,480.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha elektronik				100	25,965,450.00	280	25,908,906.00	100%	25,908,906.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Total pelaku usaha yang melakukan investasi	58	367,643,847.68	308,085,950.00		664,441,950.00		456,280,500.00	69%	764,366,450.00	208%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			308,085,950.00		664,441,950.00		456,280,500.00	69%	764,366,450.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			216,971,950.00						216,971,950.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				91,114,000.00						91,114,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan				30	400,557,950.00	240	275,750,000.00	69%	275,750,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data				12	175,923,000.00	60	146,595,500.00	83%	146,595,500.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang diselesaikan permasalahan dan hambatan nya				9	87,961,000.00	9	33,935,000.00	39%	33,935,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan perizinan berbasis sistem informas	100%	331,371,576.05	319,359,998.00		104,901,986.00		102,440,065.00	98%	421,800,063.00	127%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				319,359,998.00		104,901,986.00		102,440,065.00	98%	421,800,063.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikay dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikay dan Dimanfaatkan			319,359,998.00	4	104,901,986.00	4	102,440,065.00	98%	421,800,063.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	3,147,131,513.20	2,834,667,429.00		3,324,936,935.00		2,630,209,203.00	79%	5,464,876,632.00	174%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah					15,006,044.00		14,931,762.00	100%	14,931,762.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3	10,000,000.00	3	9,988,562.00	100%	9,988,562.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD				2	5,006,044.00	2	4,943,200.00	99%	4,943,200.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,177,625,342.00		2,402,340,877.00		1,783,364,921.00	74%	3,960,990,263.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2,086,899,442.00	20	2,299,904,877.00	14	1,682,112,631.00	73%	3,769,012,073.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			90,725,900.00	12	95,436,000.00	12	94,296,000.00	99%	185,021,900.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1	7,000,000.00	1	6,956,290.00	99%	6,956,290.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19,951,815.00		35,000,000.00		34,977,098.00	100%	54,928,913.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			19,951,815.00	20	35,000,000.00	14	34,977,098.00	100%	54,928,913.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			295,015,545.00		255,911,691.00		251,966,775.00	98%	546,982,320.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2,999,610.00	12	20,209,883.00	12	20,209,883.00	100%	23,209,693.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			55,340,000.00						55,340,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			36,643,800.00	1	58,939,394.00	1	58,663,719.00	100%	95,307,519.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			27,999,480.00	1	41,456,706.00	1	41,456,492.00	100%	69,455,972.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			6,568,000.00	15	10,305,708.00	12	6,768,000.00	66%	13,336,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100%		10,000,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			165,464,455.00		89	115,000,000.00	78	114,868,681.00	100%		280,333,136.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan						55,160,999.00		54,600,000.00	99%		54,600,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					13	55,160,999.00	13	54,600,000.00	99%		54,600,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			256,302,593.00			396,833,324.00		345,817,647.00	87%		602,120,240.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12,431,141.00		1	4,999,050.00	1	4,996,350.00	100%		17,427,491.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			53,572,152.00		4	144,938,725.00	4	118,526,002.00	82%		172,098,154.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3,499,300.00		1	22,240,000.00	1	22,240,000.00	100%		25,739,300.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			186,800,000.00		22	224,655,549.00	16	200,055,295.00	89%		386,855,295.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85,772,134.00			164,684,000.00		144,551,000.00	88%		230,323,134.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					10	17,748,000.00	6	9,011,000.00	51%		9,011,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			82,982,134.00		10	97,200,000.00	10	88,275,000.00	91%		171,257,134.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2,790,000.00		30	9,950,000.00	30	7,510,000.00	75%		10,300,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang Dipelihara/direhabilitasi					1	39,786,000.00	1	39,755,000.00	100%		39,755,000.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		TOTAL				3,813,377,847.00			4,248,448,394.00		3,339,903,661.00	79%						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7,185,145,798.00			7,353,261,877.00		6,802,367,367.00						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase atlit yang berprestasi ditingkat provinsi	75%	1,402,186,685.88	389,223,886.00			553,425,400.00		424,169,052.00	77%		813,392,938.00	58%		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Pelopor, wirausaha muda, dan pasukan pengibar bendera yang ditingkatkan Kapasitasnya			143,162,750.00			253,367,400.00		253,102,274.00	100%		396,265,024.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			74,979,750.00		80	130,026,000.00	80	129,838,024.00	100%		204,817,774.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			68,183,000.00		160	123,341,400.00	160	123,264,250.00	100%		191,447,250.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			246,061,136.00			300,058,000.00		171,066,778.00	57%		417,127,914.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				246,061,136.00		1	300,058,000.00	1	171,066,778.00	57%		417,127,914.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlit yang berprestasi ditingkat provinsi	85%	2,698,545,942.24	3,389,495,025.00			3,133,870,224.00		3,074,608,124.00	98%		6,464,103,149.00	240%		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan			273,291,975.00			366,237,459.00		365,259,774.00	100%		638,551,749.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan					2	186,590,059.00	2	186,525,400.00	100%		186,525,400.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			273,291,975.00		1	179,647,400.00	1	178,734,374.00	99%		452,026,349.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan kejuaraan dan partisipasi kejuaraan yang diikuti			595,759,300.00		1,084,432,792.00		1,078,429,700.00		99%		1,674,189,000.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			420,070,575.00	5	536,941,277	5	531,503,190	5	99%		951,573,765.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			175,688,725.00	33	547,491,515	33	546,926,510	33	100%		722,615,235.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi*			803,530,350.00		62,385,675.00		60,498,850.00		97%		864,029,200.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota				777,496,000.00								777,496,000.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan			26,034,350.00	1	62,385,675	1	60,498,850	1	97%		86,533,200.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan			1,600,000,000.00		1,450,000,000.00		1,400,000,000.00		97%		3,000,000,000.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				1,600,000,000.00	3	1,450,000,000	3	1,400,000,000	3	97%		3,000,000,000.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			116,913,400.00		170,814,298.00		170,419,800.00		100%		287,333,200.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			67,992,000.00	1	69,804,358	1	69,787,700	1	100%		137,779,700.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat			48,921,400.00	1	101,009,940	1	100,632,100	1	100%		149,553,500.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase sumbu kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi	80%	350,461,209.00	300,000,000.00		350,000,000.00		350,000,000.00		100%		650,000,000.00		185%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*			300,000,000.00		350,000,000.00		350,000,000.00		100%		650,000,000.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				300,000,000.00	1	350,000,000	1	350,000,000	1	100%		650,000,000.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	3,548,087,073.33	B	3,106,426,887.00	3,315,966,253.00		2,953,590,191.00		89%		6,060,017,078.00		171%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Dokumen	1,990,678,972.00	2,235,122,203.00		1,912,538,234.00		86%		3,903,217,206.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			21 orang /bulan	1,881,733,472.00	16	2,111,420,203	16	1,803,349,234	16	85%		3,685,082,706.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	108,945,500.00	12	123,702,000	11	109,189,000	11	88%		218,134,500.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4 Laporan	37,400,000.00	43,440,000.00		43,440,000.00		100%		80,840,000.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 Laporan 4 Laporan	37,400,000.00	4	43,440,000	4	43,440,000	4	100%		80,840,000.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8 Orang	37,500,000.00	37,500,000.00		19,807,800.00		53%		57,307,800.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Orang	12,500,000.00	2	12,500,000	2	11,448,400	2	92%		23,948,400.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			4 Orang	25,000,000.00	8	25,000,000	3	8,359,400	3	33%		33,359,400.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			80.00%	350,460,649.00	336,808,824.00		335,234,090.00		100%		685,694,739.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	20,700,000.00	1	20,899,860	1	20,886,329	1	100%		41,586,329.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	10,300,000.00	1	44,205,786	1	44,175,500	1	100%		54,475,500.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	75,840,447.00	1	78,551,950	1	78,500,544	1	100%		154,340,991.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	12,157,300.00	1	8,951,275	1	8,951,275	1	100%		21,108,575.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	13,353,400.00	12	19,199,953	11	17,740,042	11	92%		31,093,442.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	19,337,000.00	12	15,000,000	12	14,981,400	12	100%		34,318,400.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	198,772,502.00	25	150,000,000	25	149,999,000	25	100%		348,771,502.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 Unit	19,992,780.00		3,587,529.00		3,587,529.00		100%		23,580,309.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	19,992,780.00	3	3,587,529	3	3,587,529	3	100%		23,580,309.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Laporan	397,854,586.00		387,352,134.00		375,339,444.00		97%		773,194,030.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	5,000,000.00	12	4,999,050	12	4,990,000	12	100%		9,990,000.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	53,094,586.00	12	51,512,700	10	44,569,444	10	87%		97,664,030.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	339,760,000.00	12	330,840,384	12	325,780,000	12	98%		665,540,000.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Disorapar yang terpelihara			26 Unit	272,539,900.00		272,155,563.00		263,643,094.00		97%		536,182,994.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			21 Unit	192,557,000.00	21	198,541,778	20	190,038,341	20	96%		382,595,341.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	49,998,000.00	3	49,998,462	3	49,998,462	3	100%		99,996,462.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	29,984,900.00	3	23,615,323	3	23,606,291	3	100%		53,591,191.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							1,028,405,660.00											DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kenaikan pengunjung objek wisata	1	105,265,830.00	100%	749,368,260.00								749,368,260.00		712%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Terkelola Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan			1 Unit	749,368,260.00								749,368,260.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Unit	749,368,260.00								749,368,260.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari kalender tahunan	0.5	544,528,300.00	100%	279,037,400.00								279,037,400.00		51%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata lama kunjungan			1 Hari	279,037,400.00								279,037,400.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Pengutan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pengutan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			2 Dokumen	279,037,400.00								279,037,400.00			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
TOTAL							8,213,551,458.00		7,353,261,877.00		6,802,367,367.00		93%						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2,925,319,172.00		2,979,143,133.00		2,835,655,665.00							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	2,627,470,191.46	B Predikat	2,633,099,370.00		2,752,781,895.00		2,617,627,306.00		95%		5,250,726,676.00		200%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 laporan	1,842,822,410.00		1,942,657,224.00		1,838,205,644.00		95%		3,681,028,054.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Orang/bulan	1,752,264,410.00	20 Orang /Bulan	1,852,099,224.00		1,747,647,644.00		94%		3,499,912,054.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			70 Dokumen	90,558,000.00	70 dokumen	90,558,000.00		90,558,000.00		100%		181,116,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya laporan pelaksanaan administrasi barang milik perangkat daerah			12 Laporan	6,840,000.00		-		-				6,840,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	6,840,000								6,840,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah			6 laporan	267,267,894.00		307,653,339.00		305,177,390.00		99%		572,445,284.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	

		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10,000,000.00	1 paket	9,999,462.00		9,999,397.00		100%		19,999,397.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	103,247,950.00	1 paket	97,499,800.00		97,430,144.00		100%		200,678,094.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3 Dokumen	7,678,000.00	3 dokumen	7,673,148.00		5,266,920.00		69%		12,944,920.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	146,341,944.00	12 laporan	192,480,929.00		192,480,929.00		100%		338,822,873.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					244,358,810.00		189,117,129.00		188,720,000.00		100%		433,078,810.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					18,185,000.00								18,185,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					226,173,810.00	1 unit	189,117,129.00		188,720,000.00		100%		414,893,810.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah			36 laporan	196,885,256.00		206,285,128.00		188,838,772.00		92%		385,724,028.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	4,000,000.00	12 laporan	3,995,100.00		3,993,600.00		100%		7,993,600.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	42,639,761.00	12 laporan	52,040,007.00		40,602,934.00		78%		83,242,695.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	150,245,495.00	12 laporan	150,250,021.00		144,242,238.00		96%		294,487,733.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			4 laporan	74,925,000.00		100,229,075.00		89,845,500.00		90%		164,770,500.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					2 unit	9,347,075.00									DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7 Unit	74,925,000.00	7 unit	90,882,000.00		89,845,500.00		99%		164,770,500.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya laporan pelaksanaan administrasi barang milik perangkat daerah			12 Laporan	-		6,840,000.00		6,840,000.00		100%		6,840,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	6,840,000.00		6,840,000.00		100%		6,840,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pegunjung perpustakaan	70%	77,319,479.45	1,61 Persen	292,219,802.00		226,361,238.00		218,028,359.00		96%		510,248,161.00		660%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka			2 laporan	173,100,602.00		147,574,524.00		145,611,659.00		99%		318,912,461.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			1 Perpustakaan	43,025,102.00	1 perpustakaan	63,860,218.00		63,326,356.00		99%		106,351,458.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			70 Eksemplar	130,075,500.00	20 Eksemplar	83,714,306.00		82,485,503.00		99%		212,561,003.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pembudayaan Gemar Membaca tingkat daerah kabupaten/kota	tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan pembudayaan gemar membaca			1 laporan	119,119,200.00		78,786,714.00		72,216,500.00		92%		191,335,700.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Sosialisasi Budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			1 Lokus	114,169,200.00	1 lokus	64,076,264.00		62,757,500.00		98%		176,926,700.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	4,950,000.00	1 perpustakaan	14,710,450.00		9,459,000.00		64%		14,409,000.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							140,992,040.00		168,314,060.00		168,019,638.00							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola di jaringan informasi kearsipan (e-arsip)	30%	49,530,233.90	16,21 Persen	140,992,040.00		168,314,060.00		168,019,638.00		100%		309,011,678.00		624%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya berkas pelaksanaan arsip dinamis			22 Berkas	43,739,000.00		56,954,060.00		56,882,080.00		100%		100,621,080.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			22 berkas	43,739,000.00	22 berkas	56,954,060.00		56,882,080.00		100%		100,621,080.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	tersedianya laporan pelaksanaan arsip statis			15 laporan	26,300,000.00		44,000,000.00		43,973,309.00		100%		70,273,309.00			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	

		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Diakuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	15 Arsip	26,300,000.00	15 arsip	44,000,000.00	43,973,309.00	100%	70,273,309.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
		Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik dan benar	6 OPD	70,953,040.00		67,360,000.00	67,164,249.00	100%	138,117,289.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
		Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	1 Pengguna	70,953,040.00	1 pengguna	67,360,000.00	67,164,249.00	100%	138,117,289.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
TOTAL					3,066,311,212.00		3,147,457,193.00	3,003,675,303.00	95%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI					-		191,334,678.00	166,173,492.00		166,173,492.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					59,948,100.00	55,012,217.00	92%	55,012,217.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota					59,948,100.00	55,012,217.00	92%	55,012,217.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Penguatan tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan Penguatan tata Kelola Kelembagaan Koperasi			8 Unit usaha	25,241,600.00	24,834,000.00	98%	24,834,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan Pengawasannya			29 Unit Usaha	34,706,500.00	30,178,217.00	87%	30,178,217.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPIUSP					29,499,200.00	25,834,041.00	88%	25,834,041.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA					29,499,200.00	25,834,041.00	88%	25,834,041.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPIUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan			7 Unit Usaha	29,499,200.00	25,834,041.00	88%	25,834,041.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					25,000,000.00	23,864,000.00	95%	23,864,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota					25,000,000.00	23,864,000.00	95%	23,864,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian			12 Orang	25,000,000.00	23,864,000.00	95%	23,864,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, dan Penguatan Kelembagaan					76,887,378.00	61,463,234.00	80%	61,463,234.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN					76,887,378.00	61,463,234.00	80%	61,463,234.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pelatihan terhadap usaha mikro			15 Unit Usaha	25,000,000.00	18,339,285.00	73%	18,339,285.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Facilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi			30 Unit usaha	27,496,878.00	20,070,982.00	73%	20,070,982.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang memhami Pengetahuan usaha mikro dan Kewirausahaan			20 Orang	24,390,500.00	23,052,967.00	95%	23,052,967.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					206,108,050.00		-	-		206,108,050.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1	15,042,519.50		8,395,000.00	-		8,395,000.00	56% Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro				8,395,000.00			8,395,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				8,395,000.00			8,395,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis	60%	36,603,438.37		-	-		-	0% Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n				-			-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n																Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	65%	21,059,481.17		14,732,600.00		-		-				14,732,600.00		70%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan				14,732,600.00		-		-				14,732,600.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				14,732,600								14,732,600.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					-											Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan harmonisasi Hubungan Industrial	90%	55,155,911.51		182,980,450.00		-		-				182,980,450.00		332%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang disahkan				8,725,600.00		-		-				8,725,600.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				8,725,600								8,725,600.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konflik yang diselesaikan				174,254,850.00		-		-				174,254,850.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				60,931,100								60,931,100.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				113,323,750								113,323,750.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							3,138,927,019.00		1,602,287,013.00		1,473,299,165.87			4,612,226,184.87				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola	31%	72,296,275.54		2,140,976,049.00		535,511,300.00		411,007,112.87			2,551,983,161.87		3530%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana Distribusi Perdagangan				2,090,597,849.00		510,000,000.00		385,495,812.87			2,476,093,661.87				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2,090,597,849	1 Unit	510,000,000		385,495,812.87			2,476,093,661.87				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				50,378,200.00		25,511,300.00		25,511,300.00			75,889,500.00				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				50,378,200	1 Dokumen	25,511,300		25,511,300.00			75,889,500.00				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting	80	176,729,454.06		564,466,000.00		321,882,188.00		321,882,188.00			886,348,188.00		502%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota				564,466,000.00		321,882,188.00		321,882,188.00			886,348,188.00				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				14,562,400.00	1 laporan	26,151,200		26,151,200.00			40,713,600.00				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				549,903,600.00	1 laporan	295,730,988		295,730,988.00			845,634,588.00				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase usaha perdagangan dengan alat ukur/timbangan yang terstandarisasi	50	56,886,365.13		70,781,007.00		83,960,060.00		83,951,355.00			154,732,362.00		272%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					70,781,007.00		83,960,060.00		83,951,355.00			154,732,362.00				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang			70,781,007.00	118 Unit	83,960,060	83,951,355.00			154,732,362.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pameran Produk Lokal yang diikuti	50	8,033,254.22	362,703,963.00		660,933,465.00	656,458,510.00			1,019,162,473.00		12687%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			362,703,963.00		660,933,465.00	656,458,510.00			1,019,162,473.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			362,703,963	3 UMKM	660,933,465	656,458,510.00			1,019,162,473.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						3,979,390,815.00		4,681,269,357.00	4,419,563,913.00			8,398,954,728.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase dokumen perencanaan pembangunan industri	100%	278,227,371.86	394,780,005.00		673,867,928.00	661,971,446.00			1,056,751,451.00		380%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembangunan Industri			394,780,005.00		673,867,928.00	661,971,446.00			1,056,751,451.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			326,988,205.00	1 Dokumen	554,407,536	542,542,331.00			869,530,536.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			67,791,800.00						67,791,800.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	119,460,392	119,429,115.00						Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri	100%	22,091,147.87	35,002,200.00		71,811,700.00	71,766,400.00			106,768,600.00		483%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SILInas			35,002,200.00		71,811,700.00	71,766,400.00			106,768,600.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SILInas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SILInas)			35,002,200	1 Dokumen	71,811,700	71,766,400.00			106,768,600.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SILInas													Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	3,416,069,993.10	3,549,608,610.00		3,935,589,729.00	3,685,826,067.00			7,235,434,877.00		212%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi			62,530,200.00		47,293,260.00	47,065,829.00			109,596,029.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			62,530,200	7 Dokumen	45,226,300	45,063,829.00			107,594,029.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,066,960	2,002,000.00						Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penyelesaian administrasi keuangan			2,129,794,328.00		2,394,659,063.00	2,272,292,488.00			4,402,086,816.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2,040,226,328.00	24 Org/Bln	2,297,531,063	2,180,270,488.00			4,220,496,816.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			89,568,000.00	12 Dokumen	97,128,000	92,022,000.00			181,590,000.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			20,400,000.00		20,280,000.00	16,200,000.00			36,600,000.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			20,400,000	1 Laporan	20,280,000	16,200,000.00			36,600,000.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan			8,940,000.00		39,554,200.00	39,272,103.00			48,212,103.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

		Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan					38 Paket	14,929,200		14,720,000.00						Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			8,940,000		2 Orang	24,625,000		24,552,103.00			33,492,103.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Umum			417,793,023.00			310,111,576.00		309,308,872.00			727,101,895.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4,495,500.00		1 Paket	4,499,874		4,495,000.00			8,990,500.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan											32,008,450.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			31,206,600.00		9 Jenis	32,087,055		32,008,450.00			69,814,300.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			52,336,400.00		36 Jenis	39,241,307		38,607,700.00			71,536,400.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			13,867,500.00		2 Paket	19,283,340		19,200,000.00			28,866,000.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			25,999,000.00		1 Dokumen	15,000,000		14,998,500.00			225,998,222.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			289,888,023.00		1 Laporan	200,000,000		199,999,222.00			515,506,540.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase pengadaan barang milik daerah			175,746,200.00			239,832,376.00		225,618,517.00			401,364,717.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 3					2 Unit	90,016,000		77,134,000.00			85,550,000.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	86,601,856		85,550,000.00			51,340,517.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan					2 Unit	51,508,994		51,340,517.00			11,594,000.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional / lapangan yang disediakan					1 Unit	11,705,526		11,594,000.00				11,594,000.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			84,042,700.00									84,042,700.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			91,703,500.00									91,703,500.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			536,660,027.00			498,230,854.00		496,010,803.00				1,032,670,830.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4,000,000.00		1 Laporan	5,992,650		5,990,000.00				9,990,000.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			41,360,027.00		3 Laporan	43,797,760		41,580,359.00				82,940,386.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			491,300,000.00		1 laporan	448,440,444		448,440,444.00				939,740,444.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase pemeliharaan barang milik daerah			197,744,832.00			385,628,400.00		280,057,455.00				477,802,287.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			157,491,332.00		12 Unit	135,000,000		134,857,761.00				292,349,093.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			40,253,500.00		16 Unit	50,678,000		42,880,700.00				83,134,200.00			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhab					1 Unit	199,950,400		102,318,994.00							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
TOTAL						7,324,425,884.00			6,474,891,048.00		6,059,036,570.87		94%						
SEKRETARIAT DAERAH						32,330,591,888.00			39,795,495,151.00		37,911,432,813.08							SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	21,039,280,731.15	100%	25,531,853,468.00	100%	31,671,551,580.00		30,028,663,228.00		95%		55,560,516,696.00		264%	SEKRETARIAT DAERAH	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100%	32,011,900.00	100%	32,021,800.00		31,219,198.00		97%		63,231,098.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Peran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32,021,400.00	7 dokumen	32,021,800		31,219,198.00		97%		63,240,598.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan			100%	9,434,632,334.00	100%	12,155,687,970.00		11,367,836,136.00		94%		20,802,468,470.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8,666,806,287.00	96 orang	11,347,019,030		10,588,860,239.00		93%		19,255,666,526.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				735,826,847.00	12 dokumen	776,668,940		747,130,981.00		96%		1,482,957,828.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				31,999,200.00	2 laporan	32,000,000		31,844,916.00		100%		63,844,116.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Administarsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	63,473,100.00	100%	59,716,870.00		59,163,880.00		99%		122,636,980.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				63,473,100	3 laporan	59,716,870.00		59,163,880.00		99%		122,636,980.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	391,424,191.00	100%	528,915,153.00		519,469,417.00		98%		910,893,608.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengadaan Pakaiam Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiam Dinas beserta Atribut Kelengkapan				99,000,000	55 paket	152,640,900.00		145,400,000.00		95%		244,400,000.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				66,391,550	80 orang	106,506,253.00		106,142,753.00		100%		172,534,303.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				226,032,641	25 orang	269,768,000.00		267,926,664.00		99%		493,959,305.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum			100.00%	3,952,682,370.00	100%	6,723,993,897.00		6,401,470,072.00		95%		10,354,152,442.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				68,380,200	4 paket	73,303,280.00		72,531,069.00		99%		140,911,269.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				492,364,400	11 paket	2,420,561,000.00		2,389,040,500.00		99%		2,881,404,900.00			SEKRETARIAT DAERAH	

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			320,584,288	12 paket	421,107,266.00		418,781,000.00	99%		739,365,288.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			25,044,150	5 paket	36,377,512.00		30,082,600.00	83%		55,126,750.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			118,051,332	60400 dokumen	133,999,402.00		119,507,098.00	89%		237,558,430.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1,978,258,000	170 laporan	2,278,645,437.00		2,021,628,700.00	89%		3,999,886,700.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			950,000,000	70 laporan	1,360,000,000.00		1,349,899,105.00	99%		2,299,899,105.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah			100		1,158,839,188.00		1,156,339,178.00	100%		3,002,336,639.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan				1,380,260,000	2 unit	770,098,000.00		770,098,000.00	100%		2,150,358,000.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			199,952,936	1 unit	226,039,315.00		224,564,000.00	99%		424,516,936.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			152,970,725	4 unit	103,119,400.00		102,363,608.00	99%		255,334,333.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			112,813,800	2 unit	59,582,473.00		59,313,570.00	100%		172,127,370.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100		3,136,764,142.00		2,850,762,045.00	91%		5,565,070,557.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			16,780,000	1678 Laporan	16,777,350.00		15,500,000.00	92%		32,280,000.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1,028,008,260	12 Laporan	1,475,148,520.00		1,273,553,845.00	86%		2,301,562,105.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			335,999,000	1248 Orang/Bulan	1,339,921,272.00		1,256,840,000.00	94%		1,592,839,000.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1,333,521,252	5 Laporan	304,917,000.00		304,868,200.00	100%		1,638,389,452.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100%		2,350,607,671.00	100%	2,199,243,558.00	94%		4,955,484,285.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya			256,804,403.00	26 Unit	245,616,992.00		237,794,096.00	97%		494,598,499.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1,277,383,003.00	114 Unit	1,313,206,109.00		1,296,592,661.00	99%		2,573,975,664.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			213,173,025.00	140 Unit	216,364,000.00		205,515,157.00	95%		418,688,182.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			177,623,027.00	1 Unit	157,526,000.00		151,581,090.00	96%		329,204,117.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			459,714,100.00	6 Unit	257,354,190.00		185,376,000.00	72%		645,090,100.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			371,543,169.00	4 Unit	160,540,380.00		122,384,554.00	76%		493,927,723.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah			100%		290,000,000.00	100%	283,674,400.00	98%		531,348,800.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			7,674,400.00	2 Orang	50,000,000.00		43,674,400.00	87%		51,348,800.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			240,000,000.00	2 Orang	240,000,000.00		240,000,000.00	100%		480,000,000.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	Persentase fasilitasi kerumahaan			100		804,361,189.00	100%	767,656,400.00	95%		1,471,039,750.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			645,889,500.00	7 Paket	741,770,417.00		710,282,800.00	96%		1,356,172,300.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			18,936,950.00	7 Paket	19,999,453.00		17,912,700.00	90%		36,849,650.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			38,556,900.00	4 Paket	42,591,319.00		39,460,900.00	93%		78,017,800.00			SEKRETARIAT DAERAH	

		Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan perangkat Daerah			85	447,052,722.00	100%	645,643,700.00		624,555,913.00		97%		1,071,608,635.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				166,630,861.00	37 dokumen	200,123,700.00		199,187,660.00		100%		365,818,521.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				80,716,692.00	37 Laporan	207,664,770.00		201,061,219.00		97%		281,777,911.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				105,181,349.00	1 dokumen	107,778,400.00		102,797,953.00		95%		207,979,302.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				26,816,300.00	37 dokumen	26,850,630.00		19,046,801.00		71%		45,863,101.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				67,707,520.00	1 dokumen	103,226,200.00		102,462,280.00		99%		170,169,800.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			100	3,337,412,356.00	100%	3,785,000,000.00		3,767,273,031.00		100%		7,104,685,387.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				899,087,363.00	280 Laporan	2,780,040,000.00		2,767,463,159.00		100%		3,686,550,522.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				2,438,324,993.00	350 Laporan	1,004,960,000.00		999,809,872.00		99%		3,438,134,865.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	4,366,124,079.12	100%	5,395,264,930.00	100%	7,072,432,386.00		6,845,404,146.08		97%		12,240,669,076.08		280%	SEKRETARIAT DAERAH	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan			100%	805,691,056.00	100%	850,672,300.00		758,589,138.08		88%		1,564,280,194.08			SEKRETARIAT DAERAH	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				165,195,300.00	3 Dokumen	176,013,550.00		173,323,086.00		98%		338,518,386.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				409,665,931.00	3 Dokumen	509,480,140.00		422,262,982.08		83%		831,928,913.08			SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				170,735,756.00	3 Dokumen	165,178,610.00		163,003,070.00		99%		333,738,826.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat			100%	3,137,187,225.00	100%	5,058,289,036.00		4,938,785,705.00		98%		8,075,972,930.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5,252,284,989.00	13 Dokumen	3,813,309,292.00		3,712,450,384.00		97%		8,964,735,373.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				92,199,025.00	3 Dokumen	900,000,184.00		882,427,360.00		98%		974,626,385.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perputakaan, Kearsipan, Translumb Lnnmas				49,927,650.00	1 Dokumen	344,979,560.00		343,907,961.00		100%		383,835,611.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum			100%	1,333,060,149.00	100%	1,083,740,550.00		1,068,857,147.00		99%		2,401,917,296.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				438,465,100.00	955 Dokumen	412,423,000.00		411,876,151.00		100%		850,341,251.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				622,153,702.00	955 Dokumen	237,744,550.00		234,160,815.00		98%		866,316,517.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				272,439,347.00	3 Kasus	433,573,000.00		422,820,181.00		98%		695,259,528.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Kerjasama daerah			5	119,326,500.00	100%	79,730,500.00		79,172,156.00		99%		198,498,656.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				119,326,500.00	3 Dokumen	79,730,500.00		79,172,156.00		99%		198,498,656.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi kegiatan perekonomian dan pembangunan	100%	1,124,474,893.27	100%	1,403,383,490.00	100%	1,051,511,185.00		1,037,365,439.00		99%		2,440,748,929.00		217%	SEKRETARIAT DAERAH	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian			100%	237,169,936.00	100%	291,110,670.00		289,517,396.00		99%		526,687,332.00			SEKRETARIAT DAERAH	
		Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				46,272,660.00	2 Dokumen	43,305,000.00		43,904,780.00		101%		90,177,440.00			SEKRETARIAT DAERAH	

		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				153,567,626.00	4 laporan	197,794,500.00		195,945,435.00	99%		349,513,061.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				37,329,650.00	2 Dokumen	50,011,170.00		49,667,181.00	99%		86,996,831.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan			100%	64,222,650.00	100%	64,346,800.00		63,868,539.00	99%		128,091,189.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Facilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				6,487,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00		6,499,742.00	100%		12,986,742.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				18,184,850.00	2 Laporan	18,244,000.00		18,189,000.00	100%		36,373,850.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				39,550,800.00	12 Laporan	39,602,800.00		39,179,797.00	99%		78,730,597.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			100%	882,375,354.00	100%	475,579,955.00		464,997,245.00	98%		1,347,372,599.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				568,681,802.00	150 Dokumen	210,902,050.00		204,713,447.00	97%		773,395,249.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				230,836,754.00	150 Dokumen	158,738,750.00		155,020,746.00	98%		385,867,500.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				82,856,798.00	37 Orang	105,939,155.00		105,263,052.00	99%		188,119,850.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam			100%	219,615,550.00	100%	220,473,760.00		218,982,259.00	99%		438,597,809.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				110,150,950.00	4 Dokumen	110,554,400.00		109,177,933.00	99%		219,328,883.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				55,103,450.00	2 Dokumen	55,470,000.00		55,466,700.00	100%		110,570,150.00		SEKRETARIAT DAERAH	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian				54,361,150.00	2 Dokumen	54,449,360.00		54,337,626.00	100%		108,698,776.00		SEKRETARIAT DAERAH	
TOTAL							32,330,501,888.00		39,795,495,151.00		37,911,432,813.08	95%					
SEKRETARIAT DPRD							50,407,007,275.00		61,019,591,369.00		452,356,022,799.00						SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	27,337,697,962.30	98%	33,041,078,922.00	B	31,967,394,295.00	B	423,445,920,020.00	B	1325%	456,486,998,942.00	1670%	SEKRETARIAT DPRD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase				26,934,350.00	100%	20,026,898.00	100%	19,237,800.00	100%	96%	46,172,150.00		SEKRETARIAT DPRD	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				26,934,350.00	4 Dokumen	20,026,898.00	4 Dokumen	19,237,800.00	4 Dokumen	96%	46,172,150.00		SEKRETARIAT DPRD	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen laporan hasil Administrasi			98.00%	3,581,815,685.00	100%	3,837,955,294.00	100%	3,616,078,104.00	100%	94%	7,197,893,789.00		SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2,194,103,621.00	25 Orang	2,480,782,985.00	25 Orang	2,318,473,494.00	25 Orang	93%	4,512,577,115.00		SEKRETARIAT DPRD	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1,308,713,764.00	1000 Dokumen	1,347,000,000.00	1000 Dokumen	1,287,544,660.00	1000 Dokumen	96%	2,596,258,424.00		SEKRETARIAT DPRD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					78,998,300.00	1 Laporan	10,172,309.00	1 Laporan	10,059,950.00	1 Laporan	99%	89,068,250.00		SEKRETARIAT DPRD	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				99.00%	343,494,884.00	100%	390,353,144.00	100%	381,344,242.00	100%	98%	724,839,126.00		SEKRETARIAT DPRD	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya				128,752,000.00	35 Paket	131,353,144.00	35 Paket	127,920,000.00	35 Paket	97%	256,672,000.00		SEKRETARIAT DPRD	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65,560,000.00	15 Paket	67,500,000.00	15 Paket	65,580,000.00	15 Paket	97%	131,140,000.00		SEKRETARIAT DPRD	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				149,182,884.00	35 Orang	191,500,000.00	35 Orang	187,844,242.00	35 Orang	98%	337,027,126.00		SEKRETARIAT DPRD	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				100.00%	1,857,329,272.00	100%	2,382,594,104.00	100%	1,414,816,695.00	100%	59%	3,272,147,967.00		SEKRETARIAT DPRD	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				53,955,000.00	40 Dus	86,583,566.00	40 Dus	85,785,203.00	40 Dus	99%		139,740,203.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				128,542,000.00	40 Unit	129,368,997.00	40 Unit	127,550,000.00	40 Unit	99%		256,092,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Bahan Logistik kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				74,756,700.00	12 Paket	134,183,656.00	12 Paket	132,448,515.00	12 Paket	99%		207,205,215.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				117,238,000.00	150 Paket	103,494,820.00	150 Paket	99,107,962.00	150 Paket	96%		216,345,962.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					999,594,200.00	200 Dokumen	999,998,306.00	200 Dokumen	99,525,000.00	200 Dokumen	10%		1,099,119,200.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Facilitasi Kunjungan Tamu					234,260,400.00	48 Laporan	299,964,759.00	48 Laporan	241,868,809.00	48 Laporan	81%		476,129,209.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				248,982,972.00	24 Laporan	628,910,000.00	24 Laporan	628,533,206.00	24 Laporan	100%		877,516,178.00			SEKRETARIAT DPRD	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				92.00%	1,285,239,985.00	100%	1,477,342,191.00	100%	1,384,615,982.00	100%	94%		2,669,855,967.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				187,859,585.00	12 bulan	202,876,220.00	12 bulan	187,076,108.00	12 bulan	92%		374,935,693.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				149,994,000.00	2 Laporan	287,310,000.00	2 Laporan	263,340,000.00	2 Laporan	92%		413,334,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				947,386,400.00	12 Laporan	987,155,971.00	12 Laporan	934,199,874.00	12 Laporan						SEKRETARIAT DPRD	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				100.00%	677,443,003.00	100%	753,393,922.00	100%	522,396,378.00	100%	69%		1,199,839,381.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24,710,150.00	5 Unit Roda Empat 20 Unit Roda Dua	42,640,992.00	5 Unit Roda Empat 20 Unit Roda Dua	25,548,840.00	5 Unit Roda Empat 20 Unit Roda Dua	60%		50,258,990.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				210,353,903.00	5 Unit Roda Empat 20 Unit Roda Dua	217,500,000.00	5 Unit Roda Empat 20 Unit Roda Dua	217,264,538.00	5 Unit Roda Empat 20 Unit Roda Dua	100%		427,618,441.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40,440,000.00	36 unit	69,650,000.00	36 unit	69,503,000.00	36 unit	100%		109,943,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				309,850,950.00	2 unit	114,535,000.00	2 unit	94,988,000.00	2 unit	83%		404,838,950.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22,215,000.00	5 unit	39,316,930.00	5 unit	20,640,000.00	5 unit	52%		42,855,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					69,873,000.00	3 unit	269,751,000.00	3 unit	94,452,000.00	3 unit	35%		164,325,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		LAYANAN KEDUKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD				100.00%	17,351,690,060.00	100%	17,879,312,307.00	100%	17,293,111,801.00	100%	97%		34,644,801,861.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				16,902,190,060.00	35 Orang	17,082,694,807.00	35 Orang	16,536,351,351.00	35 Orang	97%		33,438,541,411.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				449,500,000.00	35 Stel	746,617,500.00	35 Stel	731,250,000.00	35 Stel	98%		1,180,750,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pelaksanaan Medical Check	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				-	35 orang	50,000,000.00	35 orang	25,510,450.00	35 orang	51%		25,510,450.00			SEKRETARIAT DPRD	
		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD				100.00%	7,917,131,683.00	100%	5,226,506,435.00	100%	398,814,317,018.00	100%	7631%		406,731,448,701.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD				492,714,620.00	35 Laporan	467,500,000.00	35 Laporan	394,161,631,631.00	35 Laporan	84313%		394,654,346,251.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				7,424,417,063.00	35 laporan	4,759,006,435.00	35 laporan	4,652,685,387.00	35 laporan	98%		12,077,102,450.00			SEKRETARIAT DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%		17,554,834,748.81	100%	17,385,928,353.00	100%	29,052,197,074.00	100%	28,910,102,779.00	100%	100%	46,276,031,132.00		264%	SEKRETARIAT DPRD	
		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD				100.00%	501,848,788.00	100%	600,000,000.00	100%	537,961,617.00	100%	90%		1,039,810,405.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				196,072,985.00	24 Dokumen	250,000,000.00	24 Dokumen	192,769,700.00	24 Dokumen	77%		388,842,685.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				249,675,803.00	24 Dokumen	250,000,000.00	24 Dokumen	249,290,800.00	24 Dokumen	100%		498,966,603.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				56,100,000.00	100%	100,000,000.00	100%	95,901,117.00	100%	96%		152,001,117.00			SEKRETARIAT DPRD	
		PEMBAHASAN KEBIUKAAN ANGGARAN				100%	304,984,040.00	100%	339,995,000.00	100%	319,703,150.00	100%	94%		624,687,190.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				119,995,400.00	4 Dokumen	120,000,000.00	4 Dokumen	119,907,000.00	4 Dokumen	100%		239,902,400.00			SEKRETARIAT DPRD	

		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			20,000,000.00	2 dokumen	30,000,000.00	2 dokumen	20,000,000.00	2 dokumen	67%		40,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			124,988,640.00	4 Dokumen	139,995,000.00	4 Dokumen	139,796,150.00	4 Dokumen	100%		264,784,790.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			20,000,000.00	2 Dokumen	30,000,000.00	2 Dokumen	20,000,000.00	2 Dokumen	67%		40,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	100%		40,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD				1,710,442,868.00	100%	2,793,668,197.00	100%	2,772,359,831.00	100%	99%		4,482,802,699.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Orientasi DPRD	Dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD				1 Dokumen	412,500,000.00	1 Dokumen	392,926,358.00	1 Dokumen	95%		392,926,358.00				
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Tugas DPRD			1,143,827,208.00	3 kali	1,735,168,430.00	3 kali	1,730,722,712.00	3 kali	100%		2,874,549,920.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			299,615,660.00	200 Dokumen	299,999,767.00	200 Dokumen	299,452,761.00	200 Dokumen	100%		599,068,421.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			168,000,000.00	10 orang	246,000,000.00	10 orang	258,000,000.00	10 orang	105%		426,000,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			99,000,000.00	24 Dokumen	100,000,000.00	24 Dokumen	91,258,000.00	24 Dokumen	91%		190,258,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		PENYEERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT				100%	3,700,964,500.00	100%	3,774,125,700.00	100%	3,736,017,724.00	100%	99%	7,436,982,224.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 laporan	50,000,000.00	3 laporan	45,162,000.00	3 laporan	90%		45,162,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			149,568,300.00	12 Dokumen	150,000,000.00	12 Dokumen	149,208,924.00	12 Dokumen	99%		298,777,224.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3,551,396,200.00	3 Dokumen	3,574,125,700.00	3 Dokumen	3,541,646,800.00	3 Dokumen	99%		7,093,043,000.00			SEKRETARIAT DPRD	
		FASILITASI TUGAS DPRD				100.00%	11,147,688,157.00	100%	21,544,408,177.00	100%	21,544,060,457.00	100%	100%	32,691,748,614.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			8,148,764,372.00	1680 Dokumen	17,744,408,177.00	1680 Dokumen	17,744,219,357.00	1680 Dokumen	100%		25,892,983,729.00			SEKRETARIAT DPRD	
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			2,998,923,785.00	144 Dokumen	3,800,000,000.00	144 Dokumen	3,799,841,100.00	144 Dokumen	100%		6,798,764,885.00			SEKRETARIAT DPRD	
		TOTAL				50,407,007,275.00		61,019,591,369.00		452,356,022,799.00		741%					BAPPEDA & LITBANG	
		PERENCANAAN				9,593,562,432.00		10,353,872,125.00		9,590,755,793.00							BAPPEDA & LITBANG	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A		5,954,856,244.17	A Predikat	5,397,933,563.00		6,125,754,010.00				11,305,977,886.00		100%	BAPPEDA & LITBANG	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu			12 Dokumen	18,624,900.00							18,624,900.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	8,000,000.00							8,000,000.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6 Laporan	10,624,900.00							10,624,900.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu			5 Laporan	3,697,630,170.00	3,899,484,664.00		3,809,205,814.00				7,506,835,984.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			35 Orang/bulan	3,585,022,170.00	3,786,840,664.00		3,696,561,814.00				7,281,583,984.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6000 Dokumen	112,608,000.00	112,644,000.00		112,644,000.00				225,252,000.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan disiplin dan kompetensi pegawai yang dievaluasi dan ditindaklanjuti			2 Laporan	145,355,740.00	194,000,000.00		181,856,980.00				327,212,720.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			6 Orang								-			BAPPEDA & LITBANG	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20 Orang	145,355,740.00	194,000,000.00		181,856,980.00				327,212,720.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang terlaksana tepat waktu			7 Pelayanan	616,982,663.00	745,818,047.00		734,639,147.00				1,351,621,810.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	7,359,700.00	7,588,830.00		6,605,000				13,964,700.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	95,696,000.00	112,509,855.00		111,867,500.00				207,563,500.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	96,259,400.00	126,509,559.00		126,277,550.00				222,536,950.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	23,239,890.00	23,958,708.00		23,286,635.00				46,526,525.00			BAPPEDA & LITBANG	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			425 Dokumen	58,434,300.00		69,251,095.00		68,422,000.00				126,856,300.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00				12,000,000.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	329,993,373.00		400,000,000.00		392,180,462.00				722,173,835.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					282,500,000.00		570,763,000.00		556,500,000.00				839,000,000.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				282,500,000.00		570,763,000.00		556,500,000.00				839,000,000.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia tepat waktu			3 Jasa	283,802,715.00		311,286,973.00		263,987,719.00				547,790,434.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan	3,000,000.00		3,105,000.00		1,000,000.00				4,000,000.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	99,242,715.00		113,847,295.00		102,477,719.00				201,720,434.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	181,560,000.00		194,334,678.00		160,510,000.00				342,070,000.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana tepat waktu			3 Jenis	353,037,375.00		404,401,326.00		361,854,663.00				714,892,038.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			23 Unit	220,717,155.00		283,642,844.00		267,652,463.00				488,369,618.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				68 Unit	52,172,820.00		74,770,000.00		48,627,800.00				100,800,620.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi			1 Unit	80,147,400.00		45,988,482.00		45,574,400.00				125,721,800.00			BAPPEDA & LITBANG	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Anggaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Pelaksanaan Konsistensi	1	1,699,949,420.74	95.78 %	2,038,998,728.00		2,278,713,414.00		1,989,499,023.00				4,028,497,751.00	237%		BAPPEDA & LITBANG	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat waktu			2 Dokumen	1,297,978,550.00		1,252,634,229.00		1,209,147,508.00				2,507,126,058.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			1 Berita Acara	36,575,550.00		49,756,613.00		46,487,350.00				83,062,900.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			1 Berita Acara	27,665,300.00		19,811,961.00		19,604,950.00				47,270,250.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	131,077,895.00		322,388,743.00		303,026,190.00				434,104,085.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			1 Dokumen	1,102,659,805.00		860,676,912.00		840,029,018.00				1,942,688,823.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang pembangunan daerah yang ditindaklanjuti dengan digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah			5 Dokumen	346,777,865.00		489,163,920.00		474,921,046.00				821,698,911.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			1 Dokumen	280,438,476.00		256,206,440.00		248,702,626.00				529,141,102.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			4 Buku	66,339,389.00		232,957,480.00		226,218,420.00				292,557,809.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti			20 Laporan	394,242,313.00		536,915,265.00		305,430,469.00				699,672,782.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			16 Laporan	182,125,137.00		385,182,322.00		166,799,098.00				348,924,235.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkele Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			4 Laporan	212,117,176.00		151,732,943.00		138,631,371.00				350,748,547.00			BAPPEDA & LITBANG	

		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesatuan Pembinaan Koordinasi Program RPD ke Dalam RKPD dan Dokumen Kelembagaan	100%	779,033,956.11	2,066,630,161.00	1,949,404,701.00	1,693,212,357.00	3,759,842,518.00	483%	BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan dalam perencanaan daerah		4 Laporan	958,139,934.00	687,062,833.00	648,735,617.00	1,606,875,551.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	102,355,301.00	70,647,444.00	60,087,306.00	162,442,607.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					11,000,000.00	10,019,200.00	10,019,200.00			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 Laporan	6,297,300.00	10,675,523.00	9,778,000.00	16,075,300.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan					50,000,000.00	48,597,076.00	48,597,076.00			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	391,300,900.00	271,838,899.00	262,899,971.00	654,200,871.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	78,008,300.00	108,701,831.00	105,290,686.00	183,298,986.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	173,311,618.00	24,000,000.00	22,892,270.00	196,203,888.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	206,866,515.00	140,199,136.00	129,171,108.00	336,037,623.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA) yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan dalam perencanaan daerah		4 Laporan	568,837,824.00	626,564,255.00	532,725,994.00	1,101,563,818.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	151,426,171.00	165,319,195.00	154,838,721.00	306,264,892.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		2 Laporan	25,941,300.00	60,080,691.00	58,898,469.00	84,839,769.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Pelaksanaan Monitoring dan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		2 Laporan	10,520,600.00	6,163,000.00	5,199,000.00	15,719,600.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 Laporan	73,631,400.00	26,040,346.00	21,906,000.00	95,537,400.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	248,160,453.00	281,947,574.00	222,497,904.00	470,658,357.00		BAPPEDA & LITBANG	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		2 Laporan	32,850,900.00	50,067,243.00	42,643,000.00	75,493,900.00		BAPPEDA & LITBANG	

		Pelaksanaan Monitoring dan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			2 Laporan	8,785,000.00		6,562,900.00		4,977,500.00				13,762,500.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				2 Laporan	17,522,000.00		30,383,306.00		21,765,400.00				39,287,400.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan dalam perencanaan daerah			4 Laporan	539,652,403.00		635,777,613.00		511,750,746.00				1,051,403,149.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			2 Dokumen	76,141,303.00		110,749,004.00		110,316,292.00				186,457,595.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			2 Laporan	72,734,300.00		48,296,864.00		45,137,411.00				117,871,711.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			2 Laporan	11,346,600.00		9,276,459.00		7,394,000.00				18,740,600.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Infrastruktur			2 Laporan	77,474,060.00		133,875,801.00		128,705,581.00				206,179,641.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			2 Dokumen	105,581,233.00		148,884,491.00		46,768,200.00				152,349,433.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	70,669,647.00		43,322,184.00		38,915,072.00				109,584,719.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			2 Laporan	11,259,600.00		9,276,459.00		8,520,000.00				19,779,600.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Kewilayahan			2 Laporan	114,445,660.00		132,096,351.00		125,994,190.00				240,439,850.00			BAPPEDA & LITBANG	
PENELITIAN PENGEMBANGAN							491,611,529.00		324,211,967.00		322,951,954.00							BAPPEDA & LITBANG	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbang	100%	150,623,516.69	23.40 %	491,611,529.00		324,211,967.00		322,951,954.00				814,563,483.00		541%	BAPPEDA & LITBANG	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					99,905,500.00								99,905,500.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					99,905,500.00								99,905,500.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					99,911,100.00								99,911,100.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					99,911,100.00								99,911,100.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				2 Kegiatan	291,794,929.00		324,211,967.00		322,951,954.00				614,746,883.00			BAPPEDA & LITBANG	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	291,794,929		324,211,967.00		322,951,954.00				614,746,883.00			BAPPEDA & LITBANG	
TOTAL KEUANGAN							9,995,173,981.00		10,676,084,092.00		9,913,707,657.00		93%					Badan Keuangan Daerah	
							213,719,693,596.00		231,239,726,360.00										
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	9,991,199,055.43	A	8,758,708,108.00	A	10,279,032,210.00	A	9,441,822,288.00	A	92%		18,200,530,396.00		182%	Badan Keuangan Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku			4 Dokumen	61,578,580.00	4 Dokumen	73,265,986.00	4 Dokumen	59,363,800.00	4 Dokumen	81%		120,942,380.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	61,578,580	4 Dokumen	73,265,986.00	4 Dokumen	59,363,800.00	4 Dokumen	81%		120,942,380.00			Badan Keuangan Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tepat waktu			4 Dokumen	6,741,018,553.00	4 Dokumen	8,100,143,545.00	4 Dokumen	7,353,736,964.00	4 Dokumen	91%		14,094,755,517.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			47 Orang/bulan	6,354,733,553	46 Orang/ bulan	7,685,294,045.00	46 Orang/ bulan	6,975,411,464.00	46 Orang/ bulan	91%		13,330,145,017.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pelaksanaan Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	386,285.000	1 Dokumen	414,849,500.00	1 Dokumen	378,325,500.00	1 Dokumen	91%		764,610,500.00			Badan Keuangan Daerah	

		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada yang tepat waktu			1 Dokumen	27,160,000.00	2 Laporan	31,920,000.00	2 Laporan	23,862,000.00	2 Laporan	75%		51,022,000.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2 Laporan	27,160,000	2 Laporan	31,920,000.00	2 Laporan	23,862,000.00	2 Laporan	75%		51,022,000.00			Badan Keuangan Daerah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang dikelola			6 Dokumen	177,962,155.00	6 Dokumen	135,705,000.00	6 Dokumen	126,040,000.00	6 Dokumen	93%		304,002,155.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	52,987,995	1 Orang	37,565,000.00	1 Orang	32,414,000.00	1 Orang	86%		85,401,995.00			Badan Keuangan Daerah	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	124,974,160	10 Orang	98,140,000.00	10 Orang	93,626,000.00	10 Orang	95%		218,600,160.00			Badan Keuangan Daerah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasaran Kantor			100.00%	707,600,366.00	100%	782,285,995.00	100%	768,956,344.00	100%	98%		1,476,556,710.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didediakan			1 Paket	14,689,200	1 Paket	14,998,821.00	1 Paket	14,793,200.00	1 Paket	99%		29,482,400.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didediakan			1 Paket	22,190,000	1 Paket	21,880,920.00	1 Paket	21,880,920.00	1 Paket	100%		44,070,920.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didediakan			4 Paket	159,573,500	4 Paket	172,496,632.00	4 Paket	170,256,900.00	4 Paket	99%		329,830,400.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didediakan			1 Paket	84,999,850	1 Paket	84,910,598.00	1 Paket	79,380,411.00	1 Paket	93%		164,380,261.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Didediakan			1 Dokumen	71,600,000	1 Dokumen	79,999,024.00	1 Dokumen	79,650,000.00	1 Dokumen	100%		151,250,000.00			Badan Keuangan Daerah	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			4 Laporan	4,760,000	1 Laporan	8,000,000.00	1 Laporan	7,440,000.00	1 Laporan	93%		12,200,000.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	349,787,816	12 Laporan	400,000,000.00	12 Laporan	395,554,913.00	12 Laporan	99%		745,342,729.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah			100.00%	7,750,000.00		83,348,240.00		82,864,997.00		99%		90,614,997.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Didediakan					1 Paket	56,650,930.00	1 Paket	56,350,000.00	1 Paket	99%		56,350,000.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didediakan			1 Unit	7,750,000	1 Unit	26,697,310.00	1 Unit	26,514,997.00	1 Unit	99%		34,264,997.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00%	612,595,975.00		622,585,899.00		607,358,878.00		98%		1,219,954,853.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12,600,000.00	1 Laporan	12,595,950.00	1 Laporan	12,000,000.00	1 Laporan	95%		24,600,000.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didediakan				236,395,975.00	4 Laporan	244,999,450.00	4 Laporan	243,998,878.00	4 Laporan	100%		480,394,853.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didediakan				363,600,000.00	1 Laporan	364,990,499.00	1 Laporan	351,360,000.00	1 Laporan	96%		714,960,000.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			100.00%	423,042,479.00		449,777,545.00		419,639,305.00		93%		842,681,784.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			34 Unit	314,431,029.00	34 Unit	311,296,375.00	34 Unit	299,378,879.00	34 Unit	96%		613,809,908.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			50 Unit	25,169,150.00	50 Unit	39,380,000.00	50 Unit	37,747,400.00	50 Unit	96%		62,916,550.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	39,923,000.00	3 Unit	60,980,000.00	3 Unit	45,215,200.00	3 Unit	74%		85,138,200.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitas Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			22 Unit	43,519,300.00	22 Unit	38,121,170.00	22 Unit	37,297,826.00	22 Unit	98%		80,817,126.00			Badan Keuangan Daerah	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen terkait APBD dan APBD-P terkait tepat waktu dan akurat	100%	1,127,228,552.24	100%	202,274,316,474.00	100%	218,227,586,900.00	100%	207,350,504,886.00	100%	95%		409,624,821,360.00		36339%	Badan Keuangan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang Tersusun Tepat Waktu			100%	1,356,444,954.00	100%	1,124,071,987.00	100%	1,049,537,012.00	100%	93%		2,405,981,966.00			Badan Keuangan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	32,227,800.00	2 Dokumen	24,304,828.00	2 Dokumen	23,363,000.00	2 Dokumen	96%		55,590,800.00			Badan Keuangan Daerah	

		Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	31,727,800.00	2 Dokumen	24,304,828.00	2 Dokumen	22,913,000.00	2 Dokumen	94%		54,640,800.00			Badan Keuangan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			4 Dokumen	724,537,726.00	4 Dokumen	724,544,344.00	4 Dokumen	658,075,780.00	4 Dokumen	91%		1,382,613,506.00			Badan Keuangan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			4 Dokumen	220,003,628.00	4 Dokumen	140,960,000.00	4 Dokumen	136,857,332.00	4 Dokumen	97%		356,860,960.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			37 Orang	347,948,000.00	37 Orang	209,957,987.00	37 Orang	208,327,900.00	37 Orang	99%		556,275,900.00			Badan Keuangan Daerah	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD dengan realisasi ≥ 75%				981,940,221.00	100%	1,015,062,039.00	100%	957,747,956.00	100%	94%		1,939,688,177.00			Badan Keuangan Daerah	
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Simkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Simkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi			2123 Dokumen	360,165,836.00	2123 Dokumen	294,015,324.00	2162 Dokumen	281,815,257.00	2162 Dokumen	96%		641,981,093.00			Badan Keuangan Daerah	
		Koordinasi pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			6343 Dokumen	85,743,600.00	6343 Dokumen	72,830,000.00	7048 Dokumen	67,181,644.00	7048 Dokumen	92%		152,925,244.00			Badan Keuangan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyortiran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyortiran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyortiran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			6343 Laporan	74,731,400.00	6343 Laporan	66,147,000.00	7048 Dokumen	64,988,000.00	7048 Dokumen	98%		139,719,400.00			Badan Keuangan Daerah	
		Rekonsiliasi Data penerimaan dan pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			1162 Dokumen	223,492,535.00	1162 Dokumen	165,503,315.00	1234 Dokumen	153,008,885.00	1234 Dokumen	92%		376,501,420.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			5 Dokumen	34,294,300.00	5 Dokumen	42,738,000.00	5 Dokumen	35,404,400.00	5 Dokumen	83%		69,698,700.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			265 Orang	203,512,550.00	265 Orang	373,728,400.00	132 orang	355,349,770.00	132 orang	95%		568,862,320.00			Badan Keuangan Daerah	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP				634,024,990.00	100%	634,376,645.00	100%	625,402,774.00	100%	99%		1,259,427,764.00			Badan Keuangan Daerah	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ, dan Beban			37 Dokumen	44,990,560.00	37 Dokumen	48,391,420.00	37 Dokumen	47,817,741.00	37 Dokumen	99%		92,808,301.00			Badan Keuangan Daerah	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			7 Laporan	158,339,734.00	7 Laporan	148,300,000.00	7 Laporan	146,290,697.00	7 Laporan	99%		304,630,431.00			Badan Keuangan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			2 Dokumen	227,669,066.00	2 Dokumen	229,750,000.00	2 Dokumen	227,731,000.00	2 Dokumen	99%		455,400,066.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	78,463,600.00	1 Dokumen	82,400,000.00	1 Dokumen	82,179,336.00	1 Dokumen	100%		160,642,936.00			Badan Keuangan Daerah	

		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			83 Orang	124,562,030.00	83 Orang	125,535,225.00	83 Orang	121,384,000.00	83 Orang	97%		245,946,030.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Mendesak dan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			100%	199,301,906,309.00	100%	215,454,076,229.00	100%	204,717,817,144.00	100%	95%		404,019,723,453.00			Badan Keuangan Daerah	
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah			1 Laporan	8,884,660,088.00	12 Laporan	7,623,046,367.00	12 Laporan	7,623,046,367.00	12 Laporan	100%		16,507,706,455.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi			12 Laporan	1,069,500,079.00	12 Laporan	1,070,513,315.00	12 Laporan	1,070,115,987.00	12 Laporan	100%		2,139,616,066.00			Badan Keuangan Daerah	
		Analisis perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			749 Laporan	186,776,451,711.00	12 Laporan	201,467,648,200.00	12 Laporan	192,640,889,200.00	12 Laporan	96%		379,417,340,911.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			12 Laporan	-	12 Laporan	2,312,630,847.00	12 Laporan	509,619,684.00	12 Laporan	22%		509,619,684.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pengelolaan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			214 Laporan	2,571,294,431.00	12 Laporan	2,980,237,500.00	12 Laporan	2,874,145,906.00	12 Laporan	96%		5,445,440,337.00			Badan Keuangan Daerah	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Nuburan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai aturan yang berlaku	100%	1,438,971,112.59	100%	1,380,025,987.00	100%	1,464,941,579.00	100%	1,314,787,979.00	100%	90%		2,694,813,966.00		187%	Badan Keuangan Daerah	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai aturan yang berlaku			6 Laporan	1,380,025,987.00	6 Laporan	1,464,941,579.00	6 Laporan	1,314,787,979.00	6 Laporan	90%		2,694,813,966.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			2 Dokumen	126,455,374.00	2 Dokumen	160,099,000.00	2 Dokumen	151,296,000.00	2 Dokumen	95%		277,750,374.00			Badan Keuangan Daerah	
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			37 Laporan	388,053,317.00	100 %	345,400,000.00	100 %	339,305,900.00	100 %	98%		727,359,217.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			2 Laporan	426,569,612.00	2 Laporan	443,768,063.00	2 Laporan	398,548,740.00	2 Laporan	90%		825,118,352.00			Badan Keuangan Daerah	
		Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			5 Dokumen	184,072,152.00	4 Dokumen	190,093,988.00	4 Dokumen	166,283,350.00	4 Dokumen	87%		350,355,502.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			37 Laporan	76,883,750.00	100 %	145,037,850.00	100 %	80,812,565.00	100 %	56%		157,696,315.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				48 Orang	177,991,782.00	40 Orang	180,542,678.00	40 Orang	178,542,424.00	40 Orang						Badan Keuangan Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian pajak daerah dan pendapatan lainnya	100%	1,271,735,182.64	98%	1,306,643,027.00	99%	1,268,165,891.00	102.78	1,055,624,283.00	102.78	83%		2,362,267,310.00		186%	Badan Keuangan Daerah	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi pajak daerah dan pendapatan lainnya			90.00%	1,306,643,027.00	99%	1,268,165,891.00	102.78	1,055,624,283.00	102.78	83%		2,362,267,310.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			440 Objek Pajak	138,629,100	455 Objek Pajak	189,000,000.00	0.00%	10,000,000.00	0.00%	5%		148,629,100.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keetapan Pajak Daerah			104000 Dokumen	199,026,200	104000 Dokumen	200,110,739.00	107592 Dokumen	197,363,765.00	107592 Dokumen	99%		396,389,965.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			11 Layanan	539,669,307	11 Layanan	392,288,093.00	11 Layanan	373,246,276.00	11 Layanan	95%		912,915,583.00			Badan Keuangan Daerah	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			110000 Dokumen	310,396,264	110000 Dokumen	324,587,059.00	101272 Dokumen	315,558,278.00	101272 Dokumen	97%		625,954,542.00			Badan Keuangan Daerah	
		Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			11 Dokumen	118,922,156	11 Dokumen	162,180,000.00	11 Dokumen	159,455,964.00	11 Dokumen	98%		278,378,120.00			Badan Keuangan Daerah	
TOTAL							213,719,693,596.00		231,239,726,580.00		219,162,739,436.00		95%						
KEPEGAWAIAN							10,532,174,074.00		18,362,595,960.00		17,925,867,294.00							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	3,819,770,871.41	100%	9,075,698,373.00	BB	16,210,654,484.00	A	15,905,355,649.00	A	98%		24,981,054,022.00		654%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan			100.00%	13,545,000.00	100%	25,000,000.00	100%	24,652,400.00	100%	99%		38,197,400.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			4 Dokumen	13,545,000	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	24,652,400	4 dokumen	99%		38,197,400.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Administrasi Keuangan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan			100.00%	8,274,367,931.00	100%	15,364,153,601.00	100%	15,068,797,034.00	100%	98%		23,343,164,965.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			29 Orang/bulan	8,142,523,931	28 orang/ bulan	15,236,578,601	28 orang/ bulan	14,941,222,034	28 orang/ bulan	98%		23,083,745,965.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	131,844,000	12 dokumen	127,575,000	12 dokumen	127,575,000	12 dokumen	100%		259,419,000.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Laporan Aset			100.00%	13,200,000.00	100%	13,200,000.00	100%	13,160,000.00	100%	100%		26,360,000.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan		13,200,000	2 laporan	13,200,000	2 laporan	13,160,000	2 laporan	100%		26,360,000.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi kepegawaian			100.00%	59,115,400.00	100%	39,205,010.00	100%	39,044,000.00	100%	100%		98,159,400.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan		5 Orang		59,115,400	3 orang	39,205,010	3 orang	39,044,000	3 orang	100%		98,159,400.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Kegiatan Rutin Kantor			100.00%	327,344,232.00	100%	381,063,629.00	100%	380,493,603.00	100%	100%		707,837,835.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket		6,982,100	4 paket	6,999,706	4 paket	6,997,476	4 paket	100%		13,979,576.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket		105,968,500	11 paket	134,685,984	11 paket	134,682,539	11 paket	100%		240,651,039.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan		5 Paket		49,892,200	5 paket	49,999,666	5 paket	49,999,595	5 paket	100%		99,891,795.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		48 Dokumen		15,000,000	48 dokumen	17,997,422	48 dokumen	17,997,422	48 dokumen	100%		32,997,422.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan		149,501,432	12 laporan	171,380,851	12 laporan	170,816,571	12 laporan	100%		320,318,003.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.00%	189,762,333.00	100%	200,193,070.00	100%	192,590,796.00	100%	96%		382,353,129.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan		3,000,000	1 laporan	2,991,150	1 laporan	2,988,000	1 laporan	100%		5,988,000.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		66,562,333	12 laporan	82,001,800	12 laporan	80,582,796	12 laporan	98%		147,145,129.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		120,200,000	12 laporan	115,200,120	12 laporan	109,020,000	12 laporan	95%		229,220,000.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			100.00%	198,363,477.00	100%	187,839,174.00	100%	186,617,816.00	100%	99%		384,981,293.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit		173,543,477	20 unit	162,989,174	20 unit	161,797,816	20 unit	99%		335,341,293.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		46 Unit		24,820,000	46 unit	24,850,000	46 unit	24,820,000	46 unit	100%		49,640,000.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	97%		1,270,258,324.00	97%	1,075,133,301.00	97%	1,969,327,476.00	97%	1,848,185,945.00	97%	94%		2,923,319,246.00		230%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Persentase bezetelng pegawai			100.00%	497,612,700.00	37%	805,753,350.00	40.40%	801,982,378.00	40.40%	100%		1,299,595,078.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		8 Laporan		406,448,000	8 laporan	714,332,000	8 laporan	712,792,780	8 laporan	100%		1,119,240,780.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		150 Dokumen		30,944,300	150 dokumen	39,991,350	157 dokumen	38,379,598	157 dokumen	96%		69,323,898.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			1 Lembaga		46,730,400	1 lembaga	33,430,000	1 lembaga	33,410,000	1 lembaga	100%		80,140,400.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		4 Dokumen		13,490,000	4 dokumen	18,000,000	4 dokumen	17,400,000	4 dokumen	97%		30,890,000.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi			100.00%	401,787,227.00	97%	976,000,000.00	79.41%	858,790,783.00	79.41%	88%		1,260,578,010.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		1 Dokumen		325,796,327	1 dokumen	880,000,000	1 dokumen	764,240,463	1 dokumen	87%		1,090,036,790.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN		600 Dokumen		75,990,900	600 dokumen	96,000,000	282 dokumen	94,550,320	282 dokumen	98%		170,541,220.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi			100.00%	124,678,174.00	2 kegiatan	138,286,628.00	2 kegiatan	138,172,454.00	2 kegiatan	100%		262,850,628.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		50 Orang		68,478,174	50 orang	83,147,426	50 orang	83,094,454	50 orang	100%		151,572,628.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		1 Orang		56,200,000	30 orang	55,139,200	31 orang	55,078,000	31 orang	100%		111,278,000.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		

		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pembinaan Disiplin ASN			100.00%	51,055,200.00	0.4%	49,287,500.00	0.3%	49,240,330.00	0.3%	100%		100,295,530.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengelcaian Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa			100 orang	36,655,200	50 orang	30,000,000	35 orang	29,970,330	35 orang	100%		66,625,530.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			9 Orang	14,400,000	9 orang	19,287,500	12 orang	19,270,000	12 orang	100%		33,670,000.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan kompetensi pejabat struktural	8.67	819,944,217.02	18%	381,342,400.00	4.20%	182,614,000.00	5%	172,325,700.00	5%	94%		553,668,100.00		68%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			100.00%	381,342,400.00	1 kegiatan	182,614,000.00	1 kegiatan	172,325,700.00	1 kegiatan	94%		553,668,100.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penyelengga- raan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1 Laporan	381,342,400	1 laporan	182,614,000	1 laporan	172,325,700	1 laporan	94%		553,668,100.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
TOTAL							10,532,174,074.00		18,362,595,960.00		17,925,867,294.00		98%						
INSPEKTORAT DAERAH							9,331,123,958.00		11,985,538,898.00		11,263,969,133.00							INSPEKTORAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	A	7,541,898,250.69	A predikat	7,828,810,746.00	A	10,339,020,852.00	A	9,777,426,113.00	A	95%		17,606,236,859.00		233%	INSPEKTORAT	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tepat waktu			4 Dokumen	6,220,944,404.00	4 Dokumen	7,526,771,925.00	4 Dokumen	7,243,216,535.00	4 Dokumen	96%		13,464,160,939.00			INSPEKTORAT	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			44 orang/bulan	6,101,820,404	44 Orang	7,407,587,925.00	44 Orang	7,127,432,535.00	44 Orang	96%		13,229,252,939.00			INSPEKTORAT	
		Pelaksanaan Penatuzsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuzsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	119,124,000	10 Dokumen	119,184,000.00	10 Dokumen	115,784,000.00	10 Dokumen	97%		234,908,000.00			INSPEKTORAT	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang di telola			4 Dokumen	369,867,058.00	4 Dokumen	740,695,192.00	4 Dokumen	699,156,777.00	4 Dokumen	94%		1,069,023,835.00			INSPEKTORAT	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			44 Orang	347,887,058	62 Orang	720,575,192.00	65 Orang	684,050,777.00	65 Orang	95%		1,031,937,835.00			INSPEKTORAT	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			44 Orang	21,980,000	108 Orang	20,120,000.00	137 Orang	15,106,000.00	137 Orang	75%		37,086,000.00			INSPEKTORAT	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana kantor			100.00%	693,264,431.00	100%	662,195,356.00	100%	647,081,682.00	100%	98%		1,340,346,113.00			INSPEKTORAT	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			16 Paket	18,331,900	16 Paket	23,739,388.00	16 Paket	22,291,448.00	16 Paket	94%		40,623,348.00			INSPEKTORAT	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			16 Paket	150,296,555	8 Paket	63,963,000.00	8 Paket	63,860,000.00	8 Paket	100%		214,156,555.00			INSPEKTORAT	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Logistik Kantor					1 Paket	12,500,000.00	1 Paket	12,500,000.00	1 Paket	100%		12,500,000.00				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			9 Paket	98,334,350	6 Paket	105,112,080.00	6 Paket	93,916,168.00	6 Paket	89%		192,250,518.00			INSPEKTORAT	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			27 Media	17,610,000	27 Media	24,553,072.00	27 Media	24,520,000.00	27 Media	100%		42,130,000.00			INSPEKTORAT	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			50 Laporan	81,865,900	50 Laporan	82,327,816.00	124 Laporan	81,013,600.00	124 Laporan	98%		162,879,500.00			INSPEKTORAT	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40 Laporan	326,825,726	40 Laporan	350,000,000.00	74 Laporan	348,980,466.00	74 Laporan						INSPEKTORAT	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah			100.00%	45,261,000.00	100%	842,560,000.00	100%	668,088,000.00	100%	79%		713,349,000.00			INSPEKTORAT	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dsediakan					2 Unit	672,760,000.00	2 Unit	624,000,000.00	2 Unit	93%		624,000,000.00			INSPEKTORAT	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	45,261,000	1 Unit	169,800,000.00	1 Unit	44,088,000.00	1 Unit	26%		89,349,000.00			INSPEKTORAT	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100.00%	335,994,193.00	100%	333,813,559.00	100%	308,053,771.00	100%	92%		644,047,964.00			INSPEKTORAT	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	9,082,000	12 Laporan	10,308,600.00	12 Laporan	10,300,000.00	12 Laporan	100%		19,382,000.00			INSPEKTORAT	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	120,291,033	12 Laporan	117,237,530.00	12 Laporan	91,880,808.00	12 Laporan						INSPEKTORAT	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	206,621,160	12 Laporan	206,267,429.00	12 Laporan	205,872,963.00	12 Laporan						INSPEKTORAT	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah peranakat daerah		100.00%	163,479,660.00	100%	232,984,820.00	100%	211,829,348.00	100%	91%		375,309,008.00			INSPEKTORAT	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 Unit	31,050,572	3 Unit	32,557,220.00	3 Unit	31,348,289.00	3 Unit	96%		62,398,861.00			INSPEKTORAT	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	97,973,800	26 Unit	142,937,600.00	26 Unit	123,736,059.00	26 Unit	87%		221,709,859.00			INSPEKTORAT	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Jenis	31,680,288	69 Unit	46,570,000.00	69 Unit	45,936,000.00	69 Unit	99%		77,616,288.00			INSPEKTORAT	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1,198,000	1 Unit	6,120,000.00	1 Unit	6,120,000.00	1 Unit	100%		7,318,000.00			INSPEKTORAT	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		56 Sarana	1,577,000	3 Unit	4,800,000.00	3 Unit	4,689,000.00	3 Unit	98%		6,266,000.00			INSPEKTORAT	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan Yang Selesai Ditindaklanjuti	85%	1,096,098,818.51	83%	1,376,998,410.00	84%	1,384,394,052.00	83.13%	1,300,237,224.00	83.13%	94%	2,677,235,634.00		244%	INSPEKTORAT	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal		89 Laporan	1,209,179,410.00	136	1,239,190,052.00	147	1,157,502,264.00	147	93%		2,366,681,674.00			INSPEKTORAT	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		11 Laporan	216,130,200	22 Laporan	164,510,580.00	23 Laporan	162,880,580.00	23 Laporan	99%		379,010,780.00			INSPEKTORAT	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		20 Laporan	238,401,300	40 Laporan	357,216,500.00	50 Laporan	323,706,500.00	50 Laporan	91%		562,107,800.00			INSPEKTORAT	
		Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja		42 Laporan	180,556,100	18 Laporan	112,413,500.00	15 Laporan	111,803,500.00	15 Laporan	99%		292,359,600.00			INSPEKTORAT	
		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan		1 Laporan	281,442,900	47 Laporan	336,827,340.00	52 Laporan	332,287,340.00	52 Laporan	99%		613,730,240.00			INSPEKTORAT	
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		12 Laporan	124,000,000	3 Laporan	35,679,260.00	2 Laporan	33,729,260.00	2 Laporan	95%		157,729,260.00			INSPEKTORAT	
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1 Kesepakatan	77,057,010	1 Kesepakatan an	111,466,936.00	1 Kesepakatan an	90,282,028.00	1 Kesepakatan an	81%		167,339,038.00			INSPEKTORAT	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP		2 Dokumen	91,591,900	4 Dokumen	121,075,936.00	4 Dokumen	102,813,056.00	4 Dokumen	85%		194,404,956.00			INSPEKTORAT	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti		100.00%	167,819,000.00	100%	145,204,000.00	100%	142,734,960.00	100%	98%		310,553,960.00			INSPEKTORAT	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		10 laporan	167,819,000	6 laporan	145,204,000.00	6 Laporan	142,734,960.00	6 Laporan	98%		310,553,960.00			INSPEKTORAT	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level kapabilitas APUP	level 3	273,518,448.95	3 Level	125,314,802.00	Level 3	262,123,994.00	Level 3	206,305,796.00	Level 3	79%	331,620,598.00		121%	INSPEKTORAT	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Laporan Peningkatan Kapabilitas APUP		1 Laporan	4,255,000.00	1	4,373,212.00	1	2,170,000.00	1	50%		6,425,000.00			INSPEKTORAT	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		2 SOP	4,255,000	1 Rekomendasi	4,373,212.00	1 Rekomendasi	2,170,000.00	1 Rekomendasi	50%		6,425,000.00			INSPEKTORAT	
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian MCP		88.00%	121,059,802.00	84	257,750,782.00	83.00%	204,135,796.00	83.00%	79%		325,195,598.00			INSPEKTORAT	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		37 Perangkat Daerah	1,500,000	10 Perangkat Daerah	43,613,212.00	10 Perangkat Daerah	25,800,000.00	10 Perangkat Daerah	59%		27,300,000.00			INSPEKTORAT	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		37 Perangkat Daerah	43,405,202	10 Perangkat Daerah	78,237,570.00	10 Perangkat Daerah	64,670,070.00	10 Perangkat Daerah	83%		108,075,272.00			INSPEKTORAT	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		4 Kegiatan	38,811,600	4 Kegiatan	113,240,000.00	4 Kegiatan	91,905,726.00	4 Kegiatan	81%		130,717,326.00			INSPEKTORAT	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		37 Perangkat Daerah	37,343,000	3 Perangkat Daerah	22,660,000.00	3 Perangkat Daerah	21,760,000.00	3 Perangkat Daerah	96%		59,103,000.00			INSPEKTORAT	
TOTAL						9,331,123,958.00		11,985,538,898.00		11,283,969,133.00		94%						
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						26,171,910,050.00		34,679,312,778.00		33,933,948,541.00							KESBANGPOL	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	1,909,377,533.20	98.98	1,993,370,002.00		3,128,133,475.00		2,845,943,357.00	91%		4,839,313,359.00		253%	KESBANGPOL	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1,445,472,232.00		1,965,506,785.00		1,717,551,732.00		87%		3,163,023,984.00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1,367,874,232.00	100	1,845,242,285.00		1,597,862,252.00		87%		2,965,736,484.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			77,598,000.00	100	120,264,500.00		119,689,500.00		100%		197,287,500.00			KESBANGPOL	

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100%	9,560,000.00		21,840,000.00		21,840,000.00		100%		31,400,000.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9,560,000.00	100	21,840,000.00		21,840,000.00		100%		31,400,000.00			KESBANGPOL	
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah					9,872,000.00		10,000,000.00		9,129,850.00		91%		19,001,850.00			KESBANGPOL	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				9,872,000.00	100	10,000,000.00		9,129,850.00		91%		19,001,850.00			KESBANGPOL	
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah				100%	237,390,850.00		303,398,076.00		297,746,470.00		98%		535,137,320.00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5,000,000.00	100	5,986,233.00		5,932,410.00		99%		10,932,410.00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21,993,800.00	100	36,241,583.00		35,894,255.00		99%		57,888,055.00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					100	12,500,000.00		12,500,000.00		100%		12,500,000.00				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				21,982,400.00	100	21,981,960.00		21,981,000.00		100%		43,963,400.00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4,000,000.00	100	5,848,300.00		5,845,800.00		100%		9,845,800.00			KESBANGPOL	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10,000,000.00	100	20,840,000.00		15,600,000.00		75%		25,600,000.00			KESBANGPOL	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				174,414,650.00	100	200,000,000.00		199,993,005.00		100%		374,407,655.00			KESBANGPOL	
		Pengadaan Barang Milik Daerah				100%	4,731,600.00		526,995,040.00		505,120,000.00		96%		509,851,600.00			KESBANGPOL	
		Pengadaan Mebel					4,731,600.00								4,731,600.00			KESBANGPOL	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					100	472,230,000.00		452,500,000.00		96%		452,500,000.00			KESBANGPOL	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					100	54,765,040.00		52,620,000.00		96%		52,620,000.00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah				99,12	201,171,820.00		207,782,018.00		203,278,483.00		98%		404,450,303.00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,390,000.00	100	2,494,350.00		2,490,000.00		100%		3,880,000.00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				30,101,652.00	100	35,607,500.00		31,108,315.00		87%		61,209,967.00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				169,680,168.00	100	169,680,168.00		169,680,168.00		100%		339,360,336.00			KESBANGPOL	
		Pemeliharaan Barang Milik daerah				99,69	85,171,500.00		92,611,556.00		91,276,802.00		99%		176,448,302.00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					66,556,500.00	100	67,932,000.00		66,625,400.00		98%		133,181,900.00			KESBANGPOL	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				7,005,000.00	100	10,749,556.00		10,721,402.00		100%		17,726,402.00			KESBANGPOL	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				11,610,000.00	100	13,930,000.00		13,930,000.00		100%		25,540,000.00			KESBANGPOL	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase koordinasi penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	103,804,706.92	99,49	1,092,910,792.00		1,379,355,200.00		1,350,421,424.00		98%		2,443,332,216.00		2354%	KESBANGPOL	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				99,49	1,092,910,792.00		1,379,355,200.00		1,350,421,424.00		98%		2,443,332,216.00			KESBANGPOL	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				24,131,000.00	100	42,810,800.00		41,057,600.00		96%		65,188,600.00			KESBANGPOL	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				19,914,000.00	100	42,916,200.00		39,048,440.00		91%		58,962,440.00			KESBANGPOL	

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1,014,210,992.00	100	918,550,000.00		903,554,144.00	98%		1,917,765,136.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				34,654,800.00	100	375,078,200.00		366,761,240.00	98%		401,416,040.00			KESBANGPOL	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Budaya Politik	Tingkat partisipasi pemilih	80%		1,119,251,350.05	99.98	16,171,976,432.00	29,094,648,793.00		28,747,436,402.00	99%		44,919,412,834.00		4013%	KESBANGPOL	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik					96.35	16,171,976,432.00	29,094,648,793.00		28,747,436,402.00	99%		44,919,412,834.00			KESBANGPOL	
		Penyusunan Program Kerja Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				65,423,600.00	100	1,138,931,500.00		1,103,885,009.00	97%		1,169,308,609.00			KESBANGPOL	
		Penyusunan bahan Perumusan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				16,038,887,132.00	100	23,589,066,193.00		23,586,333,093.00	100%		39,625,220,225.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				38,320,000.00	100	376,651,100.00		75,540,900.00	20%		113,860,900.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					29,345,700.00	100	3,990,000,000.00		3,981,677,400.00	100%		4,011,023,100.00			KESBANGPOL	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang aktif melaksanakan kegiatan kemasyarakatan	100%		36,185,793.65	99.45	54,618,000.00						54,618,000.00		151%	KESBANGPOL	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					99.45	54,618,000.00						54,618,000.00			KESBANGPOL	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				54,618,000.00							54,618,000.00			KESBANGPOL	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%		89,369,953.24	99.79	204,741,730.00	186,152,400.00		176,365,500.00	95%		381,107,230.00		426%	KESBANGPOL	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya					99.79	204,741,730.00	186,152,400.00		176,365,500.00	95%		381,107,230.00			KESBANGPOL	

		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengcagahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental				10,310,800.00								10,310,800.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengcagahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi P4GN				66,151,380.00								66,151,380.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengcagahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah yang Ditusun				29,783,800.00	100	26,370,500.00		24,851,000.00		94%		54,634,800.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengcagahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat dan Koordinasi Forum Umat Beragama				98,495,750.00	100	159,781,900.00		151,514,500.00		95%		250,010,250.00			KESBANGPOL	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penerapan kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%		444,444,519.49	94,78	654,293,094.00	891,022,911.00		813,781,858.00		91%		1,468,074,952.00		330%	KESBANGPOL	
		Perumusan Kebijakan Teknik dan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknik dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial n Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial					94,78	654,293,094.00	891,022,911.00		813,781,858.00		91%		1,468,074,952.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.						100	307,030,000.00		266,730,961.00		87%		266,730,961.00			KESBANGPOL	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					44,016,000.00								44,016,000.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				76,425,000.00	100	193,489,000.00		172,732,800.00		89%		249,157,800.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				41,895,000.00								41,895,000.00			KESBANGPOL	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				491,957,094.00	100	390,503,911.00		374,318,097.00		96%		866,275,191.00			KESBANGPOL	
TOTAL							20,171,910,050.00		34,679,312,779.00		33,933,948,541.00		98%						
KECAMATAN							5,291,305,752.00		6,027,941,177.00		5,790,758,803.00							KECAMATAN TEBO TENGAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB		4,174,509,336.35	4,091,029,338.00		4,653,526,340.00		4,505,869,035.00		97%		8,596,898,373.00		206%	KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,000,000.00	100%	2,000,278.00	100%	2,000,278.00	100%	100%		4,000,278.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,000,000.00	15 dokumen	2,000,278.00	15 dokumen	2,000,278.00	15 dokumen	100%		4,000,278.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase OrangBulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,368,486,996.00	100%	3,931,093,076.00	100%	3,789,924,213.00	100%	96%		7,158,411,209.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3,254,624,996.00	40 orang/bulan	3,617,231,076.00	40 orang/bulan	3,676,062,213.00	40 orang/bulan	96%		6,930,687,209.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				113,862,000.00	70 dokumen	113,862,000.00	70 dokumen	113,862,000.00	70 dokumen	100%		227,724,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6,000,000.00	100%	6,000,000.00	100%	6,000,000.00	100%	100%		12,000,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6,000,000.00	2 laporan	6,000,000.00	2 laporan	6,000,000.00	2 laporan	100%		12,000,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase orang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22,995,720.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	100%		72,995,720.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22,995,720.00	2 orang	50,000,000.00	2 orang	50,000,000.00	2 orang	100%		72,995,720.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase paket Administrasi Umum Perangkat Daerah				313,636,747.00	100%	247,994,647.00	100%	247,148,280.00	100%	100%		560,785,027.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8,503,000.00	1 paket	8,110,260.00	1 paket	8,089,500.00	1 paket	100%		16,592,500.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				49,686,200.00	6 paket	53,773,415.00	6 paket	53,047,331.00	6 paket	99%		102,733,531.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9,608,100.00	3 paket	10,009,821.00	3 paket	9,996,306.00	3 paket	100%		19,604,406.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				33,937,700.00	1 paket	41,059,405.00	1 paket	41,059,405.00	1 paket	100%		74,997,105.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12,022,350.00	2 paket	12,000,270.00	2 paket	11,995,670.00	2 paket	100%		24,018,020.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				84,995,000.00	20 laporan	56,119,868.00	20 laporan	56,112,328.00	20 laporan	100%		141,107,328.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114,884,397.00	26 laporan	66,921,608.00	26 laporan	66,847,740.00	26 laporan	100%		181,732,137.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Persentase unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13,475,500.00	100%	15,271,736.00	100%	15,122,813.00	100%	99%		28,598,313.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3,750,000.00	6 unit	4,424,108.00	1 unit	4,300,000.00	1 unit	97%		8,050,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9,725,500.00	3 unit	10,847,628.00	3 unit	10,822,813.00	3 unit	100%		20,548,313.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227,257,975.00	100%	230,748,003.00	100%	228,509,651.00	100%	99%		455,767,626.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2,500,000.00	800 laporan	2,494,350.00	800 laporan	2,410,000.00	800 laporan	97%		4,910,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				54,199,475.00	3 laporan	43,576,875.00	3 laporan	41,536,041.00	3 laporan	95%		95,735,516.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9,998,500.00	3 laporan	14,996,610.00	3 laporan	14,996,610.00	3 laporan	100%		24,995,110.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				160,560,000.00	12 laporan	169,680,168.00	12 laporan	169,567,000.00	12 laporan	100%		330,127,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persentase Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137,176,400.00	100%	170,418,600.00	100%	167,163,800.00	100%	98%		304,340,200.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dikelola Pakainya				116,265,400.00	11 unit	118,365,600.00	11 unit	115,110,800.00	11 unit	97%		231,376,200.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10,101,000.00	15 unit	4,020,000.00	15 unit	4,020,000.00	15 unit	100%		14,121,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				10,810,000.00	1 unit	48,033,000.00	1 unit	48,033,000.00	1 unit	100%		58,843,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	141,154,509.06	596,845,300.00	100%	670,277,850.00	100%	646,231,819.00	100%	96%		1,243,077,119.00	881%	KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Persentase Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			242,699,850.00	100%	293,200,293.00	100%	293,200,293.00	100%	100%		535,900,143.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4,499,850.00	1 laporan	5,000,293.00	1 laporan	5,000,293.00	1 laporan	100%		9,500,143.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			238,200,000.00	2 dokumen	288,200,000.00	2 dokumen	288,200,000.00	2 dokumen	100%		526,400,000.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Persentase Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			4,999,700.00								4,999,700.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4,999,700								4,999,700.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Persentase Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			349,145,750.00	100%	377,077,557.00	100%	353,031,526.00	100%	94%		702,177,276.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			349,145,750.00	2 laporan	377,077,557.00	2 laporan	353,031,526.00	2 laporan	94%		702,177,276.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	2,163,991,887.32	570,072,814.00	100%	632,679,504.00	100%	567,499,314.00	100%	90%		1,137,572,128.00	53%	KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Persentase Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10,000,000.00		-		-				10,000,000.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			10,000,000								10,000,000.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase unit Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			430,662,800.00	100%	430,000,000.00	100%	365,111,220.00	100%	85%		795,774,020.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			390,662,800.00	5 pokmas/ormas	400,000,000.00	4 pokmas/ormas	335,113,220.00	4 pokmas/ormas	84%		725,776,020.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			40,000,000.00	350 laporan	30,000,000.00	350 laporan	29,998,000.00	350 laporan	100%		69,998,000.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat			12,499,650.00	100%	58,679,300.00	100%	58,671,000.00	100%	100%		71,170,650.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya			7,999,800.00	3 Lembaga Kemasyarakatan	54,180,300.00	3 Lembaga Kemasyarakatan	54,172,000.00	3 Lembaga Kemasyarakatan	100%		62,171,800.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			4,499,850.00	1 laporan	4,499,000.00	1 laporan	4,499,000.00	1 laporan	100%		8,998,850.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			116,910,364.00	100%	144,000,204.00	100%	143,717,094.00	100%	100%		260,627,458.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			109,926,964.00								109,926,964.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			6,983,400.00								6,983,400.00		KECAMATAN TEBO TENGAH	

		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				35 keluarga	144,000,204.00	35 keluarga	143,717,094.00	35 keluarga	100%		143,717,094.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	100%	1,004,156.78	5,380,000.00	100%	6,000,000.00	100%	6,000,000.00	100%	100%		11,380,000.00		1133%	KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Persentase Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2,380,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	100%		5,380,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2,380,000.00	1 laporan	3,000,000.00	1 laporan	3,000,000.00	1 laporan	100%		5,380,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Persentase Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	100%		6,000,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			3,000,000.00	5 laporan	3,000,000.00	5 laporan	3,000,000.00	5 laporan	100%		6,000,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	1,004,156.78	22,978,300.00	100%	53,689,492.00	100%	53,480,492.00	100%	100%		76,458,792.00		7614%	KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Meningkatnya Persentase Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			22,978,300.00	100%	53,689,492.00	100%	53,480,492.00	100%	100%		76,458,792.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun			19,998,300.00	25 orang	50,689,492.00	25 orang	50,480,492.00	25 orang	100%		70,478,792.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			2,980,000.00	1 laporan	3,000,000.00	1 laporan	3,000,000.00	1 laporan	100%		5,980,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	18,848,022.72	5,000,000.00	100%	11,767,991.00	100%	11,678,143.00	100%	99%		16,678,143.00		88%	KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			5,000,000.00	100%	11,767,991.00	100%	11,678,143.00	100%	99%		16,678,143.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			5,000,000.00								5,000,000.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 dokumen	11,767,991.00	1 dokumen	11,678,143.00	1 dokumen	99%		11,678,143.00			KECAMATAN TEBO TENGAH	
TOTAL						5,291,305,752.00		6,027,941,177.00		5,790,758,803.00		96%						
KECAMATAN						4,030,519,181.00		4,161,151,672.00		4,085,744,544.00							KECAMATAN TEBO ILIR	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	2,943,346,189.52	3,365,072,531.00	B	3,394,857,024.00	B	3,319,621,469.00	B	98%		6,684,694,000.00		227%	KECAMATAN TEBO ILIR	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Persentase pencapaian kinerja Administrasi keuangan			2,625,929,216.00	1 Tahun	2,736,974,820.00	1 Tahun	2,663,916,304.00	1 Tahun	97%		5,289,845,520.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2,540,844,216	1 Tahun	2,657,570,717.00	1 Tahun	2,584,596,304.00	1 Tahun	97%		5,125,440,520.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			85,085,000	1 Tahun	79,404,103.00	1 Tahun	79,320,000.00	1 Tahun	100%		164,405,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6,000,000.00	1 Tahun	6,000,000.00	1 Tahun	6,000,000.00	1 Tahun	100%		12,000,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6,000,000	1 Tahun	6,000,000.00	1 Tahun	6,000,000.00	1 Tahun	100%		12,000,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	

		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya				21,480,000.00	1 Tahun	34,000,000.00	1 Tahun	33,904,600.00	1 Tahun	100%		55,384,600.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21,480,000	1 Tahun	34,000,000.00	1 Tahun	33,904,600.00	1 Tahun	100%		55,384,600.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi umum				297,779,950.00	1 Tahun	228,969,950.00	1 Tahun	228,775,860.00	1 Tahun	100%		526,555,810.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4,999,600	1 Tahun	5,000,094.00	1 Tahun	4,997,190.00	1 Tahun	100%		9,996,790.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23,452,400	1 Tahun	7,714,180.00	1 Tahun	7,635,402.00	1 Tahun	99%		31,087,802.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor yang Tersedia				14,989,000	1 Tahun	45,499,868.00	1 Tahun	45,472,643.00	1 Tahun	100%		60,461,643.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				49,184,950	1 Tahun	14,999,956.00	1 Tahun	14,999,956.00	1 Tahun	100%		64,184,906.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5,499,000	1 Tahun	5,499,954.00	1 Tahun	5,499,631.00	1 Tahun	100%		10,998,631.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7,498,200	1 Tahun	7,499,878.00	1 Tahun	7,499,878.00	1 Tahun	100%		14,998,078.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				100,000,000	1 Tahun	35,000,000.00	1 Tahun	35,000,000.00	1 Tahun	100%		135,000,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				92,156,800	1 Tahun	107,756,028.00	1 Tahun	107,671,160.00	1 Tahun	100%		199,827,960.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya pengadaan barang milik Daerah untuk penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50,332,700.00	1 Tahun	29,998,353.00	1 Tahun	29,998,353.00	1 Tahun	100%		80,331,053.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50,332,700	1 Tahun	29,998,353.00	1 Tahun	29,998,353.00	1 Tahun	100%		80,331,053.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya penyediaan jasa dalam penunjang urusan Pemerintahan Daerah				249,661,915.00	1 Tahun	228,736,035.00	1 Tahun	227,752,365.00	1 Tahun	100%		477,414,280.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000	1 Tahun	4,999,050.00	1 Tahun	4,999,050.00	1 Tahun	100%		9,999,050.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				53,053,747	1 Tahun	37,425,201.00	1 Tahun	36,487,047.00	1 Tahun	97%		89,540,794.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15,498,000	1 Tahun	15,498,575.00	1 Tahun	15,458,000.00	1 Tahun	100%		30,956,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				176,110,168	1 Tahun	170,813,209.00	1 Tahun	170,808,268.00	1 Tahun	100%		346,918,436.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113,888,750.00	1 Tahun	130,177,858.00	1 Tahun	129,273,987.00	1 Tahun	99%		243,162,737.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Dan Pajak Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan Dinas				63,947,050	1 Tahun	64,393,078.00	1 Tahun	63,575,478.00	1 Tahun	99%		127,522,528.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10,445,700	1 Tahun	26,285,001.00	1 Tahun	26,207,442.00	1 Tahun	100%		36,653,142.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				39,496,000	1 Tahun	39,499,779.00	1 Tahun	39,491,067.00	1 Tahun	100%		78,987,067.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	19,780,613.25		254,223,050.00	1 Tahun	269,999,872.00	1 Tahun	269,987,613.00	1 Tahun	100%		524,210,663.00	2650%		KECAMATAN TEBO ILIR	
		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH DITINGKAT KECAMATAN	Terlaksananya kegiatan Musrenbang di Tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan				4,999,800.00	1 Tahun	20,000,000.00	1 Tahun	20,000,000.00	1 Tahun	100%		24,999,800.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4,999,800	1 Tahun	20,000,000.00	1 Tahun	20,000,000.00	1 Tahun	100%		24,999,800.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilmphikan kepada Camat					249,223,250.00	1 Tahun	249,999,872.00	1 Tahun	249,987,613.00	1 Tahun	100%		499,210,863.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilmphikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilmphikan				249,223,250	1 Tahun	249,999,872.00	1 Tahun	249,987,613.00	1 Tahun	100%		499,210,863.00			KECAMATAN TEBO ILIR	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	1,344,213,215.58		380,978,200.00	1 Tahun	423,991,963.00	1 Tahun	423,845,222.00	1 Tahun	100%		804,823,422.00		60%	KECAMATAN TEBO ILIR	
		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Tercapainya pemberdayaan masyarakat di kelurahan				199,384,100.00	1 Tahun	200,000,000.00	1 Tahun	199,999,697.00	1 Tahun	100%		399,383,797.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					47,898,500								47,898,500.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				151,485,600	1 Tahun	200,000,000.00		199,999,697.00		100%		351,485,297.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Tercapainya pemberdayaan masyarakat di kelurahan				134,100,000.00	1 Tahun	123,992,000.00	1 Tahun	123,855,000.00	1 Tahun	100%		257,955,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					134,100,000								134,100,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Temiang					1 Tahun	123,992,000.00		123,855,000.00		100%		123,855,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan				47,494,100.00	1 Tahun	99,999,963.00	1 Tahun	99,990,525.00	1 Tahun	100%		147,484,625.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara				47,494,100	1 Tahun	99,999,963.00		99,990,525.00		100%		147,484,625.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	100%	1,004,156.78		3,000,000.00	1 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	100%		6,000,000.00		598%	KECAMATAN TEBO ILIR	
		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				3,000,000.00	1 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	100%		6,000,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat				3,000,000	1 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	100%		6,000,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	1,004,156.78	0%	21,495,400.00	1 Tahun	64,999,315.00	1 Tahun	64,990,240.00	1 Tahun	100%		86,485,640.00		8613%	KECAMATAN TEBO ILIR	
		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				21,495,400.00	1 Tahun	64,999,315.00	1 Tahun	64,990,240.00	1 Tahun	100%		86,485,640.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian				19,995,400	1 Tahun	64,999,315.00	1 Tahun	64,990,240.00	1 Tahun	100%		84,985,640.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1,500,000								1,500,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	100%	2,008,313.56		5,750,000.00	1 Tahun	4,303,498.00	1 Tahun	4,300,000.00	1 Tahun	100%		10,050,000.00		500%	KECAMATAN TEBO ILIR	
		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya Desa dalam melaksanakan rekomendasi, koordinasi dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa dan peraturan Desa				5,750,000.00	1 Tahun	4,303,498.00	1 Tahun	4,300,000.00	1 Tahun	100%		10,050,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
		Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5,750,000	1 Tahun	4,303,498.00	1 Tahun	4,300,000.00	1 Tahun	100%		10,050,000.00			KECAMATAN TEBO ILIR	
TOTAL KECAMATAN							4,030,519,181.00		4,161,151,672.00		4,085,744,544.00		98%					KECAMATAN TEBO ULU	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	3,468,074,408.63	1 Tahun	3,450,673,877.00		3,979,031,035.00		3,532,913,212.00		89%		6,983,587,089.00		201%	KECAMATAN TEBO ULU	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Persentase Orang/Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Tahun	2,829,681,452.00		3,384,546,097.00		2,942,917,503.00		87%		5,772,598,955.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2,717,697,452.00	1 Tahun	3,272,562,097.00	1 Tahun	2,830,933,503.00	1 Tahun	87%		5,548,630,955.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				111,984,000.00	1 Tahun	111,984,000.00	1 Tahun	111,984,000.00	1 Tahun	100%		223,968,000.00			KECAMATAN TEBO ULU	

		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			1 Tahun	8,160,000.00		8,159,644.00			8,080,000.00		99%		16,240,000.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8,160,000.00	1 Tahun	8,159,644.00	1 Tahun		8,080,000.00	1 Tahun	99%		16,240,000.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Persentase Orang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 Tahun	43,889,000.00		31,888,775.00			31,887,607.00		100%		75,776,607.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11,889,000.00	1 Tahun	11,888,775.00	1 Tahun		11,888,412.00	1 Tahun	100%		23,777,412.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah				300,474,638.00		228,015,803.00			226,323,136.00		99%		526,797,774.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10,943,200.00	1 Tahun	5,939,357.00	1 Tahun		5,939,357.00	1 Tahun	100%		16,882,557.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36,016,400.00	1 Tahun	25,723,057.00	1 Tahun		24,243,200.00	1 Tahun	94%		60,259,600.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2,483,600.00	1 Tahun	4,330,938.00	2 Tahun		4,330,938.00	2 Tahun	100%		6,814,538.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah tersedia bahan logistik kantor				9,999,950.00	1 Tahun	35,999,721.00	3 Tahun		35,957,260.00	3 Tahun	100%		45,957,210.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan bahan cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				59,815,588.00	1 Tahun	19,786,200.00	1 Tahun		19,665,996.00	1 Tahun	99%		79,481,584.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3,234,700.00	1 Tahun	4,636,530.00	1 Tahun		4,600,000.00	1 Tahun	99%		7,834,700.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				93,050,000.00	1 Tahun	71,600,000.00	1 Tahun		71,600,000.00	1 Tahun	100%		164,650,000.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84,931,200.00	1 Tahun	60,000,000.00	1 Tahun		59,986,385.00	1 Tahun	100%		144,917,585.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Persentase Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 Tahun	18,686,400.00		42,816,665.00			42,816,665.00		100%		61,503,065.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9,463,200.00	1 Tahun	14,329,216.00	1 Tahun		14,329,216.00	1 Tahun	100%		23,792,416.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9,223,200.00	1 Tahun	28,487,449.00	1 Tahun		28,487,449.00	1 Tahun	100%		37,710,649.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Persentase Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			1 Tahun	185,256,387.00		196,864,839.00			196,127,039.00		100%		381,383,426.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2,000,000.00	1 Tahun	2,999,707.00	1 Tahun		2,940,000.00	1 Tahun	98%		4,940,000.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				41,393,855.00	1 Tahun	45,675,000.00	1 Tahun		44,996,907.00	1 Tahun	99%		86,390,762.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7,963,400.00	1 Tahun	14,870,000.00	1 Tahun		14,870,000.00	1 Tahun	100%		22,833,400.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				133,899,132.00	1 Tahun	133,320,132.00	1 Tahun		133,320,132.00	1 Tahun	100%		267,219,264.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Persentase Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				64,526,000.00		86,739,212.00			84,761,262.00		98%		149,287,262.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dipayarkan Pajak dan Periznannya				2,720,000.00	1 Tahun	6,020,000.00	1 Tahun		4,202,800.00	1 Tahun	70%		6,922,800.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51,243,000.00	1 Tahun	51,282,350.00	1 Tahun		51,121,600.00	1 Tahun	100%		102,364,600.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10,563,000.00	1 Tahun	29,436,862.00	1 Tahun		29,436,862.00	1 Tahun	100%		39,999,862.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	11,768,637.10	1 Tahun	276,674,600.00		413,959,978.00			413,923,845.00		100%		690,798,445.00		5870%	KECAMATAN TEBO ULU	
		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH DI TINGKAT KECAMATAN	Meningkatnya Persentase Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Tahun	35,904,000.00		128,785,081.00			128,784,380.00		100%		164,688,380.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan				35,904,000.00	1 Tahun	17,185,081.00	1 Tahun		17,184,380.00	1 Tahun	100%		53,088,380.00			KECAMATAN TEBO ULU	

		Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 Tahun	111,600,000.00	1 Tahun	111,600,000.00	1 Tahun	100%		111,600,000.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Persentase Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			240,970,600.00			285,174,897.00		285,139,465.00		100%		526,110,065.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			240,970,600.00		1 Tahun	285,174,897.00	1 Tahun	285,139,465.00	1 Tahun	100%		526,110,065.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	1,340,287,524.91	1 Tahun	451,778,100.00		324,498,710.00		324,497,964.00		100%		776,276,064.00		58%	KECAMATAN TEBO ULU	
		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Meningkatnya Persentase Unit Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1 Tahun	200,000,000.00		200,000,000.00		199,999,867.00		100%		399,999,867.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Umhas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			200,000,000.00		1 Tahun	200,000,000.00	1 Tahun	199,999,867.00	1 Tahun	100%		399,999,867.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			114,982,400.00			24,498,900.00		24,498,650.00		100%		139,481,050.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan			114,982,400.00		1 Tahun	24,498,900.00	1 Tahun	24,498,650.00	1 Tahun	100%		139,481,050.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				136,795,700.00			99,999,810.00		99,999,447.00		100%		236,795,147.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pendidikan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan			136,795,700.00		1 Tahun	99,999,810.00	1 Tahun	99,999,447.00	1 Tahun	100%		236,795,147.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	1,004,156.78		5,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		100%		8,000,000.00		797%	KECAMATAN TEBO ULU	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Persentase Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		100%		8,000,000.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan terlaksananya sinergitas dengan koefisiensi negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal terkait di wilayah kecamatan			2,000,000.00									2,000,000.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat			3,000,000.00		1 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	100%		6,000,000.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	1,004,156.78		34,659,800.00		123,223,006.00		123,223,006.00		100%		157,882,806.00		15723%	KECAMATAN TEBO ULU	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Persentase Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			34,659,800.00			123,223,006.00		123,223,006.00		100%		157,882,806.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia			29,659,800.00		1 Tahun	118,223,006.00	1 Tahun	118,223,006.00	1 Tahun	100%		147,882,806.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			5,000,000.00		1 Tahun	5,000,000.00	1 Tahun	5,000,000.00	1 Tahun	100%		10,000,000.00			KECAMATAN TEBO ULU	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	1,004,156.78		3,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		100%		8,000,000.00		797%	KECAMATAN TEBO ULU	

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Persentase Dokumen Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	100%		8,000,000.00			KECAMATAN TEBU ULU	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa persentase capaian pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				3,000,000.00	1 Tahun	5,000,000.00	1 Tahun	5,000,000.00	1 Tahun	100%	8,000,000.00			KECAMATAN TEBU ULU	
TOTAL							4,221,986,377.00		4,848,712,729.00		4,402,558,027.00	91%					KECAMATAN SUMAY	
KECAMATAN							2,167,072,345.00		2,421,859,584.00		2,342,971,294.00						KECAMATAN SUMAY	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	1,964,847,254.04		1,903,719,495.00		2,021,432,055.00		1,942,613,365.00	96%		3,846,332,860.00		196%	KECAMATAN SUMAY	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun				-		6,007,775.00		5,923,775.00	99%		5,923,775.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					100 %	6,007,775.00		5,923,775.00	99%		5,923,775.00			KECAMATAN SUMAY	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan				1,445,559,994.00		1,558,966,092.00		1,483,963,709.00	95%		2,929,523,703.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1,385,739,994.00	100%	1,499,146,092.00		1,424,143,709.00	95%		2,809,883,703.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				59,820,000.00	100%	59,820,000.00		59,820,000.00	100%		119,640,000.00			KECAMATAN SUMAY	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiannya Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6,480,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	100%		12,480,000.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6,480,000.00	100%	6,000,000.00		6,000,000.00	100%		12,480,000.00			KECAMATAN SUMAY	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				19,545,130.00		50,000,000.00		50,000,000.00	100%		69,545,130.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				19,545,130.00	100%	50,000,000.00		50,000,000.00	100%		69,545,130.00			KECAMATAN SUMAY	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiannya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum				190,189,900.00		133,297,876.00		133,297,613.00	100%		323,487,513.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5,274,000.00	100%	5,265,467.00		5,265,467.00	100%		10,539,467.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30,207,900.00	100%	21,176,695.00		21,176,623.00	100%		51,384,523.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3,311,900.00	100%	3,309,937.00		3,309,836.00	100%		6,621,736.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2,568,600.00	100%	2,568,478.00		2,568,437.00	100%		5,137,037.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3,831,600.00	100%	3,827,299.00		3,827,250.00	100%		7,658,850.00			KECAMATAN SUMAY	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				70,000,000.00	100%	22,650,000.00		22,650,000.00	100%		92,650,000.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74,995,900.00	100%	74,500,000.00		74,500,000.00	100%		149,495,900.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13,410,400.00		34,892,654.00		34,892,654.00	100%		48,303,054.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13,410,400.00	100%	34,892,654.00		34,892,654.00	100%		48,303,054.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172,433,171.00		172,434,964.00		172,434,964.00	100%		344,868,135.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				26,993,027.00	100%	26,994,820.00		26,994,820.00	100%		53,987,847.00			KECAMATAN SUMAY	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				145,440,144.00	100%	145,440,144.00		145,440,144.00	100%		290,880,288.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56,100,900.00		59,832,694.00		56,100,650.00	94%		112,201,550.00			KECAMATAN SUMAY	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibiayarkan Pajak dan Perizinan				43,800,000.00	100%	47,532,000.00		43,800,000.00	92%	87,600,000.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10,150,000.00	100%	10,150,000.00		10,150,000.00	100%	20,300,000.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				2,150,900.00	100%	2,150,694.00		2,150,650.00	100%	4,301,550.00			KECAMATAN SUMAY	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	68,497,369.27		215,061,450.00		299,434,515.00		299,364,915.00	100%	514,426,365.00		740%	KECAMATAN SUMAY	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				65,301,700.00		149,434,654.00		149,365,054.00	100%	214,666,754.00			KECAMATAN SUMAY	
		Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Kegiatan Musrenbang Tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan					100%	5,319,600.00		5,250,000.00	99%	5,250,000.00			KECAMATAN SUMAY	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				65,301,700.00	100%	144,115,054.00		144,115,054.00	100%	209,416,754.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					149,759,750.00		149,999,861.00		149,999,861.00	100%	299,759,611.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				149,759,750	100%	149,999,861.00		149,999,861.00	100%	299,759,611.00			KECAMATAN SUMAY	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	1,004,156.78		48,291,400.00		13,000,000.00		13,000,000.00	100%	61,291,400.00		6104%	KECAMATAN SUMAY	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Tersedianya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				48,291,400.00		13,000,000.00		13,000,000.00	100%	61,291,400.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				48,291,400	100%	13,000,000.00		13,000,000.00	100%	61,291,400.00			KECAMATAN SUMAY	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	100%	1,004,156.78				74,993,014.00		74,993,014.00	100%	74,993,014.00		7468%	KECAMATAN SUMAY	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah						74,993,014.00		74,993,014.00	100%	74,993,014.00			KECAMATAN SUMAY	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan pada hari kemerdekaan republik Indonesia					100%	74,993,014.00		74,993,014.00	100%	74,993,014.00			KECAMATAN SUMAY	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE CAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	1,004,156.78				13,000,000.00		13,000,000.00	100%	13,000,000.00		1295%	KECAMATAN SUMAY	
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terselenggara Terekomendasi dan Terkoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pada Pemerintahan Desanya						13,000,000.00		13,000,000.00	100%	13,000,000.00			KECAMATAN SUMAY	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terselenggara, Terkoordinasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100%	13,000,000.00		13,000,000.00	100%	13,000,000.00			KECAMATAN SUMAY	
TOTAL							2,167,072,345.00		2,421,859,584.00		2,342,971,294.00	97%					
KECAMATAN							4,620,911,103.00		3,000,731,672.00		2,901,272,154.00					KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	2,845,104,199.86		3,107,407,152.00		3,000,731,672.00		2,901,272,154.00	97%	6,008,679,306.00		211%	KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,093,656,219.00		2,240,345,831.00		2,141,144,859.00	96%	4,234,801,078.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1,949,280,719	100%	2,084,405,831.00		2,001,002,859.00	96%	3,950,283,578.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				144,375,500	100%	155,940,000.00		140,142,000.00	90%	284,517,500.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				12,240,000.00		12,240,000.00		12,240,000.00	100%	24,480,000.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12,240,000	100%	12,240,000.00			12,240,000.00	100%	24,480,000.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				9,994,900.00		20,000,000.00			20,000,000.00	100%	29,994,900.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9,994,900	100%	20,000,000.00			20,000,000.00	100%	29,994,900.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				358,808,073.00		301,020,241.00			300,998,784.00	100%	659,806,857.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12,996,573	100%	15,199,676.00			15,192,778.00	100%	28,189,351.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19,429,300	100%	49,852,743.00			49,838,223.00	100%	69,267,523.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					56,893,700	100%	12,500,000.00			12,500,000.00	100%	69,393,700.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				24,800,300	100%	15,378,789.00			15,378,759.00	100%	40,179,050.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				11,000,000	100%	5,999,687.00			5,999,687.00	100%	16,999,687.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				122,927,500	100%	70,984,451.00			70,984,451.00	100%	193,911,951.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					110,760,700	100%	131,104,895.00			131,104,895.00	100%	241,865,595.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				164,943,300.00										KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-										KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60,528,100.00										KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				104,415,200.00										KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				365,128,360.00		352,221,700.00			351,984,611.00	100%	717,112,971.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4,190,125	100%	4,999,230.00			4,999,230.00	100%	9,189,355.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				63,860,135	100%	69,995,650.00			69,758,561.00	100%	133,618,696.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9,078,100							9,078,100.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				288,000,000	100%	277,226,820.00			277,226,820.00	100%	565,226,820.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				102,636,300.00		74,903,900.00			74,903,900.00	100%	177,540,200.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				61,488,000	100%	46,941,750.00			46,941,750.00	100%	108,429,750.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9,935,000	100%	19,000,000.00			19,000,000.00	100%	28,935,000.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31,213,300	100%	8,962,150.00			8,962,150.00	100%	40,175,450.00			KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		196,415,074.08	507,063,951.00							507,063,951.00	258%		KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		KOORDINASI PENYELenggaraAN KEGIATAN PEMERINTAH DI TINGKAT KECAMATAN	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan				35,047,000.00										KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				35,047,000.00										KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	jumlah peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan															

		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan camat				472,016,951.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				472,016,951.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%		1,463,948,086.54	973,429,600.00							973,429,600.00		66%	KECAMATAN RIMBO BUJANG		
		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan				595,459,600.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan																KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				595,459,600.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					377,970,000.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					377,970,000.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	100%		4,026,668.68	5,223,900.00							5,223,900.00		130%	KECAMATAN RIMBO BUJANG		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					3,723,900.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3,723,900.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1,500,000.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1,500,000											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		1,004,156.78	22,896,500.00							22,896,500.00		2280%	KECAMATAN RIMBO BUJANG		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				22,896,500.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Polestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20,000,000											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2,896,500											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	100%		1,003,035.87	4,890,000.00							4,890,000.00		488%	KECAMATAN RIMBO BUJANG		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4,890,000.00											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4,890,000											KECAMATAN RIMBO BUJANG	
TOTAL							4,620,911,103.00		3,000,731,672.00				2,901,272,154.00		97%				
KECAMATAN							2,493,128,272.00		2,487,157,764.00				2,295,921,022.00					KECAMATAN RIMBO ULU	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB		1,802,689,058.73	1,976,247,072.00		1,979,258,770.00				1,790,039,476.00		90%		3,766,286,548.00	209%	KECAMATAN RIMBO ULU
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10,099,700.00		10,099,342.00				10,095,862.00		100%		20,195,562.00		KECAMATAN RIMBO ULU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10,099,700.00	100	10,099,342				10,095,862		100%		20,195,562.00		KECAMATAN RIMBO ULU

		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				1,200,767,040.00		1,326,132,120.00		1,139,696,054.00		86%		2,340,465,094.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1,102,770,740.00	100	1,247,412,120		1,060,978,054		85%		2,163,748,794.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			97,996,300.00	100	78,720,000		78,720,000		100%		176,716,300.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH				10,800,000.00		10,800,000.00		10,800,000.00		100%		21,600,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penatausahaan Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			10,800,000.00	100	10,800,000		10,800,000		100%		21,600,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						500,000.00		500,000.00		100%		500,000.00				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai melaksanakan pelatihan				100	500,000		500,000		100%		500,000.00				
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				298,457,900.00		350,657,365.00		350,384,263.00		100%		648,842,163.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5,000,000.00	100	5,000,000		4,940,055		99%		9,940,055.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			29,998,600.00	100	30,000,000		29,986,559		100%		59,985,159.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			79,000,000.00	100	82,657,365		82,602,650		100%		161,602,650.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4,500,000.00	100	4,500,000		4,500,000		100%		9,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Peny. Bahan Bacaan&Perpu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4,997,300.00	100	5,000,000		5,000,000		100%		9,997,300.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			99,980,000.00	100	59,500,000		59,500,000		100%		159,480,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			74,982,000.00	100	164,000,000		163,854,999		100%		238,836,999.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA				193,666,762.00		193,999,500.00		193,592,097.00		100%		387,268,859.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4,000,000.00	100	4,000,000		4,000,000		100%		8,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Peny. Jasa Komunikasi, Sbr Daya Air, Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			32,108,762.00	100	32,249,500		32,026,097		99%		64,134,859.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			157,560,000.00	100	157,750,000		157,566,000		100%		315,126,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH				262,453,670.00		87,070,443.00		84,969,200.00		96%		347,422,870.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kebutuhan dan Pajak				100	24,308,400		22,246,800		92%		22,246,800.00				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			57,621,200.00	100	31,981,475		31,981,000		100%		89,602,200.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5,996,000.00	100	6,000,000		6,000,000		100%		11,996,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			198,836,470.00	100	24,780,568		24,741,400		100%		223,577,870.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	112,974,044.04	323,384,400.00		170,408,727.00		170,268,090.00		100%		493,652,490.00	437%		KECAMATAN RIMBO ULU	
		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN				8,000,000.00		7,999,753.00		7,997,575.00		100%		15,997,575.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah & Instansi Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8,000,000.00	100	7,999,753		7,997,575		100%		15,997,575.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				9,919,000.00		4,021,000.00		3,891,800.00		97%		13,810,800.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9,919,000.00	100	4,021,000		3,891,800		97%		13,810,800.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT				305,465,400.00		158,387,974.00		158,378,715.00		100%		463,844,115.00			KECAMATAN RIMBO ULU	

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				305,465,400.00	100	158,387,974		158,378,715	100%		463,844,115.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	1,004,156.78		105,000,000.00		175,994,077.00		175,917,941.00	100%		280,917,941.00		27976%	KECAMATAN RIMBO ULU	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					5,000,000.00		25,994,394.00		25,968,516.00	100%		30,968,516.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam				1,000,000.00	100	1,000,000		1,000,000	100%		2,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4,000,000.00	100	24,994,394		24,968,516	100%		28,968,516.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					100,000,000.00		149,999,683.00		149,949,425.00	100%		249,949,425.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				100,000,000.00	100	149,999,683		149,949,425	100%		249,949,425.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	100%	35,145,487.23		30,000,000.00		29,999,825.00		29,990,415.00	100%		59,990,415.00		171%	KECAMATAN RIMBO ULU	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketersitibatan					30,000,000.00		29,999,825.00		29,990,415.00	100%		59,990,415.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				15,000,000.00	100	15,000,000		15,000,000	100%		30,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15,000,000.00	100	14,999,825		14,990,415	100%		29,990,415.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	37,153,800.78		51,996,800.00		124,996,365.00		123,205,100.00	99%		175,201,900.00		472%	KECAMATAN RIMBO ULU	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					51,996,800.00		124,996,365.00		123,205,100.00	99%		175,201,900.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					19,996,800.00	100%	74,996,365		74,901,300	100%		94,898,100.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				32,000,000.00	100	50,000,000		48,303,800	97%		80,303,800.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	5,020,783.89		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00	100%		13,000,000.00		259%	KECAMATAN RIMBO ULU	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00	100%		13,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Kelerbitan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Kelerbitan Umum				6,500,000.00	100	6,500,000		6,500,000	100%		13,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ULU	
TOTAL							2,493,128,272.00		2,487,157,764.00		2,295,921,022.00	92%						
KECAMATAN							2,484,860,922.00		2,340,628,556.00		2,310,984,172.00						KECAMATAN RIMBO ILIR	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	1,841,306,116.77		1,684,371,922.00		1,935,118,734.00		1,905,517,974.00	98%		3,589,889,896.00		195%	KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,194,280,305.00		1,388,903,125.00		1,362,903,887.00	98%		2,557,184,192.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1,134,460,305.00	100%	1,329,083,125	98%	1,303,083,887	98%		2,437,544,192.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				59,820,000.00	100%	59,820,000	100%	59,820,000	100%		119,640,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6,960,000.00		6,960,000.00		6,960,000.00	100%		13,920,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.960.000.00	1	6.960.000.00	100%	6.960.000.00	100%		13.920.000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					40,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	100%		70,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40,000,000.00	100%	Rp 30,000,000	100.00%	Rp 30,000,000	100%		70,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					238,029,358.00		299,452,715.00		299,259,408.00	100%		537,288,766.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10,376,500.00	100%	12,518,748.00	100%	12,518,748.00	100%		22,895,248.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22,413,100.00	100%	33,252,956.00	100%	33,252,633.00	100%		55,665,733.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7,022,400.00	100%	10,918,202.00	100%	10,918,202.00	100%		17,940,602.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34,000,000.00	100%	36,232,802.00	100%	36,232,802.00	100%		70,232,802.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8,261,100.00	100%	11,578,241.00	100%	11,578,241.00	100%		19,839,341.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				5,990,000.00	100%	3,984,784.00	98%	3,900,000.00	98%		9,890,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				69,970,000.00	100%	70,966,982.00	100%	70,966,982.00	100%		140,936,982.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79,996,258.00	100%	120,000,000.00	100%	119,891,800.00	100%		199,888,058.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					135,236,457.00		128,528,666.00		126,095,651.00	96%		261,332,108.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2,000,000.00	100%	1,997,550	100%	1,990,000	100%		3,990,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				17,450,457.00	100%	18,999,100	87%	16,573,731	87%		34,024,188.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18,826,000.00	100%	10,571,920	100%	10,571,920	100%		29,397,920.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96,960,000.00	100%	96,960,096	100%	96,960,000	100%		193,920,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					69,865,802.00		81,274,228.00		80,299,028.00	99%		150,164,830.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				41,455,302.00	100%	42,961,542	98%	41,986,342	98%		83,441,644.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8,452,100.00	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%		18,452,100.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19,958,400.00	100%	28,312,686	100%	28,312,686	100%		48,271,086.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Uapahan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	2,714,133.88		679,958,200.00		174,993,708.00		174,976,181.00	100%		854,934,381.00		31499%	KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					29,959,200.00		25,000,000.00		25,000,000.00	100%		54,959,200.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				29,959,200.00	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%		54,959,200.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					649,999,000.00		149,993,708.00		149,976,181.00	100%		799,975,181.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				649,999,000.00	100%	149,993,708	100%	149,976,181	100%		799,975,181.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	3,012,470.33		71,534,000.00		158,517,202.00		158,491,105.00	100%		230,025,105.00		7636%	KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					2,000,000.00		20,990,000.00		20,990,000.00	100%		22,990,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2,000,000.00	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%		4,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					100%	18,990,000	100%	18,990,000	100%		18,990,000.00				
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					69,534,000.00		137,527,202.00		137,501,105.00	100%		207,035,105.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	

		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				69,534,000.00	100%	137,527,202	100%	137,501,105	100%		207,035,105.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	100%	3,012,470.33	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	100%		4,000,000.00		133%	KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	100%		4,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2,000,000.00	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%		4,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	3,012,470.33	42,000,000.00		64,999,712.00		64,999,712.00	100%		106,999,712.00		3552%	KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				42,000,000.00		64,999,712.00		64,999,712.00	100%		106,999,712.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			40,000,000.00	100%	64,999,712	100%	64,999,712	100%		104,999,712.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			2,000,000.00							2,000,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	100%	5,020,783.89	4,996,800.00		4,999,200.00		4,999,200.00	100%		9,996,000.00		199%	KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				4,996,800.00		4,999,200.00		4,999,200.00	100%		9,996,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
		Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			4,996,800.00	100%	4,999,200	100%	4,999,200	100%		9,996,000.00			KECAMATAN RIMBO ILIR	
TOTAL						2,484,860,922.00		2,340,628,556.00		2,310,984,172.00	99%						
KECAMATAN						1,724,211,703.00		2,443,809,062.00		2,406,687,734.28						KECAMATAN TENGAH ILIR	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	1,621,723,910.71	1,479,696,303.00		1,595,454,704.00		1,558,867,976.00	98%		3,038,564,279.00		187%	KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,083,435,559.00		1,132,915,292.00		1,103,792,860.00	97%		2,187,228,419.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menetima Gaji dan Tunjangan ASN			1,025,365,559.00		1,074,061,292.00		1,044,938,860.00	97%		2,070,304,419.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			58,070,000.00		58,854,000.00		58,854,000.00	100%		116,924,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10,080,000.00		10,080,000.00		10,080,000.00			20,160,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			10,080,000.00		10,080,000		10,080,000			20,160,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00	100%		50,000,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00	100%		50,000,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				192,152,400.00		207,609,975.00		207,577,305.00	100%		399,729,705.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10,998,000.00		5,979,225.00		5,979,225.00	100%		16,977,225.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			29,973,000.00		29,806,758.00		29,806,758.00	100%		59,779,758.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			19,415,200.00		26,884,198.00		26,884,198.00	100%		46,299,398.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,877,600.00		8,868,600.00		8,868,600.00	100%		21,746,200.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				6,295,600.00		6,295,568.00		6,295,544.00		100%		12,591,144.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				72,750,000.00		22,750,000.00		22,750,000.00		100%		95,500,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39,843,000.00		107,025,626.00		106,992,980.00		100%		146,835,980.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13,085,600.00		34,846,124.00		27,414,498.00		79%		40,500,098.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13,085,600.00		34,846,124.00		27,414,498.00		79%		40,500,098.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109,186,744.00		107,308,013.00		107,308,013.00		100%		216,494,757.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000.00		4,999,050.00		4,999,050.00		100%		9,999,050.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9,585,744.00		8,495,000.00		8,495,000.00		100%		18,090,744.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9,991,000.00		9,813,963.00		9,813,963.00		100%		19,804,963.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				84,600,000.00		84,000,000.00		84,000,000.00		100%		168,600,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61,756,000.00		62,695,300.00		62,695,300.00		100%		124,451,300.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41,707,200.00		41,699,080.00		41,699,080.00		100%		83,406,280.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1,726,300.00		2,682,720.00		2,682,720.00		100%		4,409,020.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18,322,500.00		18,313,500.00		18,313,500.00		100%		36,636,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	24,099,762.67		204,515,400.00		638,375,294.00		638,374,094.28		100%		842,889,494.28		3498%	KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					69,300,800.00		5,000,000.00		5,000,000.00		100%		74,300,800.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				69,300,800.00		5,000,000.00		5,000,000.00		100%		74,300,800.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimplokan kepada Camat					135,214,600.00		633,375,294.00		633,374,094.28		100%		768,588,694.28			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimplokan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimplokan				135,214,600.00		633,375,294.00		633,374,094.28		100%		768,588,694.28			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	20,083,135.56		20,000,000.00		107,981,829.00		107,448,429.00		100%		127,448,429.00		635%	KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					20,000,000.00		24,990,000.00		24,961,600.00		100%		44,961,600.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20,000,000.00		24,990,000.00		24,961,600.00		100%		44,961,600.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							82,991,829.00		82,486,829.00		99%		82,486,829.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara							82,991,829.00		82,486,829.00		99%		82,486,829.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	5,020,783.89		5,000,000.00		79,197,235.00		79,197,235.00		100%		84,197,235.00		1677%	KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					5,000,000.00		79,197,235.00		79,197,235.00		100%		84,197,235.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							74,997,235.00		74,997,235.00		100%		74,997,235.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	

		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5,000,000.00		4,200,000.00		4,200,000.00	100%		9,200,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	5,020,783.89		15,000,000.00		22,800,000.00		22,800,000.00	100%		37,800,000.00		753%	KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					15,000,000.00		22,800,000.00		22,800,000.00	100%		37,800,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum				15,000,000.00		22,800,000.00		22,800,000.00	100%		37,800,000.00			KECAMATAN TENGAH ILIR	
TOTAL							1,724,211,703.00		2,443,809,062.00		2,406,687,734.28	98%						
KECAMATAN							1,938,238,326.00		2,370,653,566.00		2,300,251,895.00						KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	1,937,056,090.55		1,678,237,926.00		1,999,978,764.00		1,929,665,892.00	96%		3,607,903,818.00		186%	KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,327,243,876.00		1,614,390,841.00		1,546,359,219.00	96%		2,873,603,095.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1,267,423,876.00		1,554,570,841.00		1,486,539,219.00	96%		2,753,963,095.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				59,820,000.00		59,820,000.00		59,820,000.00	100%		119,640,000.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14,160,000.00		14,160,000.00		14,160,000.00	100%		28,320,000.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				14,160,000.00		14,160,000.00		14,160,000.00	100%		28,320,000.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				20,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00	100%		29,000,000.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00	100%		29,000,000.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				145,599,200.00		178,949,917.00		178,949,616.00	100%		324,548,816.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3,000,000.00		4,485,740.00		4,485,740.00	100%		7,485,740.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				63,600,100.00		49,928,547.00		49,928,547.00	100%		113,528,647.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1,000,000.00		2,540,950.00		2,540,950.00	100%		3,540,950.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				499,100.00		1,994,680.00		1,994,680.00	100%		2,493,780.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				22,500,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00	100%		62,500,000.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55,000,000.00		80,000,000.00		79,999,699.00	100%		134,999,699.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							11,993,070.00		11,993,070.00	100%		11,993,070.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							11,993,070.00		11,993,070.00	100%		11,993,070.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang PD				126,261,050.00		128,024,936.00		127,785,187.00	100%		254,046,237.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4,000,000.00		3,995,100.00		3,995,100.00	100%		7,995,100.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25,531,051.00		27,069,740.00		26,830,087.00						KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96,729,999.00		96,960,096.00		96,960,000.00						KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				44,973,800.00		43,460,000.00		41,418,800.00	95%		86,392,600.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44,973,800.00		43,460,000.00		41,418,800.00	95%		86,392,600.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	107,639,862.82		137,669,100.00		162,841,170.00		162,821,170.00	100%		300,490,270.00		279%	KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan				-		18,990,000.00		18,990,000.00	100%		18,990,000.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						18,990,000.00		18,990,000.00		100%		18,990,000.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimplokan kepada Camat					137,669,100.00	143,851,170.00		143,831,170.00		100%		281,500,270.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimplokan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimplokan				137,669,100.00	143,851,170.00		143,831,170.00		100%		281,500,270.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	1,004,156.78		88,958,300.00	142,837,251.00		142,836,894.00		100%		231,795,194.00		23084%	KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00		100%		21,000,000.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00		100%		21,000,000.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				78,958,300.00	131,837,251.00		131,836,894.00		100%		210,795,194.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				78,958,300.00	131,837,251.00		131,836,894.00		100%		210,795,194.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan wawasan dan ketahanan Nasional	100%	1,004,156.78		33,373,000.00	64,996,381.00		64,927,939.00		100%		98,300,939.00		9789%	KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pembinaan wawasan dan ketahanan Nasional				33,373,000.00	64,996,381.00		64,927,939.00		100%		98,300,939.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia				33,373,000.00	64,996,381.00		64,927,939.00		100%		98,300,939.00			KECAMATAN SERAI SERUMPUN	
TOTAL							1,938,238,326.00	2,370,653,566.00		2,300,251,895.00		97%						
KECAMATAN							1,921,995,569.00	2,262,852,947.00		2,069,614,715.00								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	1,705,580,222.29		1,600,152,624.00	1,893,608,328.00		1,680,702,476.00		89%		3,280,855,100.00		192%	KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,219,965,696.00	1,548,542,325.00		1,336,163,643.00		86%		2,556,129,339.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1,156,666,496.00	1,488,722,325.00		1,276,343,643.00		86%		2,433,010,139.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				63,299,200.00	59,820,000.00		59,820,000.00		100%		123,119,200.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					23,720,100.00	11,280,000.00		11,280,000.00		100%		35,000,100.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				23,720,100.00	11,280,000.00		11,280,000.00		100%		35,000,100.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10,796,900.00	15,000,000.00		14,958,000.00		100%		25,754,900.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1,000,000.00										KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9,796,900.00	15,000,000.00		14,958,000.00		100%		24,754,900.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					158,894,150.00	141,054,860.00		140,981,145.00		100%		299,875,295.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisidakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisidakan				5,998,800.00	3,602,628.00		3,598,625.00		100%		9,597,425.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										#DIV/0!		-			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisidakan				13,905,050.00	26,466,618.00		26,435,720.00		100%		40,340,770.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	

		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					2,500,000.00		1,779,729.00		1,750,000.00		98%		4,250,000.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				46,491,200.00		25,000,000.00		25,000,000.00		100%		71,491,200.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89,999,100.00		84,205,885.00		84,196,800.00		100%		174,195,900.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29,991,880.00		5,234,409.00		5,234,409.00		100%		35,226,289.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9,997,800.00								9,997,800.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				19,994,080.00		5,234,409.00		5,234,409.00		100%		25,228,489.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				114,672,288.00		125,998,380.00		125,978,639.00		100%		240,650,937.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6,452,500.00		2,999,741.00		2,993,244.00		100%		9,445,744.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12,219,798.00		26,998,639.00		26,985,395.00		100%		39,205,193.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96,000,000.00		96,000,000.00		96,000,000.00		100%		192,000,000.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				42,111,600.00		46,498,354.00		46,106,640.00		99%		88,218,240.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				19,618,600.00		24,000,000.00		23,624,800.00		98%		43,243,400.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7,494,000.00		7,499,554.00		7,490,000.00		100%		14,984,000.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				14,999,000.00		14,998,800.00		14,991,840.00		100%		29,990,840.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		90,676,768.12	125,329,945.00		221,020,213.00		220,976,999.00		100%		346,306,944.00		382%	KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				29,998,100.00		146,019,782.00		145,984,794.00		100%		175,982,894.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				29,998,100.00		146,019,782.00		145,984,794.00		100%		175,982,894.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14,979,100.00		75,000,431.00		74,992,205.00		100%		89,971,305.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14,979,100.00		75,000,431.00		74,992,205.00		100%		89,971,305.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				80,352,745.00											KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				80,352,745.00								80,352,745.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%		4,011,341.21	79,879,700.00		91,002,360.00		90,921,040.00		100%		170,800,740.00		4258%	KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				44,897,700.00		-		-				44,897,700.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				44,897,700.00								44,897,700.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				34,982,000.00		91,002,360.00		90,921,040.00		100%		125,903,040.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				34,982,000.00		91,002,360.00		90,921,040.00		100%		125,903,040.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	100%		7,064,172.43	9,000,000.00		7,205,446.00		7,199,500.00		100%		16,199,500.00		229%	KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9,000,000.00		7,205,446.00		7,199,500.00		100%		16,199,500.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9,000,000.00		7,205,446.00		7,199,500.00		100%		16,199,500.00			KECAMATAN VII KOTO ILIR	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	1,002,835.30	39,642,900.00	70,016,600.00	70,014,700.00	100%	109,657,600.00	10935%	KECAMATAN VII KOTO ILIR
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				39,642,900.00	70,016,600.00	70,014,700.00	100%	109,657,600.00		KECAMATAN VII KOTO ILIR
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengantapan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengantapan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			39,642,900.00	70,016,600.00	70,014,700.00	100%	109,657,600.00		KECAMATAN VII KOTO ILIR
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	68,377,402.44	67,990,400.00	-	-		67,990,400.00	99%	KECAMATAN VII KOTO ILIR
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				67,990,400.00	-	-		67,990,400.00		KECAMATAN VII KOTO ILIR
		Fasilitasi Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlaksanaan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlaksanaan Umum			33,982,900.00				33,982,900.00		KECAMATAN VII KOTO ILIR
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			34,007,500.00				34,007,500.00		KECAMATAN VII KOTO ILIR
		TOTAL				1,921,995,569.00	2,282,852,947.00	2,069,814,715.00	91%			
		KECAMATAN				2,018,550,002.00	2,318,174,966.00	2,169,436,771.00				KECAMATAN VII KOTO
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	1,791,783,554.63	1,715,318,652.00	1,953,384,189.00	1,826,203,681.00	93%	3,541,522,333.00	198%	KECAMATAN VII KOTO
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,664,600.00	7,499,108.00	7,406,708.00	99%	14,071,308.00		KECAMATAN VII KOTO
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6,664,600.00	7,499,108.00	7,406,708.00	99%	14,071,308.00		KECAMATAN VII KOTO
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,215,819,238.00	1,417,724,468.00	1,314,844,045.00	93%	2,530,663,283.00		KECAMATAN VII KOTO
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1,149,999,238.00	1,351,904,468.00	1,249,024,045.00	92%	2,399,023,283.00		KECAMATAN VII KOTO
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			65,820,000.00	65,820,000.00	65,820,000.00				KECAMATAN VII KOTO
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				13,972,400.00	15,355,430.00	13,680,000.00	89%	27,652,400.00		KECAMATAN VII KOTO
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			13,972,400.00	15,355,430.00	13,680,000.00	89%	27,652,400.00		KECAMATAN VII KOTO
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19,995,600.00	20,000,000.00	18,395,250.00	92%	38,390,850.00		KECAMATAN VII KOTO
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			19,995,600.00	20,000,000.00	18,395,250.00	92%	38,390,850.00		KECAMATAN VII KOTO
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				229,121,950.00	276,611,415.00	263,772,665.00	95%	492,894,615.00		KECAMATAN VII KOTO
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10,998,800.00	10,880,774.00	10,880,774.00	100%	21,879,574.00		KECAMATAN VII KOTO
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20,000,000.00	34,981,130.00	34,981,122.00				KECAMATAN VII KOTO
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1,472,600.00	1,470,841.00	1,470,841.00				KECAMATAN VII KOTO
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			39,819,100.00	23,174,457.00	23,174,429.00				KECAMATAN VII KOTO
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5,931,400.00	5,444,100.00	5,444,100.00				KECAMATAN VII KOTO
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			5,999,750.00	5,660,113.00	5,660,000.00				KECAMATAN VII KOTO
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			70,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00				KECAMATAN VII KOTO
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			74,900,300.00	175,000,000.00	162,161,399.00				KECAMATAN VII KOTO
		Pengadaan Barang Milik Daerah				44,918,700.00	14,411,984.00	14,391,684.00	100%	59,310,384.00		KECAMATAN VII KOTO
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan							#DIV/0!	-		KECAMATAN VII KOTO

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14,926,400.00											KECAMATAN VII KOTO	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				29,992,300.00		14,411,984.00			14,391,684.00						KECAMATAN VII KOTO	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					122,638,864.00		141,513,418.00			137,030,823.00	97%		259,669,687.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2,000,000.00		1,997,550.00			1,997,300.00	100%		3,997,300.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				11,019,256.00		29,896,390.00			25,414,045.00						KECAMATAN VII KOTO	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				109,619,608.00		109,619,478.00			109,619,478.00						KECAMATAN VII KOTO	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62,187,300.00		60,268,366.00			56,682,506.00	94%		118,869,806.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34,284,600.00		34,227,300.00			30,848,100.00	90%		65,132,700.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2,909,800.00		2,958,306.00			2,859,706.00						KECAMATAN VII KOTO	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				14,993,400.00		13,098,060.00			12,990,000.00						KECAMATAN VII KOTO	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9,999,500.00		9,984,700.00			9,984,700.00						KECAMATAN VII KOTO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		21,654,640.92	159,745,800.00		184,945,337.00			166,615,260.00	90%		326,361,060.00		1507%	KECAMATAN VII KOTO	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					9,941,900.00		24,945,442.00			23,195,442.00	93%		33,137,342.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9,941,900.00		24,945,442.00			23,195,442.00	93%		33,137,342.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	-		9,999,975.00			7,999,975.00	80%		7,999,975.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							9,999,975.00			7,999,975.00	80%		7,999,975.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dimploahkan Kepada Camat					149,803,900.00		149,999,920.00			135,419,843.00	90%		285,223,743.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dimploahkan					149,803,900.00		149,999,920.00			135,419,843.00	90%		285,223,743.00			KECAMATAN VII KOTO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%		1,004,156.78	84,948,800.00		99,980,400.00			99,244,522.00	99%		184,193,322.00		18343%	KECAMATAN VII KOTO	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					9,996,100.00		-			-			9,996,100.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					9,996,100.00								9,996,100.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					74,952,700.00		99,980,400.00			99,244,522.00	99%		174,197,222.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					74,952,700.00		99,980,400.00			99,244,522.00	99%		174,197,222.00			KECAMATAN VII KOTO	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	100%		8,911,891.40	4,889,700.00		4,999,916.00			4,146,848.00	83%		9,036,548.00		101%	KECAMATAN VII KOTO	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum					4,889,700.00		4,999,916.00			4,146,848.00	83%		9,036,548.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					4,889,700.00								4,889,700.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							4,999,916.00			4,146,848.00	83%		4,146,848.00				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		1,004,156.78	48,647,050.00		74,865,124.00			73,226,460.00	98%		121,873,510.00		12137%	KECAMATAN VII KOTO	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					48,647,050.00		74,865,124.00			73,226,460.00	98%		121,873,510.00			KECAMATAN VII KOTO	

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik				43,942,250.00		74,865,124.00		73,226,460.00		98%		117,168,710.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4,704,800.00								4,704,800.00			KECAMATAN VII KOTO	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	1,004,156.78		5,000,000.00		-		-				5,000,000.00		498%	KECAMATAN VII KOTO	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					5,000,000.00		-		-				5,000,000.00			KECAMATAN VII KOTO	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5,000,000.00								5,000,000.00			KECAMATAN VII KOTO	
TOTAL KECAMATAN							2,018,550,002.00	1,493,548,339.00	2,318,174,966.00	1,747,302,458.00	2,169,436,771.00	1,610,257,002.00	94%						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	1,204,518,619.93		1,205,590,539.00		1,405,879,374.00		1,268,977,398.00		90%		2,474,567,937.00		205%	KECAMATAN MUARA TABIR	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10,052,000.00		7,866,681.00		7,816,681.00		99%		17,868,681.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10,052,000.00		7,866,681.00		7,816,681.00		99%		17,868,681.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					706,263,648.00		983,846,696.00		854,738,772.00		87%		1,561,002,420.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				661,317,648.00		938,900,696.00		809,792,772.00		86%		1,471,110,420.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				44,946,000.00		44,946,000.00		44,946,000.00		100%		89,892,000.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH					11,280,000.00		11,280,000.00		11,280,000.00		100%		22,560,000.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				11,280,000.00		11,280,000.00		11,280,000.00		100%		22,560,000.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					14,939,350.00		40,000,000.00		39,954,000.00		100%		54,893,350.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14,939,350.00		40,000,000.00		39,954,000.00		100%		54,893,350.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					177,045,600.00		171,973,794.00		171,839,021.00		100%		348,884,821.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4,431,800.00		4,431,355.00		4,431,355.00		100%		8,863,155.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27,571,500.00		39,696,416.00		39,696,416.00		100%		67,267,916.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5,340,000.00		1,780,000.00		1,780,000.00		100%		7,120,000.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				52,722,500.00		34,850,300.00		34,850,300.00		100%		87,572,800.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				86,980,000.00		91,215,723.00		91,080,950.00		100%		178,060,950.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					44,491,700.00								44,491,700.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21,490,800.00								21,490,800.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					23,000,900.00								23,000,900.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					102,515,883.00		114,422,163.00		107,508,584.00		94%		210,024,467.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2,000,000.00		993,600.00		993,600.00		100%		2,993,600.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3,695,883.00		16,468,467.00		10,554,888.00		64%		14,250,771.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96,820,000.00		96,960,096.00		95,960,096.00		99%		192,780,096.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					139,002,158.00		76,490,040.00		75,840,340.00		99%		214,842,498.00			KECAMATAN MUARA TABIR	

		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Dan Pajak Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				38,735,658.00		39,380,660.00			38,730,960.00		98%		77,466,618.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8,376,500.00		8,369,380.00			8,369,380.00		100%		16,745,880.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				84,570,000.00		21,420,000.00			21,420,000.00		100%		105,990,000.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7,320,000.00		7,320,000.00			7,320,000.00		100%		14,640,000.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		26,320,736.55	155,742,300.00		159,150,440.00			159,150,440.00		100%		314,892,740.00		1196%	KECAMATAN MUARA TABIR	
		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH DITINGKAT KECAMATAN					5,308,400.00		5,299,200.00			5,299,200.00		100%		10,607,600.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5,308,400.00		5,299,200.00			5,299,200.00		100%		10,607,600.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN					3,778,800.00		3,853,690.00			3,853,690.00		100%		7,632,490.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3,778,800.00		3,853,690.00			3,853,690.00		100%		7,632,490.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIUMPAHKAN KEPADA CAMAT					146,655,100.00		149,997,550.00			149,997,550.00		100%		296,652,650.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diumpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diumpahkan				146,655,100.00		149,997,550.00			149,997,550.00		100%		296,652,650.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%		41,666,832.80	96,650,000.00		98,338,275.00			98,338,275.00		100%		196,988,275.00		473%	KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					96,650,000.00		98,338,275.00			98,338,275.00		100%		196,988,275.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					98,650,000.00		98,338,275.00			98,338,275.00		100%		196,988,275.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase lingkungan yang aman yang kondusif	100%		9,298,491.76	5,230,000.00		4,280,000.00			4,280,000.00		100%		9,510,000.00		102%	KECAMATAN MUARA TABIR	
		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5,230,000.00		4,280,000.00			4,280,000.00		100%		9,510,000.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5,230,000.00		4,280,000.00			4,280,000.00		100%		9,510,000.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		14,761,104.64	24,290,500.00		76,520,889.00			76,440,889.00		100%		100,731,389.00		682%	KECAMATAN MUARA TABIR	
		PENYELENGGARAAN URUSAN PENGUSAN KEPALA DAERAH					24,290,500.00		76,520,889.00			76,440,889.00		100%		100,731,389.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					16,676,800.00		70,019,138.00			70,019,138.00		100%		86,695,938.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3,623,500.00		3,626,424.00			3,546,424.00		98%		7,169,924.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				3,990,200.00		2,875,327.00			2,875,327.00		100%		6,865,527.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%		17,241,964.33	4,045,000.00		3,133,480.00			3,070,000.00		98%		7,115,000.00		41%	KECAMATAN MUARA TABIR	
		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					4,045,000.00		3,133,480.00			3,070,000.00		98%		7,115,000.00			KECAMATAN MUARA TABIR	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4,045,000.00		3,133,480.00			3,070,000.00		98%		7,115,000.00			KECAMATAN MUARA TABIR	

TOTAL					1,493,548,339.00		1,747,302,458.00		1,610,257,002.00		92%					



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dan Daerah

3.1.1. Arah Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Nasional

Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan RAPBN tahun 2026 tema RKP yang disepakati adalah ***"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"***. Tema ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi dinamika secara Global. Semangat globalisasi yang dulunya mengedepankan kerjasama, telah bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan antar bangsa di segala bidang, eskalasi perang dagang, serta adanya ketegangan antara beberapa negara di dunia. Disrupsi rantai pasok dan kebijakan tarif agresif Amerika Serikat-Tiongkok juga menjadi salah satu pengaruh terhadap ketidakstabilan perekonomian global.

Indonesia sudah 30 tahun terjebak dalam tingkat pendapatan menengah. Pemerintah memproyeksikan bahwa Indonesia baru akan keluar dari *middle income* trap pada tahun 2038. Pada Tahun 2026, tingkat kemiskinan ditargetkan antara 6,5% - 7,5%, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan diangka 4,44% - 4,96%, rasio gini di sekitar 0,377 – 0,380 dan indeks modal manusia (yang sebelumnya indeks pembangunan manusia) ditargetkan tercapai di 0,57.

Pertumbuhan ekonomi pada 2026 dipatok pada kisaran 5,8%-6,3%. Proyeksi pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yang diperkirakan mencapai 5,3% – 5,6%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan.



Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3 – Rp.2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tercermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30– 205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain:

1. Beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi nikel ke arah baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah;
2. Penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
3. fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor Industrial Process and Production Use (IPPU) dan meningkatkan efisiensi produksi; serta



4. Penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun.

Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK.

Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi:

1. integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah;
2. promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi;
3. peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah;
4. stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah;
5. pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan;
6. optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah;
7. penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik;
8. peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta
9. peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.



Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US\$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. FaktorFaktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi:

1. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia;
2. Kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata;
3. Pengembangan atraksi dan event berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional;
4. Penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta
5. Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (Tourism 5.0).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Perekonomian Provinsi Jambi 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp322,98 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp86,7 juta. Ekonomi Jambi tahun 2024 tumbuh sebesar 4,51 persen, melambat dari tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,67 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 13,26 persen. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan



dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,31 persen; Konstruksi sebesar 9,83 persen; Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 9,64 persen, serta Jasa Perusahaan sebesar 9,53 persen. Lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah sembilan persen. Sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terkontraksi sebesar 0,87 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar berlaku tahun 2024 tidak mengalami perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 33,93 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,41 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,29 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,77 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi mencapai 70,40 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi atau *Source of Growth (SOG)* Provinsi Jambi tahun 2024 (c-to-c), kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,15 persen; diikuti kategori Konstruksi sebesar 0,75 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,60 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 0,47 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2024 dibanding triwulan III-2024 (q-to-q) tumbuh sebesar 0,89 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,29 persen dan Jasa Lainnya sebesar 8,92 persen. Kemudian lapangan usaha yang juga tumbuh adalah Konstruksi sebesar 2,78 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,44 persen; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 2,42 persen. Sementara itu terjadi kontraksi yang cukup dalam pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,35 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2024 dibanding triwulan IV-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,00 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 10,58 persen; diikuti Konstruksi sebesar 9,49 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,01 persen; Pertambangan dan Penggalian



sebesar 7,84 persen, serta Jasa Perusahaan sebesar 5,88 persen. Sementara itu, pertumbuhan dari kategori dengan kontribusi yang cukup besar, yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 2,47 persen dan 1,42 persen. Lapangan usaha lainnya yang mengalami kontraksi adalah Industri Pengolahan sebesar 2,05 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,74 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 1,67 persen; dan Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,43 persen

Mengacu pada isu strategis dan rancangan awal RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas, pemerintah Provinsi Jambi menjabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi progresif, inklusif dan berkelanjutan
2. Pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya yang merata dan berkeadilan
3. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah
4. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis
5. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Melalui lima prioritas tersebut, pemerintah Provinsi Jambi memiliki sasaran dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8-5,4%; penurunan angka kemiskinan sebesar 6,25-6,76%; tingkat pengangguran terbuka 4,2-4,4%; Indeks Gini sebesar 0,314-0,32; Indeks Modal Manusia 0,56; dan penurunan intensitas gas rumah kaca sebesar 77,12-79,29%.

Di sisi inflasi, sepanjang triwulan IV-2024, inflasi Provinsi Jambi sebesar 0,03 persen pada Oktober 2024; 0,21 persen pada November 2024; dan 0,46 persen pada Desember 2024. Kelompok pengeluaran utama penyumbang inflasi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2024 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jambi sebesar 0,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,41. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 1,24 persen dengan IHK sebesar 107,97 dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 0,16 persen dengan IHK sebesar 106,02. Inflasi y-on-y di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok



pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,49 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 2,57 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,30 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,01 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 3,77 persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,81 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,33 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 4,59 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 8,01 persen; kelompok Kesehatan sebesar 1,28 persen; dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,77 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Januari 2025, antara lain: emas perhiasan, minyak goreng, daging ayam ras, kopi bubuk, bawang merah, cabai rawit, sigaret kretek mesin (SKM), kontrak rumah, ikan nila, pempek, rekreasi, telur ayam ras, bawang putih, sepeda motor, sigaret kretek tangan (SKT), tahu mentah, baju muslim wanita, upah asisten rumah tangga, ikan lele, ikan tongkol/ikan ambu-ambu. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Januari 2025, antara lain: tarif listrik, petai, tomat, beras, jeruk, ikan nila, ketimun, jengkol, pisang, udang basah, mukena, pasta gigi, masker, tarif angkutan udara, sabun mandi cair.

Pada Januari 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,79 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,17 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,02 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,07 persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,04 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,32 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi y-on-y, yaitu: kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,08 persen, kelompok Kesehatan sebesar 0,04 persen; dan kelompok Informasi, Komunikasi,



dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen. Sementara itu, kelompok Transportasi tidak memberikan andil/sumbangan inflasi yang signifikan.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Kondisi Perekonomian Kabupaten Tebo

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Tebo, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Tebo namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tebo merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Di samping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Kerangka ekonomi daerah dibentuk dengan indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.



Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah daerah berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Tebo, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional dan memperhatikan asumsi kondisi ekonomi makro Pemerintah Provinsi Jambi maka dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Bupati/Wakil Bupati Tebo yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2026-2029 yakni **Terwujudnya Kabupaten Tebo yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera**, perlu didukung dengan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, antara lain:

1. Peningkatan mutu pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan
2. Optimalisasi penanganan stunting
3. Optimalisasi penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem menuju nol persen
4. Pemerataan perlindungan sosial yang adaptif
5. Penguatan peran keluarga dalam pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan
6. Penguatan keberdayaan lembaga keagamaan

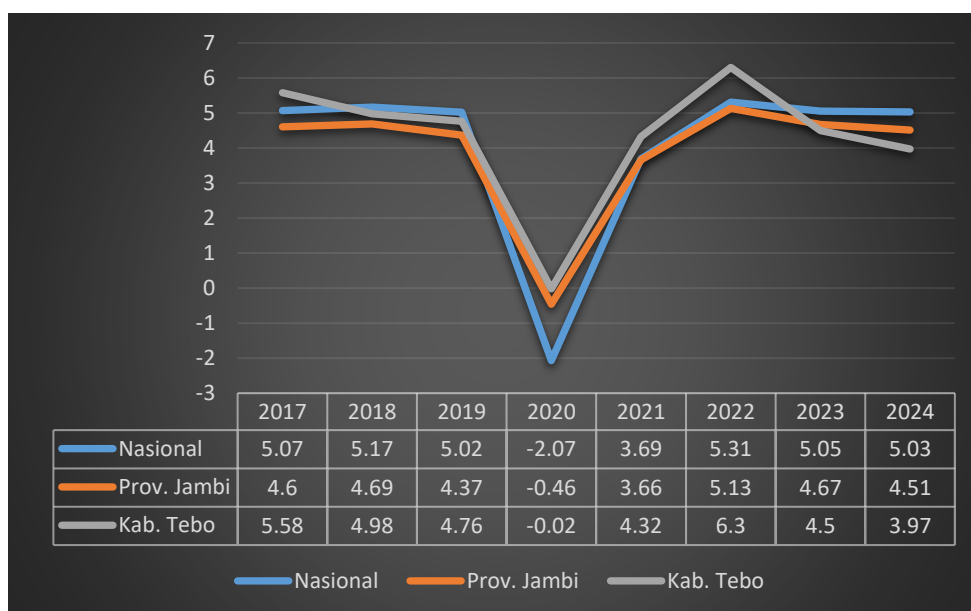
Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing. Capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Tebo hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:



a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain.

Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2025

Perekonomian Kabupaten Tebo beberapa tahun terakhir cenderung mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung melambat terutama terjadi pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama di Kabupaten Tebo. Kondisi ekonomi Kabupaten Tebo terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai -0,02%, hal ini merupakan efek dari pandemi covid-19 yang belum terkendali. Namun pada tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Tebo mulai meningkat dengan pertumbuhan positif mencapai 4,32% dan meningkat kembali di tahun 2022 mencapai 6,3%. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali melambat diangka 4,50% dan angka tersebut kembali turun pada tahun 2024 mencapai 3,97%.



Melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi pada lapangan usaha pertambangan yang dalam dua tahun berturut-turut mengalami penurunan dari 41,22% pada tahun 2022 menjadi -0,06% pada tahun 2023 dan semakin turun menjadi -19,74%. Sedangkan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tebo justru mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam dua tahun terakhir yakni dari 2,57% pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,51% di Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 sebesar 6,70%. Begitupun untuk lapangan industri pengolahan di Tahun 2024 di angka 8,67 dan perdagangan sebesar 9,59%.

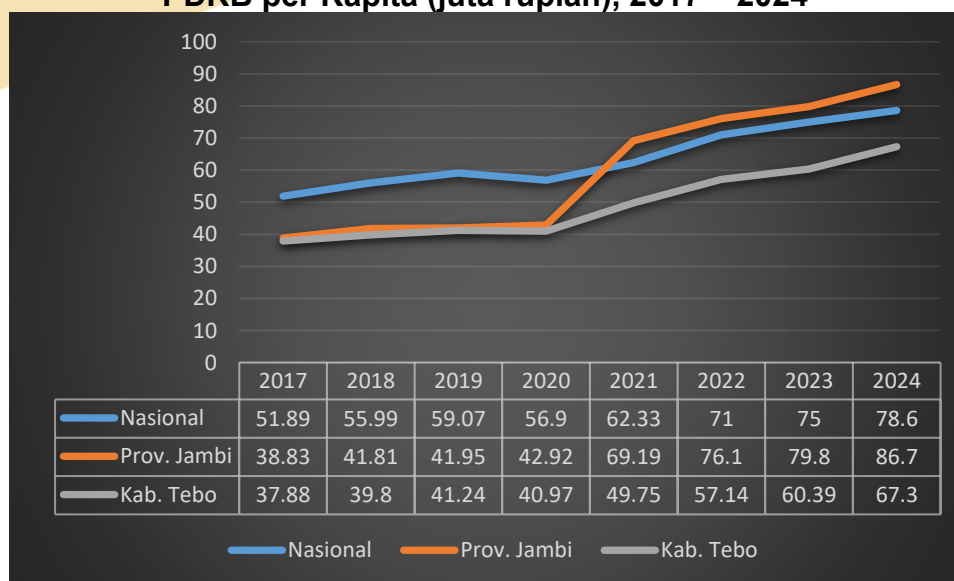
Pada tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo diprediksi dapat tumbuh sebesar 4,30% - 4,34% sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029. Tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2026 ini adalah memacu kegiatan dinas/PD untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan Indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi suatu daerah. Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tebo selama tahun 2017- 2024 tergambar pada grafik dibawah ini:



Grafik 3.2
PDRB per Kapita (juta rupiah), 2017 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2025

Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai PDRB perkapita Kabupaten Tebo dari tahun 2017 hingga tahun 2024 terus meningkat, dibandingkan dengan nilai PDRB perkapita tahun 2017 yakni dari Rp. 37,88 juta per orang pertahun menjadi sebesar Rp. 67,3 juta per orang pertahun pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun. Dengan melihat rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Tebo, pada Tahun 2025 diproyeksikan PDRB Perkapita Kabupaten Tebo berada diangka Rp67,3 juta Perkapita/tahun sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2026 sesuai dengan rancangan RPJMD Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp68,42 Juta Perkapita/Tahun.

c. Laju Inflasi

Inflasi menurut Bank Indonesia adalah meningkatnya harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Dampak dari inflasi ini salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena berkurangnya kemampuan untuk mengkonsumsi barang ataupun jasa.

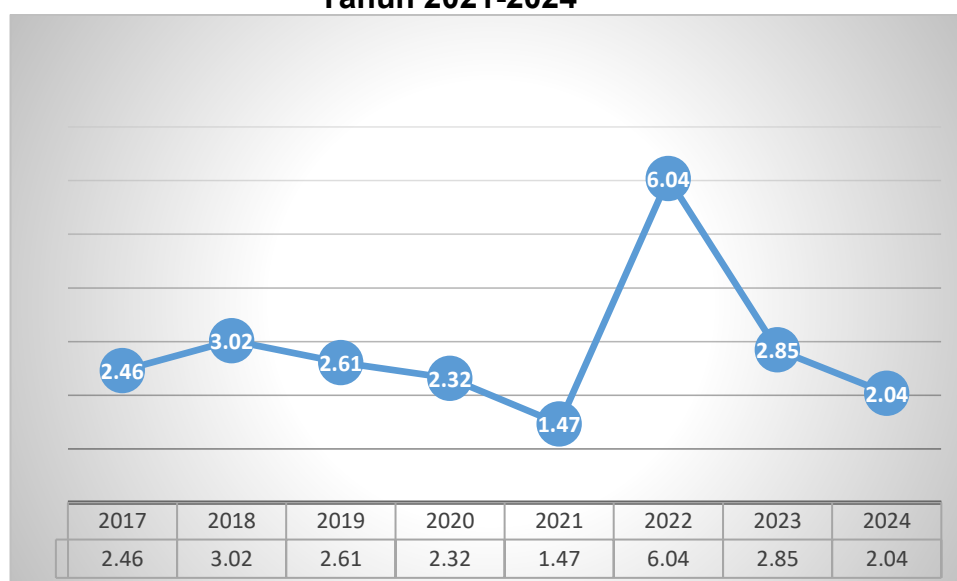
Inflasi menggambarkan fenomena kecenderungan kenaikan harga-



harga secara umum dan terus menerus dan diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil diperlukan sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fluktuasi inflasi Kabupaten Tebo tidak bisa terlepas dari fenomena fluktuasi inflasi yang secara umum terjadi di Jambi yang disebabkan oleh pasokan pangan akibat cuaca, ketergantungan pasokan dari luar Jambi dan distribusi komoditas pangan keluar Jambi.

Perkembangan dan prospek inflasi Kabupaten Tebo diambil dari pengukuran inflasi di Kota Muara Bungo, karena pengukuran inflasi oleh BPS hanya dilakukan di tiga tempat yaitu Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci. Laju inflasi Kabupaten Tebo dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik 3.3:

Grafik 3.3
Laju Inflasi Kabupaten Tebo
Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2025

Selama tahun 2017-2024, laju inflasi Kabupaten Tebo mengalami fluktuasi, inflasi tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 6.04% dan inflasi terendah dicapai pada tahun 2021 sebesar 1.47%. Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Tebo masih ringan (<10%). Hal ini masih menguntungkan karena perekonomian daerah masih tetap tumbuh yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mendorong orang lebih bergairah bekerja karena meningkatnya permintaan barang dan



meningkatnya tabungan masyarakat.

d. Investasi Daerah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh peningkatan investasi di daerah. Investasi yang ada di daerah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, politik dan perekonomian daerah. Investasi pada umumnya berasal dari investasi Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan porsi belanja publik sedangkan untuk meningkatkan investasi pihak swasta dan masyarakat perlu dilakukan peningkatan promosi serta menggali peluang – peluang investasi yang ada di daerah.

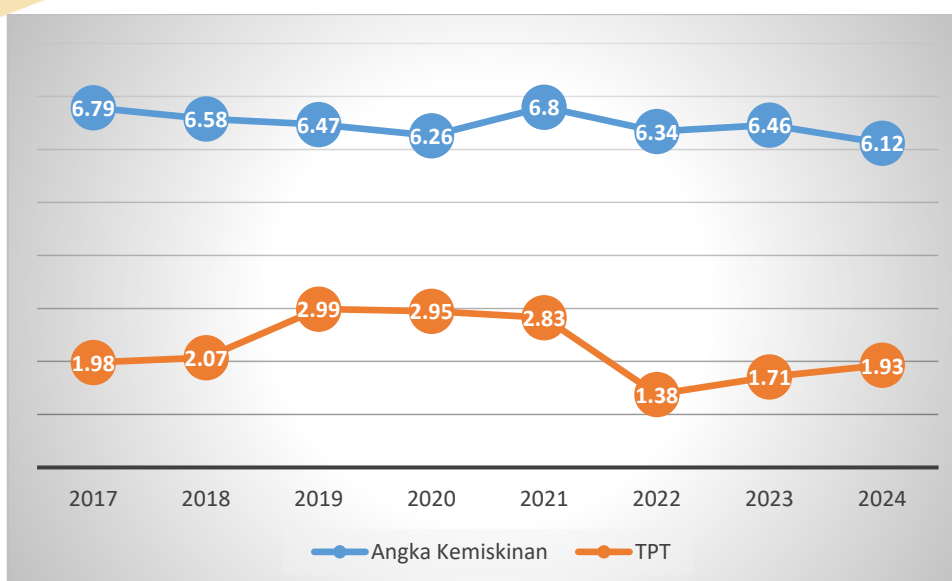
Pemerintah Kabupaten Tebo mendorong peningkatan investasi swasta pada sektor pariwisata dan pertanian untuk mempercepat berkembangnya kedua sektor utama perekonomian daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan investasi di sektor pariwisata dan pertanian, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang ramah investasi, diantaranya kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, keringanan tarif pajak/retribusi daerah.

e. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah.



Grafik 3.4
Persentase Penduduk Miskin
dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2017 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2025

Seperti terlihat pada grafik 3.4 Tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo pada tahun 2024 sebesar 6,12 %, sedangkan tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,93%. Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tebo pada tahun 2023 dipicu oleh kenaikan garis kemiskinan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, sedangkan kenaikan angka pengangguran terbuka dipicu penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten Tebo tahun 2024. Kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Tebo.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026.

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Tebo, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) mempertahankan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk. Agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus tumbuh perlu



dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Potensi Ekonomi Kabupaten Tebo yang potensial untuk dikembangkan terdiri dari sektor pertanian dan sektor pariwisata. Kabupaten Tebo memiliki berbagai jenis komoditas unggulan khususnya hasil pertanian, perkebunan dan peternakan berupa beras, karet, kelapa sawit, kedelai, pinang dan hasil industri pangan olahan makanan yang berkualitas.

Untuk mengoptimalkan kedua potensi ekonomi tersebut diatas dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Tebo, perlu mendorong pengembangan sektor Agro Industri dan agro Wisata yang berdaya saing tinggi melalui peningkatan integrasi dan keterkaitan manufaktur dengan sektor primer (hilirisasi pertanian) dan juga perlu mendorong pengembangan pariwisata sebagai pertumbuhan ekonomi potensial.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tebo serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Tebo masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan tersebut perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Pada Tahun 2026 sektor ekonomi kabupaten Tebo masih dihadapkan dengan masih relatif lemahnya keterkaitan sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya, termasuk pariwisata dan industri pengolahan. Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi sektor unggulan di dalam perekonomian Kabupaten Tebo yang diharapkan berkorelasi positif dengan sektor pariwisata. Untuk itu diperlukan sinergi dengan sektor unggulan kontribusi tinggi lainnya yaitu pariwisata, perdagangan, dan UMKMK. Industri pangan olahan berbasis pertanian yang didominasi oleh UMKMK menjadi salah satu alternatif meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga produksi dan produktivitasnya dapat ditingkatkan pada tahun 2026.



Secara umum, refleksi terhadap pembangunan Kabupaten Tebo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian yang cukup baik di satu sisi, namun di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan dan kerentanan dalam mewujudkan transformasi pembangunan serta mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Di tengah capaian kinerja yang positif, Kabupaten Tebo masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kinerja kesejahteraan yang baik saat ini masih sangat bergantung pada sektor perkebunan sawit, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan tuntutan standar keberlanjutan global.

Memperhatikan kondisi di atas, maka pada tahun 2026, diperkirakan perekonomian Kabupaten Tebo perlu upaya optimal untuk menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir serta masih adanya ketidakpastian dan volatilitas perekonomian nasional. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

- a. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- b. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan terutama dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) agrobisnis dan agrowisata sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi lebih *pro poor* dan *pro job*, sekaligus *pro environment*.
- c. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-



- undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- d. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan (sustainable). Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
 - e. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
 - f. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL serta kelengkapan fasilitas *agro complex* secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Tebo, di samping menciptakan lapangan kerja.
 - g. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Tebo.
 - h. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Tebo sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
 - i. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
 - j. Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.



b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026

Kondisi ekonomi global masih tidak pasti dan sulit untuk diprediksi. Untuk itu pada tahun 2026 perlu bersikap hati-hati dan waspada tanpa mengurangi optimisme. Dalam melakukan perumusan kebijakan, sinergi fiskal dan moneter perlu terus diperkuat agar kebijakan ekonomi nasional yang dihasilkan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Dalam menjaga ketahanan perekonomian Indonesia yang selama ini telah dicapai, perlu sinergi dan inovasi sebagai kunci untuk menghadapi gejolak global. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi perlu terus diperkuat dengan tetap mewaspadaai rambatan dari ketidakpastian global, termasuk risiko *stagflasi* (perlambatan ekonomi dan inflasi tinggi) dan bahkan *resflasi* (resesi ekonomi dan inflasi tinggi).

Hal ini mengingat risiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi politik dan ekonomi terus berlanjut, serta pengetatan kebijakan moneter memerlukan waktu yang lebih lama untuk mampu menurunkan inflasi di masing-masing negara.

Kinerja APBN menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi dalam tiga tahun ini, dan upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus berupaya menjaga APBN dan keuangan negara sebagai instrumen yang kredibel, efektif dan tentu sehat dan *sustainable* demi mewujudkan Indonesia terus maju. Kebijakan pelaksanaan RKP dan APBN 2026 untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mengurai isu-isu strategis, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tahun 2026 diperkirakan akan menjadi momentum untuk melanjutkan transformasi ekonomi, melalui hilirisasi dan Danantara, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah dan koperasi desa merah putih, serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.



Prioritas di bidang ekonomi pada RKPD Provinsi Jambi pada Tahun 2026 diarahkan pada Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan dengan strategi/arah kebijakan:

1. Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon
2. Pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif dan koperasi sektor produksi
3. Meningkatkan investasi daerah
4. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan
5. Pengembangan ekosistem pekerjaan hijau serta pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau
6. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan

Sedangkan prioritas pembangunan bidang ekonomi pada RKPD kabupaten Tebo Tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dengan strategi/ arah kebijakan :

1. Peningkatan iklim investasi daerah ekonomi hijau
2. Penguatan ekosistem industrialisasi sektor pertanian
3. Peningkatan kualitas produk dan pelaku wirausaha /UMKM /ekonomi kreatif /koperasi
4. Diversifikasi akses pekerjaan layak dan kompetensi tenaga kerja
5. Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan

Secara umum, kerangka ekonomi makro Tahun 2026 Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo, tersaji pada tabel 3.5 di bawah ini :

Grafik 3.5
Kerangka Ekonomi Makro Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah
Kabupaten Tebo Tahun 2026

KERANGKA EKONOMI MAKRO	NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KABUPATEN TEBO
Laju pertumbuhan Ekonomi	5,8 % - 6,30 %	4,8% – 5,4 %	4,30% – 4,34 %
Tingkat Kemiskinan	6,5 % - 7,5 %	6,25% - 6,76 %	5,96% – 6,09 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	,44% – 4,96 %	4,2 % - -4,4%	2.35 %
Gini Ratio	0,377-0,380	0,314 – 0,32	0.254



KERANGKA EKONOMI MAKRO	NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KABUPATEN TEBO
Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	0,57	0,56	74.32
Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK)	37,14	77,12% – 79,29%	-

Sumber : Ranwal RKP 2026, Ranwal RKPD Provinsi Jambi 2026, RPJMD Kabupaten Tebo 2025-2029 (diolah)

3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Oleh karena itu harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tepat.

Kebijakan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat memberikan manfaat maksimal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Adapun belanja untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dan alokasi belanja untuk Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.



Sebagaimana dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur (klasifikasi) belanja mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana struktur belanja saat ini terdiri dari:

1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal, meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Kebijakan TKD pada RKP tahun 2026 secara umum diarahkan untuk :

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*;
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan;
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah Transfer ke Daerah yang terdiri atas :

1) Dana Bagi Hasil (DBH) dengan arah kebijakan:

- a) Memperkuat sinkronisasi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan pendapatan negara yang dibagihasilkan
- b) Mendorong perhitungan alokasi DBH yang transparan, akurat dan akuntabel;
- c) Meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim;
- d) Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi;



- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) dengan arah kebijakan:
 - a) Memperbaiki formula penghitungan alokasi DAU untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelayanan publik termasuk penerapan DAU yang ditentukan penggunaannya;
 - b) Mendorong peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan karakteristik daerah;
 - c) Penguatan sinergi penggunaan DAU dengan prioritas nasional
 - d) Menjaga pemenuhan layanan dasar kawasan afirmasi;
 - e) Perbaikan tata kelola DAU terutama dalam aspek perencanaan, penggunaan, dan pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan arah kebijakan:
 - a) Mengarahkan pemanfaatan DAK untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung operasionalisasi layanan publik,
 - b) Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta matching program, dan
 - c) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan.
- 4) Hibah Daerah. Tujuan alokasi Hibah kepada Daerah difokuskan untuk :
 - a) Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi);
 - b) Penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani;
 - c) Peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban. Evaluasi hibah ke daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri (rupiah murni) dan pengalihan/pengintegrasian dengan DAK Fisik.
- 5) Arah Kebijakan Dana Desa antara lain :



- a) Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa, melalui:
- Mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - Memberikan dukungan pada program ketahanan pangan/lumbung pangan dan hewani mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan perikanan dan energi.
 - Membangun dan memelihara infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (gotong royong) meliputi akses air bersih dan sanitasi, revitalisasi rumah tidak layak huni, peningkatan ketahanan iklim, serta mitigasi risiko dan penanggulangan bencana;
 - Membangun infrastruktur digital dan teknologi di desa;
 - Mendukung operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen, dan/atau
 - Melaksanakan program prioritas desa lainnya.
- b) Menambah kriteria alokasi afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana.
- c) Memberikan dukungan dalam pembentukan dan/atau operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih, serta dukungan insentif kepada desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- d) Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka prevalensi stunting, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit;
- e) Operasional pemerintahan desa, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial;
- f) Dukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan fokus permodalan BUMDES; pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDES/BUMDES Bersama, dan UMKM; akses perbankan masyarakat desa; akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa; perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui peningkatan



kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDES/BUMDES Bersama; diversifikasi kegiatan ekonomi desa produktif, meliputi industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya; (vii) peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDES dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); peningkatan kerja sama antardesa, termasuk penetapan dan penegasan batas wilayah antardesa untuk meningkatkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kondusivitas iklim usaha di desa.

- g) Dukungan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui program padat karya tunai desa, antara lain dalam penyediaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala desa; sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); akses dan moda transportasi desa; pemanfaatan energi baru terbarukan berskala desa; penyediaan fasilitas pendidikan; daur ulang persampahan dengan prinsip 3R dan ekonomi sirkular; serta pemeliharaan lingkungan dan pembangunan prasarana lainnya dalam rangka mitigasi, adaptasi, dan penguatan ketahanan bencana.
- 6) Arah Kebijakan Dana Insentif Fiskal antara lain :
 - a) Mengalokasikan Dana Insentif Fiskal berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya, kinerja pemerintah daerah tahun berjalan, dan/atau kinerja spesifik pemerintah daerah;
 - b) Mempertajam indikator penilaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan pemerintah, di antaranya peningkatan ketahanan pangan dan/atau pengelolaan sampah;
 - c) Menggunakan indikator penilaian kinerja spesifik pemerintah daerah yang berkinerja baik sesuai prioritas nasional;
 - d) Mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas penggunaan Dana Insentif Fiskal.

Guna mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah maka dilakukan analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh



gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Hal ini, secara bertahap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian dalam pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Pada Tahun 2026, berdasarkan rancangan Dana Transfer Keuangan Daerah yang disampaikan oleh pemerintah ke daerah, pendapatan Kabupaten Tebo berkontraksi secara signifikan sehingga pendapatan diproyeksikan sebesar Rp. **935.238.604.895,61** yang terdiri dari pendapatan transfer yang masih menjadi sumber pendanaan daerah utama sebesar **Rp816.996.721.553,-** (87,36%), Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp118.241.883,34** (12,64%). Penurunan proyeksi pendapatan Tahun 2026 bila dibandingkan dengan Tahun 2025 sebesar Rp305.361.182.578,40 atau sebesar 25 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tebo
Tahun 2020 s.d tahun 2026 (dalam juta)

No.	Uraian	Realisasi					Target	Proyeksi
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.00	PENDAPATAN	1.046.219,76	1.121.513,62	1.146.703,97	1.213.289,13	1.254.351,22	1.240.599,79	935.238,60
1.10	PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.125,47	92.906,03	82.967,50	91.814,76	97.195,00	117.565,90	118.241,88
0.04	Pendapatan Pajak Daerah	17.649,50	22.539,89	19.009,50	24.324,47	25.880,62	43.876,57	44.921,35
0.04	Pendapatan Retribusi Daerah	4.469,00	2.830,77	3.868,00	4.383,58	52.329,71	2.232,12	40.130,43
0.04	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000,00	8.777,30	8.500,00	11.139,65	11.575,08	11.000,00	11.000,00
0.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.006,97	58.758,07	51.590,00	51.967,07	7.409,58	60.457,19	22.190,09
1.20	PENDAPATAN TRANSFER	927.569,09	1.017.377,60	1.022.211,27	1.107.752,19	1.132.623,87	1.123.033,88	816.996,72
0.04	Transfer Pemerintah Pusat	857.100,84	950.568,70	969.727,30	1.018.118,02	1.065.328,46	1.050.462,35	774.287,77
0.04	Transfer Antar Daerah	70.468,25	66.808,89	52.483,96	89.634,16	67.294,30	72.571,53	42.708,96
1.30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	41.525,20	11.230,00	41.525,20	13.722,18	24.533,45-	-	-
0.04	Pendapatan Hibah	41.525,20	11.230,00	41.525,20	13.722,18	24.533,45	-	-



Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan berbagai strategi yaitu:

- a. Peningkatan PAD
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi
- c. Pemutakhiran data baik PAD maupun Dana Perimbangan
- d. Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Warga Sadar Pajak
- e. Koordinasi Lintas Instansi

Berkenaan dengan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Oleh karena itu kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Perbaikan manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah berupa peningkatan kualitas SDM maupun restrukturisasi organisasi pengelola pendapatan di pemerintah daerah.
- b. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
- e. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- f. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.



- g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- h. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada.
- i. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan.
- j. Menerbitkan Perda dengan persetujuan DPRD, yang lebih fokus kepada mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada, sehingga ada dasar hukumnya.
- k. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
- l. Melakukan pengamanan Perda dan penegakan sanksi hukum melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- m. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan.
- n. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
- o. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
- p. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya.
- q. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.



- r. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
- s. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.

Disamping intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Usaha-usaha ekstensifikasi yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
2. Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan menjangkau wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata.
3. Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam menetapkan target pajak dan retribusi daerah.
4. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi misi pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Pengelolaan belanja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisien). Keluaran dari belanja seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi) selain itu pengelolaan belanja harus memiliki administrasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang-



undangan yang berlaku (akuntabilitas). Arah pengelolaan belanja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur yang baik dan merata yang dapat menjangkau seluruh daerah baik berupa infrastruktur transportasi berupa jalan dan jembatan ataupun energi. Selain itu, yang menjadi prioritas kegiatan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta program strategis lainnya.

3. Tolak Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai dengan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil dari setiap kegiatan. Optimalisasi belanja langsung diupayakan mendukung mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat.

4. Transparansi dan akuntabel

Setiap belanja harus dapat dipertanggungjawabkan menyangkut aspek administrasi, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Adapun belanja untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dan alokasi belanja untuk Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.



Sebagaimana dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur (klasifikasi) belanja mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana struktur belanja saat ini terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial.
- 2) Belanja Modal, meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Guna mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah dilakukanlah analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung



- jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (Specific/fokus, Measurable/terukur, Acceptable/dapat diterima, Realistic/dapat dicapai, Timebound/memiliki kerangka waktu yang jelas) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
 - e. Dana Alokasi Khusus lebih difokuskan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- 1) Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Daerah, baik tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan umum sesuai dengan petunjuk teknis. Pembayaran gaji ke-13 dan 14, serta pembayaran tambahan penghasilan (TPP).
- 2) Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah 12,5 % terdiri dari *accres* 2,5 persen dan 10 persen untuk mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, dan mutasi, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Alokasi dana untuk JKK dan JKN baik untuk ASN maupun Non ASN dan BPJS Kesehatan
- 4) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan



penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang/Jasa

Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri;

Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekuensinya;

Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun.

c. Belanja Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun jangka panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran. Untuk Tahun Anggaran 2026, alokasi belanja bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada pihak ketiga.

d. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan harga barang/jasa dengan daya beli masyarakat tertentu pada saat-saat tertentu sesuai ketentuan peraturan.

e. Belanja Hibah



- 1) Dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah (seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya/perencanaannya.
 - 2) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - 3) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus (ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
 - 4) Mengacu kepada Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan/penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - 2) Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan lembaga non pemerintahan;
 - 3) Pemberian bantuan pada lembaga non pemerintahan dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada lembaga non pemerintahan yang sama dan jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - 4) lembaga non pemerintahan penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tebo.



- 5) Mengacu kepada Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. Belanja Modal

- 1) Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/Perangkat Daerah, dengan kriteria antara lain sebagai berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- 2) Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

C. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya.

D. Belanja Transfer

- a. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /kota dan Pemerintah Desa.

Pemenuhan kewajiban bagi hasil PDRD kepada desa sebesar 5 % dari target penerimaan PDRD.

- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa.

Pemenuhan kewajiban Alokasi Dana Desa Minimal 10 % dari Dana Perimbangan dikurangi DAK

Guna membiayai implementasi rencana pembangunan daerah tahun 2026, maka proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp955.246,38 (dalam juta) .

Secara besaran juta realisasi belanja daerah serta rincian belanja Kabupaten Tebo tahun 2018-2023 serta target dan proyeksi Belanja Kabupaten Tebo Tahun 2025-2026 (PP 12 Tahun 2019) dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Kabupaten Tebo
Tahun 2018 s.d tahun 2026 PP 12 tahun 2019 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI							TARGET 2025	PROYEKSI 2026
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
2	BELANJA	1,046,282.91	1,119,835.57	1,021,783.33	1,099,521.52	1,317,367.46	1,224,015.15	1,247,505.78	1,279,880.36	955.246,38
2.1	BELANJA OPERASI	618,275.71	665,142.86	671,389.05	703,376.84	701,614.58	792,011.13	827,161.50	838,526.57	
02.01.01	Belanja Pegawai	378,075.17	396,714.73	381,775.56	394,808.80	398,756.89	379,921.21	436,663.06	428,543.72	
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	228,158.13	257,079.11	276,394.79	265,573.44	260,261.98	373,699.63	342,109.72	340,696.46	
02.01.02	Belanja Bunga	-	-	6,317.60	-	-	-	7,391.88	6,009.42	-
02.01.04	Belanja Subsidi	4,737.20	4,309.24	6,901.10	1,070.51	1,070.51	8,616.51	1,070.11	1,200.00	
02.01.05	Belanja Hibah	7,305.20	7,039.78	-	41,924.08	41,525.20	1,069.50	39,926.71	62,076.96	
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	28,704.27			-
02.01.07	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	-			
2.2	BELANJA MODAL	258,990.83	269,093.69	139,855.99	212,615.08	449,611.38	242,656.27		227,927.24	
02.02.01	Belanja Tanah	128.28	409.63						115.94	-
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	30,787.20	32,462.72	52,344.17	26,796.05	56,664.89	31,585.36	41,686.65	35,489.23	
02.02.03	Belanja Bangunan	26,731.95	36,980.55	35,739.13	57,477.96	121,547.09	59,229.09	54,574.61	54,785.80	



No	Uraian	REALISASI							TARGET 2025	PROYEKSI 2026
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	dan Gedung									
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	198,896.77	189,764.61	44,486.62	127,854.88	270,371.28	145,617.17	121,358.09	136,820.80	
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,446.63	9,476.19	7,286.07	486.19	1,028.13	6. 224.65	6,108.32	715.45	
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	591,93		-
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1,593.79	1,016.01	31,687.80	2,722.88	2,722.88	-	509.62-	7,000.00	5,000.00
02.03.01	Belanja Tak Terduga	1,593.79	1,016.01	31,687.80	2,722.88	2,722.88		509.62-	7,000.00	5,000.00
2.4	BELANJA TRANSFER	167,422.59	184,583.01	178,850.48	180,806.72	163,418.61	189,347.75	195,515.03	206,426.54	
02.04.01	Belanja Transfer Bagi Hasil	2,239.12	2,063.96	2,214.30	2,202.35	2,230.95	2,571.29	2,874.14	7,537.58	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1,751.26	1,627.97	1,766.95	1,763.75	1,781.39	2,110.49	2,434.63		
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	487.86	436.00	447.35	438.60	449.56	460.80	439.51		
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-		-	-
02.04.02	Belanja Transfer	165,183.47	182,519.05	176,636.18	178,604.37	161,187.66	186,347.75	192,640.88	198,888.97	



No	Uraian	REALISASI							TARGET 2025	PROYEKSI 2026
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Bantuan Keuangan									
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-	192,640.88	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-		-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	164,139.53	181,482.96	175,615.82	178,604.37	161,187.66	186,347.75			
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,043.94	1,036.09	1,020.37	-	-	-		-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	53,613.49	37,446.77	63,818.62	62,756.40	(170,663.49)	(6,089.30)	6,845.43	(39,280.58)	



3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2026 dilakukan diantaranya dengan mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja di tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk membayar cicilan pokok hutang. Pada tahun 2026 diperkirakan penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp40.000,00 (dalam juta) sedangkan hutang pokok diperkirakan sebesar Rp19.992,22. Rincian pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3
Realisasi, Target, dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tebo
Tahun 2018 s.d Tahun 2026 (dalam juta)

NO	URAIAN	REALISASI							TARGET	PROYEKSI
		2018	2019	2020	2025	2022	2023	2024	2025	2026
3	PEMBIAYAAN	18.211,75	35.153,88	61.097,72	120.416,34	170.663,49	91.535,87	60.818,48	39.280,58	20.007,77
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.168,03	71.825,24	72.598,32	124.916,34	190.000,00	112.862,07	80.810,71	59.272,80	40.000,00
03.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	48.168,03	71.825,24	72.598,32	124.916,34	40.000,00	112.862,07	80.810,71	59.272,80	40.000,00
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-
03.01.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	29.956,29	36.671,36	11.500,60	4.500,00	19.336,51	21.326,21	19.992,22	19.992,22	19.992,22
03.02.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	23.719,54	22.671,36	-	-	14.836,51	18.326,21	19.992,22	19.992,22	19.992,22
03.02.02	Penyertaan modal daerah;	6.236,75	14.000,00	11.500,60	4.500,00	4.500,00	3.000,00	-	-	-
03.02.03	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	18.211,75	35.153,88	61.097,72	120.416,34	170.663,49	91.535,87	60.818,48	39.280,58	20.007,77



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, terintegrasi, dan konsisten terhadap pencapaian sasaran pembangunan serta mengikat, dalam upaya tercapainya tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah yang berdampak pada pembangunan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2026 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target dan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Tebo yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Tahun 2026 berpedoman dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam 8 prioritas pembangunan nasional.
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 guna tercapainya visi dan misi Gubernur Jambi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026.
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025 – 2029 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD Tahun 2026.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tebo pada penyusunan RKPD Tahun 2026.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan



pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2026. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan dan sasaran Pembangunan disusun dengan merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun 2024 dan tahun berjalan 2025, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2026.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tujuan pembangunan nasional secara khusus telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, sebagai penjabaran pelaksanaan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. ini menjadi dokumen jangka menengah pertama dalam mencapai Indonesia Emas 2045 yang difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, RKP 2026 diharapkan menjawab perubahan



global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya. Sekaligus menjadi *window opportunity* bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2026 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Pada Tahun 2026, untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,80-6,30 persen, GNI percapita sebesar (US\$) 5.870, Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 37,14 persen, dan indeks Kualitas Lingkungan Hidup di angka 76,67. Untuk penurunan tingkat kemiskinan target yang ingin dicapai yaitu tingkat kemiskinan diangka 6,5-7,5 persen, Rasio Gini di angka 0,377-0,380, tingkat pengangguran sebesar 4,44-4,96 persen dan kemiskinan ekstrem di angka 0,5-0,0 persen, sedangkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas ditetapkan target Indeks Modal Manusia (IMM) di angka 0,57. Sasaran pembangunan RKP tahun 2026 ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel.4.1.

**Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2026 yang menjadi Acuan
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Indikator	f
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,30
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44-4,96%
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5%
Gini Ratio (indeks)	0,377–0,380
Indeks Modal Manusia	0,57
Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (%)	37,14



Indikator	f
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,67
GNI Percapita (US\$)	5,870
Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0-0,50

Sumber: Rancangan RKP 2026, Kementerian PPN/Bappenas, 2025

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025

RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan RKPD tahun kedua RPJMD periode 2025-2029 setelah ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi untuk periode yang sama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (3) bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah dan keterkaitan antara visi dan program pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 berpedoman pada Visi dan Misi pembangunan pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan yaitu:

“Mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien,**
- 2. Memantapkan Daya Saing Daerah dan produktivitas Bidang pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata,**



3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia,

Pada dasarnya tujuan Pembangunan adalah menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Oleh karena itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta stakeholders harus bersinergi dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran, terlaksananya misi dan tercapainya visi. Pada tahun 2026, Provinsi Jambi menetapkan sasaran pembangunan yang akan dicapai, sebagaimana pada tabel 4.2 berikut :

Tabel.4.2.
Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang akan dicapai pada Tahun 2026

Indikator Makro	Target 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0 – 5,4 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2-4,4 %
Tingkat Kemiskinan (%)	5,34 – 6,34 %
Gini Ratio (indeks)	0,296 – 0,301
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,57
Persentase Penurunan Intensitas GRK	77,12 – 80,76%

Sumber: RKPD Provinsi Jambi, 2025

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tebo

Untuk menjamin keselarasan dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah nasional maupun daerah, maka perumusan sasaran dan prioritas dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD. Kabupaten Tebo menggunakan dokumen RPJMD sebagai acuan bagi OPD dalam Menyusun Renstra dan RKPD selama periode 2025 – 2029. Penyusunan tujuan dan sasaran pada RKPD Kabupaten Tebo tahun 2026 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target dan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Tebo yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tebo



Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 – 2029 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah **“Terwujudnya Kabupaten Tebo yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera”** yang diturunkan dari visi RPJPD Kabupaten Tebo 2025-2045. Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Tebo sebagai berikut:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik.
4. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun 2024 dan tahun berjalan 2025, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel.4.3.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Indikator Sasaran RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026

Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN	SDM Tebo yang cerdas dan sehat		IPM	74,32
		Meningkatnya akses pendidikan yang	Rerata Nilai Asessmen Nasional	62,62



Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026
SEJAHTERA Misi 1 Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan Misi 2 Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik Misi 4 Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Misi 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	berkualitas		
		Derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat	UHH	74,21
			Tingkat kemiskinan	5,96-6,09
			LPE	4,30-4,34
			Indeks Gini	0,254
		Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian	4,69
			Indeks Desa	0,7549
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,35
		Dukungan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	45,85
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana	IKLH	73,34
			Indeks Risiko Bencana	131,19
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	71,29
		Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berberbasis transformasi digital	Nilai SAKIP	68,19
			Indeks Pelayanan Publik	2,94
			MCSP KPK	82,95
			Indeks SPBE/ Indeks Pemdi*	2,63
		Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	IPKD	79,1
			Persentase peningkatan PAD	3,4-5

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2025



Tabel.4.4.
Hubungan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan
RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan	• Peningkatan mutu layanan pendidikan. • Peningkatan mutu layanan kesehatan. • Peningkatan kesetaraan gender, inklusi sosial dan kualitas keluarga. • Peningkatan harmoni sosial.	• Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas • pemerataan dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah • Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi • Pemerataan perlindungan sosial yang adaptif, diantaranya melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan • Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas • Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan • Peningkatan akses penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah • Penguatan sekolah terbuka dan pesantren • Penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan suku anak dalam



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal	• Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor agro. • Peningkatan daya tarik pariwisata berbasis potensi daerah. • Penguatan iklim investasi dan stabilitas perekonomian daerah. • Penguatan keberdayaan usaha mikro dan kecil, serta koperasi. • Pengembangan perekonomian berbasis kawasan.	• mengembangkan kawasan agroindustri untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pusat agroindustri • mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan • Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, khususnya pada komoditas karet dan sawit • Penguatan integrasi perkebunan sawit terhadap peternakan • Penguatan lembaga kemitraan (seperti koperasi) yang inklusif • Penguatan skema kemitraan yang adil dan transparan, termasuk penataan pengelolaan hulu-hilir antara petani swadaya dan PKS • meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk perkebunan unggulan sebagai satu kesatuan sistem • mengembangkan sarana dan prasarana produksi hasil perkebunan ke pusat-pusat pemasaran sampai terbuka akses ke pasar regional dan nasional • meningkatkan pemberdayaan koperasi • Peningkatan iklim investasi daerah berbasis ekonomi hijau • Pengembangan Usaha Kecil, Mikro, Menengah (UMKM) dan Industri Kreatif • mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan • pemberdayaan industri kecil dan <i>home industry</i> melalui pengolahan hasil pertanian dan perkebunan • Pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis keunggulan wilayah • Penguatan keberdayaan



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat desa • Peningkatan kompetensi (bersertifikat) petani karet dan sawit berbasis pertanian berkelanjutan • Optimalisasi pengelolaan dampak tambang dan perkebunan sawit melalui pemanfaatan DBH, CSR, maupun kompensasi dalam bentuk lainnya • Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif • Memperkuat daya tarik wisata budaya dengan perwujudan nilai-nilai adat • Meningkatkan pelestarian kuliner lokal dan kuliner tradisi sebagai tambahan daya tarik pengalaman wisata. • City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism • Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha • mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri, pelayanan pariwisata dan ekonomi kreatif • Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan MHA suku anak dalam
Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik	• Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas. • Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung akselerasi perekonomian.	• Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa • Dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Muarabulian-Muaratebo-Muarabungo.



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian • meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata dan industri • Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah • Percepatan pemerataan dan peningkatan akses sanitasi
Misi 4 Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	• Peningkatan kelestarian lingkungan hidup • Pembangunan yang berketahanan iklim dan tangguh bencana. • Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif. • Peningkatan pendapatan berbasis kompetensi angkatan kerja dan keberdayaan masyarakat. • Penguatan kapasitas tata kelola desa dan pemberdayaan ekonomi desa. • Peningkatan pemajuan kebudayaan.	• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kelestarian lingkungan berbasis daerah tangkapan sungai dan danau • mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan berbasis hulu-hilir guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih • Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan • Intensifikasi pendidikan pengurangan sampah • Mengembangkan kelembagaan pengelolaan sampah non formal • Penguatan aturan baku mutu dan debit air buangan yang lebih ketat • peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari DAS Batanghari • pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam • Meningkatkan pengawasan



Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		pelaksanaan pertambangan • Mendorong rehabilitasi lahan bekas tambang • Revitalisasi kearifan lokal dalam pengendalian alih fungsi lahan • Mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang valid secara terbuka kepada Masyarakat • Memperkuat kapasitas masyarakat tangguh bencana • Optimalisasi infrastruktur pengendalian bencana • Penguatan keberdayaan lembaga keagamaan • Pelestarian dan penguatan corak kebudayaan daerah
Misi 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	• Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan adaptif transformasi digital. • Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. • Peningkatan profesionalitas dan integritas birokrasi.	• Penguatan arsitektur sistem pemerintahan berbasis digital • Penguatan sistem akuntabilitas • Penguatan sistem merit pendukung birokrasi profesional dan berintegritas • Penguatan Kapasitas aparatur • penyelarasan pembangunan Desa dan Supra-Desa • Penguatan ekosistem inovasi • Penguatan kebijakan keamanan berbasis komunitas

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2025

Merujuk kepada evaluasi pembangunan tahun 2024 dan tahun berjalan 2025, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 juga mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tebo 2025-2029.

Sasaran Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo yang akan dicapai pada Tahun 2026 dengan mempedomani Arah Target Pembangunan Kabupaten Tebo sebagaimana tabel 4.5 berikut :



Tabel.4.5.
Sasaran Pembangunan Kabupaten Tebo yang akan dicapai pada tahun 2026

Indikator RPD	Skenario 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,30-4,34 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,35 %
Tingkat Kemiskinan (%)	5,96-6,09 %
Gini Ratio (indeks)	0,254
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,32

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2025

4.2 Prioritas Pembangunan

4.2.2 Prioritas Nasional

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebagai perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2026 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah 2025-2029. Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2026 menjadi sangat strategis. Dengan kebijakan pemerintah yang berfokus pada swasembada pangan dan energi, teknologi, peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka RKP tahun 2026 mengangkat tema pembangunan yaitu **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**

Tema pembangunan RKP tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari tema RPJMN tahun 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Tema RKP ini berfokus pada swasembada pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif, yang diwujudkan melalui prioritas pembangunan yang meliputi:



Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional. Prioritas kebijakan pembangunan yang tercakup dalam tema RKP 2026 meliputi:

1. Swasembada pangan, energi dan air melalui Optimalisasi BULOG, Pelaksanaan food estate, peningkatan bauran athanol dan biodiesel, energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir dan pengelolaan sampah.
2. Pendidikan dan Kesehatan melalui Ekosistem Makan Bergizi Gratis, percepatan renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, digitalisasi Pendidikan, cek Kesehatan dan percepatan rumah sakit daerah.
3. Deregulasi dan kepastian hukum melalui Reformasi Birokrasi, Kemudahan berbisnis dan ketertarikan investasi.
4. Adopsi teknologi dan inovasi melalui transformasi digital dan riset dan inovasi
5. Pertahanan semesta melalui komponen cadangan, pemenuhan alutsista dan penguatan kemampuan teritorial.
6. Fiskal adaptif, stabilitas makroekonomi.



7. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia, serta optimalisasi Danantara.
8. Percepatan pengentasan kemiskinan melalui data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, penyediaan 3 juta rumah dan Koperasi merah putih.

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4.2.1. Prioritas Provinsi Jambi

Terdapat lima isu strategis yang menjadi fokus pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2026 yaitu produktivitas ekonomi yang belum optimal, rantai nilai komoditas unggulan Provinsi Jambi, kualitas sumber daya manusia belum merata, tata kelola pemerintahan dan demokrasi substansial serta tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan isu strategis Provinsi Jambi dan mengacu rancangan awal RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema RKP tahun 2026, maka tema RKPD Provinsi Jambi tahun 2026 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing”**.

Tema pembangunan RKPD Provinsi Jambi tahun 2026 menekankan pentingnya peningkatan produktivitas daerah melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, mendorong pemulihan dunia usaha, peningkatan kualitas SDM serta penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial. Tema tersebut dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada Prioritas Nasional serta selaras dengan tujuan, sasaran dan kebijakan RPJMD Provinsi Jambi, yaitu:

- 1) **Pembangunan Ekonomi yang Progresif, Inklusif dan Berkelanjutan**, dengan arah kebijakan :
 - a) Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon;
 - b) Pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif dan koperasi sektor produksi;
 - c) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan;
 - d) Pengembangan ekosistem pekerjaan hijau serta pengembangan kompetensi



tenaga kerja hijau;

- e) Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan;
- f) Meningkatkan investasi daerah.

2) Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang Merata dan Berkeadilan, dengan arah kebijakan :

- a) Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan;
- b) Pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
- c) Meningkatkan kualitas pemuda serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak;
- d) Meningkatkan kapasitas inovasi daerah;
- e) Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter.

3) Peningkatan Dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah, dengan arah kebijakan :

- a) Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar;
- b) Penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang logistik daerah;
- c) Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak;
- d) Penanganan permukiman kumuh.

4) Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Demokratis, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi;
- b) Penerapan manajemen resiko;
- c) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit;
- d) Optimalisasi pendapatan daerah;
- e) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.

5) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dengan arah kebijakan :

- a) Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana;
- b) Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas;
- c) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d) Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).



4.2.2. Prioritas Kabupaten Tebo

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (53), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD. Pada dasarnya tujuan Pembangunan adalah menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Oleh karena itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta stakeholders harus bersinergi dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tema RKP tahun 2026, tema RKPD Provinsi Jambi serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Tebo maka tema RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah **“Pembangunan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan, Pengembangan SDM yang Berkualitas serta Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Tebo Maju dan Sejahtera”**.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya penguatan perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, mendorong pemulihan dunia usaha, peningkatan kualitas SDM serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2026, ditetapkan lima prioritas pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2026, serta arah kebijakan yang melekat pada masing-masing prioritas sebagai berikut:

1) Transformasi Sosial yang Berakhlakul Karimah, dengan arah kebijakan :

- a) Peningkatan mutu pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan;
- b) Optimalisasi penanganan stunting;
- c) Optimalisasi penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem menuju nol persen;
- d) Pemerataan perlindungan sosial yang adaptif;
- e) Penguatan peran keluarga dalam Pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan;
- f) Penguatan keberdayaan Lembaga keagamaan.



2) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Berbasis Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan, dengan arah kebijakan :

- a) Pengembangan sawit rakyat berkelanjutan;
- b) Pengembangan ekosistem pariwisata berbasis alam, pertanian, dan budaya daerah;
- c) Pemerataan pengembangan wilayah berbasis potensi ekonomi desa;
- d) Pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis Masyarakat.

3) Peningkatan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan arah kebijakan :

- a) Peningkatan iklim investasi daerah ekonomi hijau;
- b) Penguatan ekosistem industrialisasi sektor pertanian;
- c) Peningkatan kualitas produk dan pelaku wirausaha /UMKM /ekonomi kreatif /koperasi;
- d) Diversifikasi akses pekerjaan layak dan kompetensi tenaga kerja;
- e) Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan.

4) Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berketahanan, dengan arah kebijakan :

- a) Pemerataan akses pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan;
- b) Pemenuhan kebutuhan pelayanan permukiman layak huni, air minum dan sanitasi;
- c) Penyediaan infrastruktur pertanian modern berbasis teknologi tepat guna;
- d) Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pelayanan persampahan;
- e) Penguatan manajemen resiko bencana dan keselamatan;
- f) Pemerataan akses terhadap internet.

5) Percepatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan arah kebijakan :

- a) Penguatan arsitektur SPBE;
- b) Penguatan system akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi;
- c) Penguatan system merit pendukung birokrasi professional dan berintegritas;
- d) Penguatan ekosistem inovasi;
- e) Peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi informasi di setiap perangkat daerah.

Adapun Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo mencakup:



1. Beasiswa untuk siswa kurang mampu dan berprestasi, serta tenaga pendidik
2. Bantuan operasional ke pondok pesantren dan madrasah
3. Insentif guru ngaji/TPQ dan tenaga kesehatan daerah terpencil
4. Infrastruktur jalan, irigasi, pertanian, sarana olahraga dan sekretariat lembaga kecamatan
5. Kesehatan gratis (UHC 100 persen) dan layanan kesehatan untuk semua (*Health for All*)
6. Dokter masuk dusun
7. Membuka Kawasan siap bangun, RTH dan penataan ibukota kecamatan
8. Menyediakan Balai Latihan Kerja / BLK terpadu
9. Ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ramah lingkungan
10. Peningkatan kesejahteraan ASN dan perangkat desa
11. Layanan perijinan dan kependudukan berbasis web dan mobile dengan moto Sijempol (sistim perijinan jemput bola)

Dalam rangka membangun sinergi antara pendekatan politik dan teknokratik, program prioritas juga berupaya mengkerangkai program janji politik Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dengan rumusan kinerja. Rumusan program prioritas RPJMD Kabupaten Tebo sebagai berikut:

Tabel.4.6.

Perumusan program prioritas RPJMD Kabupaten Tebo

Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan (Janji Politik)	Program Prioritas Nomenklatur
Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA Misi 1 Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan Misi 2 Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi	SDM Tebo yang cerdas dan sehat	Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas	IPM Rerata Nilai Asessmen Nasional	Kesehatan gratis (UHC 100%) dan layanan kesehatan untuk semua (Health for All) Dokter masuk dusun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKP UKM)
		Derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat	UHH		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan		Tingkat kemiskinan LPE Indeks Gini		
		Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Indeks Desa	Menyediakan Balai Latihan Kerja / BLK terpadu Ekonomi kerakyatan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI



Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan (Janji Politik)	Program Prioritas Nomenklatur
sumber daya alam dan kearifan lokal Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik Misi 4 Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Misi 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	berbasis agribisnis dan ramah lingkungan Infrastruktur jalan, irigasi, pertanian, sarana olahraga dan sekretariat lembaga kecamatan Membuka Kawasan siap bangun, RTH dan penataan ibukota kecamatan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN



Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan (Janji Politik)	Program Prioritas Nomenklatur
					PERTANIAN
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINE
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGAKERJA
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
					PROGRAM PENGEMBANGAN



Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan (Janji Politik)	Program Prioritas Nomenklatur	
		Dukungan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah		SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
					Program Penyelenggaraan Jalan	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
					Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
					Program Penataan Desa	
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
					Program Pengelolaan Persampahan	
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				
		Program Penanggulangan Bencana				
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana	IKLH		Indeks Risiko Bencana	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berbasis transformasi digital	Indeks Reformasi Birokrasi	Insentif guru ngaji/TPQ dan tenaga kesehatan daerah terpencil	Bantuan operasional ke pondok pesantren dan madrasah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya kapasitas keuangan daerah						IPKD



Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2026 dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tebo dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4.7.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Tahun 2026	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029
Transformasi Sosial yang Berakhlakul Karimah	SDM Tebo yang cerdas dan sehat Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas Derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Berbasis Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa Menurunnya pengangguran
Peningkatan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal	Dukungan infrastruktur yang merata dan berkualitas
Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berketahanan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana
Percepatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berberbasis transformasi digital Meningkatnya kapasitas keuangan daerah

Prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2026 serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2026 dengan permasalahan dan isu strategis daerah dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel.4.8.

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis (RPJMD) dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2026

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan belum optimal	Tantangan sektor ekonomi unggulan dan optimalisasi sektor potensial	Peningkatan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal
2.	Pertumbuhan sektor pariwisata belum optimal		
3.	Pengembangan BUMD belum optimal		
4.	Pembentukan modal tetap bruto belum memadai		
5.	Ekspor barang dan jasa belum memadai		
6.	Pertumbuhan sub sektor perikanan belum memadai		
7.	Pertumbuhan sektor pertanian belum optimal		
8.	Stabilitas harga barang dan jasa		
9.	Usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil belum memadai	Sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan	
10.	Volume usaha koperasi belum memadai		
11.	Kesempatan kerja belum memadai		
12.	Belum optimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang inklusif	Transformasi Sosial yang Berakhlakul Karimah
13.	Belum optimalnya penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas		
14.	Belum optimalnya reformasi birokrasi berdampak	Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Percepatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
15.	Belum optimalnya implementasi sistem merit		
16.	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik		
17.	Belum optimalnya pengawasan daerah		
18.	Pengendalian pencemaran sungai belum optimal	Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berketahanan
19.	Menurunnya kualitas tutupan lahan		
20.	Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal		
21.	Aksesibilitas wilayah untuk kesejahteraan masyarakat		
22.	Belum maksimalnya kualitas perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan	
23.	Kesesuaian pemanfaatan ruang		
24.	Belum optimalnya upaya penanggulangan risiko kelompok rentan	Peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan kelompok rentan	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Berbasis Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan
25.	Belum optimalnya layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial		



Tabel.4.9.

Sinkronisasi Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo Tahun 2026

No	Nasional	Provinsi	Kabupaten Tebo
	Tema: "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"	Tema: "Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing"	Tema: "Pembangunan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan, Pengembangan SDM yang Berkualitas serta Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Tebo Maju dan Sejahtera"
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PP4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Demokratis	PD5. Percepatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PP1. Pembangunan Ekonomi yang Progresif, Inklusif dan Berkelanjutan	PD3. Peningkatan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PP3. Peningkatan Dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	PD4. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berketahanan
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta	PP2. Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang Merata dan Berkeadilan	PD1. Transformasi Sosial yang Berakhlakul Karimah



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten Tebo
	Tema: "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"	Tema: "Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing"	Tema: "Pembangunan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan, Pengembangan SDM yang Berkualitas serta Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Tebo Maju dan Sejahtera"
	Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PP1. Pembangunan Ekonomi yang Progresif, Inklusif dan Berkelanjutan	PD3. Peningkatan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP3. Peningkatan Dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	PD2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Berbasis Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan
		PP1. Pembangunan Ekonomi yang Progresif, Inklusif dan Berkelanjutan	PD3. Peningkatan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Demokratis	PD5. Percepatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan	PP5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	PD4. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berketahanan



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten Tebo
	Tema: "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"	Tema: "Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing"	Tema: "Pembangunan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan, Pengembangan SDM yang Berkualitas serta Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Tebo Maju dan Sejahtera"
	Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PP2. Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang Merata dan Berkeadilan	

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan keterkaitan prioritas nasional tahun 2026 serta sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Keterkaitan hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel.4.10.
KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
KABUPATEN TEBO

URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Non Urusan				Non Urusan				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		78.83	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		78.83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		75.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		75.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		80.66	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		80.66	RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		80.20	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		80.20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		70.26	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		70.26	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP			Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP			Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		71.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		71.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		54.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		54.00	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		69.10	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		69.10	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		60.15	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		60.15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		60.50	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		60.50	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		80.81	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		80.81	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		81.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		81.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akip		71.05	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai Akip		71.05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		65.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		65.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		62.30	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		62.30	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		80.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		80.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
								Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		79.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		79.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		72.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		72.00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		70.32	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		70.32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		83.50	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		83.50	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		65.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		65.00	Dinas Perkebunan dan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
								Peternakan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		83.50	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		83.50	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		80.41	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		80.41	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		89.40	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		89.40	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah dan Penelitian, Pengembang an
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		86.87	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		86.87	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		83.77	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		83.77	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		89.93	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		89.93	Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan Muara Tabir
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan Rimbo Bujang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan Rimbo Ilir
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan Rimbo Ulu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan Serai Serumpun
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan Sumay
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan Tebo Ilir



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan Tebo Tengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan Tebo Ulu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan Tengah Ilir
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah		1.00	Kecamatan VII Koto



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					Daerah			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.00	Kecamatan VII Koto Ilir
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		56.68	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP		56.68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.05	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase standar kompetensi yang terpenuhi pada kurikulum muatan lokal	%	100	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase standar kompetensi yang terpenuhi pada kurikulum muatan lokal	%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persentase Guru yang memiliki sertifikat Pendidik	%	41.69	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persentase Guru yang memiliki sertifikat Pendidik	%	41.69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Izin Pendidikan yang diterbitkan	%	100	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Izin Pendidikan yang diterbitkan	%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai lebih dari 90%	%	75	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai lebih dari 90%	%	75	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	65	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	65	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	%	100	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan	%	100	Dinas Kesehatan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					Makanan Minuman			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat yang Diberdayakan Dibidang Kesehatan	%	72	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat yang Diberdayakan Dibidang Kesehatan	%	72	Dinas Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	20.42	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	20.42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	75.01	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	75.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sanitasi layak	%	89.96	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	%	89.96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					Sanitasi layak			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Rasio Jaringan Drainase dalam kondisi baik	Rasio	1.92	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Rasio Jaringan Drainase dalam kondisi baik	Rasio	1.92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah bangunan dan prasarana pendukung kawasan milik pemerintah daerah yang dibangun / direhabilitasi	%	15	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah bangunan dan prasarana pendukung kawasan milik pemerintah daerah yang dibangun / direhabilitasi	%	15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	31.61	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	31.61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	156	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	156	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Ketersediaan dokumen mengenai Rencana Tata Ruang yang di sahkan	Dokumen	4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Ketersediaan dokumen mengenai Rencana Tata Ruang yang di sahkan	Dokumen	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
Meningkatnya pelayanan terhadap pengembang perumahan	Peningkatan Jumlah Pengembangan Perumahan yang ada		42	Meningkatnya pelayanan terhadap pengembang perumahan	Peningkatan Jumlah Pengembangan Perumahan yang ada		42	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	3.65	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	3.65	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Jumlah RTLH di Perumahan dan Kawasan Permukiman		6,026.00	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Jumlah RTLH di Perumahan dan Kawasan Permukiman		6,026.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	%	100	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	%	94	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	%	94	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
Meningkatnya layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Rata-rata capaian layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	Meningkatnya layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Rata-rata capaian layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanggulanagan bencana yang tertangani	%	100	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanggulanagan bencana yang tertangani	%	100	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	20	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	20	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya rehabilitasi sosial	1). Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	5	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1). Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2). Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar,	%	2		2). Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar,	%	2	
	3). Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	1		3). Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	1	
	4). Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya,	%	64		4). Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya,	%	64	
	5). Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya,	%	9		5). Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya,	%	9	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1). Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar;	%	16.67	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1). Persentase penerima manfaat yang terpenuhi	%	16.67	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					kebutuhan dasar;			Perlindungan Anak
	2). Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi;	%	0.90		2). Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi;	%	0.90	
	3) Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradiasi dari kemiskinan;	%	16.6		3) Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradiasi dari kemiskinan;	%	16.6	
	4) Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin;	%	68		4) Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin;	%	68	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1) Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat bencana	%	12.2	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1) Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat bencana	%	12.2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
	2). Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya,	%	33.3		2). Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya,	%	33.3	
	3). Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	12		3). Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	12	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
Terkelolanya informasi tenaga kerja	persentase dokumen RTK mikro	%	10	Terkelolanya informasi tenaga kerja	persentase dokumen RTK mikro	%	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkn Pelatihan berbasis Kompetensi	%	4	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkn Pelatihan berbasis Kompetensi	%	4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dalam dan luar negeri	%	2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dalam dan luar negeri	%	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
Meningkatnya pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang undangan bidang tenaga kerja	%	54	Meningkatnya pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang undangan bidang tenaga kerja	%	54	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1). Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG),	%	25	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1). Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG),	%	25	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
	2). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	56		2). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	56	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	56	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak	%	56	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					anak sesuai standar			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	35	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	4	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1). Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif,	%	100	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1). Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif,	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2) Indeks Perlindungan khusus Anak (IPKA)	%	75		2) Indeks Perlindungan khusus Anak (IPKA)	%	75	



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	68	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	68	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang dimanfaatkan	%	100	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang dimanfaatkan	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	94.95	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	94.95	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	91		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	91	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Rekomendasi Penanganan Kerawanan Pangan	Dokumen	1	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Rekomendasi Penanganan Kerawanan Pangan	Dokumen	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Peningkatan Legalisasi Aset PSU		10	Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Peningkatan Legalisasi Aset PSU		10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang di tindak lanjuti	%	100	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang di tindak lanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73.34	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73.34	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang dikelola	%	2.78	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang dikelola	%	2.78	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	30	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	30	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	0	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	%	0	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	%	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	%	0	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	%	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/Kota	%	100	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/Kota	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	35	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak usia 0–18 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	98.2	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak usia 0–18 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	98.2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara daring	Jumlah	10	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara daring	Jumlah	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.33	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Angka	70.48	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Modern Contraceptive Prevalence	Angka	70.48	Dinas Pengendalian Penduduk



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					Rate (mCPR)			dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahann keluarga	%	63.50	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahann keluarga	%	63.50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				DPMD
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	%	100	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	%	100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
Meningkatnya Persentase kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	Meningkatnya Persentase kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD)	%	100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	62	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	62	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
	Persentase Kendaraan Lulus Uji Berkala (KIR)	%	19		Persentase Kendaraan Lulus Uji Berkala (KIR)	%	19	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
Meningkatnya kualitas layanan transportasi air	Persentase Pengelolaan Pelayaran	%	0	Meningkatnya kualitas layanan transportasi air	Persentase Pengelolaan Pelayaran	%	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	72	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	72	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE/Indeks Pemdi		2.63	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE/Indeks		2.63	Dinas Komunikasi



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					Pemdi			dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi Aktif yang diawasi dan diperiksa	%	31.45	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi Aktif yang diawasi dan diperiksa	%	31.45	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI				
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	100	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pelatihan	%	10.27	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pelatihan	%	10.27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase UMKM yang dilakukan pengembangan usahanya	%	65	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase UMKM yang dilakukan pengembangan usahanya	%	65	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
								dan Menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Meningkatnya kemudahan investasi	Persentase Peluang investasi yang teridentifikasi	%	25	Meningkatnya kemudahan investasi	Persentase Peluang investasi yang teridentifikasi	%	25	DPMPSTP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase promosi investasi yang berhasil menarik investor	%	25	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase promosi investasi yang berhasil menarik investor	%	25	DPMPSTP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	%	98	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	%	98	DPMPSTP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase tingkat Kepatuhan Penyampaian LKPM	%	90	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase tingkat Kepatuhan Penyampaian LKPM	%	90	DPMPSTP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Layanan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	%	75	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Layanan Informasi Pelayanan	%	75	DPMPSTP



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					Publik Terintegrasi			
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
Persentase Peningkatan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang Berprestasi di Tingkat Propinsi	%	78	Persentase Peningkatan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang Berprestasi di Tingkat Propinsi	%	78	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN				
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase SDM Kepramukaan yang berprestasi ditingkat Provinsi	%	100	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase SDM Kepramukaan yang berprestasi ditingkat Provinsi	%	100	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
Peningkatan Persentase Prestasi Olahraga	Rasio Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasional terhadap ajang yang diikuti	%	98.97	Peningkatan Persentase Prestasi Olahraga	Rasio Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasional terhadap ajang yang diikuti	%	98.97	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.6	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.6	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintahan daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	20	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintahan daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	20	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%	100	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kelompok kesenian yang dibina	%	15	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kelompok kesenian yang dibina	%	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	%	5	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	%	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	98.10	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	98.10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	3,956	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	3,956	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang terinventarisasi	Jumlah	2	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang terinventarisasi	Jumlah	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase OPD yang menggunakan sistem aplikasi Srikandi	%	20	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase OPD yang menggunakan sistem aplikasi Srikandi	%	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Pilihan				Urusan Pemerintahan Pilihan				
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	443.45	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	443.45	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	660.85	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	660.85	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati	Peningkatan jumlah kelompok yang dibina	Kelompok	125	Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati	Peningkatan jumlah kelompok yang dibina	Kelompok	125	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	35.5	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	35.5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Kenaikan Pengunjung Objek Wisata	%	99.35	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Kenaikan Pengunjung Objek Wisata	%	99.35	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari Kalender Tahunan	%	89.31	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari Kalender Tahunan	%	89.31	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Kenaikan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	98.08	Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Kenaikan Sumber Daya Pariwisata dan	%	98.08	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					Ekonomi Kreatif			
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Tanaman pangan	Ton	1560	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Tanaman pangan	Ton	1560	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	151.70		Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	151.70	
Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Peningkatan Jumlah ternak yang terinseminasi	Ekor	6,500	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Peningkatan Jumlah ternak yang terinseminasi	Ekor	6,500	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Total ketersediaan Bibit Unggul	Batang	18,750		Total ketersediaan Bibit Unggul	Batang	18,750	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang dalam proses ditetapkan menjadi LP2B	Ha	60	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang dalam proses ditetapkan menjadi LP2B	Ha	60	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang difasilitasi memperoleh bantuan Prasarana Pertanian	%	50	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang difasilitasi memperoleh bantuan Prasarana Pertanian	%	50	Dinas Perkebunan dan Peternakan
Progam Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian				Progam Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian				
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	%	30.85	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana	%	30.85	Dinas Tanaman Pangan dan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					pertanian			Holtikultura
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Pengendalian Lahan Perkebunan dari serangan OPT yang Dilaporkan	%	70	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Pengendalian Lahan Perkebunan dari serangan OPT yang Dilaporkan	%	70	Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program Penyuluhan Pertanian				Program Penyuluhan Pertanian				
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelompok tani	%	46.34 %	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelompok tani	%	46.34 %	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Persentase Kelembagaan petani yang dibina	%	50		Persentase Kelembagaan petani yang dibina	%	50	Dinas Perkebunan dan Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Ternak Tervaksin	%	40	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Ternak Tervaksin	%	40	Dinas Perkebunan dan Peternakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola	%	4.76	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola	%	4.76	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan Stok Barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan Stok Barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	32.5	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	32.5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	persentase Promosi Pemasaran produk lokal yang diikuti	%	100	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	persentase Promosi Pemasaran produk lokal yang diikuti	%	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan kapasitas Produksi	%	3.00	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan kapasitas Produksi	%	3.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi industri	Jumlah	1	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi industri	Jumlah	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan Meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan Meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	Sekretariat DPRD
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	Sekretariat Daerah
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan				Perencanaan				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	%	97	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	%	97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	96	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Pemerintahan dan	%	96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					Pembangunan Manusia			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	100	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	94	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata Penjabaran Konsistensi Program RPD ke Dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan
Keuangan				Keuangan				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Alokasi Belanja Pendidikan	%	20	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Alokasi Belanja Pendidikan	%	20	Badan Keuangan Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40	
	Persentase Realisasi Belanja Daerah	%	92		Persentase Realisasi Belanja Daerah	%	92	
	Persentase Penurunan SILPA	%	25		Persentase Penurunan SILPA	%	25	
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	%	100	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	%	100	Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	9.76	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	9.76	Badan Keuangan Daerah
	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Cakupan	6		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Cakupan	6	
	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	%	84.10		Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	%	84.10	



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Kepegawaian				Kepegawaian				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, tata kelola pengembangan karir ASN, dan kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	100	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, tata kelola pengembangan karir ASN, dan kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	2.07		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	2.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	83		Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	83	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	90.10		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	90.10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Pelatihan				Pendidikan dan Pelatihan				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar	%	100	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
					Dasar			Daya Manusia
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan kompetensi Manajerial	%	35.35		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan kompetensi Manajerial	%	35.35	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
Penelitian dan Pengembangan				Penelitian dan Pengembangan				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah dan Penelitian, Pengembang an
	Persentase keberlanjutan inovasi yang diterapkan di Perangkat Daerah	%	19		Persentase keberlanjutan inovasi yang diterapkan di Perangkat Daerah	%	19	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah dan Penelitian, Pengembang an
Unsur Pengawasan Pemerintahan Daerah				Unsur Pengawasan Pemerintahan Daerah				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Rekomendasi Temuan Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	83.25	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Rekomendasi Temuan Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	83.25	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
				ASISTENSI				
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas APIP		3.00	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas APIP		3.00	Inspektorat
Unsur Kewilayahan				Unsur Kewilayahan				
Kecamatan Muara Tabir				Kecamatan Muara Tabir				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan Muara Tabir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan Muara Tabir
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Keteritaban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Kecamatan Muara Tabir
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan Muara Tabir



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Kecamatan Muara Tabir
Kecamatan Rimbo Bujang				Kecamatan Rimbo Bujang				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan Rimbo Bujang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan Rimbo Bujang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan transtibumlinmas	%	100	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan transtibumlinmas	%	100	Kecamatan Rimbo Bujang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan Rimbo Bujang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	0	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	0	Kecamatan Rimbo Bujang



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Kecamatan Rimbo Ilir				Kecamatan Rimbo Ilir				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan Rimbo Ilir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan Rimbo Ilir
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Kecamatan Rimbo Ilir
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan Rimbo Ilir
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Kecamatan Rimbo Ilir
Kecamatan Rimbo Ulu				Kecamatan Rimbo Ulu				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan Rimbo Ulu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan Rimbo Ulu
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Kecamatan Rimbo Ulu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan Rimbo Ulu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Kecamatan Rimbo Ulu
Kecamatan Serai Serumpun				Kecamatan Serai Serumpun				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan Serai Serumpun
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan Serai Serumpun
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan Serai Serumpun
Kecamatan Sumay				Kecamatan Sumay				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan Sumay
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan Sumay
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan Sumay
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDDes tepat waktu	%	100	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDDes tepat waktu	%	100	Kecamatan Sumay
Kecamatan Tebo Ilir				Kecamatan Tebo Ilir				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan Tebo Ilir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan Tebo Ilir
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Kecamatan Tebo Ilir
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan Tebo Ilir
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Kecamatan Tebo Ilir
Kecamatan Tebo Tengah				Kecamatan Tebo Tengah				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan Tebo Tengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan Tebo Tengah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Kecamatan Tebo Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan Tebo Tengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Kecamatan Tebo Tengah
Kecamatan Tebo Ulu				Kecamatan Tebo Ulu				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan Tebo Ulu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan Tebo Ulu
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan	%	100	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan	%	100	Kecamatan Tebo Ulu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan Tebo Ulu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Kecamatan Tebo Ulu
Kecamatan Tengah Ilir				Kecamatan Tengah Ilir				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan Tengah Ilir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan Tengah Ilir
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan Tengah Ilir
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Kecamatan Tengah Ilir
Kecamatan VII Koto				Kecamatan VII Koto				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan VII Koto
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK Yang terbina	%	100	Kecamatan VII Koto
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Kecamatan VII Koto
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Kecamatan VII Koto
Kecamatan VII Koto Ilir				Kecamatan VII Koto Ilir				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan Pelayanan publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan	%	100	Kecamatan VII Koto Ilir



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK yang terbina	%	100	Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelompok PKK yang terbina	%	100	Kecamatan VII Koto Ilir
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan gangguan trantibum linmas	%	100	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase Penanganan gangguan trantibum linmas	%	100	Kecamatan VII Koto Ilir
Unsur Pemerintahan Umum				Unsur Pemerintahan Umum				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	100	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RPJMD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME (RKPD)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pelatihan perberdayaan	%	100	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pelatihan perberdayaan	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pelatihan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pelatihan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	%	100	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Tebo.

Program prioritas yang direncanakan akan dibiayai pada tahun anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memaparkan kegiatan–kegiatan strategis yang diusulkan oleh PD.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2024 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat



analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh warga Kabupaten Tebo.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini, tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Tebo, namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selanjutnya pagu per prioritas pembangunan dijabarkan kedalam Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 disajikan pada Tabel 5.1

Tabel.5.1.
Pagu Indikatif Per Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026

NO	NAMA OPD	2026
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	305,204,248,654.00
2	RSUD	68,418,850,710.68
3	DINAS KESEHATAN	112,614,666,487.22
4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	5,686,573,075.20
5	DINAS PEKERJAAN UMUM & PR	40,384,754,908.00
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13,361,827,069.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,767,961,848.00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	5,126,198,913.00
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,850,771,003.00
10	DINAS SOSIAL	5,550,052,144.00
11	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	6,487,315,454.38
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	3,529,510,425.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERHUBUNGAN	10,857,174,770.00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,488,974,838.00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,180,566,112.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,020,655,076.00
17	DPMPSTP	2,715,321,555.00
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3,293,997,297.00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,930,698,899.00



20	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	5,834,690,634.63
21	DINAS PERINDUSTRIAN PERDANGAN DAN KUKM	4,777,003,674.00
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2,557,547,501.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	28,494,836,228.00
24	SEKRETARIAT DPRD	43,839,894,144.00
25	BAPPEDA	7,008,109,469.00
26	BAKEUDA	205,763,949,503.00
27	BKPSDM	4,473,238,897.00
28	INSPEKTORAT	6,747,569,705.00
29	KECAMATAN TEBO TENGAH	4,570,542,988.00
30	KECAMATAN TEBO ILIR	2,944,539,679.50
31	KECAMATAN TEBO ULU	3,325,602,034.00
32	KECAMATAN RIMBO BUJANG	5,203,746,299.00
33	KECAMATAN SUMAY	1,761,990,179.00
34	KECAMATAN VII KOTO	1,454,916,275.00
35	KECAMATAN RIMBO ULU	1,574,267,519.00
36	KECAMATAN RIMBO ILIR	1,418,992,981.00
37	KECAMATAN TENGAH ILIR	1,651,666,804.00
38	KECAMATAN SERAI SERUMPUN	1,759,517,963.00
39	KECAMATAN VII KOTO ILIR	1,593,438,411.00
40	KECAMATAN MUARA TABIR	1,217,290,144.00
41	BADAN KESBANGPOL	4,802,906,409.00
TOTAL		955,246,376,679.61

Rincian rencana program kegiatan pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Per PD Tahun 2026

Tabel.5.2.

Matriks Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat utama untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penetapan indikator kinerja daerah akan menjadi acuan penting dalam lima tahun mendatang.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Indikator kinerja pemerintah daerah tersebut digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah adalah untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan daya saing yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan visi dan misi, tujuan, sasaran, program dan secara sistematis di dalamnya memuat strategi kebijaksanaan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif, berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.



Diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah yang ditetapkan harus memenuhi syarat berikut ini:

- Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan;
- Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah;
- Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 bertujuan untuk memenuhi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Tebo untuk tahun 2026 dimuat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tebo Tahun 2026

Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	7
TERWUJUDNYA KABUPATEN TEBO YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA	SDM Tebo yang cerdas dan sehat		IPM	72,67	74,32
		Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas	Rerata Nilai Asessmen Nasional	58,62	62,62
		Derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat	UHH	73,62	74,21



Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	7
Misi 1 Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan			Tingkat kemiskinan	6,12	5,96-6,09
Misi 2 Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan		LPE	3,97	4,30-4,34
Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik			Indeks Gini	0,257	0,254



Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	7
Misi 4 Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Misi 5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi		Meningkatnya produktivitas perekonomian berbasis potensi daerah dan keberdayaan desa	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian	6,7	4,69
			Indeks Desa	0,7344	0,7549
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,5	2,35



Visi - Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	7
		Dukungan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	45,17	45,85
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana	IKLH	67,82	73,34
			Indeks Risiko Bencana	131,2	131,19
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	70,04	71,29
		Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berbasis transformasi digital	Nilai SAKIP	66,84	68,19
			Indeks Pelayanan Publik	2,54	2,94
			MCSP KPK		
			Indeks SPBE/ Indeks Pemdi*	82,8	82,95
		Meningkatnya kapasitas keuangan daerah		2,62	2,63
			IPKD	78,1	79,1
			Persentase peningkatan PAD	6,1	3,4-5



6.2. Indikator Kinerja Kunci

Penetapan indikator kinerja kunci Kabupaten Tebo untuk tahun 2026 dimuat pada tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Tebo Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	71,36	72,08
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	11,03	10,92
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita		
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	69,33	75,01
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	67,82	70,37
	IKA	indeks	55	72,08
	IKU	indeks	93,16	78,07
	IKL	indeks	42,98	66,76
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	88,26	89,96
7	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	0	0



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	16,36	16,92
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2 Ekuivalen	N/A	#####
10	Indeks Risiko Bencana	poin	131,2	131,19
11	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,24	0,25
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,28	1,32
13	Rasio Penduduk	%	105,09	105,52
14	Kepadatan Penduduk	Orang/m ²	58,2	61,17
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,97	4,30-4,34
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,12	5,96-6,09
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	67,3	69,53
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,50	2,35
5	Indeks Gini	angka	0,257	0,254
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	72,67	74,32
7	Usia Harapan Hidup	tahun	73,62	74,21



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
8	Prevalensi Stunting	%	22,7	18,79
9	Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC).	%	82	88
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,04	8,69
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,93	14,6
12	Rerata nilai assesmen nasional: literasi membaca & numerasi	Skor	58,62	62,62
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Skor	57,01	62,01
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Skor	67,37	69,57
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Skor	49,85	55,65



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Skor	60,25	63,25
13	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	angka	43,87	44,61
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	37,99	42,03
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	74	76,45
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	41,8	43,5
17	Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)	angka	65,56	68
18	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	angka	73,11	75
19	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	angka	66,26	66,26
20	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,46	63,78
21	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	%	2,35	2,33



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
22	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	69,8	70,48
23	Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15–19)	Angka	35,1	34,9
24	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need)	%	6,9	6,25
25	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,59	0,56
26	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	91,63	93,35
27	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	58,35	59
28	Indeks Pembangunan Pemuda	poin	60,59	65
29	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	71,81	71,87
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Angka Ketergantungan	%	31,98	31,62



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6,11	6,58
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,29	0,32
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%		
5	Rasio Kewirausahaan	%	0,01	0,04
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	87,33	88,3
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	34,86	36,36
8	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/Jiwa		
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%		
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	19,71	21,88
11	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	97,83	98,2
12	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		Na	



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	9376,00%	93,85
14	Persentase Desa Mandiri	%	16,30%	26%
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,12	0,13
16	Tingkat Inflasi	%	2,04	2,03
17	Kapasitas Fiskal Daerah		1,358	
18	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,09	3,22
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,36	87,44
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	2,62	2,63
3	Indeks Transformasi Digital	Indeks	42.30* (Data 2022 Provinsi Jambi)	39,5
4	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,1	4,7
5	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	angka	3,211	3,215



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
6	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	angka	2,892	2,902
7	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	3,175	3,179
8	Persentase Penegakan Perda	%	92	94
9	Persentase Capaian Aksi HAM	%	90	90,46
10	Indeks Demokrasi Indonesia	%	80,61	81,93
11	Indeks Rasa Aman	angka		
12	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	angka	99,22	99,24
13	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,23	3,81
INDIKATOR KINERJA KUNCI				
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1,1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	59,42	61,42



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
1,2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	88,88	90,88
1,3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	86,78	88,78
1,4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	25,87	27,87
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
2,1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen		



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
2,2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100
2,3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	74%	100%
2,4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	76%	100%
2,5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	80%	100%
2,6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	79%	100%
2,7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
2,8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%
2,9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	84%	100%
2,1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90%	100%
2,11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
2,12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	93%	100%
2,13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	58%	100%
2,14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	80%	100%
2,15	cakupan penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	Persen	2,88	2,9
2,16	Tingkat Akreditasi RS	Peringkat	Paripurna	Paripurna
2,17	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	56,86	60
2,18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	78,81	79
2,19	Nett Death Rate (NDR)	Permill	0,015	0,014
3	Urusan Pemerntahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
3,1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	0	0
3,2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai	Persen	0	0
3,3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	20,17	20,68



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
3,4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	69,33	75,01
3,5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	88,26	89,96
3,6	Rasio kepatuhan IMB	Persen	44,02	44,20%
3,7	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	30,61	31.610
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
4,1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	56	59



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
4,2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	45	48
4,3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	80	83
4,4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	100	100
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
5,1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	99,22%	99,24%
5,2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	92%	94%
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
0,3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	9%	9%
0,3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	100%	12%
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
1,1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	99%	99%



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
1,2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	3,73%	3,80%
1,3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	35%	39%
1,4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	1,66%	1,88%



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
1,5	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Persen	3,73%	3,80%
1,6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	18,47%	23,91%
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
2,1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	20%	25%
2,2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100%	100%
2,3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,03	0,04
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
3,1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Indeks	71,36	72,08
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
4,1	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Jumlah	2	3
4,2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
5,1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,82	73,34
5,2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	Persen	21,93	25,58



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
5,3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	30,95	30
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6,1	Persentase perekaman KTP elektronik	Persen	99,98	100
6,2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	55,92	63
6,3	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	98	98,4
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
7,1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	16,39	26,22
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8,1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	Angka	35,1	25



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
8,2	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen	84,81	87
8,3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	70,06	70
8,4	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen	31,7	33
8,5	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	16,5	18
8,6	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Persen	77,1	78
8,7	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	0,09	0,35
8,8	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	13,66	20
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
9,1	Persentase Elemen Kelengkapan Jalan terpasang	Persen	12,5	20
9,2	Persentase Kendaraan Lulus Uji Berkala (KIR)	Persen	17,93	19
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
10,1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	67%	100%
10,2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	75%	76%
10,3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persen	80%	85%



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
11,1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	25	27
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
12,1	Persentase peningkatan investasi	Persen		2%
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
13,1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	82,76	84%
13,2	Rasio Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasional terhadap ajang yang diikuti	Persen	2%	2%
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
14,1	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	71%	80%
14,2	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	70%	80%
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
15,1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	N/A	25%
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
16,1	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	Angka	57,87	57,9
16,2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka	71,81	71,87
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	61,63	61,64
17,1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	60	61
17,2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	37	39
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
18,1	Rasio cagar budaya yang terlestarikan	Nilai	25	28
C	Urusan Pemerintahan Pilihan			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
1,1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Angka	-	1104,3
2	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata			
1,1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	2	3
1,2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	331,318	344,703
1,3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2,83%	2,87%
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
3,1	Produksi pertanian komoditi unggulan	Ton	162.777,17	188.079,00
3,2	Tanaman Pangan	Ton	29.516,61	45.000,00
3,3	Tanaman Perkebunan	Ton	119.110	128.829
3,4	Tanaman Hortikultura	Ton	14.150,56	14.250,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
4,1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	Persen	84,75	85
4,2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	69,09	70
4,3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	30%	32,50%
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
5,1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	154	50
5,2	Persentase kapasitas Produksi IKM	Persen	5,38	3
D	Urusan Penunjang Pemerintahan			
1	Sekretariat Daerah			
1,2	Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100	100



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
1,3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (e-catalogue)	Persen	80	82,68
2	Sekretariat Dewan			
2,1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada
2,2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
2,3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada
3	Perencanaan			
3,1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada
3,2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada
3,3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
3,4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada
3,5	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100
3,6	Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100
3,7	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100
4	Keuangan			
4,1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	10,59	11,59
4,2	Rasio PAD terhadap APBD non migas	Persen	8,24	10,43
4,3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	63,04	64,04



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
4,4	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP
4,5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	9,17	9,12
4,6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	98,11	98,5
4,7	Persentase aset yang terinventarisasi	Persen	20	40
4,8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	5,62	
4,9	Persentase informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	100
4,1	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah yang tersedia	Persen	100	100



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
5	Kepegawaian			
5,1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	Persen	74,55	75,1
5,2	Rasio pegawai fungsional	Persen	23,57	24,1
5,3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	33,93	34,1
6	Penelitian dan Pengembangan			
6,1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	50	50,54
6,2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	35	35,72
6,3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100
6,4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	100	100
7	Pengawasan			



No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
-1	-2	-3	-4	-6
7,1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat	3,211	3,215
7,2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat	3	3



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke-1 (pertama) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo tahun 2025-2029, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029.

Dokumen RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2026 ini diharapkan pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Tebo Tahun 2026 akan lebih terarah, menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan yaitu **“Pembangunan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan, Pengembangan SDM yang Berkualitas serta Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Tebo Maju dan Sejahtera”**. Karena penting dan strategisnya peran RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026, sehingga perlu disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah dan segenap *stakeholder* pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang dimuat dalam RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan;



2. Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja dengan mengacu RKPD Tahun 2026 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan, yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Tebo merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - b. Dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2026 harus menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2026 yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang akan dicapai.
 - c. Rencana Kerja PD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang akan dicapai harus menjamin konsistensi perencanaan yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD).
 - d. Dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2026 juga menjadi dasar Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkatan pemerintahan.
3. Dalam upaya menjamin penyelenggaraan RKPD dengan efisien dan efektif serta terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas penjabaran RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah dan KUA Tahun 2026, Bappeda dan litbang Kabupaten Tebo dapat melakukan analisis dan pemantauan proses dimaksud.
4. Pemerintah Daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai dengan sebaik-baiknya.

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO, S.E., M.M.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEBO**

KOMP. PERKANTORAN SEENTAK GALAH SERENGKUH DAYUNG
JALAN LINTAS TEBO - BUNGO KM. 12
DESA SUNGAI ALAI, TEBO TENGAH,
KABUPATEN TEBO , JAMBI
37571